

BAB - II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, adalah sebagai berikut :

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah:

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Sumatera Utara memiliki luas total sebesar 181.860,65 km² yang terdiri dari daratan seluas 71.680,68 km² atau 3.73 % dari luas wilayah Republik Indonesia dan luas perairan sebesar 110.000,65 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Perkembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2009, secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 421 Kecamatan dan 5828 Desa/Kelurahan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yaitu 6.620,70 Km² (9,24%). Sedangkan luas terkecil adalah Kota Sibolga yaitu 10,77km² (0,02%). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Kota Medan	Medan	21	265,10
2	Kota Binjai	Binjai	5	90,24
3	Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	5	38,44
4	Kota Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	79,97
5	Kota Tanjung Balai	Tanjung Balai	6	61,52
6	Kota Padangsidempuan	Padangsidempuan	6	114,65
7	Kota Sibolga	Sibolga	4	10,77
8	Kota Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	6	469,36
9	Kab. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	2.486,14
10	Kab. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	1.913,33
11	Kab. Langkat	Stabat	23	6.263,29
12	Kab. Asahan	Kisaran	25	3.675,79
13	Kab. Dairi	Sidikalang	15	1.927,80

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
14	Kab. Karo	Kabanjahe	17	2.127,25
15	Kab. Labuhan Batu	Rantau Prapat	9	2.561,38
16	Kab. Labuhan Batu Utara	Aek Kanopan	8	3.545,80
17	Kab. Labuhan Batu Selatan	Kota Pinang	5	3.116,00
18	Kab. Simalungun	Pamatang Raya	31	4.368,60
19	Kab. Tapanuli Utara	Tarutung	15	3.764,65
20	Kab. Tapanuli Tengah	Pandan	20	2.158,00
21	Kab. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	4.352,86
22	Kab. Toba Samosir	Balige	16	2.352,35
23	Kab. Mandailing Natal	Panyabungan	23	6.620,70
24	Kab. Pakpak Bharat	Salak	8	1.218,30
25	Kab. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	2.297,20
26	Kab. Samosir	Pangururan	9	2.433,50
27	Kab. Nias	Gido	10	980,32
28	Kab. Nias Utara	Lotu	11	1.501,63
29	Kab. Nias Selatan	Teluk Dalam	31	1.625,91
30	Kab. Nias Barat	Lahomi	8	544,09
31	Kab. Batu Bara	Limapuluh	7	904,96
32	Kab. Padang Lawas	Sibuhuan	12	3.892,74
33	Kab. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	9	3.918,05
	Provinsi Sumatera Utara	Medan	436	71.680,68*

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : *) Keadaan Juni 2013

b. Letak dan kondisi geografis

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 0° - 4°33' Lintang Utara dan 96°50' - 100°52' Bujur Timur, merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Aceh, sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta sebelah timur dengan Selat Malaka. Secara regional Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Provinsi Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km. Panjang Garis Pantai Timur 545 Km, Panjang Garis Pantai Barat 375 Km dan Panjang Garis Pantai Pulau Nias 380 Km. Terdapat 419 pulau, dengan 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat.

Pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat hutan mangrove seluas 63.467,4 Ha dalam kondisi baik seluas : 27.019,57 Ha dan 36.447,83 Ha dalam

kondisi rusak yang tersebar di 6 Kabupaten (belum termasuk Nias). Selain hasil laut dan perikanan lainnya, kawasan ini memiliki potensi pariwisata bahari yang belum teridentifikasi seluruhnya.

Daerah pantai di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara sangat bervariasi yaitu daerah yang curam, berbatu dan di beberapa daerah terdapat pantai yang didominasi rawa. Kondisi pantai semacam ini banyak ditemukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga dan Mandailing Natal. Sedangkan Pantai Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh pantai berbatu dan berpasir, khususnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.

Banyak terdapat pulau-pulau kecil merupakan ciri yang dimiliki oleh kawasan pesisir barat Sumatera Utara. Pantai barat ini juga memiliki hamparan mangrove sekitar 14.270 Ha yang membujur dari pantai selatan Kabupaten Mandailing Natal sampai ke pantai selatan Kabupaten Tapanuli Tengah serta di daerah pulau-pulau di Kabupaten Nias dengan ketebalan antara 50-150 meter. Terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara terdapat di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang tumbuh pada kedalaman 3-10 meter.

c. Topografi

1) Kemiringan lahan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0% - 2% seluas 17,8% dari luas wilayah, 2%-15 % seluas 49,2% dari luas wilayah, 15% - 25% seluas 8,8%, 25% - 40% seluas 10,8% dan diatas 40% seluas 11,3% dari luas wilayah, sedangkan luas wilayah perairan Danau Toba sekitar 112.986 Ha atau 1,6% dari luas wilayah.

2) Ketinggian lahan

Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 - 2200 m dpl. Terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 Km² atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah Daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.

Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 Km² atau 65,23 persen dari luas wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

d. Geologi

1) Struktur dan karakteristik

Secara geologis, wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng Australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas-Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi dan tanah longsor. Jalur patahan (subduction) di Pantai Barat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat pusat gempa di dasar laut.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 % dari luas daerah Provinsi Sumatera Utara yang mencakup 18 wilayah kabupaten dan 1 kota (menurut keadaan tahun 2005) merupakan kawasan yang rentan gerakan tanah longsor.

2) Potensi

- Sumber energi

Berbagai kebijakan energi yang diterapkan dalam rangka pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, rasional, optimal dan terpadu adalah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi saat ini energy telah berubah menjadi suatu hal yang sangat urgen dan mendesak kondisi ini telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Energi (khususnya fosil) masih diperlakukan sebagai komoditi dagang yang memberikan nilai tambah yang rendah.
- b) Tidak mencukupinya pasokan energy untuk kebutuhan energy domestik, namun produksi energy diekspor dalam jumlah yang besar.
- c) Pemanfaatan energy tidak efisien.
- d) Harga energy belum memenuhi harga keekonomian.
- e) Iklim investasi energy masih rendah.
- f) Kapasitas industry energy nasional masih rendah.
- g) Terbatasnya akses masyarakat terhadap energi.

Potensi energi berupa panas bumi sebagai energi alternatif yang tersebar pada beberapa tempat di Sumatera Utara, diantaranya di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Sumatera Utara.

Terdapat 4 (empat) Kabupaten / kota penghasil minyak dan gas yang ada di Sumatera Utara, yaitu : Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Padang Lawas, dan Kota Binjai dengan realisasi Lifting Minyak Bumi pada tahun 2013 sebesar 339.120 barel dan pada tahun 2014 sebesar 509.077 barel. Dengan potensi/cadangan minyak bumi Sumatera Utara sampai dengan akhir 2014 sebesar 46.431,88 MSTB.

Tabel 2.2.
POTENSI MINYAK BUMI TAHUN 2014

KABUPATEN	CADANGAN (MSTB)* MINYAK BUMI		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
LANGKAT	19.466	6.884	3.310
DELI SERDANG	7.551	31	27
BINJAI	5.207	0	0
MEDAN	674	686	594
PADANG LAWAS	2.000	0	0
TOTAL	34.898	7.602	3.931

*MSTB = Thousand stock tank barrel / ribu barrel tanki pengumpul

Potensi / cadangan Gas Bumi Sumatera Utara yang terdata sampai dengan akhir 2014 adalah sebesar 556.219 MMSCF (536.2 BCF) yang terdiri dari Potensi / cadangan terbukti sebesar 472.399 MMSCF , potensi / cadangan mungkin sebesar 56.478 MMSCF dan Potensi / cadangan harapan sebesar 27.342 MMSCF. Sedangkan untuk realisasi Lifting Gas Bumi pada tahun 2013 sebesar 3.888,1 ribu MMBTU dan pada tahun 2014 sebesar 4.822,4 MMBTU

Tabel 2.3.
POTENSI GAS BUMI TAHUN 2014

KABUPATEN	CADANGAN (MMSCF)* GAS		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
LANGKAT	233.591	54.797	25.893
DELI SERDANG	143.065	0	0
BINJAI	37.810	0	0
MEDAN	3.933	1.681	1.449
OFFSHORE MEDAN – LANGKAT	54.000	0	0
TOTAL	472.399	56.478	27.342

*MMSCF = Million Standart Cubic Feet / Juta kaki kubik

Cadangan batubara terdapat di 15 (lima belas) titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi. Di Provinsi Sumatera Utara sebaran lokasi potensinya berada pada Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah pada 1°45'03,3" LU 99°08'11,2" BT dengan jumlah cadangan sebesar 470 BSCF dan Desa Hatapang Kecamatan Na-IX-X Kabupaten Labuhanbatu. Serta beberapa wilayah lain yaitu di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan,

Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan) dimana hingga saat ini dalam tahap Penyelidikan Umum.

Terdapat juga indikasi potensi energi nuklir (radioaktif) yang terdapat di Kelurahan Aekhabil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

Bahan tambang mineral logam dan bukan logam

Provinsi Sumatera Utara mempunyai berbagai jenis bahan galian mineral yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, yaitu : mineral logam, emas, timah hitam (galena), seng, tembaga, besi dan mineral non logam : batugamping, dolomit, bentonit, zeolit, kaolin, feldspar, marmer, granit, belerang, andesit, serpentinit, pasir kwarsa, perlit serta bahan galian energi : gambut, batubara, panas bumi (geothermal) serta minyak dan gas bumi. Secara umum telah diketahui besarnya cadangan geologi (perkiraan) dan mutu sumber daya mineral, namun untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih memerlukan penyelidikan eksplorasi secara detail, guna mengetahui cadangan terukur (pasti).

Tabel. 2.4.
Potensi Bahan Galian Unggulan di Provinsi Sumatera Utara

NO	Bahan Galian	Lokasi			Keterangan
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	Batu Apung	Sitilupu	Pahae Jae	1	Batu Apung
		Huta Tinggi	Parmonangan		
		Tiga juhar	STM Hilir		
2	Belerang	Sibanggor Tonga	Kotanopan	2	Belerang
		Namora Ilangit	P. Julu		
		Gn. Pusuk Buhit	Pangururan		
		Banuaji	Adian Koting		
		Gn. Sibayak	Sp. Empat		
		Gn. Sinabung	Payung		
3	Bentonit	Pt. Padang	Sosopan	3	Bentonit
		Hasahatan	Sipirok		
		S. Tapus	Saipar Dolok Hole		
		Pangkalan Brandan	Babalan		
		Wonosari	Besitang		
4	Dolomit	Lau Buluh	Kuta Buluh	4	Dolomit
		Kempawa	Tanah Pinem		
		Kutakepar	Payung		
		Simasom	Pahae Julu		
5	Granit	Parombuana n	Sibolga	5	Granit
		Raut Bosi	Pangaribuan		
		Muara Sipongi	M. sipongi		
		Aek Banir	Panyabungan		
		Hatapang	IX Na X		

6	Kaolin	S. Tonga	Kotanopan	6	Kaolin
		Purbatua	Sipirok		
		Bulu Payung	Sipirok		
			Barus		
		Pantis	Pahae Jae		
		Pearaja	Tarutung		
7	Marmer	Aek Banir	Panyabungan	7	Marmer
		Muara pungkut	Kotanopan		
		Ranjo batu	Muara sipongi		
		Sibaganding	GSP Bolon		
		Mardinding	Mardinding		
		Mbal petarum	Lau baleng		
		Lau buluh	Kutabuluh		
		Kuta buluh	Tanah pinem		
8	Toseki	Hutatinggi	Parmonangan	8	Toseki

e. Hidrologi

1) Daerah aliran sungai

Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 71 DAS dan 3 (tiga) DAS lintas provinsi. Jumlah induk sungai di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 99 buah, Anak Sungai sebanyak 783 buah, Ranting Sungai 659 buah, anak Ranting Sungai 342 buah.

2) Sungai, danau dan rawa

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) Satuan Wilayah Sungai berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan – Ular – Padang dan WS Toba – Asahan. WS Lintas Provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal – Batang Batahan lintas provinsi dengan Sumatera Barat dan WS Rokan lintas Provinsi dengan Riau. Sementara WS Batang Angkola – Batang Gadis, WS Wampu – Besitang, WS Bah Bolon, WS Barumon – Kualuh adalah, WS Pulau Nias, dan WS Sibundong – Batang Toru merupakan WS lintas Kab/Kota.

Kawasan rawa merupakan sumber daya alam yang petensinya belum dimanfaatkan dengan optimal bagi lahan pertanian dan pertambakan. Di Provinsi Sumatera Utara luas baku daerah rawa adalah sebesar 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat.

3) Debit Air

Beberapa sungai utama di Propinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan

bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri. Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu.

Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Badan air berupa danau kecil yaitu [Danau Siais dan Danau Marsabut di Kabupaten Tapanuli Selatan](#), [Danau Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah](#), [Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo](#) dan yang terbesar yaitu [Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 \(tujuh\) kabupaten dengan luas sekitar 110.260 ha.](#)

f. *Klimatologi*

1) Tipe

Iklm di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

2) Curah hujan

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431 - 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 - 230 hari per tahun. Pada wilayah kering, curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 1.500 mm yang tercatat di beberapa bagian wilayah Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, sedang curah hujan tinggi berkisar antara 2.000 sampai 4.500 mm berlangsung sepanjang tahun di daerah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Nias, Tapanuli Tengah, dan sebagian besar Tapanuli Selatan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada Juni sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Maret.

3) Suhu

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,80°C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,40° C.

4) Kelembaban

Kelembaban udara rata-rata 78%-91%.

g. *Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:*

1) Kawasan lindung

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan

Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.055.795,00 ha atau 42,63 % dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.168.068,00 ha).

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dimaksud terdiri dari :

- Fungsi hutan dalam kawasan lindung (1.633.889,00 ha)

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/Taman Buru (TB) : 427.008,00 Ha
- b. Hutan Lindung (HL) : 1.206.881,00 Ha

- Fungsi hutan dalam kawasan budidaya (1.421.905,00 ha)

- a. Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 641.769,00 Ha
- b. Hutan Produksi Tetap (HP) : 704.452,00 Ha
- c. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) : 75.684,00 Ha

Di Provinsi Sumatera utara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung adalah kawasan berada pada ketinggian 2.000 meter d.p.l. dengan kelerengannya lebih besar dari sekitar 45 %, mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15 %, memiliki curah hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan tanah gambut dengan ketebalan 3 m yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa dan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Kawasan ini mencakup juga lahan gambut di Kabupaten Langkat, Humbang Hasundutan, Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Nias).

2) Kawasan budidaya

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian yang teridentifikasi hingga Tahun 2012 seluas 380.201 Ha. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas lebih kurang 57% dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas ± 69% dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan secara relatif berimbang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 26.360 km² atau 36,8% dari luas wilayah Sumatera Utara merupakan wilayah yang subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi, dan curah hujan juga relatif tinggi, meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Binjai, Medan, dan Tebing Tinggi. Wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan dan Kota Sibolga. Kegiatan di wilayah Pantai Timur umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan yang relatif besar dan prasarana wilayah yang memadai. Wilayah ini sesuai

untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan dan tanaman pangan.

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi Pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Komoditi bidang pertanian pada dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah sangat berpotensi untuk dikembangkan. Untuk perkebunan, luas areal perkebunan rakyat sampai tahun 2013 adalah sekitar 1,1 juta Ha, dengan total produksi sebesar ± 5,9 juta ton dengan komoditi kelapa sawit, karet, kopi, kakao, tembakau, kelapa dan komoditi lainnya.

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kelautan dan perikanan, dengan luas laut 110.000 Km² dan panjang pantai 1.300 Km meliputi Pantai Timur (WPP 571) sepanjang 545 Km dan Pantai Barat, Nias, Pulau-Pulau Batu (WPP572) sepanjang 755 Km. Potensi perikanan tangkap sebesar 841.200 ton/tahun terdiri dari potensi perikanan tangkap di WPP 571 Selat Malaka (Pantai Timur) sebanyak 276.00 ton/tahun dan WPP 572 Samudera Hindia (Pantai Barat) sebanyak 565.200 ton/tahun serta penangkapan di perairan umum sebesar 155.797 hektar. Potensi perikanan budidaya terdiri dari Budidaya laut seluas 100.000 hektar, budidaya air tawar seluas 18.647,5 hektar dan air payau seluas 20.000 ha

Potensi pariwisata di Provinsi Sumatera Utara meliputi pariwisata alam (kawasan Danau Toba, Berastagi, Kawasan Ekosistem Gunung Leuser dan Bukit Lawang Bahorok, Sibolangit, pantai di Kepulauan Nias, dan lain-lain), pariwisata budaya (Istana Maimun, Kediaman Chong A Fie, Makam Sisingamangaraja XII, Peninggalan Megalit di Pulau Nias, dan lain-lain) dan pariwisata minat khusus (Arung Jeram Sei Asahan, Taman Iman, Paralayang di Sitopsi, dan lain-lain).

2.1.1.2. Potensi pengembangan wilayah

Wilayah Sumatera Utara berpotensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah. Pengembangan potensi kewilayahan tersebut dilakukan berbasiskan kawasan sesuai dengan regulasi perencanaan, yaitu melalui penetapan kawasan-kawasan strategis provinsi serta mendorong perwujudan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis kabupaten/kota.

Koridor pembangunan kewilayahan dikembangkan dengan mengacu pada sistem wilayah atau sistem kota-kota di Sumatera Utara yang diwujudkan dalam penetapan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mendorong terwujudnya pusat-pusat kegiatan nasional dan pusat-pusat kegiatan lokal saling terkoneksi.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis provinsi berfungsi: (a) untuk memwadahi penataan ruang

kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; (b) sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan (c) sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi di Provinsi Sumatera ditetapkan berdasarkan kepentingan: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) sosial dan budaya; dan (c) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi;
 1. Merek, Kabupaten Karo;
 2. Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 3. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 4. Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
 5. Harian, Kabupaten Samosir;
 6. Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 7. Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 8. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 9. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar

- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan meliputi:
 1. Kawasan Tanjungbalai – Asahan;
 2. Kawasan Simalungun – Batubara; dengan fokus Kawasan Pengembangan Industri Berbasis Aluminium dan Diversifikasi Aluminium yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan didukung oleh Global Hubungan Internasional Kuala Tanjung yang telah dilakukan Groundbreaking pada tanggal 27 Januari 2015.
 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke yang telah beroperasi sejak 27 Januari 2015;

- c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.

- d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi :
 1. Kawasan Labuan Angin – Sibolga;
 2. Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan; dan
 3. Kawasan Perkotaan Padangsidempuan dan sekitarnya.

- e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:

- a. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, meliputi:

1. Situs dan peninggalan bersejarah Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rintang di Kabupaten Deli Serdang;
 2. Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
 3. Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
- b. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
 - c. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
 - d. Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
- b. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan
- c. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Di tingkat nasional, beberapa wilayah/kawasan di Sumatera Utara juga ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, yaitu:

- a. Dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, yaitu Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai di Kawasan Perbatasan laut RI dengan Malaysia;
- b. Dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro);
- c. Dari sudut kepentingan lingkungan, yaitu Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Pada tahun 2011, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro. Serta Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. Pada Tahun 2014 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya sesuai ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. [Pada prosesnya hingga saat ini, telah mulai inisiasi untuk pengembangan koridor antar kawasan, yaitu Belawan-Kuala Namu- Kuala Tanjung serta pengembangan konsep aerotropolis di kawasan Bandara Kuala Namu yang terintegrasi dengan sektor ekonomi pertanian unggulan serta pengembangan kawasan *Agrotechnopark* dan kawasan sosial religi terpadu di sekitar bandara Kuala Namu.](#)

2.1.1.3. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

1. Kawasan rawan massa gerakan tanah/tanah longsor

Bencana longsor disertai dengan banjir bandang sudah sering terjadi di Sumatera Utara antara lain longsor dan banjir bandang Sibolangit (Deli Serdang, 22 November 1994), Dolok - Saipar Dolok Hole di DAS Bilah (Tapanuli Selatan - Labuhan Batu, Mei 1995), Perbaungan - Lubuk Pakam (Deli Serdang, Januari 2002), Nias (31 Juli 2001 dan 2 Januari 2003), Bahorok (Langkat, 2 Nopember 2003). Berbagai longsor dan banjir bandang dalam ukuran kecil juga telah sering terjadi di berbagai lokasi di Sumatera Utara sebagai contoh Berastagi yang berada di pegunungan di Karo beberapa waktu yang lalu dilanda banjir bandang.

Kawasan ini terletak pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara - Selatan pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longsor, gelombang pasang dan banjir bandang.

Termasuk dalam kawasan ini Kabupaten Tapanuli Utara pada Kecamatan Muara, Sipoholon, Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Baki, Raja, Siborong-borong, Pagaran, Onan Ganjang, Tarutung, Adian Koting, Pahae Julu, Pahae Jae; Kabupaten Samosir pada Kecamatan Simanindo, Pangururan, Sianjur Mula-Mula, Harian Boho, Palipi, Onan Runggu, Kabupaten Toba Samosir pada Kecamatan Laguboti, Porsea, Habinsaran; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Barus, Kolang, Tapan Nauli, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Siabu, Panyabungan, Batang Natal, Kotanopan; Kabupaten Pakpak Bharat pada Kecamatan Sitelu Taliutang Jahe, Sitelu Taliutang Julu, Taliutang Salak, Taliutang PGGS, Kerajaan; Kabupaten Dairi pada Kecamatan Tigalingga, Siempat Nempu, Silima Pungga-Pungga, Pegagan, Sumbul, Sidikalang, Parbuluan; Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Dolok Silau, Silimakuta, Dolok Pardamean, Sidamanik, Dolok Panribuan, Girsang Sipangan Bolon; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Namorambe, STM Hilir, Biru-biru, Sibolangit, STM Hulu, Bangun Purba, Kabupaten Karo pada Kecamatan Mardinding, Kutabuluh, Lau Baleng, Tiga Binanga, Simpang Empat, Kabanjahe, Barusjahe, Merek; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Padang Tualang, Bahorok, Salapian, Kwala, Sei Bingai; Termasuk Pulau Nias bagian Selatan dan bagian Tengah yaitu: Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias pada Kecamatan Hiliduho; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe serta Kota Gunung Sitoli pada Kecamatan Gunung Sitoli.

2. Kawasan rawan zona patahan aktif;

Posisi wilayah Sumatera Utara terhadap Pulau Sumatera yang terletak diantara Lempeng Asia dan Lempeng Australia mengakibatkan terdapatnya kawasan rawan pada zona tumbukan lempeng di wilayah pantai barat, wilayah daratan Sumatera Utara, dan wilayah pantai Kepulauan Nias.

3. Kawasan rawan gelombang pasang air laut, abrasi dan tsunami; gelombang pasang; rawan abrasi

Tsunami adalah gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi atau longsoran di lereng dasar laut. Gelombang pasang semacam ini bisa melanda daerah pantai sampai puluhan meter tingginya dan ratusan meter jauhnya dari pantai, sehingga menyapu dan merusak segala apa yang ada di pantai dan di daratan, seperti yang terjadi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami yang menerjang pantai barat Aceh dan Sumatera Utara terjadi 20 menit sampai 5 jam setelah gempa tektonik. Kecepatan gelombang tsunaminya rata-rata 50-100 kilometer per jam. Di pusat gempa, kecepatan tsunami Aceh secara teoretis dapat dihitung, yaitu antara 400 - 800 kilometer per jam. Daerah rawan tsunami tersebar di Pantai Barat pada elevasi kurang dari 5 meter, meliputi wilayah pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias

4. Kawasan rawan banjir/ banjir bandang

Peristiwa banjir merupakan bencana alam yang juga sering terjadi di wilayah Sumatera Utara yang beriklim tropis, terutama pada wilayah dengan kemiringan lereng landai atau dataran. Beberapa peristiwa banjir yang terjadi di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Peristiwa banjir (dan juga tanah longsor) yang terbesar selama 3 tahun terakhir di Indonesia terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Leuseur (TNGL) yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.
- Di daerah Bohorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada November 2003 terjadi banjir bandang yang berasal dari bagian hulu DAS Bohorok yang menyebabkan 92 orang tewas dan 154 orang hilang.
- Bencana banjir di beberapa wilayah pada Bulan Desember 2012, meliputi Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Kepulauan Nias.

Termasuk dalam kawasan ini yaitu Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Silau Kahean, Raya Kahean, Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batunanggar, Tapian Dolok, Siantar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja, Tanah Jawa; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Manduamas, Barus, Sorkam, Kolang, Tapian Nauli, Sibolga, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Natal, Muara Batang Gadis, Batahan; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Besitang, Tanjungpura, Gebang, Secanggih, Hinai, Stabat, Padangtualang, Bahorok.; Kabupaten Labuhan Batu pada Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, Pangkatan, Bilah Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Kecamatan Kualuh Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Kecamatan Kampung Rakyat dan Kota Pinang; Kabupaten Deli Serdang pada

Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Tua, Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Biru-biru, Pantai Labu, Batang Kuis, Beringin, Lubuk Pakam; Kabupaten Serdang Bedagai pada Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Sei Bambi dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Termasuk juga pada Kabupaten Nias pada Kecamatan Idano Gawo, Gido; Kabupaten Nias Utara pada Kecamatan Tuhemberua, Lahewa, Alasa; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe, Sirombu, Kabupaten Nias Selatan pada Kecamatan Lolowau, Amandraya, Teluk Dalam, Lahusa; Kota GunungSitoli pada Kecamatan Gunungsitoli.

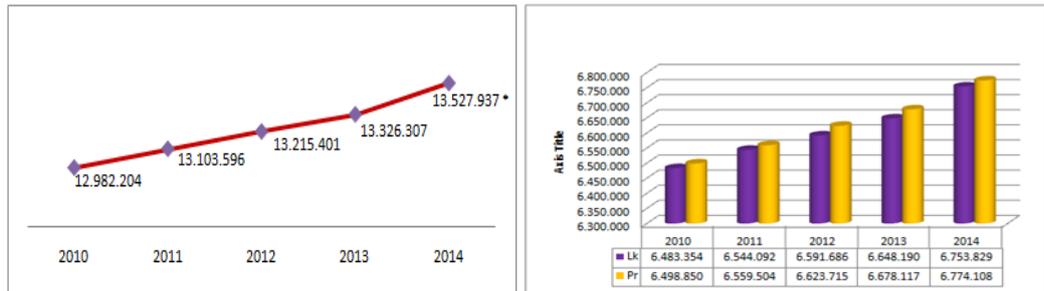
5. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung berada di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Mandailing Natal.
6. Kawasan Rawan Kebakaran hutan meliputi kawasan sepanjang kawasan Danau Toba.
7. Kawasan rawan letusan gunung berapi yang terdapat pada :
 - a. **Tipe A**, yaitu Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang pernah tercatat meledak paling tidak sekali sejak tahun 1600 yaitu pada Tahun 2010.
 - b. **Tipe B**, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Sumatera Utara memiliki empat gunung api jenis ini, yaitu Gunung Sibayak di Kabupaten Karo; Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Toba Samosir; dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - c. **Tipe C**, yaitu gunung yang tidak pernah tercatat meletus. Namun melihat tanda-tanda di sekitar gunung itu, diyakini gunung itu adalah gunung api, yaitu Gunung Dolok Martimbang/Namoralangit/Hela toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1.1.4. Demografi

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2013, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara mencapai 13.326.307 orang, yang terdiri atas 6.548.190 laki-laki dan 6.678.117 perempuan, dengan kepadatan rata-rata 186 Jiwa/Km². Sekitar 51,83 % penduduk bertempat tinggal di pedesaan dan 49,17 % bertempat tinggal di daerah perkotaan, angka ini jauh berbeda dengan kondisi tahun 2012 dimana penduduk yang tinggal di Desa mencapai 50,48% dan di perkotaan sebesar 49,52%, dan diperkirakan bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk perkotaan akan lebih banyak dari pedesaan.

Jumlah penduduk Sumatera Utara merupakan terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah atau terbesar di luar Pulau Jawa. Terdiri dari berbagai suku, yaitu suku asli yang terdiri dari 8 suku yakni Suku Melayu Deli di Pesisir Timur, terutama di kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat, Suku Batak Karo berada di Kabupaten Karo, Suku Batak Toba di wilayah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Suku Batak Pesisir berada di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Suku Batak Mandailing/Angkola di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Mandailing Natal, Suku

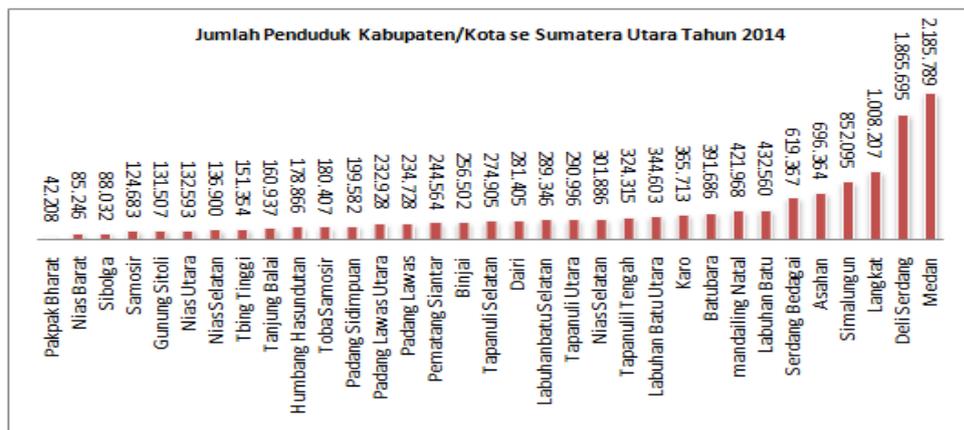
Batak Simalungun umumnya di Kabupaten Simalungun, Suku Batak Pakpak berada di Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat dan Suku Nias di Kepulauan Nias. Selain itu terdapat suku pendatang yakni Suku Minangkabau : Kota Medan, Pesisir barat, Suku Aceh umumnya di Kota Medan, Suku Jawa di Pesisir Timur & Barat dan etnis Tionghoa umumnya di wilayah perkotaan pesisir Timur & Barat.



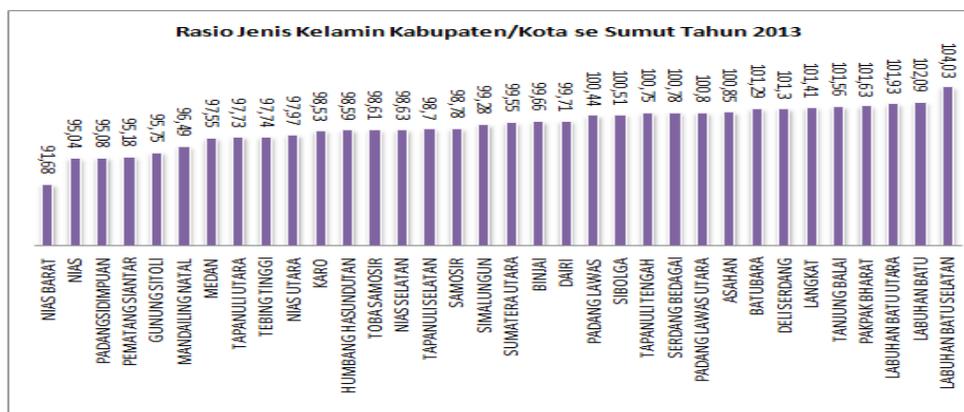
Sumber : Pusdatin 2014
* Angka estimasi

Grafik 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2014



Sumber : PUSDATIN, 2014



Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, 2013

Grafik 2.2

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Rasio Jenis Kelamin se Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 99,55, yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni sebesar 104,03 dan yang terkecil terdapat di Kabupaten Nias Barat yakni sebesar 91,86.

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dari data Proyeksi Penduduk Tahun 2025, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara tahun 2015 sebesar 1,20 persen dan pada periode 2000-2010 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,22%, merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah di Sumatera, atau posisi ke-5 laju pertumbuhan penduduk terendah secara nasional (dibawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah (0,37%), Jawa Timur (0,76%), Kalimantan Barat (0,91%), dan D.I Yogyakarta (1,02%))

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Provinsi di Indonesia
2000, 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2025

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3.929.3	4.037.9	4.112.2	4.166.3	4.196.5	4.196.3
SUMATERA UTARA	11.642.6	12.452.8	13.217.6	13.923.6	14.549.6	15.059.3
SUMATERA BARAT	4.248.5	4.402.1	4.535.3	4.693.4	4.755.4	4.846.0
RIAU	4.948.0	6.108.4	7.469.4	8.997.7	10.692.8	12.571.3
JAMBI	2.407.2	2.657.3	2.911.7	3.164.8	3.409.0	3.636.8
SUMATERA SELATAN	6.210.8	6.755.9	7.306.3	7.840.1	8.369.6	8.875.8
BENGKULU	1.455.5	1.617.4	1.784.5	1.955.4	2.125.8	2.291.6
LAMPUNG	6.730.8	7.291.3	7.843.0	8.377.4	8.881.0	9.330.0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	900.0	971.5	1.044.7	1.116.4	1.183.0	1.240.0
DKI JAKARTA	8.361.0	8.699.6	8.981.2	9.168.5	9.262.6	9.259.9
JAWA BARAT	35.724.0	39.066.7	42.555.3	46.073.8	49.512.1	52.740.8
JAWA TENGAH	31.223.0	31.887.2	32.451.6	32.882.7	33.138.9	33.152.8
D I YOGYAKARTA	3.121.1	3.280.2	3.439.0	3.580.3	3.694.7	3.776.5
JAWA TIMUR	34.766.0	35.550.4	36.269.5	36.840.4	37.183.0	37.194.5
BANTEN	8.098.1	9.309.0	10.661.1	12.140.0	13.717.6	15.343.5
B A L I	3.150.0	3.378.5	3.596.7	3.792.6	3.967.7	4.122.1
NUSA TENGGARA BARAT	4.008.6	4.355.5	4.701.1	5.040.8	5.367.7	5.671.6
NUSA TENGGARA TIMUR	3.823.1	4.127.3	4.417.6	4.694.9	4.957.6	5.194.8
KALIMANTAN BARAT	4.016.2	4.394.3	4.771.5	5.142.5	5.493.6	5.809.1
KALIMANTAN TENGAH	1.855.6	2.137.9	2.439.9	2.757.2	3.095.8	3.414.4
KALIMANTAN SELATAN	2.984.0	3.240.1	3.503.3	3.767.8	4.023.9	4.258.0
KALIMANTAN TIMUR	2.451.9	2.810.9	3.191.0	3.587.9	3.995.6	4.400.4
SULAWESI UTARA	2.000.9	2.141.9	2.277.2	2.402.8	2.517.2	2.615.5
SULAWESI TENGAH	2.176.0	2.404.0	2.640.5	2.884.2	3.131.2	3.372.2
SULAWESI SELATAN	8.050.8	8.493.7	8.926.6	9.339.9	9.715.1	10.023.6
SULAWESI TENGGARA	1.820.3	2.085.9	2.363.9	2.653.0	2.949.6	3.245.5
GORONTALO	833.5	872.2	906.9	937.5	962.4	979.4
M A L U K U	1.166.3	1.266.2	1.369.4	1.478.3	1.589.7	1.698.8
MALUKU UTARA	815.1	890.2	969.5	1.052.7	1.135.5	1.215.2
PAPUA	2.213.8	2.518.4	2.819.9	3.119.5	3.410.8	3.682.5

Sumber : Data Statistik, BPS

b. Sebaran Penduduk

Secara geografis, penyebaran penduduk terbesar masih terkonsentrasi pada wilayah Pantai Timur, yaitu dimana pada wilayah tersebut terdapat sejumlah kabupaten yang berpenghuni terbesar (di atas 5 % dari seluruh penduduk provinsi) dan berkepadatan tertinggi (di atas 200 jiwa/km²), seperti : Labuhan Batu, Asahan, Deli Serdang, Langkat dan Serdang Bedagai. Pada wilayah timur ini juga terdapat sejumlah besar kota besar dengan distribusi dan kepadatan penduduk terbesar yaitu Kota Medan, Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padang Sidempuan.

Dari hasil Sensus Penduduk 2010 terlihat bahwa penyebaran penduduk Sumatera Utara menurut kabupaten/kota rata-rata dibawah 5 persen, dan hanya lima kabupaten/kota yang persebarannya diatas 5 persen.

Secara umum kepadatan bruto di Provinsi Sumatera Utara masih rendah karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan yang tidak terbangun, yaitu kawasan hutan dan perkebunan. Kecuali pada kota-kota yang ada di Sumatera Utara, kepadatannya relatif sedang sebagai kawasan perkotaan. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat adalah tiga kabupaten/kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 2,122,804 orang (16,06%), 1,845,615 orang (13,97%), dan 976,885 orang (7,39%). Sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat merupakan

kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit yang berjumlah 41,492 orang (0,31 persen). Dengan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara sekitar 71.680,68 kilometer persegi yang didiami oleh 13,215,401 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 184 orang per kilo meter persegi.

Menurut sensus penduduk terakhir tahun 2012, Kabupaten/kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Medan yakni sebanyak 8.008 orang per kilo meter persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat yakni sebanyak 34 orang per kilo meter persegi. Kota kedua dengan kepadatan tertinggi adalah Kota Sibolga sebesar 7971 per kilometer persegi. Dengan kemampuan daya dukung lahan Kota Sibolga yang terbatas sementara penduduk terus bertambah, Kota Sibolga perlu mengendalikan pertumbuhan penduduknya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel. 2.6
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Sumatera Utara
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	JUMLAH PENDUDUK		Distribusi Penduduk	
		Jumlah	Kepadatan	Laki-Laki	Perempuan
1	NIAS	135.319	138	65.933	69.386
2	MANDAILING NATAL	426.382	64	209.401	216.981
3	TAPANULI SELATAN	273.132	63	135.707	137.425
4	TAPANULI TENGAH	342.902	159	172.037	170.865
5	TAPANULI UTARA	290.864	77	143.794	147.070
6	TOBA SAMOSIR	178.568	76	88.680	89.888
7	LABUHAN BATU	453.630	177	229.110	224.520
8	ASAHAN	699.720	190	351.415	348.305
9	SIMALUNGUN	844.033	193	420.591	423.442
10	DAIRI	277.575	144	138.608	138.967
11	KARO	382.622	180	189.815	192.807
12	DELI SERDANG	1.984.598	798	998.669	985.929
13	LANGKAT	1.005.965	161	506.513	499.452
14	NIAS SELATAN	305.010	188	151.380	153.630
15	HUMBANG HASUNDUTAN	181.026	79	89.906	91.120
16	PAKPAK BHARAT	44.520	37	22.435	22.085
17	SAMOSIR	123.065	51	61.080	61.985
18	SERDANG BEDAGAI	606.367	317	304.403	301.964
19	BATUBARA	396.479	438	199.508	196.971
20	PADANG LAWAS UTARA	247.286	63	124.229	123.057
21	PADANG LAWAS	251.927	65	126.313	125.614
22	LABUHAN BATU SELATAN	307.171	99	156.578	150.593
23	LABUHAN BATU UTARA	347.465	98	175.405	172.060
24	NIAS UTARA	132.735	88	65.705	67.030
25	NIAS BARAT	84.419	155	40.375	44.044
26	SIBOLGA	86.166	8.001	43.280	42.886
27	TANJUNG BALAI	164.675	2.677	83.006	81.669
28	PEMATANG SIANTAR	245.104	3.065	119.582	125.522
29	TEBING TINGGI	154.804	4.027	76.488	78.316

30	MEDAN	2.191.140	8.265	1.081.797	1.109.343
31	BINJAI	261.490	2.898	130.551	130.939
32	PADANGSIDIMPUAN	206.496	1.801	100.642	105.854
33	GUNUNG SITOLI	134.196	286	65.651	68.545
SUMATERA UTARA		13.766.851	188.636	6.868.587	6.898.264

Sumber : BPS Sum Sumber : BPS Proyeksi Penduduk Sumut Tahun 20 Sumber : BPS Tahun 2014, (data diolah)

Kedekatan terhadap Kota Medan dan berkedudukan di wilayah timur menjadikan suatu kabupaten memiliki penduduk perkotaan yang semakin besar, seperti kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai berpenduduk perkotaan yang dominan, diikuti Kabupaten Asahan, Batu Bara, Simalungun, Karo dan Langkat. Sebaliknya kabupaten-kabupaten yang jauh dari Medan memiliki penduduk yang sangat didominasi penduduk perdesaan, seperti Kabupaten Nias Selatan, Nias, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Selatan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari angka nilai PDRB, kontribusi PDRB, pertumbuhan PDRB, Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut :

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir, terlihat semakin mengalami fluktuatif dengan trend penurunan, pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dicapai Sumatera Utara terjadi pada tahun 2011 dimana laju pertumbuhannya mencapai 6,63 persen, akan tetapi setelah tahun 2011 terjadi trend penurunan dan puncaknya di tahun 2014 dengan laju pertumbuhan dibawah angka psikologis 6 persen tepatnya di angka 5,23 persen, adapun penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 ini, sebagai dampak pelemahan perekonomian dunia dimana Nasional juga turun dan di bawah capaian Sumatera Utara pada angka 5,02 persen, selain pengaruh global juga sebagai dampak dari berbagai persoalan internal yang masih belum teratasi seperti kondisi infrastruktur baik darat, laut maupun udara dan juga proses perizinan dan ketersediaan ketenagalistrikan dan gas yang menjadi salah satu faktor pendorong tumbuhnya minat investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel.2.7
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2010-2014

wilayah	Pertumbuhan Ekonomi					rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	
Sumatera Utara	6.38	6.66	6.45	6.08	5.23	6.16
Nasional	6.22	6.49	6.23	5.78	5.02	5.95

Sumber : BPS (Data Diolah)



Sumber : BPS Sumatera Utara (Data Diolah)

Grafik. 2.3

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014 Dibandingkan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, secara rata-rata per lima tahunan juga lebih baik dimana Sumatera Utara dalam kurun waktu lima tahun rata-rata tumbuh 6,16 persen dan nasional hanya 5,95 persen. Secara umum kondisi lima tahunan Sumatera Utara tahun 2010-2014 Sumatera Utara masih dapat mencapai angka pertumbuhan psikologis 6 persen, sementara nasional hanya bertengger di angka 5 persen.

Jika melihat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lima tahun terakhir berdasarkan ADHK Tahun 2010-2014 dari sisi produksi dengan tahun dasar dan metode perhitungan baru, terlihat kondisi sebagai berikut :

Tabel.2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara per sektoral ADHK 2010 dari Sisi produksi Tahun 2010-2014 (persen)

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	5.88	5.3	4.71	4.37
2	B	Pertambangan dan Penggalian	-	10.72	11.9	26.03	5.33
3	C	Industri Pengolahan	-	3.22	5.6	4.84	2.97
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	-	13.87	-3.0	-3.88	3.71
5	E	Pengadaan Air	-	6.30	5.1	5.68	6.04
6	F	Konstruksi	-	8.46	6.7	7.66	6.79
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	7.13	7.9	5.57	6.94
8	H	Transportasi dan Pergudangan	-	10.24	8.2	7.41	5.71
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	8.52	6.8	7.81	6.48
10	J	Informasi dan Komunikasi	-	9.96	8.8	7.78	7.23
11	K	Jasa Keuangan	-	8.71	10.1	9.99	2.84
12	L	Real Estate	-	9.66	7.0	6.94	6.59
13	M,N	Jasa Perusahaan	-	10.68	6.0	6.68	6.76
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	8.93	2.5	3.34	6.92
15	P	Jasa Pendidikan	-	4.79	4.9	8.34	6.37
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	16.00	10.6	10.82	7.00
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	-	9.00	7.8	7.45	7.04
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			-	6.66	6.45	6.08	5.23

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi kategorial di Sumatera Utara telah mempergunakan metode perhitungan baru dengan SNA 2008 dan tahun dasar 2010. Pada tahun 2010 data tidak tersedia sebab data perhitungan mempergunakan tahun dasar 2010, sehingga tidak ada perbandingan perhitungannya. Pada tahun 2011 pertumbuhan kategorial tertinggi dialami oleh kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai pertumbuhan 16 persen, disusul oleh kategorial pengadaan listrik dan gas sebesar 13,87 persen. Adapun pertumbuhan terendah dialami oleh kategori industry pengolahan sebesar 3,22 persen disusul oleh kategori jasa pendidikan sebesar 4,79 persen.

Sementara pada tahun 2014 pertumbuhan kategorial tertinggi dialami oleh kategori informasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 7,23 persen, disusul oleh kategori jasa lainnya sebesar 7,04 persen, adapun kategori terendah pertumbuhannya adalah kategori industry pengolahan sebesar 2,97 persen disusul oleh kategori jasa keuangan dengan laju pertumbuhan sebesar 2,84 persen. Dari kondisi di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kategori industry pengolahan selama kurun waktu terakhir mengalami pertumbuhan yang semakin menurun, ada indikasi awal bahwa penurunan ini dapat berimbas dari pasokan energy yang belum optimal terpenuhi di Sumatera Utara seperti pasokan listrik dan gas.

b. Struktur PDRB

Dengan berlakunya metode perhitungan PDRB dengan mempergunakan metode SNA 2008 dan tahun dasar 2010, maka format table untuk konversi data PDRB Sumatera Utara pada kurun waktu 2010-2014 disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel. 2.9
Struktur PDRB Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.79	25.42	24.9	24.5	23.2
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1.06	1.07	1.2	1.4	1.3
3	C	Industri Pengolahan	21.3	21.2	20.7	19.8	19.9
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
5	E	Pengadaan Air	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6	F	Konstruksi	11.7	11.8	12.3	13.0	13.6
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.1	17.1	17.0	16.7	17.1
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4.3	4.4	4.6	4.9	4.9
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.3	2.1	2.1	2.0	2.0
11	K	Jasa Keuangan	2.9	3.0	3.2	3.3	3.3
12	L	Real Estate	3.9	4.1	3.9	4.3	4.4
13	M,N	Jasa Perusahaan	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6
15	P	Jasa Pendidikan	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Dari data tabel 2.4 memperlihatkan bahwa dengan mempergunakan tahun dasar 2010 dan metode SNA 2008 terjadi pergeseran struktur dengan metode perhitungan PDRB sebelumnya dan tahun dasar 2000, dimana pada metode dan tahun dasar sebelumnya pertanian dan kehutanan dan perikanan dengan industry pengolahan saling bertukar posisi pada peringkat pertama penyumbang PDRB Sumatera Utara, akan tetapi dengan metode SNA 2008 dan tahun dasar 2010 maka penyumbang terbesar PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku di tempati oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dengan sumbangan pada tahun 2010 sebesar 25,79 persen, terus menurun hingga pada tahun 2015 hanya bertengger diangka sumbangan 23,20 persen. Tentunya penurunan ini masih berjalan dengan benar (on the track), sebab nilai tambah yang dihasilkan oleh pertanian akan diolah lebih besar lagi di kategori lainnya.

Hal kontradiksi terjadi di kategori industry pengolahan, dimana berdasarkan table diatas, sumbangan industry pengolahan semakin menurun, jika merujuk data maka pada tahun 2010 kontribusi industry pengolahan adalah sebesar 21,30 persen, terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 sumbangan dari kategori industry pengolahan hanya sebesar 19,90 persen, tentunya hal ini mengindikasikan bahwa kategori ini mengalami pertumbuhan yang semakin kecil, dengan berbagai factor penyebab diantaranya ketersediaan pasokan listrik dan gas yang terganggu serta fasilitas logistic baik jalur dan sistemnya yang masih belum mampu mengimbangi kebutuhan para investor.

Tabel. 2.10
Struktur PDRB Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2014

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.84	25.65	25.38	25.06	24.85
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1.01	1.05	1.10	1.31	1.31
3	C	Industri Pengolahan	21.31	20.62	20.46	20.22	19.79
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	0.15	0.16	0.15	0.13	0.13
5	E	Pengadaan Air	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
6	F	Konstruksi	11.67	11.87	11.90	12.07	12.25
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.08	17.16	17.39	17.31	17.59
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4.26	4.40	4.48	4.53	4.55
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.10	2.13	2.14	2.17	2.20
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.25	2.32	2.38	2.41	2.46
11	K	Jasa Keuangan	2.92	2.98	3.08	3.19	3.12
12	L	Real Estate	3.87	3.98	4.00	4.03	4.08
13	M,N	Jasa Perusahaan	0.82	0.85	0.85	0.85	0.86
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.39	3.46	3.33	3.25	3.30
15	P	Jasa Pendidikan	2.02	1.99	1.96	2.00	2.02
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.76	0.82	0.85	0.89	0.91
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	0.46	0.47	0.47	0.48	0.49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Dari Tabel di atas terlihat bahwa berbeda dengan PDRB ADHB yang telah disajikan di atas, kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan relative stabil walaupun penurunannya tetap terjadi tetapi kontribusinya hamper

¼ dari seluruh total PDRB, dimana penurunan kontribusi dari tahun 2010 ke tahun 2014 hanya sebesar 1,01 persen, sementara jika dinilai dari ADHB maka penurunan kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,59 persen atau penurunannya dua kali dari penurunan atas dasar harga konstan. Sementara itu kategori Industri pengolahan juga sama seperti PDRB ADHB mengalami penurunan kontribusi dari tahun 2010 sebesar 21,31 persen menjadi hanya sebesar 19,79 persen atau mengalami penurunan kontribusi sebesar 1,51 persen. Adapun untuk 2 kategori penyumbang PDRB ADHK 2010 terbesar lainnya yakni peringkat ketiga Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan kontribusi dari 2010 17,08 persen menjadi 17,59 persen, demikian juga dengan kategori konstruksi juga mengalami kontribusi dari 2010 pada angka 11,67 persen meningkat menjadi sebesar 12,25 persen.

c. Nilai PDRB

Sebagai Provinsi terbesar di luar pulau Jawa, ditilik dari besaran jumlah penduduk dan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota, maka secara umum besaran PDRB Sumatera Utara belumlah menunjukkan angka yang terbesar di Indonesia, masih merupakan peringkat 7, sebagaimana tergambar dalam table berikut ini :

Tabel 2.11
Nilai PDRB Provinsi se Indonesia Tahun 2012-2013
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. miliar)

Provinsi	2012	2013
11. Aceh	95,074.22	103,045.56
12. Sumatera Utara	351,090.36	403,933.05
13. Sumatera Barat	110,179.65	127,099.95
14. Riau	469,073.02	522,241.43
15. Jambi	72,634.07	85,558.31
16. Sumatera Selatan	206,297.63	231,683.04
17. Bengkulu	24,119.36	27,388.25
18. Lampung	144,639.48	164,393.43
19. Kep. Bangka Belitung	34,458.59	38,934.84
21. Kepulauan Riau	90,568.21	100,310.42
31. DKI Jakarta	1,103,692.66	1,255,925.78
32. Jawa Barat	949,761.26	1,070,177.14
33. Jawa Tengah	556,483.73	623,749.62
34. DI Yogyakarta	57,031.75	63,690.32
35. Jawa Timur	1,001,200.74	1,136,326.87
36. Banten	213,197.79	244,548.14
51. Bali	83,943.33	94,555.77
52. Nusa Tenggara Barat	49,679.69	56,277.97
53. Nusa Tenggara Timur	35,248.49	40,465.30
61. Kalimantan Barat	74,969.66	84,956.23
62. Kalimantan Tengah	55,885.58	63,515.47
63. Kalimantan Selatan	75,893.97	83,361.79
64. Kalimantan Timur	419,507.23	425,429.38
71. Sulawesi Utara	47,198.30	53,401.10
72. Sulawesi Tengah	51,106.07	58,641.18
73. Sulawesi Selatan	159,859.93	184,783.06
74. Sulawesi Tenggara	36,600.75	40,773.20
75. Gorontalo	10,368.80	11,752.20
76. Sulawesi Barat	14,407.64	16,184.01
81. Maluku	11,468.77	13,245.35
82. Maluku Utara	6,918.43	7,725.42
91. Papua Barat	43,204.82	50,908.73
94. Papua	77,396.09	93,136.60
Jumlah 33 Provinsi	6,733,160.11	7,578,118.87

Sumber : BPS RI

Dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa kedudukan Provinsi Sumatera Utara dalam konstelasi sumbangan PDB adalah pada peringkat 7, sementara untuk tingkat regional Pulau Sumatera menduduki peringkat dua, sementara untuk Provinsi di luar Pulau Jawa menduduki peringkat ketiga setelah Riau dan Kalimantan Timur.

Adapun untuk kondisi Provinsi Sumatera Utara Nilai Nominal PDRB Sumatera Utara dengan metode perhitungan SNA 2008 dan tahun dasar 2010 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.12
Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2010-2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. miliar)

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	85,561,143.96	95,856,863.79	103,933,114.9	115,194,745.9	121,435,442.7
2	B	Pertambangan dan Penggalian	3,336,340.26	4,048,821.63	4,848,020.0	6,581,443.7	6,944,808.7
3	C	Industri Pengolahan	70,540,953.80	79,947,917.24	86,171,929.7	93,241,472.5	104,224,003.8
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	501,178.84	643,052.37	641,934.1	586,207.1	514,666.3
5	E	Pengadaan Air	316,551.82	355,925.07	399,026.0	441,816.0	501,060.0
6	F	Konstruksi	38,650,891.30	44,527,253.68	51,426,256.0	60,997,621.4	71,225,774.0
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	56,555,799.54	64,308,761.08	70,891,922.7	78,324,823.4	89,596,998.2
8	H	Transportasi dan Pergudangan	14,101,567.03	16,580,077.93	19,056,202.1	22,990,245.2	25,923,438.0
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,936,756.77	7,874,972.12	9,100,935.8	10,598,775.3	12,283,315.7
10	J	Informasi dan Komunikasi	7,465,664.08	8,103,346.98	8,957,698.9	9,594,390.2	10,287,350.9
11	K	Jasa Keuangan	9,676,981.62	11,195,195.18	13,479,426.2	15,738,019.0	17,155,250.9
12	L	Real Estate	12,814,477.23	15,290,923.39	16,358,719.3	20,078,791.2	22,786,418.7
13	M,N	Jasa Perusahaan	2,711,690.37	3,181,125.34	3,646,330.4	4,224,044.0	4,836,417.7
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,212,993.02	12,990,356.75	14,786,938.0	16,427,959.7	18,832,080.3
15	P	Jasa Pendidikan	6,690,893.89	7,318,570.99	7,938,014.6	8,848,513.7	9,930,056.9
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,500,421.51	3,044,544.66	3,519,331.3	4,020,161.9	4,604,434.0
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	1,510,932.41	1,769,392.83	1,964,638.7	2,332,953.3	2,690,048.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			331,085,237.47	377,037,101.03	417,120,438.66	470,221,983.57	523,771,565.54

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa pertumbuhan PDRB ADHB Sumatera Utara dari tahun 2010 ke tahun 2014 meningkat sebesar 58,20 persen. Sementara jika dikonversi ke dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, maka nominal PDRB Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2010-2014
Atas Dasar Harga Berlaku

TAHUN	NILAI PDRB (Rp.juta)	KURS US \$	Nilai Nominal (000 US\$)
2010	331,085,237.47	9,078	36,463,132
2011	377,037,101.03	8,773	42,991,688
2012	417,120,438.66	9,384	44,469,130
2013	470,221,983.57	13,590	34,600,587
2014	523,771,565.54	11,867	44,125,658

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)

Berdasarkan hasil penyajian data di atas, dapat diperoleh bahwa jika dikonversi ke dollar Amerika Serikat, maka angka Nominal PDRB Sumatera Utara diketahui pada tahun 2010 bernilai US\$ 36,46 Milyar US\$ dengan kurs rata-rata sebesar Rp. 9.078 per 1 dollar Amerika Serikat, terus meningkat hingga tahun 2012 PDRB Sumatera Utara hingga mencapai US\$ 44,47 milyar dan merupakan yang tertinggi selama kurun waktu terakhir, kembali menurun pada tahun 2013 yang hanya berada di angka US\$ 34,60 milyar dengan kurs rata-rata sebesar Rp. 13.590 per Dollar Amerika Serikat, akan tetapi angka PDRB ini kembali rebound dengan angka yang hampir menyamai kondisi tahun 2012 yakni di angka US\$ 44,13 milyar dengan kurs rata-rata Rp. 11.867 per 1 Dollar Amerika Serikat.

Tabel 2.14
 Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2010-2014
 Atas Dasar Harga Konstan 2010
 (Rp. miliar)

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	85,561,143.96	90,592,547.11	95,405,416.9	99,899,566.3	104,269,613.6
2	B	Pertambangan dan Penggalian	3,336,340.26	3,693,990.92	4,135,255.2	5,211,647.4	5,489,373.7
3	C	Industri Pengolahan	70,540,953.80	72,815,223.08	76,922,410.6	80,648,618.0	83,042,087.5
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	501,178.84	570,711.45	553,396.3	531,920.5	551,651.4
5	E	Pengadaan Air	316,551.82	336,491.28	353,745.8	373,844.3	396,428.6
6	F	Konstruksi	38,650,891.30	41,921,896.14	44,718,287.8	48,144,381.8	51,411,361.1
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	56,555,799.54	60,589,055.04	65,384,605.2	69,025,207.6	73,817,641.8
8	H	Transportasi dan Pergudangan	14,101,567.03	15,545,798.35	16,827,857.6	18,075,247.2	19,107,060.7
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,936,756.77	7,527,496.52	8,035,635.9	8,663,609.6	9,225,423.5
10	J	Informasi dan Komunikasi	7,465,664.08	8,209,201.22	8,930,584.2	9,625,107.2	10,321,291.6
11	K	Jasa Keuangan	9,676,981.62	10,519,432.08	11,581,048.1	12,738,470.2	13,100,349.1
12	L	Real Estate	12,814,477.23	14,052,157.26	15,030,054.5	16,072,860.1	17,132,221.2
13	M,N	Jasa Perusahaan	2,711,690.37	3,001,220.15	3,182,589.6	3,395,102.0	3,624,699.3
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,212,993.02	12,213,771.28	12,522,710.2	12,940,560.2	13,835,996.7
15	P	Jasa Pendidikan	6,690,893.89	7,011,171.08	7,357,221.3	7,970,451.3	8,478,260.6
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,500,421.51	2,900,539.72	3,207,547.3	3,554,516.8	3,803,268.7
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	1,510,932.41	1,646,888.55	1,775,772.9	1,908,139.7	2,042,552.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			331,085,237.47	353,147,591.20	375,924,139.5	398,779,250.4	419,649,281.7

Dari tabel di atas diperoleh hasil analisa bahwa pertumbuhan PDRB ADHK dengan Tahun Dasar 2010 dari periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebesar 26,75 persen, dan apabila di konversi kembali ke dalam US Dollar, maka komposisi nominal PDRB ADHK 2010 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
 Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2010-2014
 Atas Dasar Harga Konstan 2010

TAHUN	NILAI PDRB (Rp.juta)	KURS US \$	Nilai Nominal (000 US\$)
2010	331,085,237.47	9,078	36,463,132
2011	353,147,591.20	8,773	40,267,684
2012	375,924,139.45	9,384	40,077,200
2013	398,779,250.37	13,590	29,343,580
2014	419,649,281.71	11,867	35,353,773

Berdasarkan data di atas, diperoleh hasil bahwa berbeda dengan hasil konversi Nilai PDRB ADHB ke Dollar Amerika Serikat, yang mana pada tahun 2012 lah nilai konversi PDRB yang paling besar nilai, akan tetapi dalam konversi PDRB berdasarkan ADHK 2010, maka PDRB Sumatera Utara terbesar setelah hasil konversi ada pada tahun 2011 dengan nilai US\$ 40,27 milyar, masih stabil di tahun 2012, akan tetapi pada tahun 2013 anjlok dengan nilai hanya US\$ 29,34 milyar, dan kembali meningkat menjadi US\$ 35,35 milyar pada tahun 2014.

d. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Sumatera Utara secara umum juga kondisinya lebih baik dari nasional, akan tetapi pada tahun 2014 kondisi inflasi Sumatera Utara lebih baik dari capaian nasional, dimana inflasi di Sumatera Utara mencapai 8,17%,

Secara Makro Rata-Rata Inflasi Sumatera Utara selama periode 2010-2014 sebesar 6,78% berada diatas rata-rata Inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 6,37% (nasional lbih baik). Ada pun perkembangan nilai inflasi Sumatera Utara dibandingkan dengan tingkat nasional disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.16
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2010-2014 Provinsi Sumatera Utara

INFLASI	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
INDONESIA	6,96	3,79	4,36	8,38	8,36
SUMATERA UTARA	8	3,67	3,86	10,18	8,17

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

c. PDRB per Kapita

Tabel. 2.17
PDRB Perkapita Tahun 2009-2013 Provinsi Sumatera Utara

Uraian		2010	2011	2012	2013*)
Nilai PDRB (triliun Rp)	239.03	275.70	314.37	351.12	403.93
Jumlah Penduduk (Jiwa)	13,248,386.00	12,985,075	13,103,596	13,215,401	13.326.307
PDRB perkapita (Rp.juta/jiwa)	17.84	21.23	23.99	26.40	30.00
Konversi PDRB/Kapita (US\$)	17,22.67	2,338.62	2,734.53	2,802.85	2,522.07

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Kondisi pendapatan per kapita masyarakat Sumatera Utara tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, hal ini tentunya merupakan pertanda terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada tahun 2010 PDRB Perkapita penduduk Sumatera Utara dengan mempergunakan metode SNA 2008 dan tahun dasar 2010 sebesar Rp. 25,5 juta atau jika dikonversi ke dollar Amerika Serikat telah mencapai US\$ 2.809,00; terus meningkat hingga tahun 2014 PDRB/Kapita telah mencapai Rp. 38,83 juta, akan tetapi jika secara

internasional dikonversi ke Dollar Amerika Serikat, maka PDRB/kapita terbesar Sumatera Utara terjadi di Tahun 2012 dengan nilai US\$ 3.663, dan terendah dalam kurun lima tahun terakhir adalah di tahun 2013 dengan nilai hanya US\$ 2.596, hal ini sebagai akibat nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi hingga mencapai Tiga Belas Ribuan secara rata-rata.

d. Disparitas Pendapatan Masyarakat

Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah suatu proses alamiah yang terjadi dalam tahapan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja, terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu sehingga mengurangi pemerataan modal, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

1) Tipologi Klassen

Berdasarkan hasil pemetaan Tipologi Klassen yang mengklasifikasikan daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita ke dalam 4 kuadran, diketahui bahwa selama periode tahun 2009-2013 pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan adanya perpindahan antar kuadran.

Posisi 33 Kabupaten/Kota selama periode tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.18
Tipologi Klassen 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Sibolga	1	4	4	4	4
2	Tapanuli Tengah	1	4	4	1	1
3	Tapanuli Utara	4	4	4	4	1
4	Toba Samosir	1	4	4	4	4
5	Samosir	4	4	4	4	1
6	Humbang Hasundutan	1	4	4	4	1
7	Nias	1	1	1	1	1
8	Nias Selatan	4	4	4	4	4
9	Gunung Sitoli		1	4	1	1
10	Nias Utara		1	1	4	1
11	Nias Barat		4	1	4	4
12	Padangsidempuan	1	4	4	1	1
13	Mandaling Natal	1	4	4	1	1
14	Tapanuli Selatan	4	4	4	4	4
15	Padang Lawas	1	4	4	1	1
16	Padang Lawas utara	1	1	1	1	1
17	Labuhan Batu	4	4	4	4	4
18	Asahan	4	4	4	4	4
19	Simalungun	4	4	4	4	4
20	Dairi	4	4	4	4	4
21	Karo	1	4	4	1	4
22	Deli Serdang	2	3	3	3	2
23	Langkat	4	4	4	4	4
24	Pakpak Barat	1	1	4	4	4
25	Serdang Bedagai	1	4	4	4	4
26	Batu Bara	3	3	3	3	3
27	Labuhan Batu Utara		3	3	2	2
28	Labuhan Batu Selatan		3	3	2	2
29	Tanjung Balai	4	4	4	4	4
30	Pematang Siantar	1	4	4	4	4
31	Tebing Tinggi	1	4	1	1	1
32	Medan	2	2	2	2	3
33	Binjai	1	4	4	1	1

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Posisi suatu Kabupaten/Kota dalam Tipologi Klassen ini, selain bergantung dari kinerja pembangunan Kabupaten/Kota itu sendiri juga bergantung dari kinerja pembangunan Kabupaten/Kota lainnya. Suatu kabupaten/kota bisa saja memiliki pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum tentu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita keseluruhan Kabupaten/Kota di wilayah yang menjadi acuan.

2) Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Tingkat ketimpangan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara berdasarkan Indeks Gini (Gini Ratio) selama kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.19
Tabel Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013

TAHUN	INDEKS
2009	0.32
2010	0.35
2011	0.35
2012	0.33
2013	0.354

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas diketahui bahwa kesenjangan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara secara umum semakin timpang, ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 hanya 0,32, akan tetapi trendnya terus melebar hingga pada tahun 2012 kembali turun menjadi 0,33 dari dua tahun sebelumnya (2010 dan 2011) mencapai 0,35, dan terus melebar disparitasnya sedikit di tahun 2013 menjadi 0,354.

1) Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

Indikator jumlah dan persentase penduduk miskin merupakan indikator makro yang menggambarkan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi penduduk secara umum. Jumlah desa tertinggal dapat memberikan indikasi mengenai daerah-daerah dimana penduduk miskin banyak ditemui. Kedua indikator tersebut saling melengkapi. Perlu diketahui, bahwa tidak semua penduduk di desa tertinggal adalah miskin, sebaliknya tidak semua penduduk di Kota adalah tidak miskin.

Pembangunan yang telah berjalan di Sumatera Utara berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 10,63 persen pada tahun 2011 turun menjadi 10,39 persen pada tahun 2013.

Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut Kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh : kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi); antara 12 persen sampai dengan 17 persen dikatakan berketimpangan sedang; lebih dari 17 persen berketimpangan rendah.

Menurut versi bank Dunia yang menstandarkan pendapatan perkapita yang ideal sekitar 2 US\$/hari/kapita, maka jumlah penduduk yang memenuhi standar tersebut dengan kurs rupiah Rp. 9.500/ 1 US\$ pada tahun 2010 adalah 40 persen penduduk lapisan sedang/menengah dan 20 persen penduduk lapisan atas/tinggi masih menerima pembagian pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan 40 persen penduduk terendah, yaitu berkisar antara 35,29 persen sampai dengan 40,35 persen dari total pendapatan, sementara 40% penduduk berpenghasilan terendah hanya menerima 24,36%, berartisecara umum ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia adalah rendah.

4) Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2009-2013 yang dihitung menggunakan Williamson Index menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2013, Williamson Index untuk Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 0,058 dan jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 0,058. Kondisi disparitas pendapatan ini cukup stabil mengingat angka indeks yang semakin mendekati 1 menunjukkan disparitas yang semakin lebar.

Tabel 2.20
Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara 2009-2013 menurut Indeks Ketimpangan Williamson

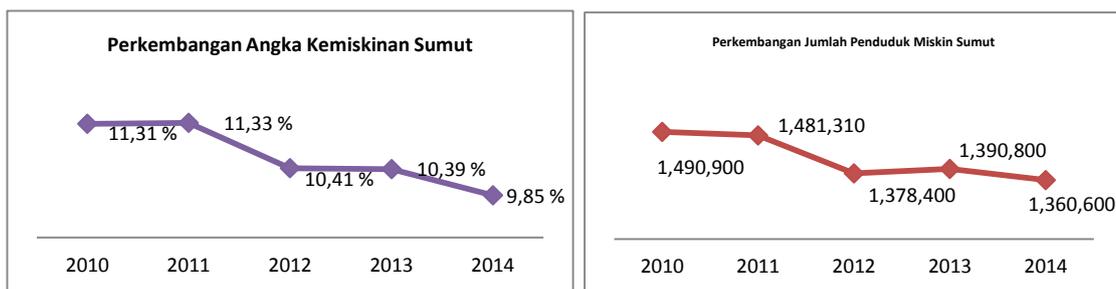
No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
1	Sibolga	0,004	0,011	0,013	0,013	0,013	0,011
2	Tapanuli Tengah	0,096	0,101	0,103	0,104	0,104	0,101
3	Tapanuli Utara	0,039	0,052	0,056	0,057	0,059	0,052
4	Toba Samosir	0,006	0,008	0,008	0,006	0,006	0,007
5	Samosir	0,025	0,033	0,035	0,035	0,037	0,033
6	Humbang Hasundutan	0,026	0,037	0,038	0,028	0,037	0,033
7	Nias	0,102	0,059	0,059	0,059	0,059	0,073
8	Nias Selatan	0,084	0,095	0,097	0,093	0,1	0,093
9	Gunung Sitoli	-	0,027	0,024	0,025	0,025	0,025
10	Nias Utara	-	0,057	0,057	0,058	0,058	0,058
11	Nias Barat	-	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
12	Padangsidempuan	0,047	0,059	0,061	0,063	0,065	0,058
13	Mandailing Natal	0,091	0,1	0,099	0,098	0,098	0,098
14	Tapanuli Selatan	0,054	0,062	0,052	0,062	0,063	0,059
15	Padang Lawas	0,076	0,088	0,087	0,089	0,091	0,085
16	Padang Lawas utara	0,075	0,083	0,084	0,085	0,086	0,082
17	Labuhan Batu	0,005	0,024	0,088	0,028	0,032	0,030
18	Asahan	0,015	0,036	0,035	0,033	0,034	0,031
19	Simalungun	0,084	0,101	0,102	0,101	0,103	0,099
20	Dairi	0,037	0,049	0,05	0,049	0,05	0,047
21	Karo	0,005	0,017	0,018	0,019	0,024	0,017
22	Deli Serdang	0,061	0,018	0,011	0,008	0,014	0,022
23	Langkat	0,025	0,044	0,044	0,039	0,041	0,041
24	Pakpak Barat	0,032	0,034	0,035	0,035	0,035	0,034
25	Serdang Bedagai	0,034	0,049	0,05	0,047	0,046	0,047
26	Batu Bara	0,227	0,184	0,185	0,181	0,157	0,188
27	Labuhan Batu Utara	0,023	0,004	0,002	0,005	0,004	0,008
28	Labuhan Batu Selatan	0,029	0,01	0,006	0,007	0,004	0,011
29	Tanjung Balai	0,009	0,004	0,011	0,013	0,018	0,010
30	Pematang Siantar	0,007	0,022	0,027	0,03	0,036	0,023
31	Tebing Tinggi	0,017	0,027	0,027	0,026	0,025	0,025
32	Medan	0,432	0,352	0,341	0,349	0,341	0,361
33	Binjai	0,007	0,007	0,006	0,001	0,004	0,006
	Sumatera Utara	0,059	0,058	0,059	0,058	0,058	0,058

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Bila dilihat dari disparitas pendapatan dengan metode indeks williamson terlihat bahwa Kota Medan merupakan Kab/kota yang memiliki disparitas pendapatan paling tinggi yakni 0,361 disusul oleh Kabupaten Batu Bara sebesar 0,188. Adapun Kab/Kota yang memiliki disparitas pendapatan rendah yakni Kota Binjai sebesar 0,006 dan disusul oleh Kabupaten Toba Samosir sebesar 0,007.

e. Perkembangan kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mengalami trend positif. Pada tahun 2010 angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mencapai 11,31 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.490.900 jiwa, 10,41 persen pada tahun 2012 dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 mencapai 9,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.360.600 jiwa.



Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara

Grafik. 2.4
Perkembangan Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara 2010 – 2015

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

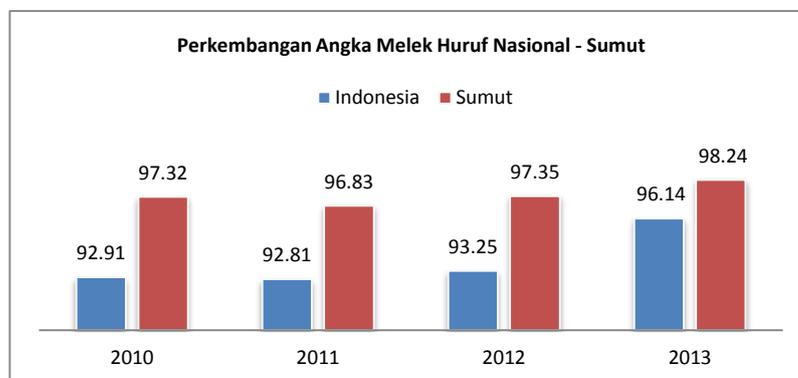
1) Bidang pendidikan

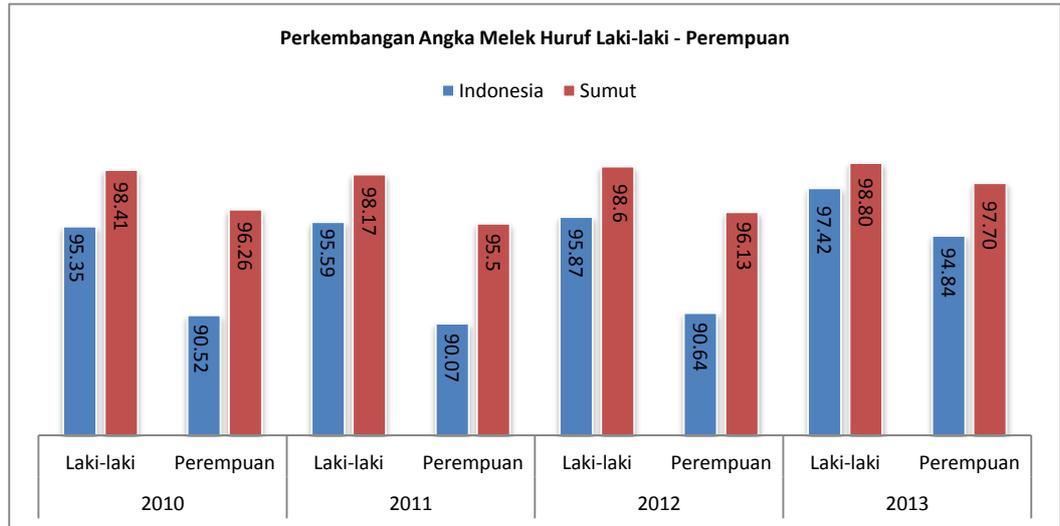
a. Angka melek huruf

Perkembangan antar waktu Angka Melek Huruf (AMH) Sumatera Utara dibandingkan capaian Nasional selama periode 4 (empat) tahun terakhir sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 secara umum mengalami tren positif (efektif). Capaian Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 yang mencapai 97,32 persen, berada di atas capaian Nasional pada tahun yang sama mencapai 92,91 persen. Kondisi ini terus berlangsung hingga tahun 2013, dimana capaian Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara mencapai 98,24 persen tetap berada di atas capaian Nasional yang mencapai 96,14 persen.

Perkembangan Angka Melek Huruf di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 – 2013 bila dilihat dari komposisi laki-laki dan perempuan, berada di atas capaian nasional dan didominasi oleh laki-laki dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 98,80 persen sedangkan perempuan mencapai 97,70 persen, sebagaimana grafik berikut :

Grafik
Perkembangan Angka Melek Huruf Sumatera Utara

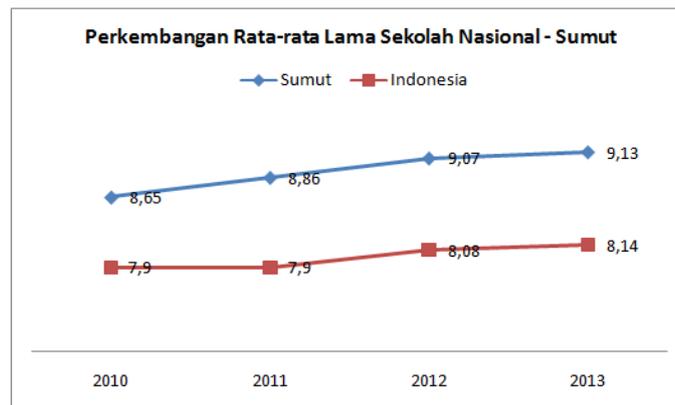




Sumber : <http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/Pages/DataSurvey/Susenas/Pendidikan/AMH/Nasional.aspx>

b. Angka rata-rata lama sekolah

Capaian Angka Lama Sekolah rata-rata Provinsi Sumatera Utara, mengalami trend positif dengan peningkatan sejak tahun 2008 (8,5 tahun), 2009 (8,6 tahun), 2010 (8,8 tahun), 2011 (8,8 tahun) hingga tahun 2012 telah mencapai 9,1 tahun.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

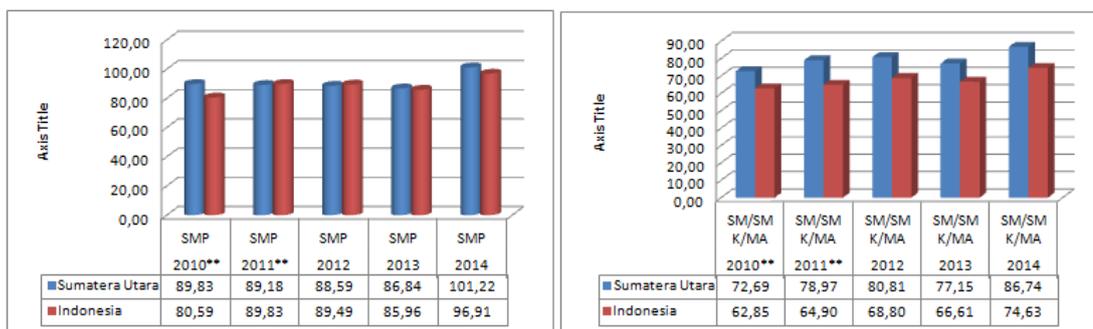
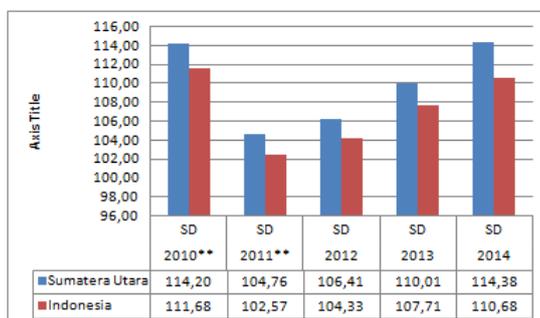
Grafik 2.5
Angka Rata-Rata Lama Sekolah

c. Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sumatera Utara mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) secara umum mengalami trend positif hal ini dikarenakan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2010 – 2014 terus berada di atas capaian Nasional.

Pada tahun 2010, capaian APK Sekolah Dasar (SD) Provinsi Sumatera Utara sebesar 114,20 persen, berada di atas capaian Nasional pada tahun yang sama sebesar 111,68 persen. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sumut 89,63 persen sedangkan Nasional 80,59 persen, APK SMA Sumut 72,68 persen sedangkan Nasional 62,85 persen. Trend positif ini terus membaik hingga tahun 2014 APK SD Sumut (114,38 persen), SMP (101,22 persen), SMA (86,74 persen), sedangkan capaian

Nasional untuk APK SD (110,68 persen), SMP (96,91 persen) dan SMA (74,63 persen), sebagaimana grafik berikut :



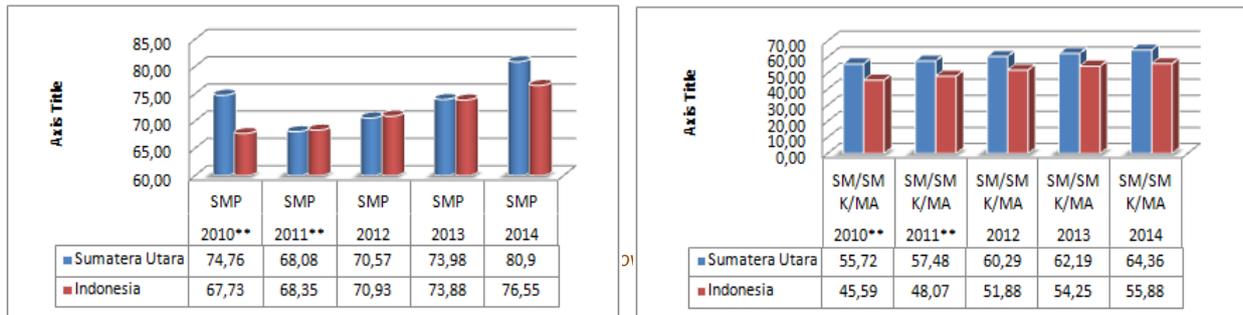
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Grafik. 2.6
Angka Partisipasi Kasar Provinsi Sumatera Utara

e. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Utara mengalami trend positif dengan peningkatan di seluruh jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMTA). Pada tahun 2010, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 95,33 persen, SMP (74,76 persen), SMTA (55,72 persen). Pada tahun 2011, APM SD (91,61 persen), SMP (67,05 persen), SMTA (55,34 persen). Hingga pada tahun 2012 APM untuk tingkat SD (93,26 persen), SMP (70,51 persen) dan SMTA (60,02 persen). Secara umum persentase Angka Partisipasi Murni (APM) di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan, namun masih terlihat adanya penurunan APM untuk jejang Sekolah Dasar (SD), hal ini menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat Sumatera Utara untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Disamping masih terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka pencapaian sasaran pendidikan di Sumatera Utara yakni Wajib Belajar 12 tahun dan untuk mewujudkan industrialisasi di Provinsi Sumatera Utara diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki pendidikan dan keahlian yang memadai atau minimal tamat Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA) khususnya dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).



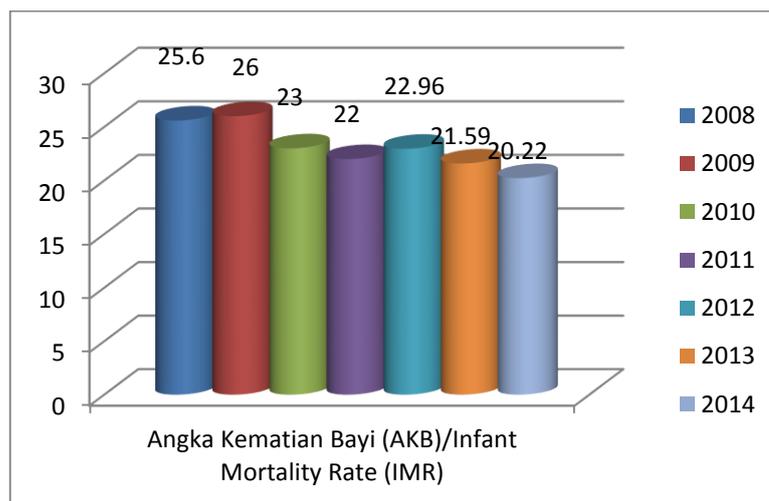
Sumber :

Grafik. 2.7
Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Utara

2) Bidang Kesehatan

Capain Indikator utama bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara, Indikator Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara per 1.000 kelahiran hidup cenderung mengalami perbaikan dari tahun ketahun. Sejak tahun 2008 dari 25,6 kematian bayi per 1.000 KH telah dapat diturunkan menjadi 20,22 kematian bayi per 1.000 KH, seperti terlihat pada grafik berikut :

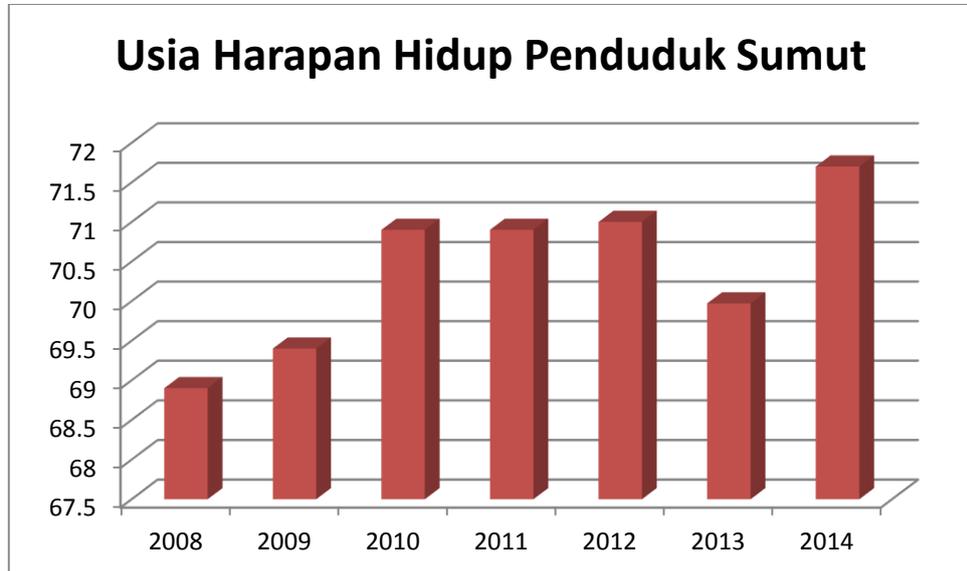


Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, data diolah

Grafik. 2.8
Jumlah Angka Kematian Bayi

a. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup penduduk Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 68,9 tahun pada tahun 2008 menjadi 69,65 tahun pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 telah mencapai 69,81 tahun dan pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 71,7 Tahun sebagaimana tertera pada grafik berikut:



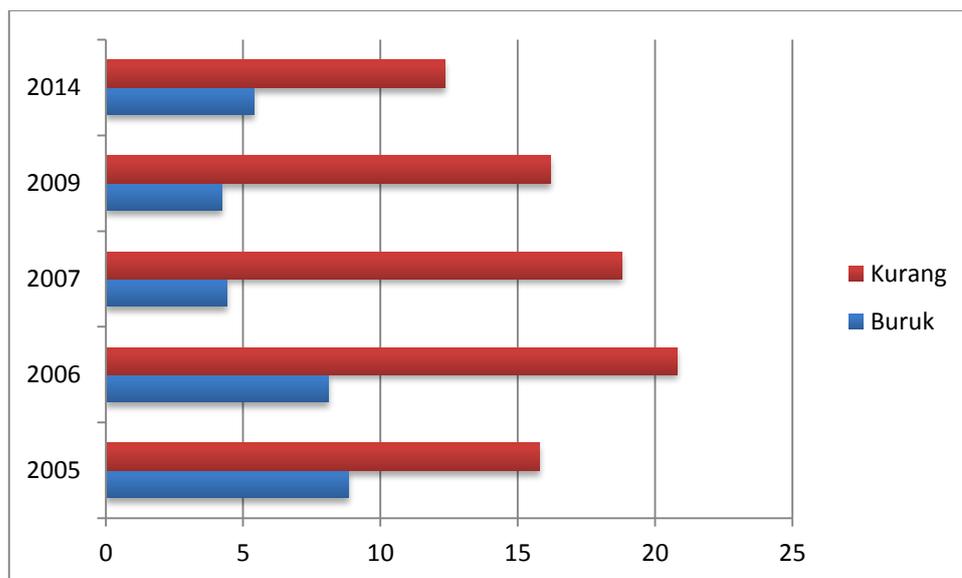
Grafik Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara 2008-2012
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Grafik. 2.9
Jumlah Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara

b. Persentase Balita Gizi Buruk

Status Gizi Balita merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa karena status gizi anak akan mempengaruhi tingkat kesehatan fisik dan kecerdasan anak yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat produktivitas secara ekonomis.

Data Kementerian Kesehatan RI (Riskesmas, 2010), Provinsi Sumatera Utara masih tergolong provinsi dengan angka kekurangan gizi balitanya diatas angka rata-rata nasional yakni 21,4 sementara angka rata-rata nasional 17,9, meskipun secara umum persentase gizi kurang dan buruk di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami penurunan. Meskipun demikian status gizi balita berdasarkan Berat Badan per umur menunjukkan bahwa Prevalensi buruk-kurang (underweight) provinsi Sumatera Utara, jika dibandingkan dengan angka prevalensi buruk-kurang secara nasional maka pada tahun 2013 angka prevalensi buruk-kurang di provinsi Sumatera Utara (22,4 persen yang terdiri dari 8,3 persen gizi buruk dan 14,1 gizi kurang) lebih tinggi 2,8 persen dibandingkan dengan angka prevalensi buruk-kurang nasional (19,6 persen) (Riskesmas 2013)



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.10

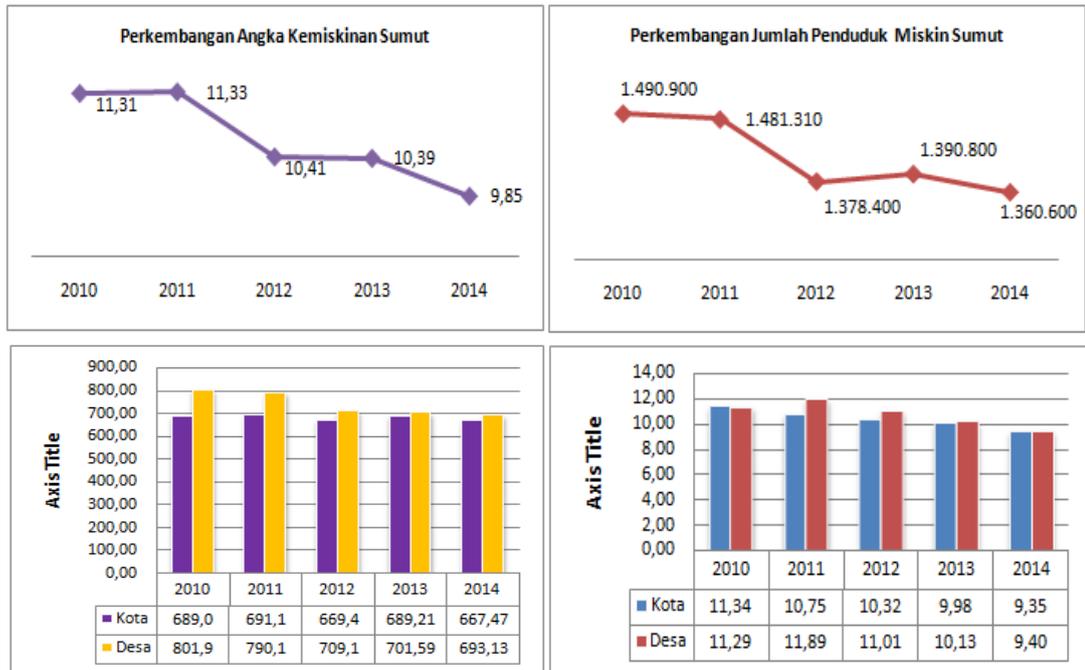
Persentase Gizi Kurang dan Buruk Provinsi Sumatera Utara 2007-2013

3) Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja

a. Persentase Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sejak tahun 2010 – 2014 mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Pada tahun 2010, angka kemiskinan di Sumatera Utara mencapai 11,31 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 1.490.900 orang. Kondisi ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2014, angka kemiskinan Sumatera Utara telah mencapai 9,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.360.600 orang.

Untuk sebaran penduduk miskin di Sumatera Utara, cenderung terfokus di wilayah perkotaan. Pada tahun 2010 sebaran penduduk miskin di Sumatera Utara wilayah perkotaan mencapai persentase sebesar 11,34 persen lebih rendah dari wilayah perdesaan sebesar 11,29 persen. Kondisi ini terus mengalami penurunan dengan tetap terfokus pada wilayah perkotaan. Namun pada tahun 2014, terjadi perpindahan fokus kemiskinan di Sumatera Utara, dimana wilayah perdesaan menjadi fokus penduduk miskin dengan capaian sebesar 9,40 persen di atas capaian fokus penduduk miskin wilayah perkotaan sebesar 9,35 persen. Hal ini merupakan bagian percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dimulai dari daerah-daerah kantong kemiskinan di desa-desa.



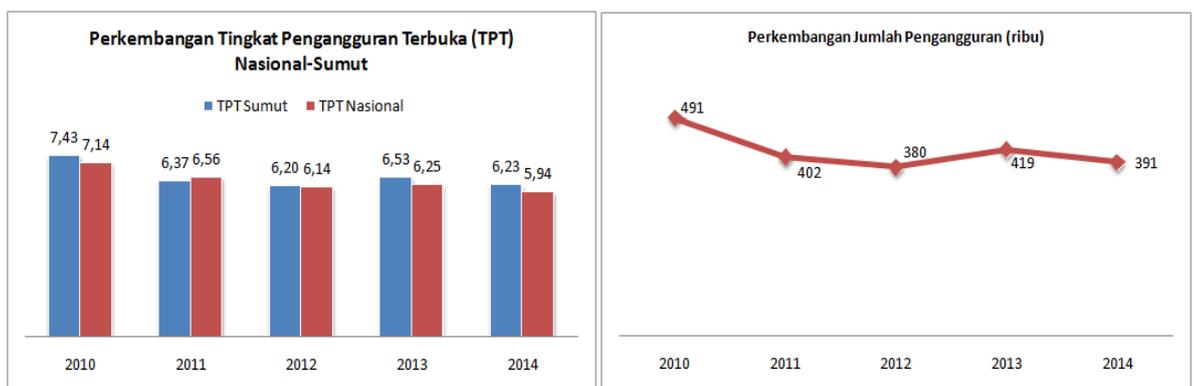
Sumber: Publikasi BPS

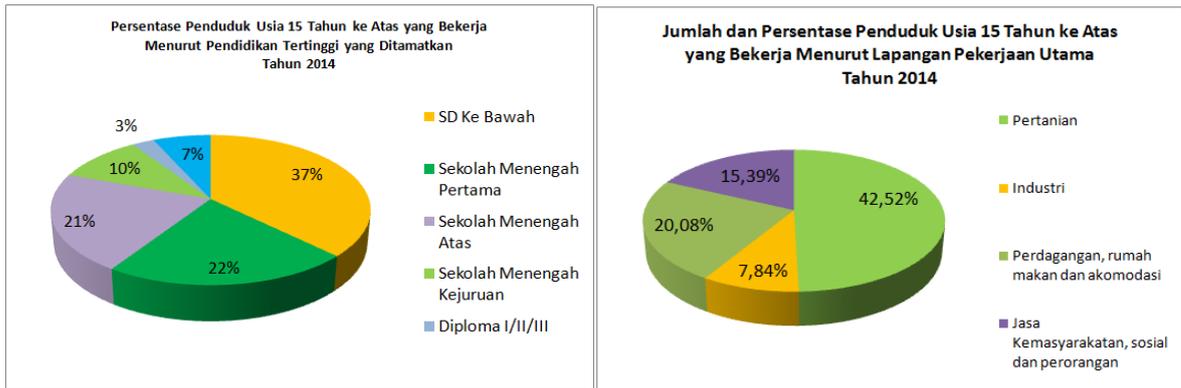
Grafik. 2.11
Perkembangan Angka dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014

b. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

seorang yang tidak mempunyai pekerjaan) secara umum capaian Sumatera Utara berada di atas Nasional. Sejak tahun 2010 – 2014 Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara terus berada di atas capaian Nasional. Hingga tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara telah mencapai 6,23 persen, berada di atas nasional pada tahun yang sama sebesar 5,94 persen dengan jumlah pengangguran mencapai 391 ribu orang, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2013) yang mencapai 419 penganggur.

Domikasi pekerjaan bila dilihat dari besaran jumlah penduduk usia 15 tahun yang bekerja pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) mencapai 37 persen, Sekolah Menengah Pertama 22 persen, Sekolah Menengah Atas 21 persen, Sekolah Menengah Kejuruan 10 persen dan Perguruan Tinggi 10 persen dengan fokus pekerjaan pada sektor pertanian yang mencapai 42,52 persen, kemudian disusul oleh sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi (20,08 persen), sektor Jasa 15 persen dan Industri 7 persen.





Sumber: Publikasi BPS

Grafik 2.12

Perkembangan Kondisi Ketenaga Kerjaan Provinsi Sumatera Utara

c. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)

Kondisi keamanan di Provinsi Sumatera Utara dilihat dari angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.21. Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

Kasus	2012	
	Kejadian	Kejadian
Pembunuhan	152	152
Penganiayaan Berat	3.892	3.892
Penculikan	18	18
Pencurian dengan Kekerasan	1.145	1.145
Pencurian dengan Pemberatan	7.198	7.198
Pencurian Ranmor	7.232	7.232
Pencurian Kawat Telepon	5	5
Pemeriksaan	217	217
Pembakaran	142	142
Senpi/Handak	29	29
Pemerasan	619	619
Penyelundupan	15	15
Jumlah	20.659	20.659

Sumber : Polda Sumut, 2014

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pencapaian kinerja pada aspek layanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terdiri dari :

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Hasil capaian kinerja layanan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari :

2.1.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah 38 relative besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan. Di satu pihak, di wilayah perkotaan umumnya memiliki sekolah yang berkualitas dengan biaya pendidikan yang relative mahal dan dikelola secara mandiri.

Dipihak lain, beberapa daerah masih terfokus pada peningkatan cakupan, atau masih berkuat pada peningkatan kualitas.

Persentase Angka Buta Huruf Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun 2010 – 2014. Dimana pada tahun 2010 Angka Buta Huruf Sumatera Utara mencapai 2,68 persen, 2011 sebesar 3,17 persen, tahun 2012 mencapai 2,65 persen dan tahun 2013 mencapai 2,19. Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan Sumatera Utara dalam mengentaskan buta aksara di Provinsi Sumatera Utara.

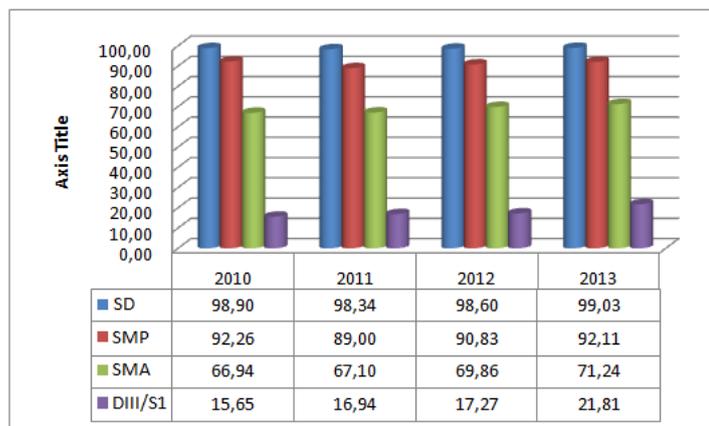
Tabel 2.22
Capaian Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Utama Bidang Pendidikan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Buta Huruf					
Usia >15 tahun	2,68	3,17	2,65	2,19	-
Usia 15-44 tahun	0,51	1,66	1,11	0,90	-
Usia >45 tahun	7,65	6,85	6,41	5,09	-
Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
Usia <7-12 Tahun)	98,9	98,33	98,59	99,03	-
Usia <13-15 Tahun)	92,26	89,1	90,85	92,11	-
Usia <16-18 Tahun)	66,94	67,54	69,73	71,24	-
Usia <19-24 Tahun)	15,65	16,42	17,36	21,81	-
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
SD/MI/Paket A	114,20	104,56	106,26	110,1	114,38
SMP/Mts/Paket B	89,83	89,02	88,55	86,84	101,22
SMA/SMK/MA/Paket C	72,69	79,69	80,58	77,15	86,74
Angka Partisipasi Murni (APM)					
SD/MI/Paket A	95,33	91,46	93,26	95,64	93,59
SMP/Mts/Paket B	74,76	67,96	70,51	73,98	80,9
SMA/SMK/MA/Paket C	55,72	57,83	60,02	62,19	64,36

Sumber : BPS Indonesia

a. Angka partisipasi sekolah (APS)

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 – 2013 dari jenjang sekolah SD – DIII/S1 secara umum mengalami trend positif. Dimana pada tahun 2010 Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 98,90 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2013 (99,03 persen). APS tingkat SMP pada tahun 2010 (92,26 persen) mengalami penurunan pada tahun 2013 (92,11 persen). APS jenjang SMA pada tahun 2010 (66,94 persen) mengalami kenaikan pada tahun 2013 (71,24 persen) dan APS DIII/S1 pada tahun 2010 (15,65 persen) mengalami kenaikan pada tahun 2013 (21,81 persen). Namun bila melihat partisipasi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga ke Perguruan Tinggi (DIII/S1) masih terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya keinginan masyarakat di Sumatera Utara untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.



Sumber :

Grafik. 2.13
Persentasi Partisipasi Sekolah Provinsi Sumatera Utara

b. Ratio Ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas pada berbagai jenjang pendidikan dasar

Tabel. 2.23
Ratio ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas
Pada berbagai jenjang pendidikan tahun 2010-2014

NO	Jenjang Sekolah	Tahun				
A.	Jumlah Gedung Sekolah	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD	8,050	10,292	8,172	9432	9483
2	SMP	1,873	2,230	2,040	2357	2388
3	SMA	861	950	869	868	1002
4	SMK	681	834	678	678	919
B.	Jumlah Ruang Kelas					
1	SD	48.005	68,268	61,255	84481	61200
2	SMP	26.997	17,010	17,807	19202	19495
3	SMA	7.745	9,445	9,188	8325	9426
4	SMK	5.777	6,639	6,467	7223	8085
C.	Ratio Kelas/Sekolah					
1	SD	5.96	6.63	7.49	8.95	6,45
2	SMP	14.40	7.62	8.72	8.15	8,16
3	SMA	8.99	9.94	10.57	9.6	9,4
4	SMK	8.48	7.96	9.53	8.72	8,79

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014 (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penambahan jumlah gedung sekolah, ditingkat SMP, SMA dan SMK selama tahun 2010-2014 Pada jenjang sekolah dasar pada tahun 2008 terjadi penggabungan beberapa sekolah dasar karena berkurangnya jumlah murid pada beberapa sekolah.

c. Jumlah Guru dan murid dan Rasio Guru/Murid pada berbagai Jenjang Pendidikan Dasar

Tabel. 2.24
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2010-2014 Provinsi Sumatera Utara

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	94.441	102.510	99.927	122.128	112.267
1.2.	Jumlah Murid	1.959.265	1.287.472	1.656.909	1.518.184	1.791.663
1.3.	Rasio	22%	24%	17%	12%	15,96%
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	59.002	45.951	57.563		51.799
2.2.	Jumlah Murid	428.575	569.581	552.761		650.748
2.3.	Rasio	12	12	10		12,56%
3	SMA					
3.1.	Jumlah Guru	18.335	22.610	22.183	17.504	27.034
3.2.	Jumlah Murid	398.100	222.200	272.042	233.916	323.579
3.3.	Rasio	13	12	12	13%	11%
4	SMK					
4.1.	Jumlah Guru	11.726	16.019	18.374	14.178	24.146
4.2.	Jumlah Murid	300.092	220.074	234.983	228.809	267.406
4.3.	Rasio	20	30	13	16	11%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2014

Dari data diatas terlihat bahwa terjadi perkembangan yang fluktuatif pada Ratio Siswa/Guru. Angka ratio sudah cukup ideal antara 11-22 orang siswa untuk setiap orang guru. Untuk Ratio Guru/Murid pada jenjang SLTP dan SMA cenderung semakin membaik. Hanya pada jenjang SMK yang mengalami penurunan. Diharapkan dengan ratio jumlah guru/murid yang semakin ideal akan lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

c. Rasio Pendidikan

Dilihat dari perbandingan jumlah siswa terhadap sekolah, perbandingan siswa terhadap jumlah kelas, perbandingan siswa terhadap jumlah guru, perbandingan jumlah kelas terhadap jumlah sekolah, perbandingan jumlah kelas terhadap guru dan perbandingan jumlah guru terhadap sekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.25
Ratio Jenjang Pendidikan/Rasio Pendidikan
Tahun 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan/ Rasio Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD					
	Siswa / Sekolah	2.15	1.99	202	161	188,93
	Siswa / Kelas	30	32	27	18	29,27
	Siswa / Guru	18	17	17	12	15,96
	Kelas / Sekolah	7.15	6.19	7.49	9	6,45
	Kelas / Guru	0.61	0.53	0.61	0.69	0,54
	Guru / Sekolah	12	12	12	13	11,84
2	SMP					
	Siswa / Sekolah	3.09	2.48	279	235	272,5
	Siswa / Kelas	36	29	32	29	33,38

No	Jenjang Pendidikan/ Rasio Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Siswa / Guru	15	13	12	10	12,56
	Kelas / Sekolah	8.59	8.66	8.72	8.15	8,16
	Kelas / Guru	0.41	0.44	0.39	0.33	0,37
	Guru / Sekolah	21	19	22	24	21,69
3	SMA					
	Siswa / Sekolah	0.43	3.08	313	269	322,93
	Siswa / Kelas	35	34	30	35	34,32
	Siswa / Guru	12	11	12	13	11,97
	Kelas / Sekolah	9.69	9.12	10.57	1	9,40
	Kelas / Guru	0.34	0.33	0.41	0.38	0,34
	Guru / Sekolah	28	27	26	20	26,98
4	SMK					
	Siswa / Sekolah	0.57	3.41	346	276	290,97
	Siswa / Kelas	39	35	36	28	33,07
	Siswa / Guru	12	13	13	16	11
	Kelas / Sekolah	9.18	9.78	9.53	9.6	8,79
	Kelas / Guru	0.3	0.37	0.35	0.5	0,33
	Guru / Sekolah	30	26	27	17	26,27

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Dari data diatas terlihat bahwa Ratio Siswa/Guru sudah cukup ideal antara 11-20 orang siswa untuk setiap orang guru, namun belum terjadi pemerataan pada semua Kabupaten/Kota. Dengan tercapainya ratio ideal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara.

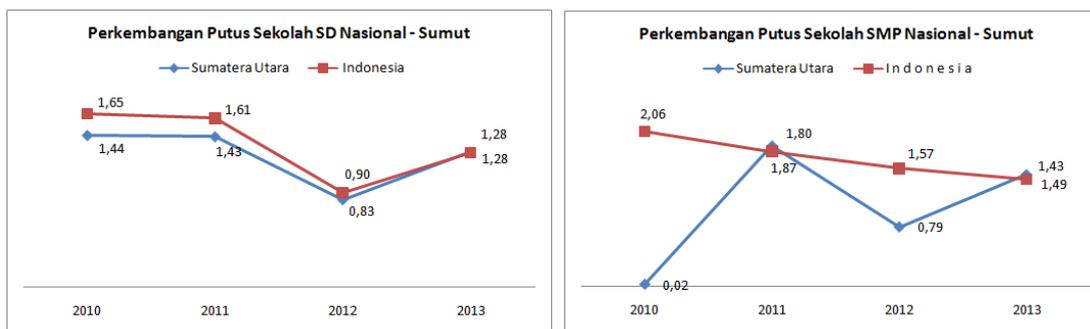
d. Fasilitas pendidikan

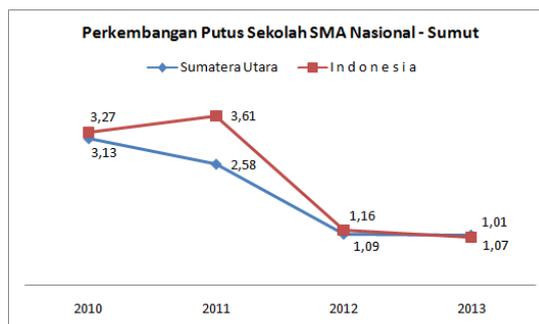
Dari data jumlah sekolah yang ada di Sumatera Utara pada tahun 2011, tercatat jumlah ruang kelas dalam kondisi baik berjumlah 54.986 buah (63.50%), kondisi rusak ringan berjumlah 16.484 (19.04%) dan kondisi rusak berat berjumlah 15.121 (17.46%). Hal ini menuntut adanya penanganan segera agar target indikator pendidikan dapat tercapai.

e. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Utara masih memperlihatkan trend negatif, karena capaian Angka Putus Sekolah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 - 2013 terus berada di atas capaian Nasional, sebagaimana grafik berikut :

Tabel 2.23.
Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dasar 2010-2013





Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

f. Angka Kelulusan

Tabel 2.26.
Perkembangan Angka Kelulusan pada berbagai jenjang pendidikan dasar 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
1	SD	205.289	506.881	237.821	286.681
2	SMP	171.304	172.973	148.873	282.212
3	SMA	91.717	98.199	75.413	117.254
4	SMK	60.513	57.987	40.172	-

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah kelulusan siswa pada berbagai tingkatan, selama tahun 2010-2014, hal ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi peserta didik dalam menjalani pendidikannya disekolah. Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang.

Tabel 2.27.
Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi

No	Jenjang Pendidikan Guru Sekolah	Tahun									
		2010		2011		2012		2013		2014	
		S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2
1	SD	204.006	65	22.446	71	40.605	192	55.764	447	71.369	703
2	SMP	21.825	148	24.007	162	36.170	358	34.141	912	32.824	1.001
3	SMA	15.290	364	16.819	400	22.183	736	17.881	1.396		
4	SMK	10.013	90	11.014	99	15.531	739	11.063	399		
	Jumlah	251.134	667	74.286	732	114.489	2.025	118.849	3.154		

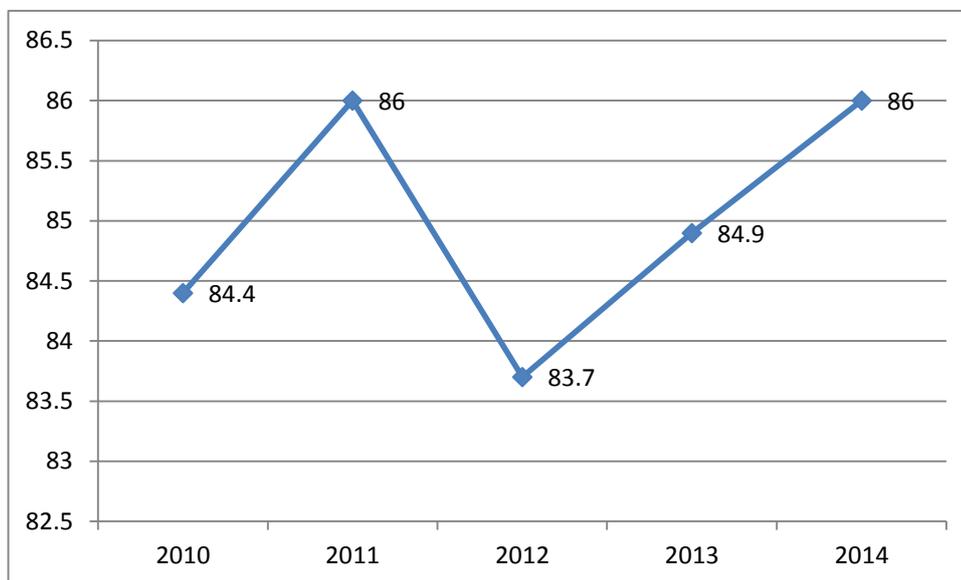
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Pemerintah provinsi Sumatera Utara secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi dan pemberian beasiswa untuk peningkatan jenjang pendidikan guru dari S0 ke S1 dan dari S1 ke jenjang S2. Dari data diatas terlihat peningkatan jumlah yang cukup signifikan sehingga dalam lima tahun terakhir (2009-2013) terjadi peningkatan kualifikasi guru berpendidikan S2.

2.1.3.1.2. Kesehatan

Pencapaian kinerja Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2014 dapat digambarkan dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 sebagai berikut:

1. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan



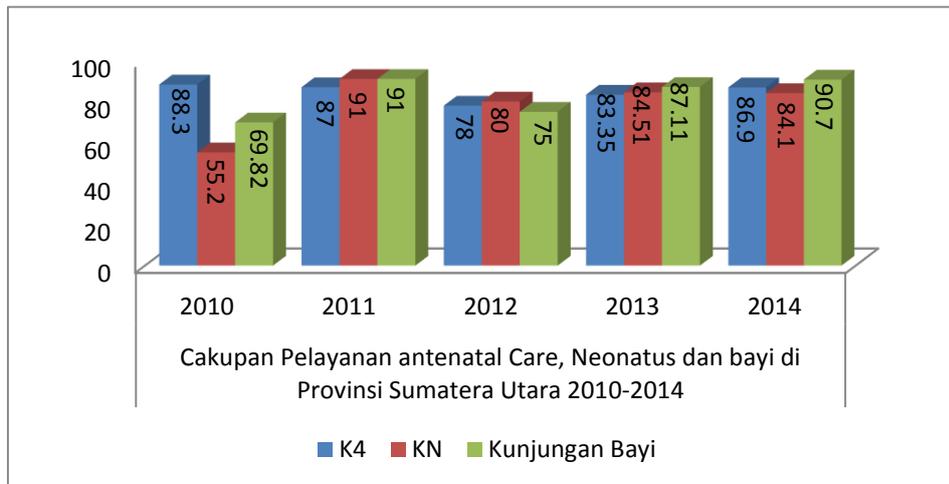
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2010-2014

Grafik. 2.14
Persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan
Tahun 2010-2014

Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu 2010-2014 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2010, cakupan indikator ini mencapai 84,4 persen dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 84,9% pada tahun 2013 menjadi 86% pada tahun 2014. Diharapkan pada Tahun 2015 dapat dicapai menjadi 87%.

2. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan kunjungan bayi

Kunjungan antenatal care (K4) di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari 78% pada tahun 2012 menjadi 84,10% pada tahun 2014, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan (90%). Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3) dan kunjungan bayi masing-masing sebesar 86,90% dan 90%, mencapai target yang telah ditetapkan.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2010-2014

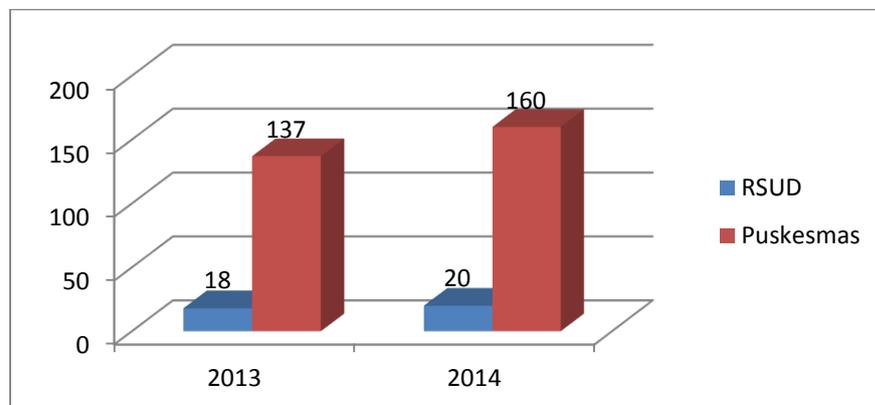
Grafik. 2.15

Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus(KN Lengkap) dan Kunjungan Bayi Tahun 2010 - 2014

3. Sumber daya kesehatan pada Pelayanan kesehatan dasar dan Rujukan

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan didukung dengan ketersediaan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014, terdapat 211 Rumah Sakit (RS), terdiri dari 35 RS pemerintah, 3 RS Khusus Pemerintah, 10 RS TNI/Polri, 13 RS BUMN, 30 RS Khusus swasta dan 120 RS swasta, serta tersedia 570 unit Puskesmas dan 1.992 unit Puskesmas Pembantu.

Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONEK berjumlah 160 Puskesmas, meningkat dibandingkan dengan jumlah tahun 2013 (140 Puskesmas). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS sebanyak 20 RS, dan terdapat 9 RSUD yang telah menjadi PPK-Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

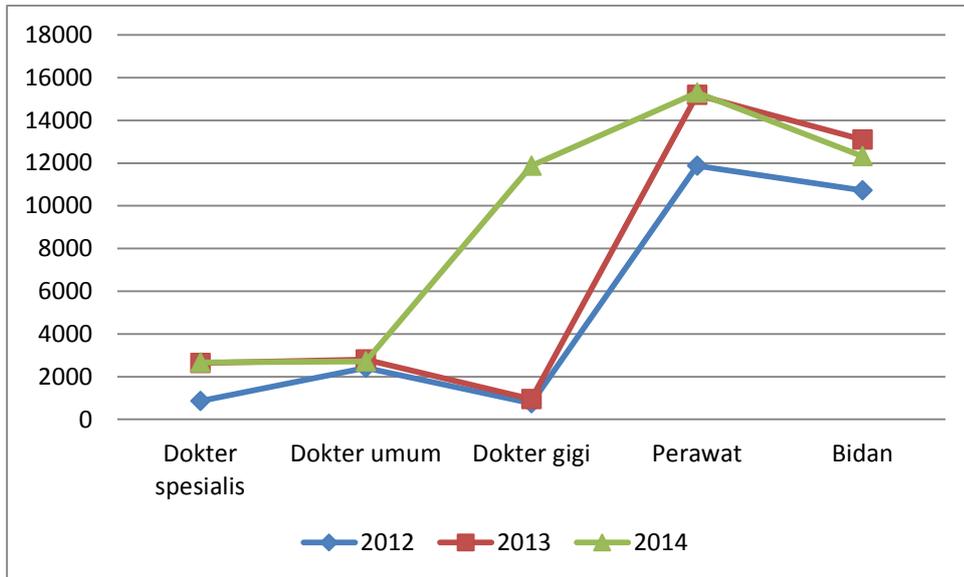


Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2014 (data diolah)

Grafik. 2.16

Jumlah RSUD mampu PONEK dan Puskesmas mampu PONEK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2014

Tenaga medis yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut : tenaga dokter spesialis meningkat dari 855 orang menjadi 2.672 orang; dokter umum meningkat dari 2.405 orang menjadi 2.705 orang; dokter gigi meningkat dari 746 orang menjadi 964 orang; perawat meningkat dari 11.876 orang menjadi 15.292 orang; dan bidan meningkat dari 10.723 orang menjadi 12.326 orang.

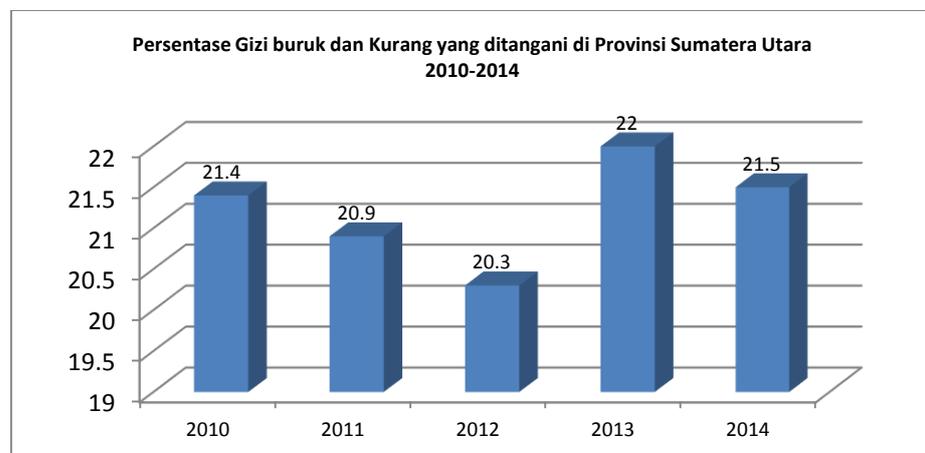


Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2014

Grafik. 2.17
Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2014

4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Pada tahun 2014, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 21,5 balita dan keseluruhan balita yang mengalami gizi buruk tersebut mendapatkan penanganan (100%). Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan mendapatkan penanganan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 (22 kasus).

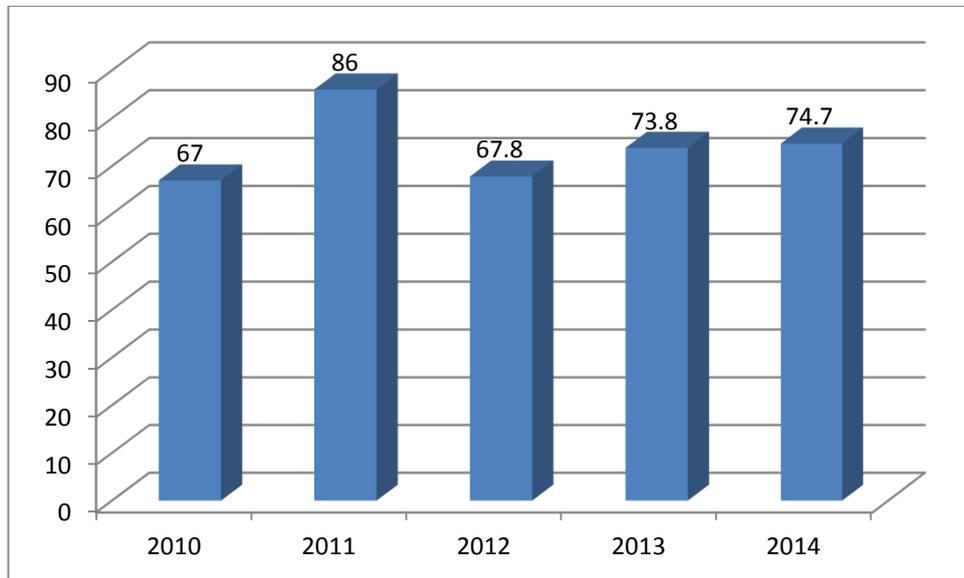


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Grafik. 2.18
Persentase Gizi Buruk dan Kurang yang ditangani di Provinsi Sumatera Utara 2010-2014

5. Desa/kelurahan *Universal Child Immunization*

Persentase desa yang mencapai UCI di Sumatera Utara mengalami fluktuatif 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2010 sampai tahun 2014. Pada tahun 2010 persentase Desa UCI mencapai 67 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2011, namun pada Tahun 2014 naik menjadi 74,7 persen namun masih dibawah target Provinsi tahun 2014 (80%)



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014

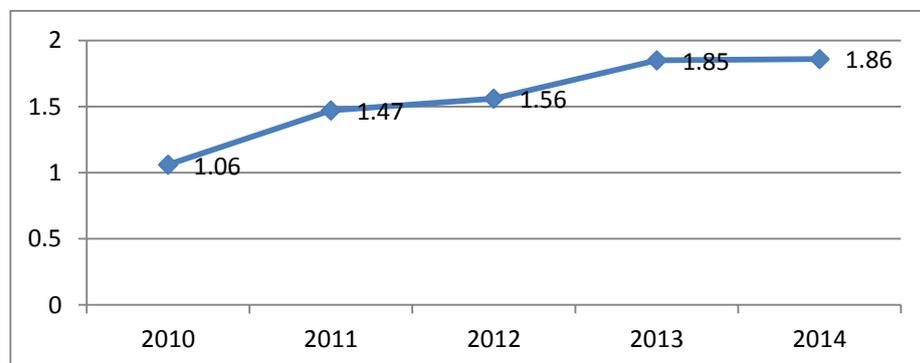
Grafik. 2.19

Persentase Desa UCI di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014

Persentase pencapaian desa UCI di Provinsi Sumatera Utara yang masih dibawah rata-rata nasional disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor supply side immunisasi, belum maksimalnya peran tenaga kesehatan yang bekerja di desa, revitalisasi posyandu yang belum maksimal.

6. Case Fatality Rate (CFR) Diare pada saat KLB (Kejadian Luar Biasa)

Pada tahun 2014 telah terjadi KLB diare di 5 Kab/Kota, yaitu di Kabupaten Padang Lawas 2 kali, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Mandailing Natal. Angka CFR Diare cenderung meningkat , dan masih diatas target nasional Tahun 2014 (kurang dari 1,2%)



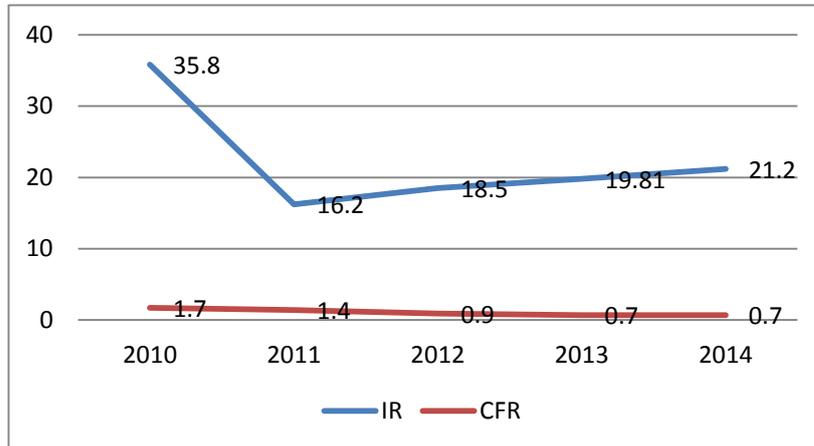
Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014

Grafik 2.20

Persentase Angka Kematian (CFR) akibat Diare pada KLB Tahun 2010-2014

1. Angka Kesakitan dan Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk

Program Pemberantasan DBD di Sumatera Utara terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu angka kesakitan (Incidence Rate/IR) dan angka kematian (Case Fatality Rate/CFR). Target Angka kesakitan (Insiden rate) Tahun 2014 DBD <50 per 100.000 penduduk, sedangkan CFR <1%.



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2010-2014

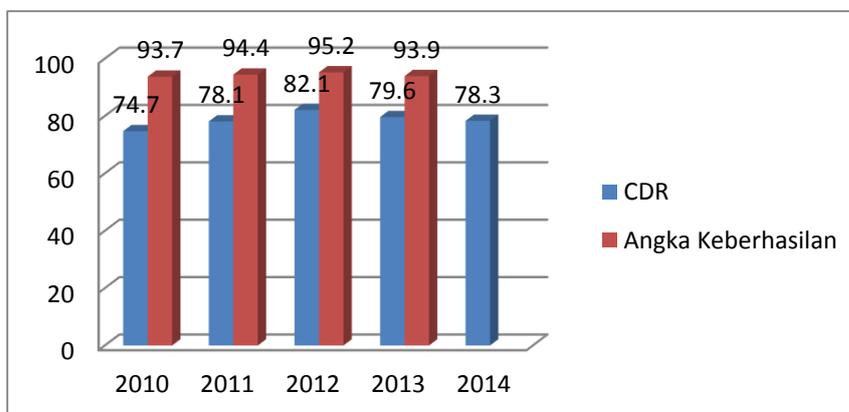
Grafik 2.21

Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2014

Angka kesakitan (IR) dan kematian (CFR) DBD per 100.000 penduduk kurun waktu 2010-2014 cenderung berada dibawah target Provinsi Sumatera Utara, meskipun dalam tiga tahun terakhir IR cenderung menurun namun CFR cenderung meningkat.

2. Angka Case Detection Rate (CDR) dan Keberhasilan Pengobatan TB

Angka CDR Penyakit TB atau Cakupan penemuan penderita TB Paru dilihat dari penemuan penderita TB Paru BTA+ yang berpotensi untuk terjadinya penularan di masyarakat. Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA+ kurun waktu 2010-2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2010-2014

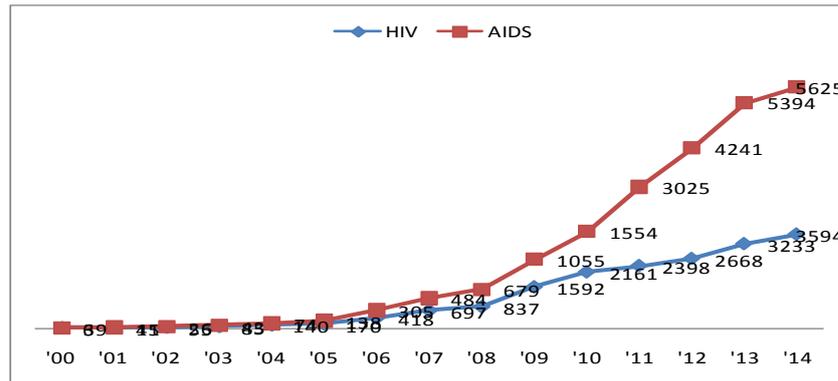
Grafik 2.22

Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014

Pada tahun 2014, jumlah kasus BTA+ yang ditemukan yaitu 16.659 kasus atau 78,3% dari estimasi kasus BTA+ yaitu 21.277 kasus; dan mampu mencapai target nasional yaitu 75% lebih rendah dari tahun 2013 (76,6%). Dari grafik terlihat bahwa cakupan penemuan penderita TB Paru BTA+ mengalami peningkatan selama kurun waktu 2010-2012, namun tahun 2013 dan 2014 CDR cenderung menurun ini terjadi karena terdapat Kab/Kota tidak mengirimkan laporan

3. ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART

Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara sejak tahun 1992 kasus tersebut ditemukan dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014

Grafik 2.23
Jumlah Kumulatif Kasus HIV/AIDS DI Sumut Tahun 2000 - 2014

Prevalensi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) mendapatkan pengobatan Anti-Retrovital Therapy (ART) meningkat dari 75% pada tahun 2013 menjadi 76% pada tahun 2014.

4. Persentase Ibu Hamil Positif yang mendapat ARV

Program Pencegahan penularan Penyakit HIV/AIDS dari ibu ke anak telah dibentuk 2 unit pelayanan PPIA dimana pada Tahun 2014 dari 130 orang ibu hamil HIV (+) yang masuk kelayanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) sebanyak 93 orang mendapatkan obat ARV (72%).

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum

Beberapa capaian indikator bidang pekerjaan umum sampai dengan tahun 2014, antara lain [proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik](#), [rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik](#), [Persentase rumah tinggal bersanitasi](#), [rasio rumah layak huni](#), [persentase rumah tangga pengguna air bersih](#), [persentase rumah tangga pengguna listrik](#).

- [Persentase rumah tinggal bersanitasi : 59,12 %](#)
- [Rasio rumah layak huni : 82,98 %](#)
- [persentase rumah tangga pengguna air bersih : 89,98 %](#)
- [Persentase rumah tangga pengguna listrik : 88,36 %](#)

- Bina Marga

Tabel 2.28
Proporsi Jalan Nasional Dalam Kondisi Mantap
Provinsi Sumatera Utara 2010-2014

	2010	2011	2012 (Akhir Tahun 2012)	2013 (Semester III Tahun 2013)	2014 (Semester II Tahun 2014)
Panjang Jalan (Km)	2.249,64	2.249,64	2.249,64	2.249,64	2.249,64
Kondisi Mantap (%)	77,69	81,59	87,30	81,51	80,30

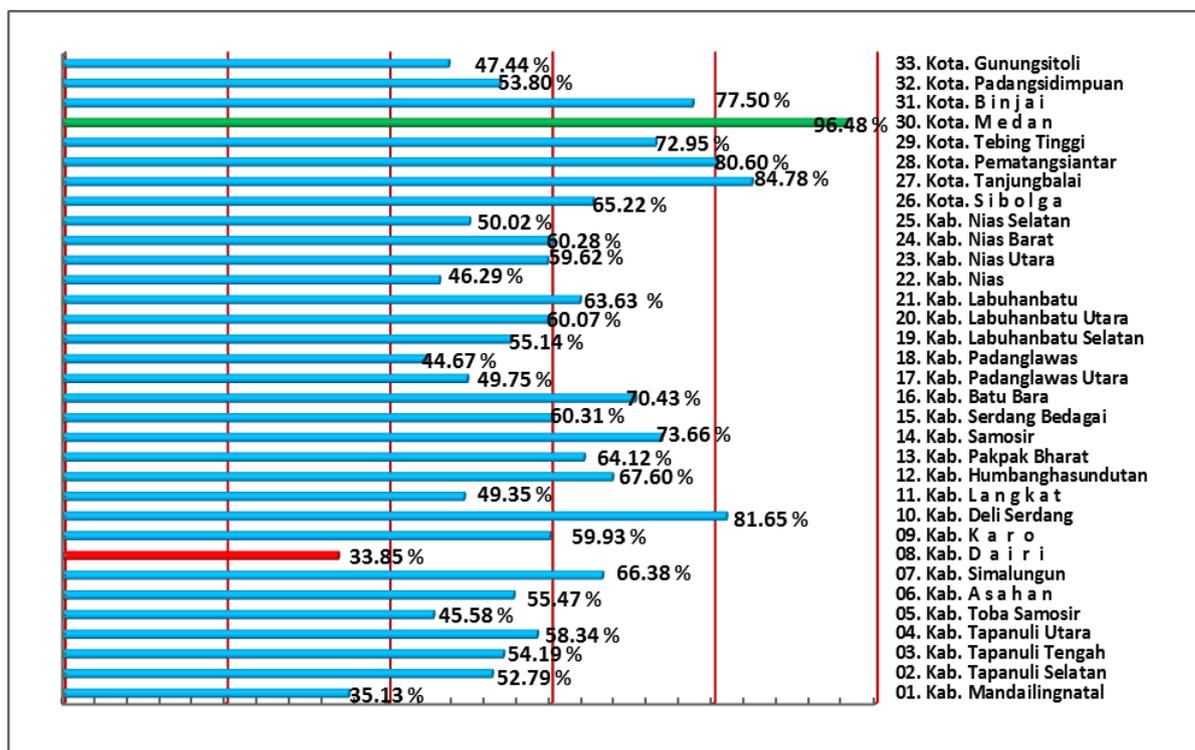
Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan

Tabel 2.29
Proporsi Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
Provinsi Sumatera Utara 2010-2014

	2010	2011	2012 (Awal Tahun 2012)	2013 (akhir Tahun 2013)	2014 (Akhir Tahun 2014)
Panjang Jalan (Km)	2.752,41	2.754,41	3.048,50	3.048,50	3.048,50
Kondisi Mantap (%)	73,71	75,52	66,59	69,60	74,42

Sumber : Dinas Bina Marga Provsu

Tabel 2.30
Diagram Kondisi Jalan Mantap di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014
(Status Jalan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota)



Sumber : Dinas Bina Marga Provsu

Tabel 2.31
Luas Irigasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

	2011	2012	2013	2014
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi layanan optimal	52.200	53.069	52.200	53.330
Luas Total	86.999	86.999	86.999	86.999
(%) layanan optimal	60	61	60	61,3

Sumber : Dinas PSDA Provsu

2.1.3.1.4. Penataan Ruang

Provinsi Sumatera Utara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang RTRW Provsu Tahun 2003 - 2018. Saat ini Perda dimaksud sedang direvisi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta untuk mengakomodir perkembangan terkini. Proses penyusunan dan pembahasan revisi RTRW Provsu tersebut telah dimulai pada tahun 2008 dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pada Juli 2010 Gubernur telah menyampaikan Raperda RTRW Provsu ke DPRD Provsu. Kemudian DPRD Provsu membentuk Badan Legislasi Daerah (Balegda) dan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Setelah melalui Balegda, selanjutnya DPRD Provinsi Sumatera Utara membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dimana saat ini Raperda RTRW Provsu dimaksud sedang dibahas oleh Pansus Tata Ruang.

Kegiatan Pembahasan dengan Pansus Tata Ruang DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 dilakukan dengan mengadakan pertemuan/konsultasi publik ke kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara guna membahas hal-hal untuk dijadikan masukan maupun muatan terhadap substansi dari materi draft Raperda RTRW Provsu. Kabupaten/kota yang berjumlah 33 tersebut kemudian dibagi ke dalam 6 (enam) zona dan masukan-masukan yang didapatkan telah didokumentasikan untuk dibahas bersama Pansus RTRW DPRD Provinsi Sumatera Utara, tenaga ahli dan BKPRD Provinsi Sumatera Utara untuk dimuat di draft Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2013 bersama Panitia Khusus Tata Ruang DPRD Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dan menghasilkan Persetujuan Bersama antara Gubernur dengan DPRD Nomor 07/K/2013 dan 188.44/669/KPTS/2013 Tanggal 9 September 2013 tentang persetujuan bersama terhadap 4 (empat) rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2033, Raperda tentang PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara, Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Raperda Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Mempedomani amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, khususnya pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, terlebih dahulu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Rancangan Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034, yang telah mendapat kesepakatan Bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, tanggal 6 November 2013 kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Selanjutnya disampaikan bahwa menindaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara, oleh Ditjen. Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 16 November 2013 di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah diterbitkan hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034 melalui Keputusan

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 650-1650 Tahun 2014.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 579 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, sebagai rangkaian proses revisi Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka telah dilakukan proses integrasi Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 579 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara ke dalam Rencana Pola Ruang Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034 serta ke dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pusat data geospasial di Provinsi Sumatera Utara, sejak Tahun 2012 telah dimulai pembangunan Jaringan Pusat Data dan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Terkait status legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota, 16 (enam belas) Kabupaten/Kota telah memperdakan RTRW nya. Status legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut ini :

Tabel 2.32
Status Legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN / KOTA	STATUS
1	Kota Medan	PERDA NO. 13 TAHUN 2011
2	Kota Binjai	PERDA NO. 12 TAHUN 2011
3	Kota Gunung Sitoli	PERDA NO. 12 TAHUN 2012
4	Kabupaten Simalungun	PERDA NO. 10 TAHUN 2012
5	Kota Pematangsiantar	PERDA NO. 1 TAHUN 2013
6	Kota Tebing Tinggi	PERDA NO. 4 TAHUN 2012
7	Kota Tanjung Balai	PERDA NO. 2 TAHUN 2013
8	Kabupaten Serdang Bedagai	PERDA NO. 12 TAHUN 2013
9	Kabupaten Batubara	PERDA NO. 10 TAHUN 2013
10	Kabupaten Tapanuli Tengah	PERDA NO. 8 TAHUN 2013
11	Kabupaten Langkat	PERDA NO. 9 TAHUN 2013
12	Kabupaten Asahan	PERDA NO. 12 TAHUN 2013
13	Kabupaten Nias	PERDA NO. 1 TAHUN 2014
14	Kabupaten Dairi	PERDA NO. 7 TAHUN 2014
15	Kota Padangsidimpuan	PERDA No. 4 TAHUN 2014
16	Kabupaten Nias Utara	PERDA No. 1 TAHUN 2015
17	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
19	Kabupaten Nias Barat	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
20	Kabupaten Nias Selatan	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
21	Kota Sibolga	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
22	Kabupaten Labuhan Batu	Di Biro Hukum
23	Kabupaten Pakpak Bharat	Evaluasi Teknis
24	Kabupaten Mandailing Natal	Evaluasi Teknis
25	Kabupaten Humbang Hasundutan	Evaluasi Teknis
26	Kabupaten Tapanuli Utara	Evaluasi Teknis
27	Kabupaten Toba Samosir	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
28	Kabupaten Samosir	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
29	Kabupaten Padang Lawas	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
30	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur

32	Kabupaten Karo	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
33	Kabupaten Deliserdang	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara

2.1.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan, adalah sebagai berikut :

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 – 2015.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2020.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengendalian Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2020.

2.1.3.1.7. Perhubungan

Capaian Indikator bidang perhubungan antara lain adalah :

- Jumlah Pelabuhan Laut : **35 Pelabuhan**
- Bandar Udara : **8 Bandara**
- Terminal Bis : **40 buah**
- Angkutan darat : **3.927 unit (AKDP : 2.833 ; AKAP : 1.094)**

2.1.3.1.8. Lingkungan Hidup

Indikator lingkungan hidup antara lain dapat dilihat dari status mutu air dan kasus pencemaran air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, dan penegakan hukum lingkungan :

a. Status Mutu Air

Jumlah alokasi pelayanan status mutu air sungai dan danau di reseptor yang sensitif ditargetkan pada 6 lokasi, dan terealisasi 6 lokasi, dengan capaian kinerja 100%.

1) Sungai Deli

Status mutu air sungai deli di 7.sampling adalah status mutu air di 5 titik (Sibayakindo, Jemabatan Simalingkar B, Jembatan Jalan Ir. Juanda, Pertemuan antara Sungai Deli dan Sungai Babura, dan Jembatan Pulau Brayon) tergolong tercemar ringan. Status mutu air di 2 titik (PT. Unibis dan Jembatan Medan Labuhan) tergolong tercemar sedang.

- 2) Sungai Belawan
Status mutu air di 7 titik sampling (Jembatan Tuntungan, Pertemuan Sei Belawan-Sei Kriyo, PDAM Tirtanadi Medan, PT. Everbright, Pabrik gula Sei Semayang, PT. Rubber Hock Lie, Tirtanadi Hamparan Perak) pada sungai Belawan tergolong tercemar ringan.
 - 3) Sungai Asahan
Status mutu air Sungai Asahan di 6 titik sampling adalah status mutu air di 2 titik (Jembatan jalan Balige pasar Porsea, Jembatan Desa Meranti Pintu Pohan) tercemar ringan. Status mutu air di 2 titik (Titi Gantung-Deang-deang, Jembatan downstream PKS Pulau Raja) tergolong tercemar sedang. Status mutu air di 2 titik (Jembatan Kuning P. Simardan, Jembatan Tabayong, Desa Patembo) tergolong tercemar berat.
 - 4) Sungai Wampu
Status mutu air di 6 titik sampling (jembatan desa sogong, jembatan sei bahorok, jembatan desa tanjung lenggang, penyeberangan getek jumari desa perhiasan, jembatan jalan umar baki binjai, jembatan desa stabat) pada sungai wampu tergolong tercemar sedang
 - 5) Sungai Percut
Status mutu air sungai percut di 6 titik sampling adalah status mutu air di 2 titik (jembatan bukum desa cinta rakyat dan jembatan desa sari laba jahe) tergolong tercemar ringan. Status mutu air di 3 titik (jembatan desa aji baho batumbak, jembatan medan amplas dan jembatan desa bandar setia) tergolong tercemar sedang. Status mutu air di 1 titik (jembatan desa tembung) tergolong tercemar berat.
 - 6) Sungai Batahan
Status mutu air di 6 titik sampling (jembatan gantung desa batu, jembatan bitungan bejangkar baru/aerapa, jembatan bitungan bejangkar kampung, jembatan ramin tran-1, jembatan gantung simpang gordes, lubuk pusing) tergolong tercemar berat.
- b. Cakupan pelayanan Kasus-kasus lingkungan hidup
Target 100% capaian kinerja 59,38%
- Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima instansi Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam satu tahun sebanyak 32 kasus sedangkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti hanya 19 kasus. Capaian kinerja yang rendah disebabkan karena beberapa hal antara lain masih kurangnya koordinasi dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dalam melakukan tindaklanjut pengaduan kasus pencemaran dan atau kasus perusakan lingkungan sehingga beberapa kasus di Kabupaten/Kota tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu disebabkan karena kurangnya personil untuk menindaklanjuti kasus-kasus serta waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan proses penanganan kasus-kasus lingkungan.
- c. Cakupan terhadap Pelayanan AMDAL
Target 100%, capaian kinerja 100%.
Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 8 perusahaan dan dokumen yang sudah selesai/dalam proses dibahas oleh Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara Tahun 2014 sebanyak 8 dokumen.
- d. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
Telah dilakukan Analisa AMDAL, khususnya pada perusahaan besar di Sumatera Utara, sebanyak 19 dokumen dalam bentuk KA-ANDAL dan ANDAL/RKL-RPL, UKL-UPL dan DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, DPPL (Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup).
- e. Penegakan hukum lingkungan
Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan telah dilakukan melalui penanganan pengaduan masalah lingkungan, sebanyak 26(dua puluh enam) kasus pengaduan. 7 (tujuh) pengaduan terkait masalah pencemaran lingkungan telah diproses dengan melakukan verifikasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

2.1.3.1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebagai salah satu capaian indikator pemberdayaan perempuan memperlihatkan trend positif. Dimana pada tahun 2011 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 67,39 persen dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 2 persen sehingga pada tahun tersebut IPG Sumatera Utara telah mencapai 69,82 persen.

Capaian IPG Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar 69,82 persen ini tidak terlepas dari capaian beberapa indikator lain seperti keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun yang sama sebesar 17 persen, perempuan sebagai tenaga kerja profesional sebesar 51,62 persen dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja sebesar 35,64 persen.

Peningkatan peran serta perempuan pada bidang ketenaga kerjaan juga menunjukkan trend positif. Pada tahun 2013, persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 56,10 persen mengalami peningkatan sebesar 3,5 persen, dimana pada tahun 2012 persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Sumut hanya mencapai 60,85 persen.

Namun, peningkatan peran serta perempuan dalam berbagai sektor, tidak diikuti oleh upaya perlindungan terhadap perempuan, sehingga pada tahun 2013 telah ditemukan 20 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), angka ini mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya (2012) yang hanya mencapai 17 kasus kekerasan. Sehingga hal ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan.

2.1.3.1.10. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Indikator terkait dengan keluarga berencana dilihat dari rata-rata jumlah anak dalam keluarga menunjukkan penurunan dari 2,42 tahun 2007 menjadi 1,92 ada tahun 2008, namun pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 2,1 dan 2,07 pada tahun 2010. Hal ini perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan tekanan kepada pertumbuhan penduduk Sumatera Utara.

Disamping itu terjadi peningkatan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I, di tahun 2011 terapat 1.059.065 dari 3.138.657 kepala keluarga dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu 1.087.362 dari 3.253.024 kepala keluarga di Sumatera Utara.

2.1.3.1.11. Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang terdapat pada beberapa Kabupaten/Kota, yang menampung anak-anak terlantar, gelandangan, cacat fisik, pengemis dan lanjut usia.

- PMKS yg memperoleh bantuan sosial

Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara terdiri dari beberapa jenis, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.33.

PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

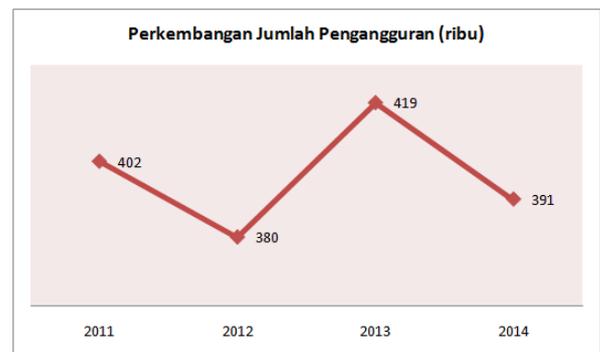
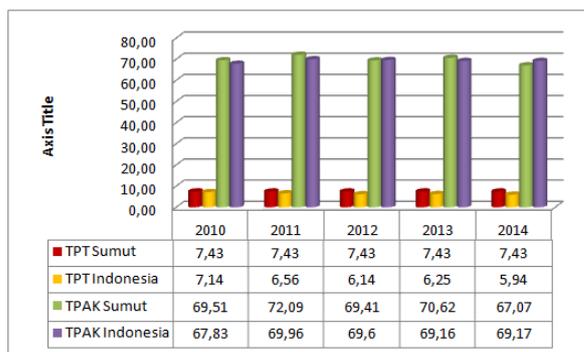
No	Jenis PMKS
1	Anak Balita Terlantar
2	Anak terlantar
3	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4	Anak jalanan
5	Anak dengan kedisabilitas
6	Wanita rawan sosial ekonomi
7	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus

8	Lanjut Usia
9	Penyandang Disabilitas
10	Tuna susila
11	Pengemis
12	Gelandangan
13	Keluarga bermasalah sosial psikologis
14	Pemulung
15	Kelompok Minoritas
16	Bekas Narapidana
17	HIV/AIDS
18	Korban Narkotika
19	Traficking
20	Komunitas Adat Terpencil (KAT)
21	Korban Tindak Kekerasan
22	Pekerja Migran Bermasalah Sosial
23	Korban Bencana Alam
24	Korban Bencana Sosial
25	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
26	Fakir Miskin

Sumber :

2.1.3.1.12. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2014 yang mncapai 67,07 persen, sebesar 7,43 persen adalah pengangguran terbuka. Kondisi capaian ini berada di bawah capaian nasional pada tahun yang sama sebesar 6,25 persen, Sehingga hal ini juga menggambarkan bertambahnya jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Dimana pada tahun 2013 jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara sebesar 419.202 jiwa mengalami peningkatan menjadi 391.202 jiwa pada tahun 2014, sebagaimana grafik berikut :



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2014

Grafik 2.24
Kondisi Ketenaga Kerjaan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2010-2014

2.1.3.1.13. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 4,41 persen. Diantaranya koperasi aktif mengalami peningkatan sebesar 7,36 persen sedangkan Koperasi yang melaksanakan RAT meningkat sebesar 4,18 persen. Jumlah anggota koperasi menunjukkan kenaikan sebesar 1,74 persen. Jumlah tenaga kerja di bidang koperasi (manajer

dan karyawan) juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 7,18 persen manajer dan 5,47 persen karyawan, . Modal sendiri juga mengalami peningkatan, dimana modal sendiri meningkat sebesar 46,86 persen, modal luar menurun sebesar 16,35 persen. Penurunan modal luar ini menunjukkan tingkat ketergantungan koperasi terhadap permodalan dari luar koperasi semakin menurun karena dapat dipenuhi oleh permodalan dari koperasi itu sendiri baik dari simpanan wajib, simpanan pokok maupun dari pembagian SHU, Volume usaha meningkat sebesar 19,26 persen. SHU menunjukkan peningkatan sebesar 34,14 persen. Untuk jumlah UKM di Sumatera Utara periode 2013 – 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 1,14 % dengan penyerapan tenaga kerja di sektor UKM ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,11 % (Tabel. 3.33) ., Besarnya jumlah usaha kecil dan menengah ini merupakan pertanda positif jika dilihat bahwa keberadaannya merupakan persemiaan usaha baru dan pengembangan kewirausahaan pada masyarakat di berbagai lapisan. Banyak UMKM yang masih bisa tumbuh atas upaya dan inisiatif sendiri, meskipun memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya.

Pada tahun 2014 Kabupaten/Kota yang tertinggi Ratio Koperasi aktif yakni Kota Medan sebesar 18 persen. dan yang terendah adalah Kabupaten Nias Utara (tabel 2.34).

Untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pada tahun 2013 terdapat sejumlah 194 unit KSP dengan jumlah anggota 242.256 orang dan nasabah berjumlah 254.338 nasabah, dengan total asset berjumlah ± Rp. 628 milyar dan jumlah pinjaman sebesar ± Rp.524 milyar (tabel 2.31)

Unit Simpan Pinjam (USP) sampai dengan tahun 2013, berjumlah 3.782 unit dengan jumlah anggota 835.848 orang dan nasabah berjumlah 1.002.008 nasabah. Total asset yang dikelola sejumlah Rp. 1.143 Milyar dengan jumlah pinjaman ± Rp. 1.090 Milyar (tabel 2.32)

Tabel 2.35
Data Keragaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KSP (UNIT)	ANGGOTA (ORANG)			JLH NASABAH (ORANG)	MODAL PINJAMAN (Rp.JUTA)	MODAL SEND/TTP (Rp.JUTA)	MODAL PENYERT (Rp.JUTA)	SIMPANAN DITERIMA (Rp.JUTA)	SHU BLM DIBAGIKAN (Rp.JUTA)	TOTAL ASSET (Rp.JUTA)	PINJAMAN DIBERIKAN (Rp.JUTA)	KET
			LAKI-LAKI	PEREMP	JLH									
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Deli Serdang	12	3,312	3,389	6,701	10,666	3,580	13,765	-	14,789	1,900	25,660	23,567	
2	Karo	10	19,789	7,689	27,478	27,900	1,279	8,900	-	400	400	10,979	8,090	
3	Langkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tapteng	11	10,678	2,245	12,923	13,098	1,450	12,643	-	5,680	1,900	21,673	19,759	
5	Simalungun	4	11,768	8,900	20,668	19,980	1,780	27,914	-	430	420	30,544	5,094	
6	Lab. Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Dairi	3	112	127	239	239	210	704	-	200	190	1,304	3,732	
8	Taput	4	8,900	2,670	11,570	11,809	1,400	13,416	-	10,560	4,560	28,900	25,900	
9	Tapsel	3	210	220	430	436	1,400	1,652	-	760	122	3,934	4,613	
10	Asahan	2	124	166	290	302	600	1,076	-	440	65	626	3,215	
11	Nias	3	1,267	1,190	2,457	2,560	1,000	2,917	-	168	88	4,173	10,667	
12	Tebing Tinggi	8	11,009	8,900	19,909	19,007	6,500	22,900	-	24,000	7,690	61,090	68,591	
13	Binjai	5	1,056	602	1,658	1,768	700	14,842	-	190	500	16,232	5,718	
14	P. Siantar	13	17,890	30,531	31,963	30,189	450	5,871	-	199	2,043	8,563	11,642	
15	Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Sibolga	10	456	200	656	690	450	600	-	567	400	2,017	2,100	
17	Medan	10	11,257	7,100	18,357	19,567	4,560	24,094	-	8,765	10,073	47,492	38,052	
18	Madina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Toba Samosir	13	6,789	4,588	11,377	11,590	800	3,570	-	2,000	900	7,270	13,284	
20	P.Sidempuan	7	1,288	790	2,078	2,078	300	1,762	-	560	120	2,742	1,467	
21	Humbahas	4	7,890	5,670	13,560	13,890	1,400	13,800	-	11,800	1,809	28,809	33,091	
22	Nias Selatan	2	6,757	2,314	9,071	11,675	2,100	5,678	-	12,768	1,009	14,390	13,900	
23	Pakpak Bharat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Sergei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Samosir	14	6,434	2,340	8,774	8,900	1,200	15,719	-	12,700	1,780	31,399	27,800	
26	Batubara	5	1,289	799	2,088	2,108	100	1,056	-	290	124	1,570	2,056	
27	Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Paluta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Labura	2	1,455	1,231	2,686	3,455	1,190	11,090	-	2,344	554	13,567	11,909	
30	Labusel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Nias Barat	1	211	194	405	929	50	617	-	456	122	1,245	1,608	
32	Nias Utara	1	111	104	215	1,078	100	440	-	430	145	1,115	1,471	
33	Gunung Sitoli	6	1,890	1,324	3,214	3,524	400	1,900	-	1,890	560	4,750	7,419	
34	Propinsi	41	21,089	12,400	33,489	36,900	17,456	189,004	-	37,900	13,870	258,230	180,062	
	JUMLAH	194	153,031	105,683	242,256	254,338	50,455	395,930	-	150,286	51,344	628,274	524,807	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu , 2015 (data diolah)

Tabel 2.36.

Data Keragaan Unit Simpan Pinjam (USP) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	JUMLAH USP (UNIT)	ANGGOTA (ORANG)			JLH NASABAH (ORANG)	MODAL PINJAMAN (Rp.JUTA)	MODAL SEND/TTP (Rp.JUTA)	MODAL PENYERT (Rp.JUTA)	SIMPANAN DITERIMA (Rp.JUTA)	SHU BELUM DIBAGIKAN (Rp.JUTA)	TOTAL ASSET (Rp.JUTA)	PINJAMAN DIBERIKAN (Rp.JUTA)	KET
			LAKI-LAKI	EREMPUAN	JLH 6=4+5									
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Deli Serdang	200	16,259	12,597	28,856	28,408	46,247	82,789	-	12,736	10,890	94,957	147,836	
2	Karo	212	17,296	18,643	35,939	33,490	36,941	19,560	-	4,689	1,567	62,757	80,276	
3	Langkat	110	32,890	22,610	55,500	56,748	5,735	13,789	-	9,856	690	23,445	25,768	
4	Tapteng	81	9,600	9,344	18,944	21,899	3,421	7,098	-	1,209	567	12,295	11,768	
5	Simalungun	128	23,567	11,714	35,281	35,478	8,977	15,678	-	9,046	789	34,490	30,541	
6	Lab. Batu	136	16,999	14,829	31,828	38,900	8,879	10,890	-	2,037	702	22,508	20,978	
7	Dairi	82	11,690	4,768	16,458	16,780	1,670	5,676	-	576	178	45,361	5,781	
8	Taput	108	9,002	5,678	14,680	14,567	3,146	7,230	-	2,485	390	13,251	11,124	
9	Tapsel	44	11,988	8,760	20,748	21,007	2,019	7,900	-	2,204	489	12,564	11,009	
10	Asahan	67	17,778	11,567	29,345	29,008	1,288	10,989	-	11,716	408	23,098	19,811	
11	Nias	21	12,143	5,785	17,928	17,900	895	5,890	-	3,565	190	10,540	5,678	
12	Tebing Tinggi	81	12,890	10,471	23,361	24,578	3,934	14,578	-	11,578	1,132	31,222	27,890	
13	Binjai	108	23,289	11,125	34,414	34,890	7,044	6,908	-	8,599	1,078	23,629	23,910	
14	P. Siantar	231	8,968	6,789	15,757	20,890	15,345	9,870	-	1,619	5,690	32,524	31,667	
15	Tanjung Balai	59	9,201	4,589	13,790	13,678	2,604	7,980	-	789	309	11,682	10,918	
16	Sibolga	83	12,210	4,356	16,566	24,556	3,402	7,689	-	1,090	209	12,390	8,078	
17	Medan	785	76,420	56,999	133,419	129,888	57,817	198,000	-	46,596	10,789	289,078	231,097	
18	Madina	79	11,002	7,523	18,525	17,890	2,838	5,468	-	1,567	209	10,082	11,456	
19	Toba samosir	54	11,765	5,980	17,745	16,789	2,145	6,790	-	780	308	10,023	19,800	
20	P.Sidempuan	173	13,223	7,755	20,978	28,034	5,670	12,899	-	12,567	1,678	32,814	23,516	
21	Humbahas	63	7,123	3,855	10,978	10,700	1,497	5,450	-	700	456	8,103	19,567	
22	Nias Selatan	39	13,002	5,294	18,296	17,567	2,312	5,068	-	450	290	8,120	10,700	
23	Pakpak Bharat	169	5,006	2,479	7,485	7,567	1,333	21,067	-	908	3,890	24,383	57,362	
24	Sergei	49	12,980	10,111	23,091	22,675	2,314	7,689	-	11,894	312	22,209	36,036	
25	Samosir	63	6,132	3,703	9,835	9,789	3,972	11,890	-	756	345	15,676	17,689	
26	Batubara	40	6,116	4,229	10,345	21,870	2,787	3,890	-	435	314	7,426	8,900	
27	Palas	31	8,098	650	8,748	11,790	2,414	2,980	-	367	300	6,061	5,670	
28	Paluta	41	8,908	5,436	14,344	15,600	2,677	3,800	-	799	378	7,654	5,789	
29	Labura	62	14,566	7,680	22,246	22,567	9,675	10,980	-	679	899	22,233	18,970	
30	Labusel	121	7,297	5,004	12,301	35,699	3,054	16,790	-	16,754	1,098	37,696	36,065	
31	Nias Barat	13	787	726	1,513	2,525	343	1,780	-	1,670	109	3,902	2,788	
32	Nias Utara	11	855	479	1,334	2,476	359	1,809	-	1,345	123	3,636	2,499	
33	Gunung Sitoli	66	4,099	3,990	8,089	10,006	1,393	8,900	-	7,908	678	19,675	13,681	
34	Propinsi	172	51,503	35,678	87,181	185,799	12,875	78,950	-	45,329	10,678	147,832	95,472	
	JUMLAH	3,782	504,652	331,196	835,848	1,002,008	267,022	638,714	-	235,298	58,132	1,143,316	1,090,090	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu ,2015 (data diolah)

Tabel 2. 37
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Sumatera Utara

No	Sektor	Jumlah (unit)	
		2013	2014
1	Jumlah UKM	2.823.210	2.855.399
2	Serapan Tenaga Kerja	4.234.802	4.282.098

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu ,2015 (data diolah)

2.1.3.1.14. Penanaman Modal Daerah

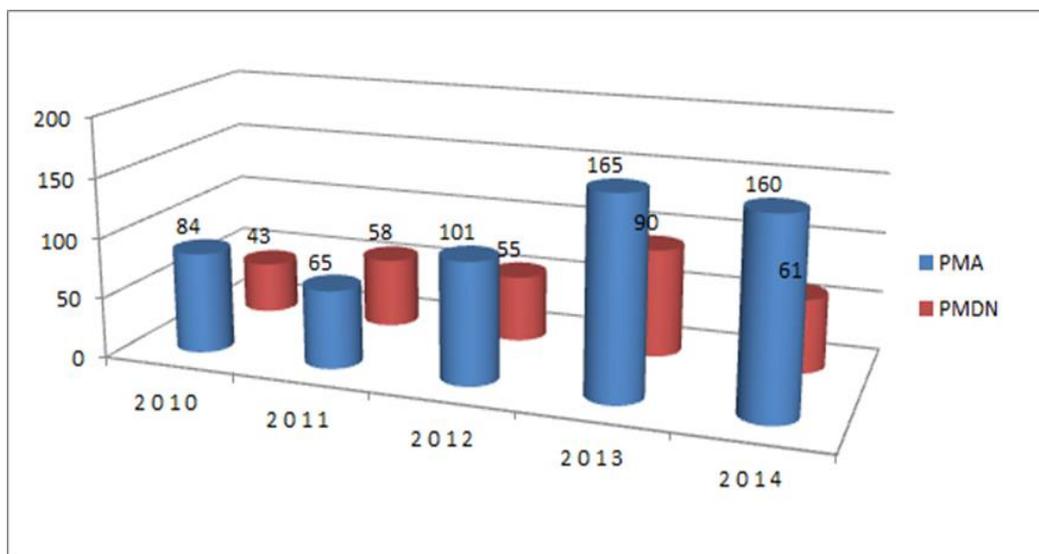
- a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan nilai investasinya

Untuk menjelaskan jumlah investor yang telah menanamkan modalnya di Sumatera Utara untuk tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38.
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010 – 2014
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	Jumlah Investor	43	84	127
2011	Jumlah Investor	58	65	123
2012	Jumlah Investor	55	101	156
2013	Jumlah Investor	90	165	255
2014	Jumlah Investor	61	160	221
JUMLAH		307	575	882

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu



Gambar 2.24. Grafik Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010 – 2014 Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel dan grafik diatas terlihat kenaikan yang signifikan untuk jumlah investor PMA maupun PMDN. Jumlah investor PMDN mengalami peningkatan yang signifikan dari 43 jumlah proyek ditahun 2010 menjadi 61 proyek ditahun 2014, namun turun jika dibandingkan tahun 2013. Hal ini disebabkan karena terjadinya Pemilihan Umum Pemerintahan baru sehingga membuat investor menunggu kebijakan dari Pemerintah baru. begitu juga dengan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami kenaikan dari

semula 84 proyek menjadi 160 jumlah proyek yang terealisasi di Sumatera Utara tahun tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan (165 investor).

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi baik yang masih dalam tahap persetujuan maupun yang sudah direalisasi di Sumatera Utara untuk tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39.

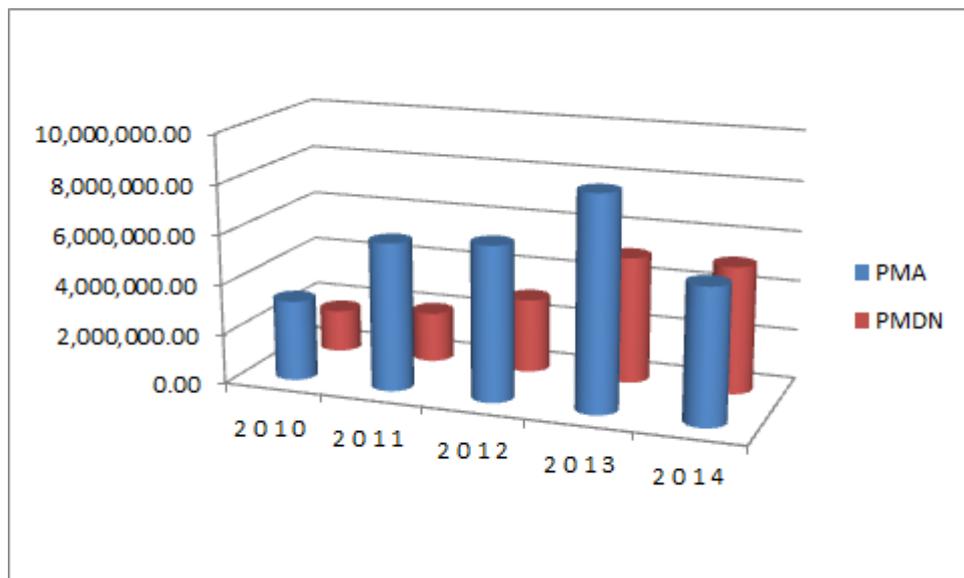
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2010 – 2014

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US \$.000)*
2010	43	1.703.056.37	84	321.829.19
2011	58	2.004.055.78	65	658.466.72
2012	55	2.970.186.19	101	645.300.00
2013	90	5.068.881.40	165	887.452.00
2014	61	5.086.871.83	160	513.810.71
Total	307	16.833.051.57	575	3.026.858.62

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu.

- US \$ 1 = Rp. 10.000.- (2010)
- US \$ 1 = Rp. 9.000.- (2011)
- US \$ 1 = Rp. 9.600.- (2012)
- US \$ 1 = Rp. 9.600.- (2013)
- US \$ 1 = Rp. 10.500.- (2014)

Perkembangan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). terus mengalami pasang surut dalam lima tahun terakhir ini. baik dilihat dari jumlah proyek maupun jumlah dana yang terealisasi. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan nilai investasi dari Penanaman Modal Asing. Namun jika hal ini telah melampaui target investasi di tahu 2014 yaitu sebesar Rp. 10 Triliun.



Grafik 2.25. Grafik Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2010 – 2014 Provinsi Sumatera Utara (Juta Rp.)

b. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja Perusahaan Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN)
Tahun 2010 – 2014 Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Tenaga Kerja yg Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	14.138	12.920	27.255	30.826	27.677
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	127	123	156	255	221
3	Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	111.32	105.04	174.71	120.89	125.24

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu



Grafik 2.26. Grafik Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA/PMDN selama 2010-2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2010 dan tahun 2013. Hal ini menggambarkan bahwa investasi pada sektor riil mengalami kenaikan dengan penggunaan teknologi masih mendominasi investasi hal ini disebabkan orientasi penyediaan lapangan kerja adalah padat karya bukan padat modal.

2.1.3.1.15. Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang sangat menarik. hal ini dapat dilihat dari suku/etnis yang tinggal di Sumatera Utara. Ada 8 (delapan) suku/etnis asli di Sumatera Utara, yaitu : Melayu, Batak Karo, Batak Toba, Mandailing, Batak Phakpak Dairi, Simalungun, Batak Angkola dan Nias. Selain itu terdapat juga beberapa suku/etnis pendatang antara lain adalah suku Jawa, Minangkabau, Cina dan Aceh. Untuk melestarikan keragaman budaya serta menjaga kerukunan antar

suku/etnis. diselenggarakan berbagai macam festival seni budaya. antara lain yaitu :

- Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang dilaksanakan rutin 1 tahun sekali.
- Pesta Danau Toba. Diselenggarakan setahun sekali di Kota Parapat.
- Festival Mejuah-juah . Diselenggarakan setahun sekali.
- SUMUT Gempar. Diselenggarakan rutin setahun sekali dan telah memperoleh rekor MURI.
- Pameran Warisan Budaya Islam.
- Festival Budaya Melayu.
- Pawai Budaya Hut RI.

b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya.

Sarana dan Prasarana adalah salah satu hal penting dalam pengembangan maupun pelestarian seni dan budaya. Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa gedung (sarana) untuk penyelenggaraan kegiatan Seni dan Budaya. yaitu : Tapian Daya PRSU sebagai tempat penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera. Museum Taman Budaya dan Museum Negeri.

c. Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Selain memiliki kawasan wisata alam yg memukau. Sumatera Utara juga memiliki kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Benda. Situs budaya yang perlu dilestarikan antara lain yaitu :

- Candi Portibi di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Candi Bahal di Kabupaten Padang Lawas Utara
- Istana Maimun di Kota Medan.
- Masjid Raya Medan.
- Budaya Loncat batu di Kabupaten Nias.
- Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1.3.1.16. Ketahanan Pangan

Pangan diartikan sebagai segala sesuatu dari sumber hayati (tanaman, hewan, ikan dan air) yang diolah maupun yang tidak diolah peruntukannya sebagai makanan dan minuman untuk konsumsi manusia. Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan.

1. Regulasi Ketahanan Pangan

Menyangkut regulasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yakni :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 14 Seri G).
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 25 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan dan Swasembada Pangan.
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

2. Ketersediaan Pangan Utama

Dalam Ketahanan pangan dikenal 3 aspek pokok yaitu Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Aspek Distribusi dan Akses Pangan serta Aspek Konsumsi. Mutu dan Keamanan Pangan.

Ketersediaan energi rata-rata penduduk Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 3.868 k.kal/kap/hari pada tahun 2013 menjadi 3.887 k.kal/kap/hari pada tahun 2014 (meningkat 0.49%). Begitu juga dengan ketersediaan protein mengalami peningkatan dari 76.18 gr/kap/hari pada tahun 2013 menjadi 76.96 gr/kap/hari pada tahun 2014 (meningkat 1.02%). Hal ini menunjukkan bahwa sumber karbohidrat

masyarakat Sumatera Utara tidak lagi mengandalkan beras. tetapi juga sumber lain seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar dan jagung. Sumatera Utara juga mengalami surplus beras sebesar 482.133 ton. dimana konsumsi beras penduduk sumatera utara pada tahun 2014 sebesar 1.740.545 ton sedangkan ketersediaan berasnya mencapai 2.194.959 ton. Jika diasumsikan konsumsi beras penduduk sumatera utara sebesar 142.735 ton/bulan. maka ketersediaan cadangan pangan Sumatera Utara aman untuk 3 bulan kedepan.

Untuk Pola Pangan Harapan (PPH) Sumatera Utara meningkat dari 83.6 pada tahun 2013 menjadi 85.0 pada tahun 2014 (meningkat sebesar 1.67%). Sedangkan tingkat konsumsi beras masyarakat Sumatera Utara menurun dari 130.61 kg/kap/tahun pada tahun 2013 menjadi 128.53 kg/kap/tahun pada tahun 2014 (menurun 1.60%) dan berada dibawah 128.65 kg/kap/tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah untuk melakukan penurunan konsumsi beras sebesar 1.5% per tahun. Hal ini dikarenakan adanya gerakan manggadong, one day no rice di Sumatera Utara.

Tabel 2.41.
Aspek Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

No.	URAIAN	Target 2014	Realisasi 2014	Pencapaian Target (%)
I.	KETERSEDIAAN PANGAN			
1.	Ketersediaan energi perkapita minimal 2400 k.kal dan penyediaan protein perkapita minimal 63gr per hari	Karbohidrat : 3.872 kkal. Protein : 76.58 gram	Karbohidrat : 3.887 kkal. Protein : 76.96 gram	Karbohidrat: 100.13 Protein : 100.49
2.	Ketersediaan Cadangan Pangan	106 Ton	-	-
3.	Kelembagaan Pangan	311 Lumbung	312 Lumbung	100.32
4.	Kelompok Lumbung Pangan	89 Gapoktan	84 Gapoktan	94.38
II.	DISTRIBUSI AKSES PANGAN			
1.	Sistem Distribusi Harga	90 %		
2.	Akses Pangan Masyarakat	62 Kelompok	70 Kelompok	112.90
III.	PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN			
1.	Penurunan Konsumsi Beras 1.5% dan Pola Pangan Harapan (PPH)	Konsumsi Beras 128.65 kg/kap/tahun; PPH 84.5	Konsumsi Beras 128.53 kg/kap/tahun; PPH 85.0	Konsumsi Beras : 100.09 PPH : 100.59
2.	Penanganan Keamanan Pangan Segar	70 %		
3.	Sertifikasi Buah dan Sayuran Segar	10 Kelompok Buah dan Sayuran	6 Kelompok Buah dan Sayuran	60
IV.	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
1.	Berkurangnya Penduduk Miskin dan Rawan Pangan	Penduduk Miskin 10.61 %. Rawan Pangan 1% per tahun	Penduduk Miskin berkurang 9.38% dan rawan pangan sebesar 5.2%	
2.	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	75 desa	27 desa	
V.	PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI KETAHANAN PANGAN			
1.	Efektivitas Koordinasi Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan	53%	60.61%	
2.	Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan provinsi dan kab/kota	5 kali	8 kali	160

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provsu 2015 (data diolah)

3. Kondisi Rawan Pangan

Kondisi sangat rawan pangan diukur dari konsumsi energi <1.400 Kkal/hari. Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini masih menghadapi kondisi rawan pangan. Dari data Susenas tahun 2009, diketahui bahwa angka proporsi penduduk sangat rawan pangan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 14,48% atau masih berada diatas angka rata-rata nasional sebesar 14,47%.

2.1.3.1.17. Perpustakaan dan Kearsipan

a. Jumlah perpustakaan

Berikut ini adalah Perpustakaan yang telah dibina Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provsu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.42.
Jumlah Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara
Jumlah Perpustakaan yang telah dibina (Mendapat Bantuan)

No	Jenis Perpustakaan	Data BPS 2008-2010	2010	2011	2012	2013	Total
1	Kabupaten/Kota	-	33	33	33	33	-
2	Kecamatan	-	30	10	-	50	-
3	Desa/Kelurahan	177	192	100	132	1321	177
4	PAUD/TK	-	-	10	-	10	-
5	SD	-	-	20	B	20	-
6	SMP	-	20	14	B	34	-
7	SMU	-	20	14	B	34	-
8	SMK	-	-	20	B	20	-
9	Pondok Pesantren	-	10	10	-	30	-
10	Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta)	6	6	6	-	24	6
11	Masjid	-	10	10	-	30	-
12	Gereja	-	10	10	-	30	-
13	Masyarakat/TBM	20	35	8	-	92	20
14	RSUD	-	10	-	-	20	-
15	Puskesmas	-	-	10	-	20	-
16	Khusus/Instansi	-	30	8	B	48	-
17	Lembaga Pemasyarakatan	1	5	10	-	17	1
18	Panti Sosial	-	12	-	-	12	-

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2014

b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Berikut ini adalah grafik tingkat kunjungan Pemustaka tiap tahunnya ke Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2.43
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun

Tahun	Jumlah
2010	589.553
2011	593.834
2012	594.443
2013	100.000



Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.27. Jumlah pengunjung perpustakaan per-tahun (dalam ribuan) 2010-2014

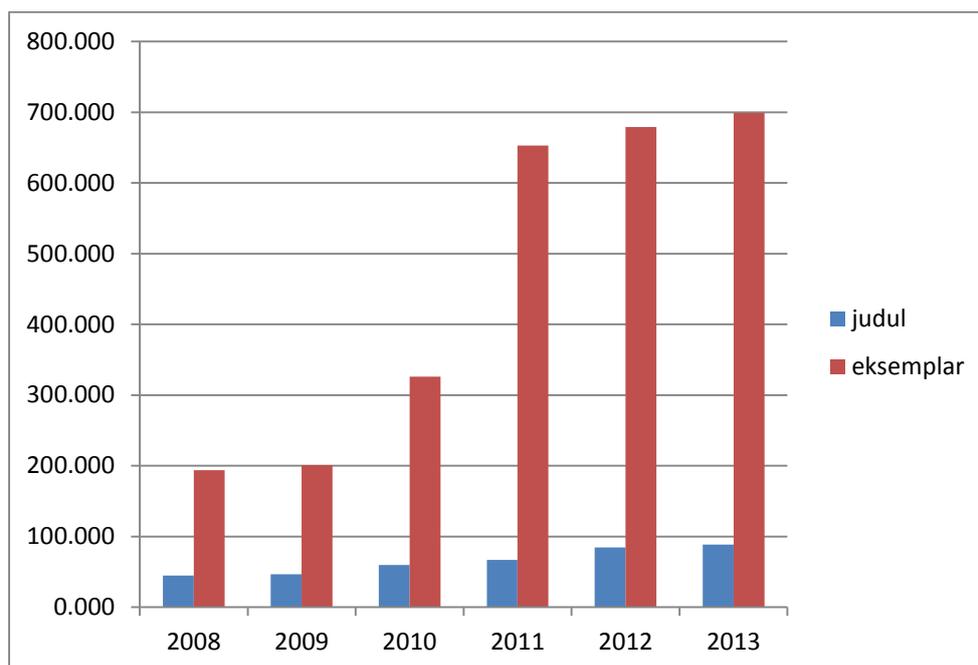
d. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Berikut ini adalah grafik koleksi buku yang ada di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara :

Tabel. 2.44
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan
Provinsi Sumatera Utara

TAHUN	JUDUL	EKSEMPLAR
2009	46.433	201.067
2010	59.855	326.170
2011	67.084	652.780
2012	84.419	679.289
2013	88.694	699.204

Grafik perkembangan jumlah dan Judul Buku dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Grafik 2.28
Grafik perkembangan jumlah dan judul buku 2009-2013

d. Kearsipan

Pengelolaan Arsip adalah proses pengendalian arsip secara efisien, efektif dan sistematis. Pengelolaan Arsip yang telah dilaksanakan di Bidang Arsip Daerah pada tahun 2010 dan 2011 adalah pengelolaan arsip dinamis aktif dan statis.

Proses/ sistem pengelolaan arsip secara baku di Bidang Arsip Daerah :

1. Mengumpulkan/ menerima arsip in aktif dan statis dari SKPD dilingkungan Pemprovsu.
2. Melakukan pemilahan arsip.
3. Melakukan pencatatan atau pendeskripsian arsip.
4. Melakukan manuver kartu deskripsi dan fisik arsip.
5. Melakukan penomoran arsip.
6. Membungkus arsip.
7. Membuat DPAS.
8. Menyimpan arsip ke dalam boks.
9. Memberikan nomor boks arsip.
10. Menyimpan boks arsip ke dalam Roll O'Pack.
11. Memasukkan data arsip statis ke dalam jaringan.

Tabel 2.45.
Jumlah Arsip Statis yang dikelola Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara

Arsip Statis

No.	Masalah	Tahun							
		2010		2011		2012		2013	
		Arsip	Boks	Boks	Arsip	Boks	Arsip	Boks	
1.	Umum	473	45	22	23	2	70	7	
2.	Keuangan	693	135	91	42	8	870	145	
3.	Kepegawaian	150	16	8	9	1	-	-	
4.	Organisasi dan Hukum	309	19	11	2174	616	-	-	

5.	Bina Program	247	29		15	19	4	-	-
6.	Jaringan Jalan Nasional dan Propinsi	575	159		114	175	43	-	-
7.	Laporan	606	85		99	-	-	12	2
8.	Hukum Teknis dan Hubungan Partisipasi	-	-		-	-	-	2798	248
9.	Program	-	-		1	-	-	12	2
10.	Pengawasan	119	14		5	-	-	-	-
11.	Pengawasan Pemanfaatan Jalan	-	-		-	-	-	-	-
12.	Pemerintahan	-	-		-	-	-	-	-
13.	Politik	-	-		-	-	-	-	-
14.	Keamanan dan Ketertiban	-	-		-	-	-	-	-
15.	Kesra	-	-		-	-	-	-	-
16.	Perekonomian	-	-		-	-	-	-	-
17.	Pembinaan	-	-		-	-	-	-	-
18.	Pembinaan	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Usaha Tani	-	-		-	-	-	-	-
20.	Perlindungan Tanaman	-	-		-	-	-	-	-
21.	Penelitian dan Laporan	-	-		-	-	-	-	-
22.	Kesiagaan	-	-		-	-	-	-	-
23.	Produk-Produk Hukum	-	-		-	-	-	-	-
24.	Pengendalian dan Pembinaan	-	-		-	-	-	-	-
25.	Umum dan Perlengkapan	-	-		-	-	-	-	-
26.	Pajak	-	-		-	-	-	-	-
27.	Retribusi dan Pendapatan	-	-		-	-	-	-	-
28.	Pengendalian dan Pengembangan	-	-		-	-	-	-	-
29.	Pengujian	-	-		-	-	-	-	-
Jumlah		3172	502	2793	366	2442	674	3762	404

2.1.3.1.18. Komunikasi dan Informatika

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, disebutkan bahwa ada 6 (enam) indikator kinerja bidang komunikasi dan informatika, yaitu : (1) Jumlah jaringan komunikasi; (2) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk; (3) Jumlah surat kabar nasional/ lokal; (4) Jumlah penyiaran radio/TV lokal; (5) Website milik pemerintah daerah; (6) Pameran /expo.

Berdasarkan keenam indikator tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah jaringan komunikasi yang tertuang dalam RPJMD Provsu ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 4 jaringan., yaitu Local Area Network, Fiber Optik, Wireless dan Internet

Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2014 target tersebut telah terpenuhi, yakni 4 jaringan. Artinya capaian kinerjanya sebesar 100 %. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan, dimana pada tahun sebelumnya jaringan komunikasi yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5 jenis (Local Area Network, Fiber Optik, Radio Link, Wireless dan VPN-IP/intranet. Hal ini disebabkan jaringan VPN-IP/Intranet tidak difungsikan lagi untuk menginput atau mengakses data/informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SPIKD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian, pada tahun 2014 telah terbangun DRC (Data Recovery Center) di Kantor Gubernur Lt. 6. Pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah jaringan komunikasi yang ada sebanyak 4 jenis.

2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk yang tertuang dalam RPJMD Provsu ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 64,64 %. Dalam realisasinya, pada tahun 2014 target tersebut telah dapat terpenuhi sebesar 64,64 %. Artinya capaian kinerjanya sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, capaian kinerja pada indikator rasio wartel/warnet terhadap penduduk mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 8,43 %. Adapun yang menjadi faktor pendorong peningkatan pada indikator ini adalah tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan informasi dan banyaknya pelaku bisnis yang menekuni bidang pengelolaan wartel/warnet di Sumatera Utara.
3. Jumlah Surat kabar nasional pada tahun 2014 yang terpantau dan tercatat sama dengan tahun sebelumnya (2013), yaitu 8 surat kabar. Kondisi ini, juga sama dengan jumlah Surat kabar lokal yang ada, yakni sebanyak 33 Surat kabar. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator jumlah Surat kabar nasional / lokal pada tahun 2014 sebesar 100 %. Pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah Surat kabar nasional sebanyak 8 Surat kabar dan 33 Surat kabar lokal.
4. Jumlah penyiaran radio pada tahun 2014 sebanyak 200 radio dan televisi lokal di Sumatera Utara sebanyak 12 televisi. Jumlah tersebut relevan dengan target yang ditetapkan pada RPJMD Provsu, yakni sebesar 200 radio dan 12 televisi lokal. Dengan demikian, maka capaian kinerja untuk indikator jumlah penyiaran radio / televisi lokal sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, maka kondisinya sama. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah penyiaran radio dan televisi sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 200 radio dan 12 televisi.
5. Website milik pemerintah daerah pada tahun 2014 sebanyak 15 website, terdiri dari 1 website milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 14 website SKPD di lingkungan Pemprovsu. Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Provsu, yaitu sebanyak 30 website. Dengan demikian, maka capaian kinerjanya sebesar 50 %. Pada tahun 2015, diproyeksikan website milik pemerintah daerah sebanyak 35 website.
6. Jumlah pameran yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu pada tahun 2014 sebanyak 1 kali dalam setahun, yakni Pekan Raya Sumatera Utara. Jumlah ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provsu sebanyak 4 kali. Dengan demikian, capaian kinerjanya sebanyak 25 %. Pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah pameran yang dilaksanakan sebanyak 1 kali.

2.1.3.2.Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

Produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedele di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46.
Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung dan Kedele
Provinsi Sumatera Utara

No.	URAIAN	Tahun				Pencapaian Target (%) Tahun 2014
		Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014*	
1	Produksi Padi (ton)	3.549.371	3.727.249	3.771.545	3.628.968	96,22
2	Luas Panen Padi (ha)	-	742.968	-	713.254	-
3	Produktifitas Padi (kw/ha)	47,70	50,17	49,90	50,64	101,48
4	Produksi Jagung (ton pipilan kering)	1.335.970	1.183.011	1.529.636	1.159.698	75,81
5	Luas Panen Jagung (ha)	-	211.750	-	199.377	-
6	Produktifitas Jagung (kw/ha)	55,40	55,87	56,50	57,82	102,33
7	Produksi Kedele (ton)	3.645	3.229	14.131	5.705	40,37
8	Luas Panen Kedele (ha)	-	3.126	-	4.363	-
9	Produktifitas Kedele (kw/ha)	10,10	10,33	10,50	11,36	108,19

Sumber :

* : Angka Sementara BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pada komoditi padi baik dari sisi produksi maupun luas panen tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun 2013 akan tetapi produktifitasnya meningkat dari 50.17 ku/ha menjadi 50.64 ku/ha pada tahun 2014 dan ini melebihi target RPJMD yaitu 49.90 ku/ha. Peningkatan produktivitas ini dikarenakan adanya usaha intensifikasi dengan berbagai upaya dalam rangka peningkatan produktivitas seiring dengan sulitnya melakukan ekstensifikasi luas lahan pertanian walaupun ada upaya dengan melakukan perlindungan terhadap lahan pangan berkelanjutan.

Pada komoditi jagung pada tahun 2014 terjadi penurunan baik dari sisi produksi, luas panen maupun produktivitas dibanding tahun 2013 sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya bencana alam di Kabupaten Karo yang merupakan salah satu sentra produksi jagung.

Pada komoditi kedele pada tahun 2014 terjadi peningkatan baik sisi produksi, luas panen maupun produktivitas dibanding tahun 2013. Akan tetapi peningkatan ini belum juga memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga untuk komoditi jagung maupun kedele harus menjadi perhatian bagi pihak yang terkait dengan sektor pertanian.

b. Tanaman Perkebunan

Luas areal tanaman perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47.
Luas Areal Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara menurut jenis komoditi dan perusahaan Tahun 2014*)

No	Jenis Komoditas	Luas Lahan (ha)				
		Perkebunan Rakyat	PTPN	PBSN	PBSA	Total Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7
1	Karet	395.190,02	42.525,81	102.152,43	52.710,54	592.578,80
2	Kelapa Sawit	415.040,31	313.133,27	327.646,52	145.914,18	1.201.734,28
3	Kopi Arabika	61.275,56	-	-	-	61.275,56
4	Kopi Robusta	20.659,13	-	796,86	-	21.455,99
5	Kelapa	110.480,02	-	1.735,35	1.122,82	113.338,19
6	Kakao	66.643,87	6.783,42	3.096,82	2.696,54	79.220,65
7	Cengkeh	3.110,30	-	-	-	3.110,30
8	Kemenyan	22.399,00	-	-	-	22.399,00
9	Kulit Manis	5.673,44	-	-	-	5.673,44
10	Nilam	816,01	-	-	-	816,01
11	Kemiri	10.856,54	-	-	-	10.856,54
12	Tembakau	1.795,70	1.215,24	-	-	3.010,94
13	Tebu	1.195,12	8.980,80	-	-	10.175,92
14	Pala	132,31	-	-	-	132,31
15	Lada	150,65	-	-	-	150,65
16	Kapuk	456	-	-	-	456
17	Gambir	1.988,00	-	-	-	1.988,00
18	Teh	-	2.574,12	178,04	-	2.752,16
19	Aren	5.179,10	-	-	-	5.179,10
20	Pinang	5.560,35	-	-	-	5.560,35
21	Vanili	196,75	-	-	-	196,75
22	Jarak	14	-	-	-	14
23	Kapulaga	16	-	-	-	16
24	Jambu Mete	13	-	-	-	13
Jumlah :		1.128.841,18	375.212,66	435.606,02	202.444,08	2.142.103,94

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2015

*) angka sementara

Produksi komoditas perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014. dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48.
Produksi komoditas perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014*

No	Jenis Komoditas	Produksi (ton)					
		Perkebunan Rakyat	PTPN	PBSN	PBSA	Total Produksi (ton)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Karet	327.521,03	27.940,48	124.590,75	73.263,70	553.315,96	
2	Kelapa Sawit	TBS	5.724.308,06	2.605.971,37	5.272.210,65	2.605.349,80	16.207.839,89
		MS	1.506.278,71	681.917,44	1.379.605,48	681.754,79	4.249.556,41
		IS	173.412,86	104.675,85	211.772,52	104.650,88	594.512,12
3	Kopi Arabika	49.619,37	-	-	-	49.619,37	

No	Jenis Komoditas	Produksi (ton)				Total Produksi (ton)
		Perkebunan Rakyat	PTPN	PBSN	PBSA	
1	2	3	4	5	6	7
	Kopi Robusta	8.733.79	-	769.28	-	9.503.07
4	Kelapa	93.454.00	-	2.090.38	1.266.74	96.811.12
5	Kakao	41.923.67	8.240.47	4.593.29	3.012.48	57.769.92
6	Cengkeh	424.81	-	-	-	424.81
7	Kemeyan	4.746.80	-	-	-	4.746.80
8	Kulit Manis	3.369.89	-	-	-	3.369.89
9	Nilam	212.01	-	-	-	212.01
10	Kemiri	12.701.16	-	-	-	12.701.16
11	Tembakau	1.812.95	166.16	-	-	1.979.11
12	Tebu	4.929.66	37.274.96	-	-	42.204.62
13	Pala	33.5	-	-	-	33.5
14	Lada	87.81	-	-	-	87.81
15	Kapuk	119.88	-	-	-	119.88
16	Gambir	1.842.23	-	-	-	1.842.23
17	The	-	4.418.72	192.83	-	4.611.55
18	Aren	3.202.35	-	-	-	3.202.35
19	Pinang	3.612.80	-	-	-	3.612.80
20	Vanili	64.91	-	-	-	64.91
21	Jarak	4	-	-	-	4
22	Kapulaga	15	-	-	-	15
23	Jambu Mete	2	-	-	-	2
Jumlah :		6.456.154,54	2.788.688,01	5.616.219,70	2.787.543,60	17.648.605,88

Keterangan : Untuk produksi Kelapa Sawit digunakan produksi dalam bentuk TBS (Tandan Buah Segar)

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2015

*) angka sementara

1) Kelapa Sawit

Secara umum kondisi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara cukup berkembang dengan baik. hal ini terbukti dengan terus meningkatnya produksi kelapa sawit baik milik perkebunan rakyat, swasta asing maupun nasional dan perkebunan negara (PTPN) yang di Sumatera Utara saat ini terdapat 3 BUMN Perkebunan yakni PTPN II, III dan IV.

Berikut ini akan disajikan data luas tanaman dan produksi kelapa sawit dari tahun 2010-2014 yang diperoleh dari data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.49

Luas Areal Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2010-2014

Tahun	Rincian	Perkebunan rakyat	PTPN	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
2010	Luas (Ha)	396.564	305.435	251.489	112.323	1.065.811
	Produksi (Ton)	5.221.132	4.823.524	3.107.385	1.545.758	14.697.799

2011	Luas (Ha)	405.799	306.302	248.426	115.168	1.075.695
	Produksi (Ton)	5.428.535	4.972.107	3.190.120	1.592.849	15.183.610
2012	Luas (Ha)	411.843.76	255.764.34	309.955.39	141.169.77	1.118.733.26
	Produksi (Ton)	5.511.644.29	2.531.276.00	4.911.914.42	2.483.784.76	15.438.619.47
2013	Luas (Ha)	414.915.84	313.070.66	327.561.00	145.885.00	1.201.452.50
	Produksi (Ton)	5.612.066.73	2.540.676.00	5.140.109.83	2.540.070.00	15.832.922.56
2014*)	Luas (Ha)	415.040.31	313.133.27	327.646.52	145.914.18	1.201.734.28
	Produksi (Ton)	5.724.308.06	2.605.971.37	5.272.210.65	2.605.349.80	16.207.839.89

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2015

*) estimasi angka sementara

Berdasarkan data yang disajikan di atas, diperoleh gambaran bahwa terjadi peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara dari tahun 2010-2014. Dengan rata-rata peningkatan sebesar 3.09 % per tahun. Untuk tahun 2014 terjadi peningkatan seluas 281.50 hektar dibanding tahun 2013. Peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit terjadi pada semua pengelolaan baik pada perkebunan rakyat, PTPN, PBSN maupun PBSA.

Sedangkan untuk produksi terus terjadi peningkatan dari tahun 2008 hingga tahun 2014 dengan rata-rata peningkatan sebesar 2.48 % per tahun. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan produksi sebesar 374.917.33 ton dibanding produksi pada tahun 2013. Seperti halnya pada peningkatan luas areal, peningkatan produksi juga terjadi pada semua pengelolaan baik pada perkebunan rakyat, PTPN, PBSN maupun PBSA.

2) Karet

Secara umum kondisi perkebunan karet di Provinsi Sumatera Utara cukup relatif berkembang dengan baik. Berikut ini akan disajikan data luas tanaman dan produksi komoditi karet dari tahun 2009-2014 yang diperoleh dari data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.50.
Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Karet di Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2010-2014

Tahun	Rincian	Perkebunan rakyat	PTPN	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
2010	Luas (Ha)	376.335	85.632	64.053	39.824	565.844
	Produksi (Ton)	261.249	61.019	75.530	46.455	444.253
2011	Luas (Ha)	378.309.95	93.254.60	62.264.96	41.252.99	575.083
	Produksi (Ton)	280.445.65	65.466.39	63.005.42	50.542.88	459.460
2012	Luas (Ha)	390.951.68	42.403.05	97.897.03	50.425.35	581.677.11
	Produksi (Ton)	310.266.17	26.843.35	125.866.00	57.877.00	520.852.52
2013	Luas (Ha)	394.113.57	42.317.35	102.132.00	52.700.00	591.262.92
	Produksi (Ton)	321.099.05	27.240.40	121.469.00	71.428.00	541.236.45
2014*)	Luas (Ha)	395.190.02	42.525.81	102.152.43	52.710.54	592.578.80
	Produksi (Ton)	327.521.03	27.940.48	124.590.75	73.263.70	553.315.96

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2015

*) angka sementara

Dari data di atas terlihat bahwa secara total terjadi peningkatan luas areal tanaman dari tahun 2010 sampai 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.16 % per tahun dan produksi komoditi karet meningkat dari tahun 2010 sampai 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.73 % per tahun. Untuk tahun 2014, luas areal meningkat seluas 1.315.88 hektar dan produksi meningkat sebesar 12.079.51 ton dibanding tahun 2013.

Komoditas karet masih didominasi oleh perkebunan rakyat, pada tahun 2014 seluas 395.190.02 Ha dengan produksi sebesar 327.521.03 ton. Jika dilihat dari produktifitasnya perkebunan rakyat 0.83 ton/Ha, masih berada dibawah dari produktifitas karet hasil Perkebunan PBSN sebesar 1.22 ton/Ha dan PBSA sebesar 1.39 ton/Ha. Sedangkan produktifitas karet dari Perkebunan PTPN sebesar 0.66 ton/Ha. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar kepada pertanaman karet rakyat untuk meningkatkan produktifitasnya, baik dengan penggunaan teknologi yang lebih baik atau peremajaan karet tua dengan klon yang lebih unggul.

3) Kakao

Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu daerah penghasil kakao yang terbesar di Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan luas areal dan produksi komoditi kakao di Provinsi Sumatera Utara, maka berikut ini akan disajikan data dari tahun 2008-2013 seperti tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.51.
Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Kakao di Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2010-2014

Tahun	Rincian	Perkebunan rakyat	PTPN	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
2010	Luas (Ha)	67.119	19.503	4.005	2.303	92.930
	Produksi (Ton)	39.582	20.357	3.984	2.543	66.466
2011	Luas (Ha)	66.413	11.853	2.811	2.467	83.544
	Produksi (Ton)	37.683	13.374	2.648	2.477	56.183
2012	Luas (Ha)	66.220	7.759	3.062	2.686	79.728
	Produksi (Ton)	39.800	8.810	4.198	2.872	55.682
2013	Luas (Ha)	66.623.88	6.782.06	3.096.20	2.696.00	79.196.14
	Produksi (Ton)	41.101.64	7.034.00	4.478.20	2.937.00	56.550.84
2014*)	Luas (Ha)	66.643.87	6.783.42	3.096.82	2.696.54	79.220.65
	Produksi (Ton)	41.923.67	8.240.47	4.593.29	3.012.48	57.769.92

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2015

*) angka sementara

Dari data di atas terlihat bahwa secara total terjadi penurunan luas areal tanaman dari tahun 2010 sampai 2013, sedangkan pada tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2013, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3.83 % per tahun dan produksi komoditi karet sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2010-2014 sebesar -3.16 % per tahun.

Komoditas kakao masih didominasi oleh perkebunan rakyat, pada tahun 2014 seluas 66.643.87 Ha dengan produksi sebesar 41.923 ton. Namun jika dilihat dari produktifitas masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan PTPN, PBSN dan PBSA. Untuk tiap hektar lahan hasil produksi kakao rakyat baru sekitar 0.63 ton/Ha. Sementara produktifitas kakao PTPN sebesar 1.21 ton/Ha, PBSN sebesar 1.48 ton/Ha dan PBSA sebesar 1.12 ton/Ha. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengelolaan pertanaman kakao yang dikelola oleh rakyat. Sehingga perlu pembinaan yang lebih intensif dan berkelanjutan, baik dalam budidaya maupun penanganan pasca panen dalam rangka meningkatkan harga penjualan kakao rakyat.

Sementara itu dari data pertanaman rakyat ternyata masih terdapat areal yang tidak produktif (Tanaman Tidak Menghasilkan) yang membutuhkan peremajaan seluas 64.749.32 Ha, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.52.
Luas Areal Perkebunan Rakyat tahun 2014

No	Jenis Komoditas	Luas Areal (Ha)			
		TBM	TM	TTM	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Karet	60.237.59	299.913.49	35.038.95	395.190.02
2	Kelapa Sawit	60.126.76	351.435.29	3.478.26	415.040.31
3	Kopi Arabika	14.394.43	43.208.56	3.672.57	61.275.56
4	Kopi Robusta	2.101.43	12.838.09	5.719.61	20.659.13
5	Kelapa	9.630.32	92.401.18	8.448.52	110.480.02
6	Kakao	16.536.04	47.051.72	3.056.12	66.643.87
7	Cengkeh	641.59	1.854.47	614.25	3.110.30
8	Kemenyan	817.64	19.533.07	2.048.28	22.399.00
9	Kulit Manis	1.088.59	3.874.52	710.33	5.673.44
10	Nilam	-	816.01	-	816.01
11	Kemiri	888.22	9.289.20	679.11	10.856.54
12	Tembakau	-	1.795.70	-	1.795.70
13	Tebu	-	1.195.12	-	1.195.12
14	Pala	11.8	93.54	26.97	132.31
15	Lada	14.52	111.43	24.70	150.65
16	Kapuk	70.6	315.10	70.30	456.00
17	Gambir	378.16	1.420.88	188.96	1.988.00
18	Aren	1.244.38	3.276.37	658.35	5.179.10
19	Pinang	1.117.80	4.157.90	284.65	5.560.35
20	Vanili	33.6	138.55	24.60	196.75
21	Jarak	-	11.04	2.96	14.00
22	Kapulaga	6	9.39	0.61	16.00
23	Jambu Mete	6.24	5.54	1.22	13.00
Jumlah :		169.345.71	890.949.35	64.749.32	1.128.841.18

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2015
*) estimasi angka sementara

c. **Peternakan**

1) Ternak Besar

Populasi ternak besar di Sumatera Utara yang meliputi ternak kuda, sapi, kerbau dan sapi perah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.53.
Kondisi Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara
dari Tahun 2010-2014

Jenis Ternak Besar	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kuda	3.098	3.175	3.069	2.133	2.153
Sapi	462.443	456.752	609.951	523.277	654.185
Kerbau	161.046	128.540	131.483	93.966	127.487
Sapi Perah	2.569	932	1.057	1.901	1.184
Total	629.156	589.399	745.560	621.277	785.009

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara.SUDA 2014

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara. 2015

Jika dilihat secara total, dari tahun 2010-2014 jumlah populasi ternak besar sangat fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan populasi ternak besar dari tahun 2010 hingga 2014 sebesar 7.47 % per tahun. Pada tahun 2014 populasi ternak besar mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 163.732 ekor. Peningkatan populasi ini terutama terjadi pada ternak Sapi diikuti oleh ternak Kerbau dan Kuda. Sedangkan pada ternak sapi perah mengalami penurunan populasi pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 sebesar 717 ekor.

2) Ternak kecil

Kondisi populasi ternak yang dikategorikan kecil di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.54.
Kondisi Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2014

Jenis Ternak Kecil	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kambing	744.535	763.147	781.774	849.487	894.235
Domba	317.777	325.722	374.286	595.517	625.297
Babi	742.670	761.235	866.207	978.717	989.120
Total	1.804.982	1.850.104	2.022.267	2.423.721	2.508.652

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara. SUDA 2014

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara. 2014

Populasi ternak kecil pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 84.931 ekor dibanding tahun 2013. Peningkatan populasi terjadi pada ternak Kambing dan Domba sedangkan pada ternak Babi mengalami penurunan populasi pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan total populasi ternak kecil dari tahun 2010 sampai 2014 sebesar 8.79 % per tahun.

3) Ternak Unggas

Kondisi populasi ternak yang dikategorikan unggas di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.55.
Kondisi Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak
Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2010-2014

Jenis Ternak Unggas	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Ayam Ras Petelur	8.839.750	9.060.742	12.055.592	15.704.311	16.383.627
Ayam Ras Pedaging	39.376.258	40.360.663	42.813.178	46.064.412	47.528.611
Ayam Kampung	11.671.883	11.963.681	12.073.428	15.545.153	16.475.729
Itik Manila	2.569.664	2.633.909	2.790.326	2.411.989	2.526.035
Total	62.457.555	64.018.995	69.732.524	79.725.865	82.914.002

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara. SUDA 2014

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara. 2014

Populasi ternak unggas pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 3.188.137 ekor dibanding tahun 2013. Peningkatan populasi terbesar pada Ayam Ras Pedaging diikuti oleh Ayam Kampung, Ayam Ras Petelur dan Itik Manila. Sedangkan rata-rata pertumbuhan populasi ternak unggas dari tahun 2010 sampai 2014 sebesar 7.44 % per tahun.

d. **Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (ADHK 2010)**

Dari data diatas dapat disimpulkan tentang produktifitas dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Utara berdasarkan harga konstan. sebagai berikut :

Tabel 2.56.
Produktivitas Bahan Pangan Utama. Kontribusi Sektor Pertanian
Terhadap PDRB ADHK

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*
1.	Produktivitas Bahan Pangan (Kw/Ha)					
	- Padi (GKG)	47.47	47.62	48.56	50.17	50.64
	- Jagung	50.13	50.71	55.41	55.87	57.82
	- Kedele	12.10	10.01	9.90	10.33	11.36
2.	Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK 2010)	-	5,88	5,3	4,71	4,37
3.	Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK 2010)	25,79	25,42	24,9	24,5	23,2

Sumber : - BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

- Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

2.1.3.2.2. Kehutanan

a. Luas Kawasan Hutan

Data luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.57.
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Tahun 2006– 2014 (Ha)

Tahun	Fungsi Hutan			
	Produksi	Lindung	Hutan Konsevasi	Hutan Produksi Dikonversi
2006*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2007*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2008*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2009*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2010*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2011*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2012*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2013*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2014**)	1.346.221.88	1.206.881.32	427.007.49	75.684.33

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

*) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penujukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

***) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas menunjukkan adanya perubahan luas kawasan hutan pada fungsi hutan yang berbeda sebagai akibat diterbitkannya SK Menteri Kehutanan Nomor: SK. 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara (menggantikan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penujukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 47/P/Hum/2011 pada tanggal 23 Desember 2013). Total luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara adalah 3.055.795.02 hektar atau 42.90% dari luas total wilayah (yang sebelumnya seluas 3.742.120 hektar). Terdiri dari Hutan Konservasi seluas 427.007.49 hektar; Hutan Lindung seluas 1.206.881.32 hektar; Hutan Produksi Terbatas seluas 641.769.79 hektar; Hutan Produksi Tetap seluas 704.452.09 hektar dan Luas Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 75.684.33 hektar.

Hasil hutan baik merupakan hasil utama maupun hasil ikutan dari tahun 2009-2014 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.58.
Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Jenis Produksi Tahun 2010-2014

Jenis Produksi		Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
A.	Hasil Utama						
1.	Log Rimba	M ³	157.776.95	367.638.30	621.543.83	106.228.77	290.360.00
2.	Log Pinus	M ³	27.863.39	78.586.89	93.665.92	3.405.48	149.907.27
3.	Kayu Gergajian	M ³	264.955.86	233.781.35	464.866.105	360.066.032	451.953.94
4.	Kayu Lapis	M ³	37.334.43	60.427.34	45.417.480	31.467.219	104.704.67
5.	PULP	M ³	176.082.31	185.403.99	178.676.080	182.436.560	139.618.05
6.	Block Board	M ³	-	-	-	-	8.884.54
7.	Moulding	M ³	143.179.44	70.047.54	-	52.447.433	-
B.	Hasil Ikutan						

1.	Rotan	Ton	315.12	65.70	45.00	-	-
		Batang	185.02*)	-	7.654.00	-	-
2.	Arang	Ton	-	-	-	-	-
3.	Getah Tusam	Ton	572.00	518.79	56.27	-	798.52

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Batang

b. Kerusakan Kawasan Hutan

Lahan kritis adalah bidang tanah yang tidak produktif dan kurang memiliki daya dukung bagi pertumbuhan tanaman hutan. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya. sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Berdasarkan kondisinya vegetasinya, kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai : sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan kondisi normal (tidak kritis).

Total luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2014 adalah 6.620.036.86 hektar, dengan tingkat kekritisannya lahan sebagai berikut:

- Tidak Kritis : 1.549.264.76 hektar
- Potensial Kritis : 1.749.347.63 hektar
- Agak Kritis : 1.520.973.87 hektar
- Kritis : 1.460.817.50 hektar
- Sangat Kritis : 339.633.10 hektar

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa lahan dengan kategori potensial kritis memiliki persentase luas terbesar yakni 27% dari total luas lahan kritis atau seluas 1.749.347.63 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa lahan di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kritis yang besar. Sedangkan untuk kategori lahan sangat kritis memiliki persentase 5% atau seluas 339.633.10 hektar. Untuk kategori ini memerlukan penanganan rehabilitasi lahan yang sangat prioritas.

c. Rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan adalah usaha yang dilakukan baik fisik maupun vegetative guna memulihkan nilai dan fungsi hutan serta lingkungannya, akibat mengalami kerusakan dari beberapa macam gangguan. Rehabilitasi lahan adalah upaya memulihkan kondisi dengan penanaman pohon dan konservasi tanah.

Total luas lahan yang telah direhabilitasi pada tahun 2014 adalah 27.977.99 hektar yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 7.993.99 hektar dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 19.984.00 hektar. Kegiatan rehabilitasi lahan yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan reboisasi seluas 573.50 hektar, penanaman hutan rakyat seluas 3.388.00 hektar, pembangunan kebun bibit rakyat sebanyak 173.00 unit, pembuatan dam pengendali sebanyak 5 unit, dan pembuatan sumur resapan sebanyak 5 unit.

d. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Konstan selama tahun 2010 -2012 terjadi penurunan kontribusi, walaupun nilai rupiahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan masih perlunya perhatian terhadap intensitas pengusahaan hutan, tanpa melupakan aspek pelestariannya. Untuk selengkapnya dapat dilihat ada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59.
*Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK
 Tahun 2008 - 2012 Provinsi Sumatera Utara*

Tahun	Kontribusi ADHB		Kontribusi ADHK	
	(Miliar Rp.)	%	(Miliar Rp.)	%
2009	2.506	1,06	1.460	1,31
2010	2.736	0,99	1.442	1,21
2011	2.987	0,95	1.451	1,15
2012	3.196	0,91	1.504	1,12

Sumber : Statistic Indonesia , PDRB Menurut Lapangan Usaha 2009-2013

2.1.3.2.3 Energi dan Sumberdaya Mineral

a. Energi Listrik

Sistem tenaga listrik Provinsi Sumatera Utara tidak bisa dilepaskan dari sistem Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero). Tenaga listrik dipasok kepada masyarakat melalui sistem terintegrasi pembangkit, transmisi dan distribusi. Karena seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah usaha PT. PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik terintegrasi hanya dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Sistem ketenagalistrikan SUMBAGUT terdiri dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Sistem SUMBAGUT dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Sumber energi primer yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik sistem SUMBAGUT bervariasi dari minyak bumi, gas, batubara, air dan panas bumi.

Tabel 2.60.
Inventarisasi Pembangkit Listrik Terpasang yang Memasok Energi Listrik ke Sistem Sumbagut sampai dengan Tahun 2014

No	Lokasi Pembangkit	Kapasitas Terpasang (MW)				
		Energi Fosil		Energi Terbarukan		
		Diesel	Batubara	Air	Panas Bumi	Biomassa
Sektor Belawan						
1	PLTU. PLTGU. PLTD sewa	1.284				
Sektor Medan						
2	Glugur	36				
3	Paya Pasir	119				
4	Titi Kuning	25				
5	PLTD Sewa	335				
Sektor Pandan						
6	Sipansihaporas			50		
7	Renun			80		
8	PLTMH tersebar			5		
Sektor Labuhan Angin						
9	Labuhan Angin #1. #2		230			
Sektor Pangkalan Susu						
10	Pangkalan Susu #1. #2		440			
Independent Power Producer (IPP)						
11	Asahan I (#1. #2)			180		
12	PLTM Parlilitan			7.5		
13	PLTM Silau			7.5		
14	PLTM Huta Raja			5		
15	PLTM Karai			8.3		
16	Sibayak #1				10	
17	PLTU Growth Sumatera					11
18	PLTU Growth Asia					20
19	PLTU Rambutan					2
Jumlah		1.799	670	343.3	10	33
		2.469		386.3		
Total		2.855.3				

(Sumber : UPB PT. PLN Sumatera Utara)

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Provinsi Sumatera Utara yang memasok daya ke sistem SUMBAGUT adalah sebesar 2.855.3 MW. Selain menggunakan bahan bakar terbarukan berupa diesel dan batubara, beberapa pembangkit listrik memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi dan biomassa. Kapasitas pembangkit berbasis energi fosil dan energi terbarukan masing-masing 2469 MW dan 386.3 MW. Komposisi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yaitu sebesar 13.5 % dari total kapasitas terpasang di Provinsi Sumatera Utara

Selain Pembangkit Listrik Terpasang yang Memasok Energi Listrik ke Sistem Sumbagut, sumber daya listrik terpasang lain di Sumatera Utara yang dikelola oleh PLN Wilayah Sumut sebesar 7.500 KW yang berasal dari pembangkit listrik PLTM dan 132.000 KW yang berasal dari PLTA, tersebar di 8 lokasi. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.61.
*Inventarisasi pembangkit listrik tenaga air
 Yang dikelola PLN Persero Wilayah Sumut Status Tahun 2014*

No.				KLASIFIKASI PEMBANGKIT	DAYA TERPASANG (KW)
	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA / DUSUN		
1.	Simalungun	Tanah Jawa	Tonduhan	PLTM	2 x 200 = 400
2.	Pakpak Bharat	- Kerajaan	Kombih I	PLTM	2 x 750 = 1500
		sda	Kombih II	PLTM	2 x 750 = 1500
3.	Madina	Penyabungan	Batang Gadis	PLTM	2 x 450 = 900
4.	Humbahas	- Dolok Sanggul	Silang	PLTM	1 x 750 = 750
		- Dolok Sanggul	Sibundong	PLTM	1 x 750 = 750
5.	Tap. Utara	- Adian Koting	Raisan I	PLTM	1 x 750 = 750
		sda	Raisan II	PLTM	1 x 750 = 750
6.	Samosir	Pangururan	Boho	PLTM	1 x 200 = 200
7.	Dairi	Sumbul	Silalahi II	PLTA Renun	2 x 41.000 = 82.000
8.	Tap. Tengah	Sibolga	Sibuluan II	PLTA Sipansihaporas	1 x 50.000 = 50.000
			TOTAL	PLTM = 9 PLTA = 2	7.500 132.000

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provsu

Berdasarkan data UPB PT. PLN Sumatera Utara, kapasitas terpasang pembangkit listrik yang berlokasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebesar 463 MW. Jadi, total kapasitas terpasang pembangkit sistem SUMBAGUT yaitu sebesar 3318.3. Sedangkan daya mampu pasok pembangkit sistem SUMBAGUT hanya sekitar 1500 MW atau sekitar 45.2 % dari total kapasitas terpasang. Kemampuan pasok pembangkit relatif rendah disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Kondisi pembangkit eksisting yang sudah berumur di atas 20 tahun khususnya di pembangkit sektor Belawan dan Medan sehingga rentan mengalami kerusakan.
2. Pembangkit-pembangkit baru dibangun berbahan bakar batubara justru sering tidak stabil atau keluar sistem kelistrikan seperti PLTU Labuhan Angin (230 MW).
3. PLTU Nagan Raya (220 MW) dan PLTU Pangkalan Susu (440 MW) belum beroperasi maksimal terkendala persoalan teknis.

Penyediaan energi listrik di sisi pembangkit sangat terbantu oleh kebijakan PT. PLN (Persero) melakukan sewa pembangkit diesel (455 MW) yang tersebar di sektor Medan dan Belawan. Beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara pada tahun 2013 dan 2014 sudah mencapai sekitar 1750 MW. Kondisi ini tidak dibarengi dengan daya mampu pasok yang hanya sekitar 1500 MW, sehingga terjadi defisit listrik sekitar 250 MW. Kondisi kelistrikan Sumatera Bagian Utara masih jauh dari kondisi ideal yaitu seharusnya memiliki cadangan listrik ideal 30 % dari beban puncak. Apabila beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara sekitar 1750 MW maka seharusnya cadangan daya listrik sudah mencapai sekitar 525 MW.

Data Bank Indonesia pada tahun 2014, Provinsi Sumatera Utara mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5.55 %. Jika pertumbuhan kebutuhan listrik optimistik Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada angka di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata yaitu sekitar 7 % maka kebutuhan listrik pada Tahun 2015 akan mengalami kenaikan 122.5 MW sehingga beban puncak listrik dapat mencapai angka sekitar 1872.5 MW. Jika tidak maksimal perbaikan

kinerja pembangkit eksisting dan tidak adanya pembangunan pembangkit baru di Sumatera Utara maka bisa dibayangkan pertumbuhan sektor listrik tidak bisa menunjang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang relatif tinggi.

b. Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sumatera Utara relatif kecil hanya sekitar 1.31% yang terutama berasal dari galian mineral/batuan. Pertumbuhan sektor Pertambangan dan penggalan di Sumatera Utara jika dilihat dari tahun 2010 naik yaitu sebesar 1.01 % menjadi 1.31 % di tahun 2014.

Pertambangan berpotensi membawa kerusakan disekitar kawasan pertambangan akibat masyarakat sekitar yang ikut melakukan penambangan secara liar. Oleh karena itu perlu penertiban penambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat. selain itu perlu dikembangkan mata pencarian alternative bagi masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.

2.1.3.2.4. Pariwisata

Sumatera Utara memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata minat khusus. Namun jika dilihat dari kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara yang masih sangat kecil dibandingkan sektor lainnya menunjukkan kurang optimalnya penanganan pariwisata di Sumatera Utara. Salah satu faktor pendukung yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata adalah aksesibilitas menuju ke daerah wisata yang dirasa masih sangat kurang. Selain itu dukungan masyarakat pariwisata di Sumatera sangat diperlukan untuk peningkatan sektor pariwisata di Sumatera Utara. Berikut ditampilkan jumlah kunjungan wisman ke Sumatera Utara dalam jangka waktu 5 tahun terakhir,

Tabel 2.62.
Wisatawan Mancanegara yang datang Ke Sumatera Utara menurut Pintu Masuk
(tahun 2010-2014)

Tahun	Bandar Udara Polonia/ Kuala Namu	Pelabuhan Laut Belawan	Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan	Jumlah Total
2010	202.296	18.260	14.962	235.518
2011	192.650	18.975	11.501	223.126
2012	205.845	22.132	13.856	241.833
2013	225.550	22.631	11.118	259.299
2014	234.724	24.769	11.344	270.837

Sumber : BPS Prov.Sumatera Utara

Selama Januari-Desember 2014, jumlah wisman yang berkunjung ke Sumatera Utara mencapai 270.837 orang, yang berarti meningkat 4,45 persen dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2013. Persentase kenaikan tertinggi terjadi di pintu masuk Belawan sebesar 9,45 persen, melalui pintu masuk Bandara Kuala Namu dengan kenaikan sebesar 4,07 persen, dan jumlah wisman yang datang melalui pintu masuk Pelabuhan Laut Tanjungbalai Asahan mengalami kenaikan sebesar 2,03 persen.

Tabel 2.63.

Jumlah Hotel Menurut Kelas di Sumatera Utara dari Tahun 2010 – 2014

No.	Kelas	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Melati	710	712	712	693	N/A
2	Bintang 1	22	24	24	23	N/A
3	Bintang 2	20	20	23	26	N/A
4	Bintang 3	13	14	18	25	N/A
5	Bintang 4	10	12	11	16	N/A
6	Bintang 5	9	6	7	6	N/A
Jumlah		727	788	795	789	N/A

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Utara pada bulan Desember 2014 mencapai rata-rata 45,86 persen, atau naik 1,37 poin dibanding TPK hotel berbintang bulan November 2014 yang sebesar 44,49 persen. Namun jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya angka TPK Desember 2014 turun 1,98 poin, yaitu dari 47,84 persen bulan Desember 2013 menjadi 45,86 persen pada bulan Desember 2014.

2.1.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

1) Perikanan tangkap

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan. Provinsi Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan produksi perikanan tangkap untuk dapat dikonsumsi di dalam negeri serta di ekspor ke luar negeri. Tabel berikut ini menyajikan data mengenai perkembangan produksi perikanan tangkap Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010-2014.

Tabel 2.64.
Kondisi Produksi Perikanan Tangkap
Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2010-2014

Rincian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Penangkapan di Laut	370.507	379.770	391.352	508.360.6	515.325.00
Penangkapan di Perairan Umum	24.979	28.979	32.892	46.950.4	50.471.27
JUMLAH	395.486	408.748	424.244	555.311	565.796.27

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu. 2015. (Data diolah)

Dari tabel di atas diketahui produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 meningkat sebesar 1.89 % dibanding produksi perikanan pada tahun 2013. Dengan rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebesar 9.98 %.

2) Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. seperti tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.65.
Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Tahun 2010-2014

Rincian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Perikanan Budidaya	118.942.80	126.386.40	143.447	193.750	204.744.20

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu. 2015. (Data diolah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 5.67 % dibanding produksi tahun 2013. Sedangkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya sebesar 15.12 %.

Sementara itu menurut data volume dan nilai ekspor serta konsumsi ikan/kapita penduduk Sumatera Utara juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.66.
Produksi Ekspor. Konsumsi Ikan/Kapita Tahun 2010-2014

TAHUN	EKSPOR		KONSUMSI IKAN/KAPITA (KG)
	Volume (ton)	Nilai (US \$)	
2010	54.678.73	206.058.110.53	29.59
2011	51.508.65	213.663.776.33	34.66
2012	52.719.29	225.434.288.08	31.92
2013	56.185.92	250.900.694.10	38.95
2014	57.314.05	299.591.121.35	40.10

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu. 2015. (Data diolah)

Volume ekspor perikanan pada tahun 2014 meningkat sebesar 1.128.13 ton atau 2.01 % dibanding tahun 2013. Begitu juga untuk konsumsi ikan/kapita tahun 2004 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 1.15 kg/kapita atau meningkat sebesar 2.95 %. Naiknya konsumsi ikan/kapita pada masyarakat menjadi indikator kenaikan gizi masyarakat terutama untuk sumber protein.

Tabel 2.67.
Potensi Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Ekspor Ikan (ton / thn)	Produksi ikan (ton / thn)
2010	54.678.73	514.429.10
2011	51.505.65	535.134.60
2012	52.719.29	567.691.10
2013	56.185.92	758.972.69
2014	57.314.05	204.744.20

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu. 2015. (Data diolah)

2.1.3.2.6. Perdagangan

- a. Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB

Kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB adalah perbandingan antara nilai kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap jumlah PDRB dalam

bentuk persentase. Nilai ini menggambarkan seberapa besar peran kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB pada tahun tertentu. Tabel berikut menjelaskan kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB untuk tahun 2010-2014 di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.68.

Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap ADHK 2010 dan ADHB Tahun 2010 s/d 2014 Provinsi Sumatera Utara

Tahun	PDRB (ADHK 2010)	ADHK 2010		PDRB (ADHB)	ADHB	
		(JutaRp.)	%		(JutaRp.)	%
2010	331,085,237.47	56,555,799.54	17.08	331,085,237.47	56,555,799.54	17.1
2011	353,147,591.20	60,589,055.04	17.16	377,037,101.03	64,308,761.08	17.1
2012	375,924,139.50	65,384,605.2	17.39	417,120,438.7	70,891,922.7	17.0
2013	398,779,250.40	69,025,207.6	17.31	470,221,983.6	78,324,823.4	16.7
2014	419,649,281.70	73,817,641.8	17.59	523,771,565.5	89,596,998.2	17.1

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan adalah Nilai Ekspor suatu daerah selama satu tahun dikurangi dengan jumlah Nilai Impor selama satu tahun. Untuk menggambarkan nilai ekspor bersih perdagangan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 s.d 2014 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.69.

Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2010-2014
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	EKSPOR		IMPOR		Neraca (000 US\$)
	BeratBersih	Nilai FOB	BeratBersih	Nilai CIF	
	(Ton)	(000 US\$)	(Ton)	(000 US\$)	
2010	7.992.103	9.147.778	6.171.734	3.576.248	5.571.530
2011	8.161.003	11.883.268	6.718.063	4.953.462	6.929.806
2012	8.695.942	10.393.936	6.813.898	5.164.751	5.229.185
2013	9.275.859	9.597.907	6.922.414	5.108.737	4.489.170
2014	9.087.526	9.361.110	7.391.305	5.046.514	4.314.598

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (BRS 02 maret 2015)

2.1.3.2.7. Perindustrian

Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dari tahun 2011-2014 sangat fluktuatif, bahkan cenderung mengalami penurunan di dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan hanya mencapai 2,97 persen, hal ini dikarenakan adanya indikasi awal bahwa penurunan ini merupakan imbas dari pasokan energy yang belum optimal, seperti pasokan listrik dan gas.

Tabel 2.70.
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Berdasarkan ADHK 2010 dan ADHB
Provinsi Sumatera Utara 2010-2014

Tahun	Kontribusi						LajuPert umbuha n ADHK
	ADHK 2010			ADHB			
	PDRB (ADHK 2010)	Sektor Industri Pengolahan (Rp. Milyar)	%	PDRB	SektorIndustri(Rp . Milyar)	%	
2010	331,085,237.47	70,540,953.80	21.31	331,085,237.47	70,540,953.80	21.3	-
2011	353,147,591.20	72,815,223.08	20.62	377,037,101.03	79,947,917.24	21.2	3.22
2012	375,924,139.50	76,922,410.60	20.46	417,120,438.7	86,171,929.7	20.7	5.6
2013	398,779,250.40	80,648,618.0	20.22	470,221,983.6	93,241,472.5	19.8	4.84
2014	419,649,281.70	83,042,087.5	19.79	523,771,565,5	104,224,003.8	19.9	2.97

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dilihat capaian indikator kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia :

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus Kemampuan Daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Nilai tukar petani dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan).

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Perbulan selama periode tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.71.
Angka Konsumsi RT perkapita/bulan Tahun 2009 - 2013

NO	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Total Pengeluaran RT	432.389	499.694	564.565	599.060	656.133
	a. Pangan	236.917	267.180	316.343	344.467	363.363
	b. Non Pangan	195.472	232.514	248.222	254.593	292.770
2	Jumlah RT	3.027.500	3.037.716	3.083.199	3.131.600	3.168.566
3	Rasio (Pengeluaran RT/ Jumlah RT)	14,28	16,44	18,31	19,13	20,71

Sumber : BPS Sumatera Utara (data diolah)

b. Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Secara konsepsional NTP adalah pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari

kesejahteraan petani. namun NTP sampai saat ini masih merupakan salah satu indikator untuk mengidentifikasi kesejahteraan petani.

Berikut ini disajikan tabel yang memperlihatkan kondisi Nilai tukar Petani Sumatera Utara tahun 2010-2014 :

Tabel 2.72.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010 s.d 2014
Provinsi Sumatera Utara

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	129.12	138.20	141.49	147.08	NA
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	126.14	133.64	139.12	147.83	NA
3.	NTP	102.36	103.42	101.71	99.49	100.08

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama 5 (lima) tahun terakhir atau selama periode 2010-2014. NTP Sumatera Utara tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan pada angka 99-103. Selama periode tersebut. NTP turun pada tahun 2013 yaitu sebesar 99.49. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani dari sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Terjadinya penurunan NTP pada tahun 2013, terutama disebabkan penyesuaian harga BBM bersubsidi yang terjadi pada bulan Juni 2013 yang dampaknya dirasakan oleh petani perdesaan. Kenaikan tersebut terlihat dari kenaikan inflasi perdesaan yang mencapai 2.53 pada bulan Juli 2013. Akan tetapi pada tahun 2014 terjadi kenaikan NTP menjadi 100.08.

- c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Tabel 2.73.
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Tahun 2009-2013 Provinsi Sumatera Utara

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	195.472	232.514	248.222	254.593	292.770
2.	Total Pengeluaran RT	432.389	499.694	564.565	599.060	656.133
3.	Rasio	45.21	46.53	43.97	42.50	44,62

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data diolah)

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Capaian Indikator Iklim Berinvestasi dilihat dari lama pengurusan ijin dan kondisi keamanan daerah (angka kriminalitas dan aksi demonstrasi) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Lama Proses Perijinan

Dalam hal proses perizinan di Provinsi Sumatera Utara telah diterbitkan Peraturan Gubernur no. 55 Tahun 2010. tentang pedoman. tata cara permohonan dan jenis perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal.

Dalam pergub tersebut telah diatur tentang penerbitan perizinan dan non perizinan lama proses nya 10 hari. terkecuali perizinan yang terkait dengan penataan ruang. lingkungan hidup. keamanan. keselamatan dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan perundang-undangan.

b. Angka kriminalitas

Tabel 2.74.
Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara 2009-2013

No	Jenis Kriminal	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Kasus Narkoba	2.802	2.718	2.728	2.432	2.713
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	105	130	129	133	118
3	Jumlah Kasus Perkosaan	214	207	113	124	305
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	6.210	6.836	6.971	6.898	7.445
5	Jumlah Kasus Pencurian	9.040	10.355	11.639	10.783	10.797
6	Jumlah Kasus Penipuan	1.707	2.317	2.808	2.316	1.877
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	22	13	31	17	12
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	35.336	41.806	47.156	43.234	43.652
9	Jumlah Penduduk	13.201.715	13.339.353	13.103.596	13.215.401	13.326.307
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0.26%	0.31%	0.35%	0.32%	0.33%

Sumber : SUDA 2014

c. Jumlah Demonstrasi

Tabel 2.75.
Jumlah Demo Provinsi Sumatera Utara, 2009 – 2012

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	Bidang Politik	243	193	84	64
2	Ekonomi	82	47	55	211
3	Sosial Budaya	66	279	70	309
4	Kasus Pemogokan Kerja	82	72	60	47
5	Jumlah Unjuk Rasa	473	591	269	631

Sumber : POLDA SUMUT, 2013

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ada tren peningkatan gangguan keamanan dari tahun 2009 – 2013 dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi dan gangguan kenyamanan berupa aksi demonstrasi yang berakibat negatif terhadap investasi di daerah ini.

Hal ini perlu diantisipasi dan dukungan dari semua pihak, baik aparat keamanan, maupun masyarakat untuk menjaga agar kondisi keamanan tetap kondusif, sehingga menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Jika dilihat dari rasio ketergantungan terlihat bahwa terjadi penurunan angka rasio ketergantungan usia tidak produktif, yang menunjukkan semakin baiknya struktur angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel ini memperlihatkan data rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.76.
Jumlah penduduk dan Rasio Ketergantungan
Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	4.139.648	3.461.930	4.344.275	4.381.084	4.311.313
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	517.226	568.777	509.599	513.793	514.899
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	4.656.874	4.030.707	4.853.874	4.894.877	
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	6.076121	6.379.748	6.105.409	5.950.598	8.500.095
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,76	0,63	0,79	0,82	

Sumber : BPS, 2013

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel rangkuman berikut ini :

Tabel 2.77.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Sumatera Utara

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	PDRB ADHB (Rp. Trilyun)	331.09	337.04	417.12	470.22	523.77		<
1.2.	PDRB ADHK (Rp. Trilyun)	331.09	353.15	375.92	398.78	419.65		<
1.3.	Pertumbuhan ekonomi (%)	6.38	6.66	6.45	6.08	5.23		<
1.4.	Laju inflasi provinsi (%)	8.0	3.67	3.86	10.18	8.17		<
1.5.	PDRB per kapita ADHB (Rp.Juta/Jiwa)	25.5	28.77	31.56	35.29	38.83		<
1.6.	Nilai Tukar Petani (NTP)	102.36	103.42	101.71	99.49	100.08		<
1.7.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,7148	0,051	0,049	0,045			<
1.8.	Persentase penduduk miskin (%)	11,31	10,83	10,41	10,39			<
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf (%)	97,32%	97,46%	97,65	97,51	-		-
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,85	8,91	-		-		-
1.3.	Angka partisipasi kasar							-
1.3.1.	PAUD (%)	31,27	35,50	33,87	33,87	-		-
1.3.2.	SD/MI (%)	114,20	104,56	104,56	106,26	-		-
1.3.3.	SMP/MTs (%)	89,83	89,02	89,02	88,55	-		-
1.3.4.	SMA/SMK/MA (%)	72,69	79,69	79,69	80,58	-		-
1.4.	Angka Partisipasi Murni							
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	95,33	91,46	91,46	93,26	-		-
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	74,76	67,96	67,96	70,51	-		-
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	55,72	57,83	57,83	60,02	-		-
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi, dilihat dari Angka Kematian Bayi /1000 kelahiran hidup	23,0	23,0	23	22	-		=
2.2.	Angka Kematian Ibu dilihat dari Kematian Ibu Melahirkan/ 100.000 kelahiran hidup	268,0	250,0	250	285	-		>
2.3.	Angka usia harapan hidup (Tahun)	69,8	72,0	-	69,65	-		>
2.4.	Persentase balita gizi buruk (%)	21,4	20,0	-	22,50	-		=
3.	Ketenagakerjaan							
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja (%)	91,99	93,63	93,80	93,40	-		>
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	31,27	35,50	33,87	33,87	-		-
1.2.	Pendidikan dasar							
1.2.1.	APK SD + MI + Paket A	114,20	104,56	104,56	106,26	-		=
1.2.2.	APM SD + MI	95,33	91,46	91,46	93,26	-		=
1.2.3.	APK SMP + MTs + Paket B	89,83	89,02	89,02	88,55	-		=
1.2.4.	APM SMP + MTs	74,76	67,96	67,96	70,51	-		=
1.2.5.	APK SMA + MA + Paket C	72,69	79,69	79,69	80,58	-		=
1.2.6.	APM SMA	55,72	57,83	57,83	60,02	-		=
1.2.1.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	97,32	97,46	-	97,51	-		>
1.2.2.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,85	8,91	-		-		=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
1.3.	Fasilitas Pendidikan:					-		
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Unit)				-	-		-
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (Unit)				-	-		-
1.4.	Angka Putus Sekolah				-	-		-
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	1.03	0.93		-	-		-
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	4.60	4.14		-	-		-
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA (%)	6.21	5.59		-	-		-
1.5.4.	Angka Putus Sekolah (APS) SMK (%)	2.15	1.94			-		-
1.5.	Angka Kelulusan:				-	-		-
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	205.289	506.881	278,219	286,681	-		-
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	171.304	172.973	242,182	282,212	-		-
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	76.115	73.393	120,090	117,254	-		-
1.6.4.	Angka Kelulusan (AL) SMK	251.134	74.286	93,900	116,884	-		-
1.6.5.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 (orang)	31,27	35,50	33,87	33,87	-		-
1.6.6.	S2 (orang)	667	732		-	-		-
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka Kematian Bayi /1000 KLH	23,0	22,0	222	22	-		>
2.2.	Angka Kematian Ibu/100.000/KLH	305	295	285	275	-		<
2.3.	Angka usia harapan hidup (Tahun)	69,6	70,4	71,2	71,30	-		<
2.4.	Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang	21,80	21,20	20,6	20	-		>
2.5.	Rasio posyandu per satuan balita	1:55,71	1:24.681			-		-
2.6.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:25.332	1:24.681			-		-
2.7.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:69.918	1:67.616			-		-
2.8.	Rasio dokter per satuan penduduk	1:14.67	1:17,64			-		-
2.9.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:25,61	1:29,69			-		-
2.10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%			-		-
2.11.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	64,20%	86,73%			-		-
2.12.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	NA	65,78%			-		-
2.13.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%			-		-
2.14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100%	100%			-		-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
2.15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%		-	-		-
2.16.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%		-	-		-
2.17.	Cakupan kunjungan bayi	69,82%	76,82%		-	-		-
2.18.	Cakupan puskesmas	1:25.332	1:24.681		-	-		-
2.19.	Cakupan pembantu puskesmas	1:6.918	1:7.137		-	-		-
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	40,86	44,11	41,74	43,47	39,04		
3.2.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang (%)	37,99	31,32	24,85	26,13	35,38		
3.3.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak ringan (%)	9,53	13,42	17,00	13,52	8,50		
3.4.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak berat (%)	11,64	11,15	16,41	16,88	17,08		
3.5.	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	40,86	44,11	41,74	43,47	39,04		
3.6.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1: 381	1: 381		-			
3.7.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	2.752,04	2.752,04	3048,50	3048,50	-		
3.8.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) (km)	32.115,92	33.078,18	33.078,18	33.383,66	-		
3.9.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	29,08	38,70	38,25	36,88			
3.10.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	39.149	52.199	53.069	52.199	53.330	62.639	<
4.	Perencanaan Pembangunan							
4.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Dokumen)	-	-		-	-		=
4.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	-		-	-		=
4.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	1	-		-	-		=
4.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	1	1		-	-		=
5.	Lingkungan Hidup							
5.1.	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	85	-	-	-	-		
5.2.	Penegakan hukum lingkungan (kasus)	-	-	-	-	-		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
6.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-				
6.1.	Rasio KDRT (kasus)	18	17	17	20	-		
6.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57%	57%	60,85 %	56,10 %	-		
7.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
7.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	2,07	3.8	3.8	3.0	-		
7.2.	Jumlah Akseptor KB	405,961	406.638	424.583	2.210.958	-		
7.3.	Cakupan peserta KB aktif	1.429.414	1.367.255	1.463.520	1.423.051	-		
7.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	1.048.191	1.059.065	198.538	1.111.883	-		
8.	Sosial							
8.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (UPT Layanan Sosial)	19	19	19	19	-		
8.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (jenis)	23	23	26	26	-		
8.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (program)	6	6	6	6	-		
9.	Ketenagakerjaan							
9.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	77,10	72,09	69,41		-	
9.2.	Pencari kerja yang ditempatkan (org)	52.974			-	
9.3.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,43	6,37	6,20	6,00	-		<
10.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
10.1.	Persentase koperasi aktif (%)	58,57	58.60	59,8	56,8	-	
10.2.	Jumlah UKM non BPR (Unit)
10.3.	Jumlah BPR/LKM (unit)	95	95				
10.4.	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	2.151.729				
11.	Penanaman Modal							
11.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	127	123	156	378	-		>
11.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)	2.024.885,56	1.662.522,50.	9.163.446,19	13.588.420,60	-		>
11.3.	Daya serap tenaga kerja (%)	110,2	104,3	173,7	126,18	-		<
11.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	(10.02304,4,30)	(362.363,00)	7.500.923,69	4.424.974,41	-		
12.	Ketahanan Pangan							
12.1.	Regulasi ketahanan pangan (Pergub)	-	-	1	-			
12.2.	Ketersediaan pangan utama							
12.2.1	Padi (ton) GKG	3.582.302	3.607.403	3.715.514	3.727.249	3.628.968	3.794.985	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
12.2.2	Jagung (ton)	1.377.718	1.294.645	1.347.124	1.183.011	1.159.698	1.672.076	<
12.2.3	Kedele (ton)	9.436	11.426	5.419	3.229	5.705	15.051	<
12.2.4	Daging Sapi (ton)	15.707,60	18.299,60	24.546,61	32.170,78	145.449.709* daging secara keseluruhan	147.687,22* daging secara keseluruhan	
13.	Statistik							
23.1.	Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada			>
14.	Kearsipan							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	Ada	Ada	Ada				
15.	Komunikasi dan Informatika							
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	4	4	4	5	2	2	=
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA	=
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5/20	5/34	5/34	8/33	8/33	8/33	=
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6/2	15/2	15/2	200/12	200/12	200/12	=
25.5.	Web site milik pemerintah daerah	23	15	15	15	15	35	<
25.6.	Pameran/expo	Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun	4	<
16.	Perpustakaan							
26.1.	Jumlah perpustakaan	31 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota			
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	589.553	593.834	594.443	99.771			
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	326,170	652.780	679.289	699.204			
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas Padi (kw/ha)	47,47	47,62	48,56	50,17	50,64	50,3	<
1.2.	Produktivitas Jagung (kw/ha)	50,13	50,71	55,41	55,87	57,82	57,3	<
1.3.	Produktivitas Kedele (kw/ha)	12,10	10,01	9,90	10,33	11,36	10,7	<
1.4.	Kontribusi Kategori pertanian, kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%) ADHK 2010	25,84	25,65	25,38	26,05	24,85		
1.5.	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	7,75	7,42	7,14	-	-		
1.6.	Kontribusi sektor perkebunan PDRB	9,67	9,74	9,81	-	-		
1.7.	Kontribusi sektor peternakan	2,40	2,38	1,12	-	-		
1.8.	Kontribusi sektor perikanan	2,58	2,53	2,50	-	-		
1.9.	Kontribusi sektor kehutanan	1,21	1,15	1,12	-	-		
2.	Kehutanan							
2.1.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,21	1,15	1,12	-	-		
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
3.1.	Kontribusi Kategori pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB (ADHK 2010)	1,01	1,05	1,10	1,31	1,31		
4.	Pariwisata							
4.1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHK)	-	-	-	-	-		
5.	Kelautan dan Perikanan							
5.2.	Produksi perikanan	514.429,1	535.134,60	567.691,00	758.965,69	204.744,20		
5.3.	Konsumsi ikan	29,59	34,66	31,92	38,95	40,10		
6.	Perdagangan							
6.1.	Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (ADHK 2010)	17,08	17,16	19,39	17,31	17,59		
6.2.	Volume Ekspor (Juta ton)	7,99	8,16	8,70	9,28	9,09		
6.3.	Nilai Ekspor (Milyar US\$)	9,15	11,88	10,39	9,597	9,36		
6.4.	Volume Impor (Juta ton)	6,17	6,72	6,81	6,92	7,39		
6.5.	Nilai Impor (Milyar US\$)	3,58	4,95	5,16	5,11	5,05		
6.6.	Nilai Bersih Perdagangan (Milyar US\$)	5,57	6,93	5,23	4,49	4,31		
7.	Perindustrian							
7.1.	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHK 2010)	21,31	20,62	20,46	20,22	19,79		
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	-	-	-	-	-		
ASPEK DAYA SAING DAERAH		ASPEK DAYA SAING DAERAH						
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah		Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	499.694	564.565	599.060	656.131			
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp.)	232.514	248.222	254.593	292.770			
1.3.	Produktivitas total daerah							
2.	Pertanian							
2.1.	Nilai tukar petani	102.36	103.42	101.71	99.49	100.08		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
Fokus Iklim Berinvestasi		Fokus Iklim Berinvestasi						
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Angka kriminalitas yang tertangani				-	-		
1.2.	Jumlah demo	6.285		-	-		
1.3.	Lama proses perijinan	581	269	631	-	-		
1.4.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha			-	-		
1.5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa				-	-		
Fokus Sumber Daya Manusia								
1.	Ketenagakerjaan							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3				-	-		
1.2.	Rasio ketergantungan	0,63	0,79	0,82	-	-		

2.1.5. Ekonomi dan Keuangan Daerah

Secara umum gambaran hasil Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.78.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			2013	2014		2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB (Harga Berlaku)	Triliun Rp	470,22	523,77	-	-	-
2	PDRB (Harga Konstan)	Triliun Rp	398,78	419,65	-	-	-
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Berlaku Tahun Tertentu	%					
4	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun Tertentu	%	6,08	5,23	-	-	-
5	Tingkat Inflasi	%	10,18	8,17	-	-	-
6	Struktur PDRB Pendekatan Produksi Atau Sektoral :						
	- Pertanian	%	21,32	-	-	-	-
	- Pertambangan & Penggalian	%	1,30	-	-	-	-
	- Industri Pengolahan	%	21,58	-	-	-	-
	- Listrik, Gas dan Air Bersih	%	0,85	-	-	-	-
	- Bangunan	%	6,92	-	-	-	-
	- Perdagangan, Hotel & Restoran	%	19,29	-	-	-	-
	- Pengangkutan dan komunikasi	%	9,55	-	-	-	-
	- Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	%	7,68	-	-	-	-
	- Jasa - jasa	%	11,51	-	-	-	-
7	Produktivitas Sektoral yang merupakan Rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap Sektor terhadap jumlah Tenaga Kerja di sektor yang bersangkutan						
	- Pertanian	Juta	33,67	-	-	-	-
	- Pertambangan & Penggalian	Juta	178,06	-	-	-	-
	- Industri Pengolahan	Juta	174,85	-	-	-	-
	- Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta	306,01	-	-	-	-
	- Bangunan	Juta	84,09	-	-	-	-
	- Perdagangan, Hotel & Restoran	Juta	65,22	-	-	-	-
	- Pengangkutan dan komunikasi	Juta	157,54	-	-	-	-
	- Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	Juta	210,37	-	-	-	-
	- Jasa - jasa	Juta	52,62	-	-	-	-
8	Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)		1,65	-	-	-	-
9	Jumlah Penduduk Miskin	Juta Jiwa		-	-	-	-
10	Tingkat Pengangguran	%	6,08	-	-	-	-
11	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :						
	- Pendapatan Perkapita	Rp Juta	29,59	-	-	-	-
	- Kemampuan Investasi	Rp Triliun	87,11	-	-	-	-

	- Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)		0,354	-	-	-	-
	- Besaran IPM (indeks Pembangunan Manusia)	-	75,57	-	-	-	-
12	Berbagai Macam Besaran Rasio dan Perbandingan-perbandingan			-	-	-	-
	- Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,12	-	-	-	-
	- Biaya Pendidikan, Kesehatan, Penelitian dan sebagainya terhadap PDRB	%	0,15	-	-	-	-
	- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)	%	1,81	-	-	-	-

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Tahun 2009-2013.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun lalu (2009 - 2013), didasarkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018 yang merupakan penjabaran tahun ke-tiga dari masa bhakti Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat Kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun 2016. Selain itu untuk mereview RPJMD dan RKPD, dengan memperhatikan dokumen RKPD tahun 2015. Perkembangan capaian pelaksanaan kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2014-2014) adalah sebagai berikut :

2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2014

Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat dari capaian Indikator makro pembangunan, baik indikator makro pembangunan sosial, maupun indikator makro pembangunan ekonomi. Salah satu indikator makro pembangunan sosial yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu : meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak.

Selanjutnya, salah satu indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yaitu : PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga Konstan), Pendapatan per Kapita dan Tingkat Inflasi.

Tabel 2.79
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2014
Provinsi Sumatera Utara

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
I. Wajib																	
1.	Pendidikan	1.1. Indeks Pendidikan			60												
		1. APK PAUD			112,59											55,67	
		2. APK SD + MI + Paket A	111,4	112,59	92,66	111,4						100				108,11	<
		3. APM SD + MI	92,66	92,66	105,01	92,66						100				96,40	>
		4. APK SMP + MTs + Paket B	101,19	105,01	97,52	101,19						100				96,35	<
		5. APM SMP + MTs	93,29	97,52	89,99	93,29						100				85,90	<
		6. APK SMA + MA + SMK	82,46	89,99	74,57	82,46						100				92,28	<
		7. APM SMA	68,5	74,57	1,54	68,5						100				80	<
		8. Buta Aksara	1,79	1,67	10,07	1,54						86,03				99,77	>
		9. Rata - Rata Lama Sekolah (tahun)	9,66	10,07		9,66						100				12	<
2.	Kesehatan	2.1. Indeks Kesehatan			22												
		1. Angka Kematian Bayi (/1000 KLH)	24	23	275	22,0						91,7				19	>
		2. Angka Kematian Ibu (AKI) (100.000 KLH)	295	285	72	250,0						118,0				235	<
		3. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	70,4	71,2	20	72,00						98,9				72	=
		4. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang (%)	21,20	20,6		20,9						101,4				20	>
3	Pekerjaan Umum																
	a. Sumber Daya Air	3.1. Irigasi (Ha)															
		1. Pemeliharaan (rutin tiap tahun)	80.659	88.725	73.326	72.934	73.326	73.318	80.000	73.318	75.201	90,94	82,64	98,04	103,10	90	<
		2. Perbaikan/ Peningkatan	7.480	8.228	9.051	21.712	6.040	5.599	9.051	10.225	12.062	80,75	68,05	100	55,56	61,86	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		3,2 Rawa (Ha)															
		1. Pemeliharaan (rutin tiap tahun)	67.905	74.696	82.166	55.832	61.732	55.232	80.413	55.232	52.832	67,9	74,69	82,16	103,10	74,91	<
		2. Perbaikan/ Peningkatan	4.620	5.590	5.590	41.046	2.604	1.135	5.560	5.560	7.000	56,36	22,33	100	55,56	59,30	<
		3,3 Sungai (m)															
		1. Perkuatan tebing	11.550	12.705	13.976	4.426	12.261	5.814	11.976	4.060	3.090	106,15	45,76	85,68	69,81	41,60	<
		2. Normalisasi/ pelurusan	10.495	11.495	12.645	19.469	16.345	42.070	10.000	15.000	36.300	156,41	36,59	79,87	186,45	332,70	>
		3. Pembangunan/ Perbaikan tanggul	16.775	18.453	20.298	19.469	17.615	14.430	20.296	14.800	36.300	115,5	78,20	100	186,45	71,09	<
		3,4 Penyediaan Air Baku/Embung (unit)	4	4	4	20	9	7	4	7	1	225,0	175	100	5	175	>
	b. Bina Marga	4.1. Kondisi Jalan dan Jembatan Bertambah Baik, Pelayanan Lalu lintas menjadi Lebih Baik (km)															
		1. Pembangunan Jalan (Km)	121,00	133,10	146,41	241,54	320,70	208,93	100,55	147,30	203,37	172,67	75,54	100,47	84,20	63,41	>
		2. Penggantian Jembatan (m)	374,00	411,40	452,54	402,74	475,90	599,10	379,00	308,00	612,70	160,19	91,46	68,06	152,13	128,75	>
		4.2. Berkurangnya Jalan - jalan berlobang	37,90	41,68	45,85	45,00	54,00	7,45	16,80	15,70	20,70	19,70	40,31	34,24	46,00	38,33	<
		1. Pemeliharaan Berkala Jalan (Km)	2.552	2.807,20	3.082,92	3.017,47	3.005,00	2.280,93	2.203,41	2.856,33	2.145,70	89,40	78,49	92,65	71,11	71,40	<
		2. Pemeliharaan Rutin Jalan (Km)	15.015	16.516,50	18.168,15	9.054,28	7.988,04	10.101,93	10.237,16	9.433,10	9.504,28	67,30	61,98	51,92	100,00	113,35	<
		3. Pemeliharaan Rutin Jembatan (m)	121,00	133,10	146,41	241,54	320,70	208,93	100,55	147,30	203,37	172,67	75,54	100,47	84,20	63,41	>
	c. Perhubungan	5.1 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan															
		1. Tersedianya alat keselamatan pelayaran (buah)	-	-	1.680	1.350	500	-	1.472	-	-	-	-	-	-	-	<
		5.2 Meningkatnya Keselamatan															
		1. Tersedianya Rambu Lalu Lintas (buah)	350	500	1.670	1.000	800	190	216	375	1.100	54,29	43,20	22,46	110,00	137,50	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		2. Tersedianya Delineator (buah)	1.000	1.900	2.075	4.000	800	545	700	490	3.000	54,45	36,84	23,61	23,33	375,00	<
		3. Tersedianya Guardrail (buah)	1.500	1.000	4.275	4.000	800	745	-	1.550	1.800	49,67	-	56,88	45,00	225,00	<
		4. Tersedianya APILL / Warning Light (lokasi)	3	5	13	4	5	-	2	1	3	-	40,00	7,69	75,00	60,00	<
		5. Tersedianya Paku Jalan (buah)	-	-	2.085	4.000	96.375	-	1.080	1.005	-	-	-	48,20	-	-	<
		6. Tersedianya Marka Jalan (m)	1.500	2.000	9.487	335.000	915.563	2.080	1.247	1.990	124.500	138,80	62,35	20,98	37,16	13,60	<
		7. Tersedianya LPJU (buah)	-	-	-	45	25	4	-	-	-	-	-	-	-	-	<
		8. Tersedianya Cermin Tikungan (buah)	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
		9. Tersedianya Rambau Perairan (buah)	50	100	100	50	200	-	-	-	20	-	-	-	40,00	10,00	<
		10. Tersedianya ZOSS (lokasi)	2	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
	d. Energi Listrik	4.1 Rasio Elektrifikasi Desa	-	-	90	-	80,85	83,63	-	-	-	-	-	90,26	90,26	-	-
		4.1 Rasio elektrifikasi rumah tangga	-	-	80	-	78,00	86,45	-	-	-	-	-	89,91	89,91	-	-
I.	Pilihan																
1.	Pertanian	1.1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya															
		a. Padi															
		1. Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	132,79	132,12	131,46	-	-	134,00	132,60	130,61	-	100,91	97,22	99,35	-	-	-
		2. Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1.782.837	1.795.953	1.808.895	-	-	1.755.881,86	1.752.362	1.740.549	-	98,49	97,57	96,22	-	-	-
		3. Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi (Ton)	2.111.039	2.159.846	2.209.782	-	-	2.042.665,05	2.158.612	2.338.4762	-	96,76	99,94	105,82	-	-	-
		4. Surplus/Penyanga per Tahun (Ton) (4-3)	328.202	363.893	400.887	-	-	286.783,00	406.250	597.927	-	87,38	111,64	149,15	-	-	-
		5. Produksi GKG	3.727.413	3.813.591	3.901.761	3.771.545	4.087.420	3.607.036,00	3.715.513	3.727.249	3.626.968	96,77	97,43	95,53	96,17	88,73	<
		6. Luas Panen (Ha)	841.980	854.609	867.428	-	-	757.428,00	765.099	742.968	-	89,96	97,43	85,65	-	-	-
		7. Produktivitas (Kw/Ha)	44,27	44,62	44,98	49,9	51,3	47,62	48,56	50,17	50,64	106,48	89,53	111,53	101,48	98,71	<
		8. Luas Tanam (Ha)	859.163	872.050	885.131	-	-	757.428,00	769.174	739.040	-	88,16	88,21	83,49	-	-	-
		b. Jagung															

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)	
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18	
		1. Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	61.492	61.615	61.739	-	-		61.615	60.820		-		100,00	98,51	-	-	-
		2. Kebutuhan (Konsumsi + Industri) per Tahun (Ton)	825.609	837.534	849.504	-	-		873.503	904.236**		-		104,29	106,44	-	-	-
		3. Surplus/Penyanga per Tahun (Ton)	194.540	217.529	241.669	-	-		473.621	278.775		-		217,73	108,41	-	-	-
		4. Produksi Jagung (Ton)	1.020.149	1.055.063	1.091.173	1.529.636	1.831.820	1.294.645	1.347.124	1.183.011	1.159.698	126,91	127,68	73,38	75,81	63,31	<	<
		5. Luas Panen (Ha)	274.632	281.498	288.536	-	-	255.291	243.098	211.750		92,96	86,36	147,72	-	-	-	-
		6. Produktivitas (Kw/Ha)	37,15	37,48	37,82	56,5	59,9	50,71	55,41	55,87	57,82	136,50	147,84	74,15	102,33	96,53	<	<
		7. Luas Tanam (Ha)	280.237	287.243	294.424	-	-	262.079	253.234	218.319		93,52	88,16	108,41	-	-	-	-
		c. Kedele																
		1. Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	4,447	4,452	4,456	-	-		4,452	4,830		-		108,39	-	-	-	-
		2. Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	59.710	60.512	61.316	-	-		4.730	64.532		-		105,25	-	-	-	-
		3. Impor/Surplus per Tahun (Ton) *	(19.379)	(14.374)	(9.366)	-	-		689	(61.313)		-		654,63	-	-	-	-
		4. Produksi Kedele (Ton)	40.337	46.138	51.950	14.131	16.687	11.426	5.419	3.229	5.705	28,33	11,75	6,22	40,37	34,19	<	<
		5. Luas Panen (Ha)	34.300	39.200	44.100	-	-	11.413	5.475	3.126		33,27	13,97	7,09	-	-	-	-
		6. Produktivitas (Kw/Ha)	11,76	11,77	11,78	10,5	11,3	10,01	9,90	10,33	11,36	85,12	84,11	87,69	108,19	100,53	>	>
		7. Luas Tanam (Ha)	35.000	40.000	45.000	-	-	14.915	5.450	4.175		42,61	13,63	9,28	-	-	-	-
		1.2. Produksi tanaman perkebunan (ton) *																
		1. Perkebunan Rakyat	5.621.653,58	5.766.437,79	5.914.635,24	6.405.697,46	7.090.026,31	5.851.971	6.088.712,25	6.372.946,65	6.456.154,54	104,09	105,59	107,75	100,79	91,06	<	<
		2. PTPN	5.006.924,07	5.135.602,02	5.267.586,99	-	-	5.372.409	5.222.013,90	2.369.684,25		107,30	101,68	44,99	-	-	-	-
		3. PBSN	4.150.919,94	4.257.598,59	4.367.018,87	-	-	3.484.123	3.259.386,82	5.800.592,56		83,94	76,55	132,83	-	-	-	-
		4. PBSA	1.686.821,24	1.730.172,55	1.774.637,99	-	-	1.838.419	1.688.057,64	2.618.354,65		108,99	97,57	147,54	-	-	-	-
		Jumlah	16.466.618,84	16.889.810,94	17.323.879,09	-	-	16.546.923	16.258.170,61	17.161.578,11		100,49	96,26	99,06	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		1.3. Produksi perikanan															
		1. Produksi Perikanan (ton)	545.720,36	545.720,36	581.192,19	623.465,3	760.485,09	535.134,4	567.691	749.061	770.540,47	98,06	104,03	128,88	123,59	101,32	>
		2. Ekspor hasil perikanan (ton)	64.151,19	70.566,31	77.622,94	55.929,9	67.983,18	51.508,65	52.719,29	56.185,92	57.314,05	80,29	74,71	72,38	102,47	84,31	<
		3. Konsumsi ikan (kg/Kapita/tahun)	32,61	34,73	36,98	38,1	46,33	34,66	31,92	38,95	40,10	106,29	91,91	105,33	105,25	86,55	<
		1.4. Produktivitas peternakan															
		1. Kebutuhan Konsumsi/Kapita/Tahun (Kg)	0,99	1,04	1,10	-	-	-	1,86	2,41	-	178,85	219,09	-	-	-	-
		2. Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	13,262	14,172	15,142	-	-	-	24.580,65	32.116,4	-	173,45	212,10	-	-	-	-
		3. Produksi Daging yang diharapkan (Ton)	13.838	15,174	16,640	-	-	16.066	24.546,61	32.170,78	-	116,10	161,77	193,33	-	-	-
		4. Jumlah Pemotongan Sapi (Ekor)	74.373	81,558	89,434	-	-	86.347	131.880	172.842	-	116,10	161,70	204,44	-	-	-
		5. Produktivitas (Kg/Ekor)	186	186	186	-	-	186	186,13	186,13	-	100,03	100,07	100,07	-	-	-
		6. Pemotongan Sapi Lokal (Ekor)	68.896	77,451	86,697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7. Populasi (Ekor)	491.038	521,975	554.859	-	-	480.941	611.008	626.892	-	97,94	117,06	112,98	-	-	-
		1. NTP Peternak	-	-	-	107,32	109,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Daging (Ton)	-	-	-	141.687,22	164.792,09	-	-	-	145.449,71	-	-	-	102,66	88,26	<
		3. Telur (Ton)	-	-	-	139.363,38	162.959,87	-	-	-	159.945,50	-	-	-	114,77	98,15	<
		4. Susu (Ton)	-	-	-	835,17	1.131,67	-	-	-	783,36	-	-	-	93,80	69,22	<
2.	Koperasi dan UMKM																
		1. Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata-rata 10 - 15% per tahun (KUKM)	1.100	1.000	800		800	875				86,36					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata - rata 10% per tahun (Orang)	55.000	50.000	50.000		50.000	45.000				103,64					
		3. Meningkatnya daya saing dan nilai ekspor produk koperasi dan pertumbuhan nilai tambahnya (KUKM)	30	30	30		30	28				100,00					
		4. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi (Koperasi)	1.200	1.200	1.100		1.100	1.000				91,67					
		5. Pemberdayaan usaha Mikro dan Menengah (UMKM)	250.000	250.000	250.000		250.000	240.000				88,00					
		6. Terbinanya Koperasi dan UKM pada daerah Agropolitan dan Agromarinepolian (KUKM)	10	10	10		10	10				120,00					
		7. Terbinanya Koperasi pada Desa TP. PKK Provinsi (Koperasi)	5	5				5				120,00					
		8. Peningkatan peran gender dalam Pengembangan KUKM (Orang)	200	200	200		200	190				110,00					
		9. Pembentukan Koperasi Primer (Unit)	200	200	200		200	185				90,00					
		10. Terbinanya UMKM dalam Sentra (UMKM)	300	300	300		300	287				90,00					

2.2.1 Review Capaian Kinerja terhadap RPJMD

Review capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2014, target yang ingin dicapai pada tahun 2015 dan proyeksi untuk tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.80.
Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
Komitmen Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa							
1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk					Keberadaan rumah ibadah yang tidak merata di daerah	Kemudahan syarat pendirian rumah ibadah
2.	Pelayanan publik yang baik melalui Good Governance dan Clean Government					Masih adanya persepsi lambannya pelayanan aparat pemerintah dan kurangnya daya saing daerah	Penguatan Lembaga perijinan terpadu
		Terbangunnya sistem e-Planning, e-Budgeting, e-Ofiice	-	-	-	Masih adanya isu KKN dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah	Pembentukan LPSE diseluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam mendukung pemberlakuan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah
		-	-	-	-	Masih tingginya inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perda tentang sistem perencanaan dan penganggaran secara terpadu - Pembangunan sistem yang terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran
Komitmen Mewujudkan Rakyat tidak lapar							
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	- Padi (Kw/Ha)	50,17	50,64			Luas tanam belum tercapai	Pencetakan sawah baru
						Produktifitas masih perlu	Penanaman bibit unggul

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						ditingkatkan untuk memenuhi target produksi	adaptif
						Irigasi belum optimal	Pembangunan dan perbaikan Irigasi
	- Jagung (Kw/Ha)	55,87	57,82	-	-	Konsumsi masih rendah	Diversifikasi pangan non beras dengan meningkatkan konsumsi jagung
						Luas tanam belum tercapai	Tumpang sari dengan kedede dan lahan kebun TBM
	- Kedede (Kw/Ha)	10,33	11,36	-	-	Luas tanam belum tercapai	Tumpang sari dengan jagung
						Produktifitas masih rendah	Penanaman bibit unggul dan teknologi pertanian
						Bibit unggul masih terbatas	Revitalisasi BBI untuk pengadaan benih
	- Daging (ton)	186,13 (Daging Sapi)	145.449.709 (Total Produksi Daging)	-	-	Ketergantungan impor masih tinggi	Pengadaan bibit ternak sapi untuk menambah populasi
						Populasi masih kurang	Pembangunan Cluster industri pengolahan ternak
						Pengembangan ternak masih terbatas	Integrasi ternak dengan kebun dan hutan (agroforestry)
2.	Kontribusi Kategori pertanian, kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%) ADHK 2010	26,05	24,85	-	-	Anomali iklim makro	Manajemen sistem usaha tani dan maksimalisasi peran BMG
							Komitmen Mewujudkan Rakyat Tidak Bodoh
1.	APK PAUD (%)	NA	-	-	-	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumatera Utara pada tahun 2010 53,50 persen masih dibawah rata-rata APK PAUD Indonesia yang sebesar 53,70	Pembinaan terhadap Lembaga PAUD di Kabupaten/Kota
2.	APK SD + MI	112,59	-	-	-	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Pemberian bantuan bagi siswa

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
3.	APM SD + MI	92,66	-	-	-	Sekolah Dasar (SD) di Sumatera Utara sebesar 94,24 masih dibawah rata-rata APK Nasional yang sebesar 95,23	dari keluarga tidak mampu
4.	APK SMP + MTs	105,01	-	-	-	APK SMP/MTs Nasional = 98,11% Hal ini berarti bahwa APK SMP/MTs Sumut lebih tinggi daripada APK SMP/MTs secara Nasional	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu
5.	APM SMP + MTs	97,52	-	-	-		
6.	APK SMA + MA + SMK (%)	89,99	-	-	-	APK SMA/MA/SMK Nasional = 69,6%, yang berarti APK SMA/MA/SMK Sumut lebih tinggi daripada APK SMA/MA/SMK secara Nasional	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan revitalisasi SMK
7.	APM SMA	74,57	-	-	-		
8.	APK Perguruan Tinggi	NA	-	-	-	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Sumatera Utara pada tahun 2010 sebesar 18,19 persen masih dibawah rata-rata APK Perguruan Tinggi (PT) Nasional sebesar 18,36	Pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang D-I dan D-III
9.	Angka Melek Huruf (%)	98,46	-	-	-	Masih terdapat buta aksara usia produktif diatas 15 tahun	Pembelajaran di luar ruang kelas dan peningkatan kesempatan belajar
10.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,07	-	-	-	Target Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun sudah tercapai tetapi perlu ditingkatkan untuk Wajib Pendidikan Dasar 12 Tahun	Perluasan kesempatan belajar formal melalui kemudahan sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan
							Komitmen Mewujudkan Rakyat tidak Sakit
1.	Angka kelangsungan hidup bayi (Angka Kematian Bayi)	22	-	-	-	Target sudah tercapai namun AKB masih cukup tinggi di beberapa Kabupaten	Meningkatkan kesehatan ibu pra kehamilan
2.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	265	-	-	-	Beberapa Kabupaten sudah memenuhi target namun masih ada yang AKI tinggi	Meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu yang melahirkan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
3.	Usia harapan hidup	72,0	-	-	-	Beberapa Kabupaten sudah memenuhi target namun masih ada disparitas	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada kabupaten yang belum memenuhi target
4.	Prevalensi balita gizi buruk dan kurang	20	-	-	-	Target rata-rata sudah tercapai namun masih ada beberapa Kabupaten yang prevalensi balita gizi buruk Sangat Tinggi (diatas 30%)	Peningkatan kesehatan bagi ibu pra kehamilan dan selama masa pertumbuhan balita
6.	Rasio posyandu per satuan balita	-	-	-	-	Keberadaan Posyandu sudah kurang berperan aktif sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat	Revitalisasi posyandu melalui rehabilitasi posyandu dan pemberian insentif bagi tenaga pelayanan kesehatan
7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	-	-	-	-	Kurangnya fungsi pelayanan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	Revitalisasi Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	-	-	-	-	Keterbatasan daya tampung pasien di Rumah Sakit	Pemberian kemudahan bagi pihak swasta dalam mendirikan Rumah Sakit dan pemberian stimulan bantuan melalui Hibah dan Bansos
9.	Rasio dokter per satuan penduduk	-	-	-	-	Kurang meratanya keberadaan tenaga pelayanan kesehatan di daerah disebabkan ketertarikan melayani di daerah perkotaan	Pemberian insentif dan beasiswa bagi tenaga pelayanan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan tertinggal.
10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	-	-	-	-		
11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	-	-	-	-	Kurangnya kompetensi SDM Bidan	Pembinaan bidang melalui seminar, workshop, lokakarya dan pelatihan keterampilan
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	-	-	-	-		
13.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	-	-	-	-	Masih terdapatnya kondisi balita gizi kurang dan gizi buruk serta pemberian imunisasi yang tidak lengkap	Pemberian imunisasi, makanan pengganti ASI dan makanan tambahan secara gratis bagi balita melalui Puskesmas, Pustu, Pusling
14.	Cakupan Balita Gizi Buruk	-	100%	-	-		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
	mendapat perawatan						dan Posyandu
15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	-	100%	-	-	Masyarakat kurang memahami gejala penyakit yang diderita dengan cepat sehingga penanganan selalu terlambat	Sosialisasi gejala penyakit penderita TBC BTA dan BDB dan tindak lanjut penanganan dengan pengobatan dasar
16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	-	100%	-	-		
17.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	100%	-	-	Masyarakat miskin yang menerima pelayanan kesehatan rujukan belum tertangani seluruhnya melalui Jamkesmas	Pengalokasian dana Jamkesda bagi masyarakat miskin di luar peserta Jamkesmas, Askes, Asabri dan Jamsostek
18.	Cakupan kunjungan bayi	-	95%	-	-	Kunjungan rutin bayi melakukan imunisasi masih kurang	Pemberian imunisasi dasar secara gratis melalui pelayanan Posyandu dan Puskesmas
19.	Cakupan puskesmas	-	1 : 23.000	-	-	Menurunnya fungsi Pelayanan Dasar Puskesmas, Pembantu Puskesmas	Revitalisasi Puskesmas dan Pembantu Puskesmas
20.	Cakupan pembantu puskesmas	-	1 : 6.700	-	-		
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)		70,64	-	-	Rendahnya kemampuan SDM angkatan kerja sehingga kurang memenuhi permintaan kesempatan kerja	Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai pelaksanaan berbagai pelatihan kerja dan pemagangan serta menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan
2.	Pencari kerja yang ditempatkan			-	-	Penempatan angkatan kerja masih belum memenuhi permintaan kesempatan kerja	Pelatihan dan pemagangan para pencari kerja oleh perusahaan pencari pekerja
3.	Persentase koperasi aktif (%)	56,8		-	-	Produktifitas koperasi yang masih rendah serta sumber daya manusia belum mampu untuk aplikasi sistem informasi teknologi khususnya pasar	Pelatihan dan pembinaan Koperasi serta pemberian aksesibilitas permodalan yang murah antara lain dengan skim kredit bunga

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
							murah seperti dengan pendirian Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dengan konsep Gramming Bank
4.	Usaha Mikro dan Kecil						
5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	378	120		123	Penerbitan izin usaha yang masih terpusat di Pusat, selain itu juga daya saing infrastruktur yang rendah	Perlu ada desentralisasi penerbitan izin investasi di daerah serta perbaikan fasilitas infrastruktur khususnya jalan dan energi
6.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.Juta)	13.588.420,60	10.000.000	11.000.000		Promosi investasi yang masih rendah, serta permasalahan lokasi investasi yang belum jelas (status lahan yang bermasalah)	Promosi investasi harus terus ditingkatkan baik skala internasional maupun nasional, serta komitmen Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan UU tentang Pertanahan yang baru
7.	Daya serap tenaga kerja (%)	126,18	108	110		Masih rendahnya serapan tenaga kerja	Menyelaraskan kurikulum pelatihan dan pemagangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja
8.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	4.424.974,41	35 %	40%		Proses perizinan yang masih birokratif, serta status lokasi usaha yang masih belum pasti (sengketa lahan)	Harus terdapat SOP untuk pengurusan izin investasi dan biaya yang jelas untuk pengurusan izin investasi serta ada payung hukum tentang ruang (RTRW Provsu) harus segera selesai diperdakan
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	99.49	100.08	-	-	NTP sudah memenuhi target, namun masih ada disparitas antar kabupaten	Perlu peningkatan SDM petani dengan penyuluhan pertanian dan bantuan permodalan
10	Angka Kemiskinan	10,30	10,2	-	-	Perlu kerja keras untuk menanggulangi Angka Kemiskinan sesuai Target MDG's 2015 sebesar 7,5%	Perlu terobosan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha
11	Angka Pengangguran	6,5	6,0	-	-	Masih perlu upaya serius untuk	Perlu terobosan untuk

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						mengatasi Angka Pengangguran Terbuka sesuai Target MDG's 2015 sebesar 7%	perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan investasi dan peluang usaha produktif
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54	76,35	-	-	Target IPM tahun 2009 sudah tercapai, namun disparitas antar Kabupaten masih sangat jauh	Perlu peningkatan pada aspek terkait kesehatan (angka harapan hidup) pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan ekonomi (pengeluaran riil/ perkapita)
							Pengembangan Infrastruktur Wilayah
1.	Tingkat Kemantapan Jalan(%)	68,22	74,42	84,44	89,08	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi topografi yang sangat bervariasi dimana daerah dataran rendah rawan bencana banjir, sedangkan di daerah pegunungan rawan longsor. Di kawasan pegunungan dan hutan lindung lebar standar 7 m tidak terpenuhi. Tonase kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pendanaan yang terbatas. Pelaksanaan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan. Peralatan kerja yang tidak memadai. SDM yang terbatas. Masih terdapat ± 400 Km kondisi jalan permukaan tanah. 	Peningkatan alokasi anggaran APBD dan APBN Peningkatan SDM dan Kelembagaan Regulasi pembatasan berat kendaraan Peningkatan Peralatan
2.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	36,88	39,45	48,50	60,00	Kemampuan keuangan yang terbatas sehingga kapasitas jalan dan geometri jalan tidak sesuai dengan standar teknis	Peningkatan bantuan APN untuk penanganan jalan di Kab/Kota

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						minimal	
3.	Jaringan irigasi						
	Pemeliharaan Rutin	80.000 Ha	88,773 Ha	86,999 Ha	72.934	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kondisi irigasi teknis dan semi teknis akibat kerusakan alat ukur dan bangunan irigasi. 2. Kondisi jaringan irigasi secara keseluruhan masih banyak yang belum dilengkapi bangunan-bangunan irigasi yang berfungsi sebagai pengatur pembagian air , pengendali kelebihan air dan pengamanan terhadap kerusakan. 3. Daerah irigasi di dataran tinggi yang jaringan irigasinya terletak pada lereng-lereng perbukitan rentan terhadap longsor. 4. Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa. 5. Penurunan fungsi jaringan irigasi dan belum lengkapnya dan/telah rusaknya bangunan pengatur sehingga pengalokasian air tidak optimal menaikkan intensitas tanam, saat ini intensitas tanam 115 %. 6. Terjadinya alih fungsi lahan pada Daerah Irigasi menjadi non pertanian. 7. Sulitnya pelaksanaan 	Meningkatkan fungsi jaringan irigasi pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						<p>pembebasan tanah untuk kebutuhan infrastruktur SDA.</p> <p>8. Kelembagaan/orgasnisasi pemakai air irigasi yang masih lemah dan belum berkembang untuk menunjang sistem pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.</p> <p>9. Masih lemahnya pemahaman tentang berbagai kebijakan dan regulasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.</p> <p>10. Belum terlaksananya pengelolaan aset irigasi dengan baik yang sangat penting untuk Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)</p> <p>11. Belum aktifnya Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara serta belum terbentuknya Komisi Irigasi kabupaten pada sebagian besar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara</p>	
	Perbaikan/Peningkatan	10.225 m	12.062 m	21.711 m	21.712 m		
	Jaringan Rawa						
	Pemeliharaan Rutin	80.413 Ha	55.232 Ha	55.232 Ha	55.832 Ha	1. Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan Rawa. 2. Terjadinya alih fungsi lahan pada Daerah Rawa menjadi non pertanian setelah	Meningkatkan fungsi jaringan Rawa pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/normalisasi /rehabilitasi jaringan Rawa
	Perbaikan/Peningkatan	5.590 m	7000 m	4857 m	4856 m		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						dibangun jaringan pengairan 3. Tidak adanya lembaga masyarakat Pengelolaan Jaringan Rawa	
	Penanganan Tebing Sungai /Pantai	4.060 m	4.090 m	4.426 m	4.428 m	Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan Sungai.	Penanganan banjir akibat sudah berkurangnya hutan di daerah hulu sungai
	Normalisasi /Pelurusan Sungai	15.000 m	36.300 m	19.469 m	19.469 m		
	Perbaikan dan pembangunan tanggul banjir	14.800 m	36.300 m	19.469 m	19.469 m		
	Penyediaan Air baku/Embung	4	30	40	10	Terbatasnya dan penyediaan air baku	Penyediaan sarana air baku sebagai kebutuhan dasar masyarakat seiring dengan peningkatan penduduk dan terjadinya krisis air
5.	Rasio elektrifikasi desa	90.25 %	90.26 %	90.42 %	90.60 %	Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi belum mampu terlayani	Pembangunan Pembangkit Listrik Mini Hydro dan PLTS (energi terbarukan)
6.	Rasio elektrifikasi rumah tangga	88.52 %	89.91 %	88.65 %	88.79 %	Potensi energi di Sumut yang belum sepenuhnya dieksploitasi	
7.	Cakupan pelayanan air minum (%)						
8.	Status Mutu Sumber Air Minum	Layak Minum	Layak Minum				

2.2.3. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPDP Provinsi

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.81.
Identifikasi Kebijakan Nasional
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No.	Kebijakan Nasional		
	RPJMN*)	RKPDP Provinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan;	Peningkatan ketersediaan bahan pangan, dengan kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi bahan pangan dengan sasaran pokok terwujudnya swasembada beras di Sumatera Utara	Revitalisasi UPT dan BBI untuk meningkatkan ketersediaan benih/bibit tanaman pangan, perkebunan dan perikanan dan Gema Pangan
2.	Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut;	Pengelolaan terpadu perikanan darat dan perikanan laut	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung (kapal, pelabuhan perikanan dan pasar lelang)
3.	Pengembangan industri unggulan;	- Pengembangan industri hilir CPO di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei - Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung berbasis aluminium	
4.	Pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra industri migas dan lumbung energi nasional;	Pembangunan PLTA Asahan III, dan PLTA Asahan IV	Pembangunan PLTP Sarulla Pengembangan Bio Mass
5.	Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya;	Pengembangan tujuan wisata Danau Toba, dan Kepulauan Nias,	Pengembangan wisata MICE di Kota Medan Pengembangan Geo Park di Danau Toba
6.	Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi;	- Pemasangan Jaringan Listrik Desa - Pembangunan SHS/PLTS 50 Wp - 100 Wp di Desa Terpencil - Pembangunan PLTS terpusat 15 KW - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) - Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya - Pemasangan Sambungan Listrik Baru Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu	
7.	Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Toll se-Sumatera • Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api se-Sumatera • Interkoneksi listrik se-Sumatera • Global hub Kuala Tanjung • Bandara Kuala Namu sebagai hub penerbangan nasional/internasional 	

8.	Pengembangan Sumatera sebagai <i>pool</i> angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN;	Pemberdayaan BLK Dukungan terhadap penciptaan 1 juta pengusaha pemula (12.000)	
9.	Peningkatan program penanggulangan kemiskinan;	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni • Beasiswa siswa miskin • Jamkesda • Bantuan Sosial 	
10.	Reformasi birokrasi dan tata kelola;	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-Government melalui system e-Planning, e-Budgeting, e-Office, e-Procurement dan e-Performance • Pencapaian WTP pada Laporan Keuangan Provinsi 	
11.	Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional	Pengembangan daerah terdepan, terluar, perbatasan (pulau Berhala)	
12.	Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.	Pengembangan Taman Nasional Gn. Leuser dan TN Batang Gadis Penataan kawasan industri berbasis lingkungan	
13.	<p>Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera. diarahkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; - Menjaga kelestarian pengembangan ekosistem Kawasan Danau Toba 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan PKN Kawasan Mebidang-ro - Pembentukan kelembagaan Mebidang-ro - Pengembangan Kerjasama Pembangunan di KSN Mebidangro - Pengembangan KSN Danau Toba berbasis lingkungan 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Cluster Industri CPO • Pengembangan Kawasan Peternakan • Pengembangan produk unggulan daerah (PUD) • Penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian 	
14.	Penanggulangan Pasca Bencana Kepulauan Nias	Pengembangan <i>Regional Management</i> dan kerjasama sektor produksi unggulan di Kepulauan Nias	
15		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan <i>Regional Management Lake Toba</i> di kawasan Danau Toba - Pengembangan infrastruktur wilayah permukiman di daerah-daerah tertinggal. seperti Pakpak Bharat. Tapanuli 	

		Tengah. Nias. Nias Selatan. Nias Barat. dan Nias Utara	
--	--	--	--

Keterangan :

*) Kebijakan Nasional terhadap Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam RPJMN-2010-2014

2.2.4. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD tahun 2014. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2015 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Rangkuman hasil telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tebel. 2.82.
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Provinsi Sumatera Utara*)
(9 Prioritas Provinsi)

O	DAPIL	USULAN KEGIATAN	LOKASI KABUPATEN/KOTA	KEWENANGAN PUSAT/PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	SKPD PROVSU PENANGGUNG JAWAB / KOORDINATOR
1	Dapil I Kota Medan	Masyarakat mengeluhkan masalah kurikulum pendidikan serta model ujian akhir yang membingungkan bagi peserta didik dan pelaku pendidikan	Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan	Pusat	Dinas Pendidikan
		Warga mengeluhkan pembagian kartu pintar tidak merata dan tidak adanya sosialisasi (11)	Medan Amplas, Kota Medan	APBN	Dinas Pendidikan
		Masyarakat mengharapkan adanya bantuan pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu (12)	Medan Kota, Kota Medan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
		Dimohon kepada pihak Dinas Pendidikan agar sekolah negeri tidak mengambil sekolah aplausan pagi-sore sampai mencapai 10 kelas sehingga berdampak kepada sekolah swasta yang muridnya menjadi berkurang. (16)	Medan Denai, Kota Medan	APBN	Dinas Pendidikan
		Masyarakat emohon permasalahan pendidikan untuk dana operasional sekolah dapat direalisasikan (17)	Medan Area, Kota Medan	APBN	Dinas Pendidikan
		Pemerintah diharapkan diharapkn masyarakat agar menertibkan warnet-warnet yang menjamur saat ini, berdampak buruk pada perkembangan pendidikan anak-anak, karena menjadi fenomena bahwa anak-anak diwilayah perkotaan kecanduan berada ditempat warnet pada waktu belajar. (21)		APBD Prov	Dinas Pendidikan

		Masyarakat mengharapkan adanya bantuan pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu khususnya yang putus sekolah (22)	Medan Perjuangan , Kota Medan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
		Warga menanyakan tentang rencana Perda Wajib Pendidikan Diniyah yang pernah diwacanakan Pemkot Medan. Sampai sejauhmana realisasinya. (24)	Medan Deli, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Pendidikan
		Orangtua murid mengeluhkan banyaknya pungutan liar disekolah-sekolah mengingat adanya sekarang dana bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah (24)	Medan Marelan, Kota Medan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
		Masyarakat memohon agar dibangun sarna gedung untuk pendidikan khusus penderita autis (24)		APBN	Dinas Pendidikan
		Kiranya menjadi perhatian bagi Pemprov maupun Pemko Medan untuk lebih memperhatikan pembangunan di bidang pendidikan khususnya MDA dan rumah ibadah di daerah Medan Marelan (25)		APBD PROV/APBD PEMKO MDN	Dinas Pendidikan
		Pendidikan bagi anak autis ataupun pendidikan bagi anak yang berasal dar keluarga yang tidak mampu harus menjai perhatian yang serius bagi Pemerintah Provsu maupun Pemko Medan. Sebagai gambaran bahwa untuk menyekolahkan anak autis dibutuhkan biaya yangng tidak sedikit dan sangat memberatkan bagi orangtua anak tersebut. Belum lai harus menghadapi kenyataan bahwa kualitas pendidikan anak autis tersebut tidaklah memadai. (27)	Medan Labuhan, Kota Medan	APBD PROV/APBD PEMKO MDN	Dinas Pendidikan
		Masyarkat mengharapkan bantuan dana BOS atau		APBN	Dinas Pendidikan

		beasiswa agar pembagiannya lebih transparan sehingga masyarakat merasa lebih paham atau lebih mengerti dengan syarat-syarat pengajuan untuk beasiswa tersebut (33)			
		Masyarakat mengharapkan agar program-program BPJS dapat lebih disosialisasikan dan dipublikasikan pada warga masyarakat karena program ini sangat bermanfaat namun kurangnya informasi menyebabkan masih banyak warga masyarakat yang belum mendaftar (Hal 6)	Medan Amplas, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Kesehatan
		Warga masyarakat jalan garu III kel harjosari I kec. Medan Amplas masih mengeluhkan mengenai Pengurusan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah diprogramkan Pemerintah Pusat sebagai pengganti jamkesmas, sangat banyak masyarakat di kec. Medan amplas belum mengurus BPJS untuk kesehatan keluarganya, untuk itu masyarakat menyampaikan keluhannya melalui anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan I Kota Medan untuk memberikan penjelasan prosedur pengurusannya dengan baik dan terhindar dari percaloan serta tidak dipersulit dalam pengurusan surat-suratnya (hal 6)		APBN	Dinas Kesehatan
		Diharapkan kepada Pemerintah agar memperhatikan penyakit demam berdarah, mohon dilakukan penyemprotan di daerah tersebut (8)	Medan Kota, Kota Medan		Dinas Kesehatan
		Masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki Jamkesmas mempertanyakan bagaimana cara untuk memiliki BPJS sebagai pengganti		APBN	Dinas Kesehatan

		Jamkesmas. (10)			
		Masyarakat kel. Tegal Sari-Mandala I mempertanyakan tentang kepesertaan Jamkesmas, Kartu Medan Sehat yang pernah berlaku berkaitan dengan keberadaan BPJS saat sekarang ini dan dipublikasikan kepada masyarakat karena program ini sangat bermanfaat. (12)	Medan Denai, Kota Medan	APBN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat kurang mampu jalan pelajar Gg. Sempurna Kel. Binjai Kec. Medan Denai mempertanyakan permasalahan pemberian Kartu Medan Sehat, Kartu BPJS dan kartu-kartu yang telah diluncurkan/diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dapat disosialisasikan penggunaan dan masa berlaku pemakaiannya. (12)		APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Masyarakat kec. Medan denai menyampaikan biaya berobat ke RS. Mahal, terkadang berobat ditunda, sedangkan program layanan melalui Jamkesmas/JKN sulit didapatkan bahkan banyak warga yang kurang mampu tidak mendapatkannya, untuk itu masyarakat meminta kepada pemerintah terus memonitor/mengawasi ke lapangan, mendata masyarakat kurang mampu agar mendapatkan bantuan kesehatan tepat sasaran. (12)		APBN	Dinas Kesehatan
		Pelayanan BPJS bagi masyarakat dirasa sangat lambat dan belum maksimal, masih ada masyarakat yang mengeluhkan dibiarkan begitu saja (14)	Medan Area, Kota Medan	ABPBD Kota Medan	Dinas Kesehatan
		Warga masyarakat kec. Medan area masih banyak belum memiliki kartu BPJS meminta kepada pemkot medan agar melakukan pengawasan lebih		ABPBD Kota Medan	Dinas Kesehatan

		aktif, mendata ulang kembali masyarakat miskin atau kurang mampu dan mensosialisasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), karena rata-rata masyarakat belum mengurus BPJS yang telah diprogramkan pemerintah bagi kesehatan masyarakat. (17)			
		Masyarakat meminta kepada pemerintah pemkot medan dapat meninjau kembali kebijakan jika kartu BPJS hilang tidak melaporkan ke Polisi dan dipersulit (17)		APBD Kota Medan	Dinas Kesehatan
		Masyarakat mempertanyakan mengapa seluruh anggota keluarga harus didaftarkan dalam kepesertaan BPJS yang iurannya terasa cukup memberatkan bila jumlah anggota keluarganya besar. Dan bagaimana kondisinya bagi warga yang kepesertaannya ganda dan dua-duanya dipotong, hal tersebut terasa merugikan. Masyarakat juga mempertanyakan tentang Jamkesda, Kartu Sehat dan Jamkesmas yang dirasakan sangat membantu masyarakat, apakah masih berlaku sampai saat ini ? (20)	Medan Perjuangan, Kota Medan	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Masyarakat mengeluhkan biaya iuran untuk BPJS sebesar Rp. 25.000/orang, sementara dalam 1 (satu) keluarga lebih dari 1 (satu) orang, sehingga masyarakat merasa terbebani (25)	Medan Marelan, Kota Medan	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Memohon agar Pemerintah memperhatikan BPJS untuk warga miskin yang sulit mendapatkan (26)	Medan Labuhan, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Kesehatan
		Terkait dengan pengalihan Kartu Medan Sehat yang diintegrasikan ke program BPJS, masyarakat mengeluhkan adanya beberapa persyaratan yang dirasa memberatkan. Antara lain harus		APBD Kota Medan	Dinas Kesehatan

		mencatatkan Nomor Induk Kependudukan, merubah KK yang berwarna merah (lama) ke KK yang berwarna biru. Sementara saat ini masih banyak masyarakat yang kartu keluarga (KK) nya masih yang lama. Masyarakat berharap, agar prosedur pengalihan Kartu Medan Sehat dan kartu keluarga dipermudah oleh Pemko Medan dan BPJS (27)			
		Masyarakat Medan Labuhan mengharapkan kiranya program BPJS hendaknya betul-betul membantu masyarakat dan diharapkan kiranya birokrasinya jangan dipersulit. Sampai saat ini masih banyak warga yang belum mengurus BPJSnya, mengapa masyarakat enggan untuk mengurus BPJS ternyata karena mereka tidak mengetahui bagaimana dan dimana mengurusnya dan ditambah pula dengan pengurusannya yang sulit. Masyarakat mengharapkan kiranya instansi terkait turun langsung ke desa-desa untuk menssialisasikan BPJS, karena sekarang ini mereka hanya mau mengurus BPJS apabila mereka sudah berurusan dengan RS walaupun dengan birokrasi yang sulit. Mohon kiranya Pemerintah dapat menugaskan pemerintah desa agar benar-benar membantu masyarakat dalam pengurusan BPJS (29)		APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat memohon kepada Pemprov su khususya Pemko Medan untuk dapat merealisasikan pelayanan pendidikan, kesehatan kepada masyarakat setempat pemberian Jamkesmas kepada masyarakat yang kurang		APBD PROV/APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan

		mampu, dan pemberiannya tidak salah sasaran (32)			
		Dalam pertemuan masyarakat mengeluhkan pelayanan Jamkesmas yang dianggap terbelah pilih. Penyelenggara Jamkesmas tidak merata, karena pelaksanaannya dianggap tidak maksimal dalam melayani peserta Jamkesmas. Masyarakat meminta agar pelaksanaan jamkesmas dilakukan dengan baik dan terukur, sehingga masyarakat miskin yang tidak berkecukupan dapat terlayani dengan baik. (32)		APBD PROV/APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat mengharapkan agar peredaran narkoba dan perjudian dapat dihilangkan serta oknum aparat yang terlibat ditindak tegas karena begitu buruknya dampak yang ditimbulkan akibat narkoba dan judi tersebut (hal 6)	Medan Amplas, Kota Medan	APBD Prov	Dinas Sosial
		Masyarakat mengharapkan agar peringatan hari-hari besar dengan pesta petasan dan kembang api tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban yang ada (hal 6)		APBD Prov	Dinas Sosial
		Warga masyarakat meminta pihak kepolisian untuk tanggap menangani Geng Motor dan Peredaran Narkoba, togel, judi karena sangat meresahkan warga (hal 7)		APBD Prov	Dinas Sosial
		Warga meminta pihak kepolisian untuk menangkap Peredaran Narkoba, togel, judi, perampokan dan berbagai kejahatan lainnya karena sangat meresahkan warga (hal 7)		APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Warga mengharapkan tindakan dari instansi terkait yaitu Pemerintah Kota Medan bersama pihak kepolisian dan jajarannya agar turun ke	Medan Kota, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Sosial

		kelurahan-kelurahan di kota medan ini karena narkoba sudah sangat merusak para Generasi muda kita. Dimana para pemuda sudah tidak ada rasa malu dan malas bekerja, sungguh sangat meresahkan para orangtua (8)			
		Masyarakat sangat resah dengan peredaran Narkoba yang merusak generasi muda, diharapkan kepada pihak kepolisian dan pihak yang terkait menindak tegas bandar-bandar narkoba. (13)	Medan Denai, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Peredaran narkoba sudah sangat menkhawatirkan di wilayah kec.medan area, dimohon kepada pemerintah untuk menyiapkan wadah agar para remaja dapat menggunakan waktunya untuk hal yang positif, serta diharapkan agar pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru seperti memberikan kredit UKM kepada warga yang membutuhkan untuk mengurangi pengangguran (14)	Medan Area, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Tokoh masyarakat memohon kepada semua pihak terutama pemerintah untuk memperhatikan Pendidikan Agama untuk anak-anak dan kalangan remaja agar ada dasar yang kuat berupa moral dan akhlak yang baik dalam menghadapi tantangan zaman dan budaya luar sehingga anak-anak generasi penerus kita tidak terjerat narkoba, kejahatan dan tindak kekerasan terhadap sesama dan lainnya. Hal ini perlu kita sikapi secara serius dengan menyediakan sarana dan wadah dalam rangka menyalurkan kreatifitas anak-anak muda yang positif dan bermanfaat. (14)		APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Masyarakat meminta kepada pihak kepolisian		APBD Kota Medan	Dinas Sosial

		agar memberantas geng motor yang sangat meresahkan warga kota medan (16)			
		Masyarakat meminta kepada Poldasu agar lebih aktif memberikan rasa aman kepada masyarakat yang saat ini ketakutan dengan maraknya narkoba, perjudian, togel, perdagangan manusia, prostitusi (17)		APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Masyarakat meminta kepada Poldasu agar lebih aktif memberikan rasa aman kepada masyarakat yang saat ini ketakutan dengan maraknya narkoba, perjudian, togel, perdagangan manusia, prostitusi (20)	Medan Perjuangan, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Masyarakat mengharapkan agar keamanan lingkungan yang kondisinya kian meresahkan akibat peningkatan sejumlah aksi kejahatan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. (23)	Medan Deli, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Masyarakat mengharapkan agar peredaran narkoba dan perjudian dapat dihilangkan serta oknum aparat yang terlibat ditindak tegas karena begitu buruknya dampak yang ditimbulkan akibat narkoba dan judi tersebut (23)		APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Masyarakat memohon perhatian Pemerintah Kota untuk menertibkan gubuk liar yang berada dibantaran sungai deli sebagai tempat maksiat dan transaksi narkoba (28)	Medan Labuhan, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Masyarakat khususnya komplek martubung mengeluhkan adanya danau buatan sampai sekarang sehingga menjadi tempat kumpul-kumpul dan sarang mesum yang meresahkan masyarakat (33)		APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Warga masyarakat di jalan Puri Gg. Mawar Kec.	Medan Area, Kota	APBD Kota Medan	Dinas Pemuda dan

		Medan Area meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan memberikan fasilitas pelatihan-pelatihan kemandirian/keahlian, sarana prasarana olahraga untuk melakukan kegiatan positif agar jauh dari perbuatan negatif (17)	Medan		Olah Raga
		Masyarakat di Komplek Marelan III kel. Rengas Pulau meminta disediakan sarana olahraga berupa Lapangan Volley dan Badminton (24)	Medan Marelan, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Diharapkan kepada agar memperhatikan perekonomian keluarga kec. Medan kota dengan membantu ibu-ibu dan membuka lapangan pekerjaan bagi para pemuda dan pemudi (8)	Medan Kota, Kota Medan	APBD Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Masyarakat memohon perhatian pemerintah dan swasta dalam rangka memberdayakan dan merekrut anak-anak muda kel. Kota bangun kec. Medan deli sebagai pekerja di industri/pabrik yang ada di kawasan tersebut, sehingga anak-anak muda kel. Kota bangun mdn deli tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya. (22)	Medan Deli, Kota Medan	APBD Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Masyarakat mengharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberdayakan anak-anak muda dengan membuat usaha-usaha lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran (29)	Medan Labuhan, Kota Medan	APBD Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Diharapkan Pemerintah membuka peluang kepada perusahaan agar membuka penerimaan Tenaga Kerja bagi para pemuda pemudi di medan labuhan warga sangat mengharapkan lapangan pekerjaan (30)		APBD Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meminta kepada pemerintah agar menertibkan akses informasi yang sekarang ini sarat dengan	Kecamatan Medan Area, Medan Area	APBD Prov	Dinas Kominfo

		informasi dan visualisasi yang destruktif terhadap moral anak bangsa, baik itu di media cetak, terlebih lagi di media televisi dan internet. (17)			
		Masyarakat memohon perhatian dan bantuan bagi komunitas di kel. sidorame barat II dalam rangka menjalankan aktifitas sosial keagamaan (19)	Medan Perjuangan	APBD Kota Medan	
		Diharapkan perhatian pemerintah yang serius terhadap pendidikan agama bagi anak-anak generasi penerus bangsa saat ini, mohon aparat kepolisian dapat sinerhi dengan aparat kelurahan serta masyarakat untuk menjauhkan pada pemuda-pemudi kita dari narkoba, karena pengaruh narkoba sangat merusak mental, akhlak dan masa depan pemuda itu sendiri. (24)	Medan Marelan	APBD Kota Medan	
		Masalah pengurusan surat-surat yang diperlukan masyarakat seperti kartu keluarga (KK), KTP, Akte Kelahiran dan surat-surat administrasi untuk usaha di kel dan kec. kiranya pemkot medan dapat lebih meningkatkan sistem yang terbaik bagi masyarakat, tidak dipersulit. (hal 7)	Medan Amplas	APBD Prov	Biro Pemerintahan
		Warga Garu V mengeluh sudah setahun tidak ada kepling sehingga menghambat administrasi dalam pengurusan seperti KK, KTP, BPJS dan pengurusannya lainnya. (hal 8)		APBD PEMKO MEDAN	Biro Pemerintahan
		Masyarakat mempertanyakan tentang penggantian kartu keluarga (KK) merah menjadi biru, karena blanko nya habis maka masyarakat menggunakan KK sementara yaitu KK putih. Apakah tidak ada pengaruh dalam kepenurusan administrasi kependudukan lainnya dengan	Medan Denai	APBD PEMKO MEDAN	Biro Pemerintahan

		menggunakan KK putih tersebut ? (12)			
		Perwakilan masyarakat Griya Martubung 2 dan martubung 3 kel. Tangkahan memohon kepada Pemko Medan untuk mengisi jabatan Kepling di wilayah tersebut karena terkendala dalam pengurusan KTP, KK dan urusan administrasi kependudukan lainnya. (29)	Medan Labuhan	APBD PEMKO MEDAN	Biro Pemerintahan
		Kelurahan Bagan Deli sudah hampir 8 bulan lamanya tidak memiliki Lurah yang definitif dan selama itu hanya dijabat oleh Sekretaris Camat sebagai Plh. Lurah. Kondisi ini sangat meresahkan dan memberatkan warga dalam pengurusan surat ataupun proses administrasi lainnya di kelurahan. Masyarakat berharap kepada Walikota Medan untuk segera mengangkat dan menetapkan Pejabat Lurah yang definitif di Kelurahan Bagan Deli. (34)	Medan Belawan	APBD PEMKO MEDAN	Biro Pemerintahan
		Musholla Aisyiyah Harjosari yang berlokasi di Jl Garu III Gang III No. 25 A1 14 sedang dalam renovasi, mohon bantuan dana dari Pemerintah. (hal 5)	Medan Amplas, Kota Medan	APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprov
		Masyarakat meminta dibangun Mushola tepatnya di lorong 1 kel sukarama 1 (16)	Medan Area, Kota Medan	APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprov
		Permohonan bantuan keuangan untuk kelanjutan perbaikan/pembangunan Mesjid Al Munawwarrah Jalan M. Basir kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan (25)	Medan Marelan, Kota Medan	APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprov
		Permohonan bantuan keuangan untuk kelanjutan perbaikan/pembangunan Musholla Nurul Hidayah Jl. Datuk Rubiah Link. 28 kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan (25)		APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprov

		Mesjid Taqwa Pekan labuhan sesuai dengan informasi dari pantia pada akhir tahun Anggaran 2014 sudah didatangi Tim Verifikasi dari Pemprovsu terkait dengan permohonan bantuan yang telah mereka sampaikan, namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Untuk itu masyarakat bermohon kepada Gubernur Sumatera Utara dapat segera mencairkan bantuan keuangan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Taqwa Pekan Labuhan atau memasukkan kembali kedalam Bantuan Keuangan Pemprovsu pada APBD Tahun Anggaran 2016 (27)	Medan Labuhan	APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprovsu
		Mohon perhatian Pemerintah agar dapat mengalokasikan dana untuk pembangunan Madrasah-madrasah untuk masyarakat Medan Labuhan (28)		APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprovsu
		Bantuan keuangan untuk kelanjutan pembangunan Musholla Al Insyaf yang berada di lingk. 3 Lr. Prooyek Jalan besar Bagan Deli Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan (34)	Medan Belawan	APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprovsu
		Bantuan keuangan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Nurul Hilal di kel. Bagan Deli Kec. Belawan. (34)		APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprovsu
		Masyarakat mempertanyakan pemberian raskin kepada masyarakat kurang mampu mengapa ada pengurangan sedangkan ekonomi masyarakat tidak berubah (17)	Medan Area	APBN	
		Warga menyampaikan masalah pembagian Raskin dan BLT masi saja tidak tepat sasaran. Warga tidak akan bosan menyampaikan masalah ini karena terkadang tetap saja warga yang lebih	Medan Perjuangan	APBN	

		mampu yng menerim bantuan tersebut. Mohon perhatian yang serius instansi terkait. Masyarakat sangat menyayangkan sekaligus mempertanyakan mengapa banyak warga miskin tidak mendapatkan raskin. (19)			
		Masyarakat kel. Kota bangun mengharapkan kepada pemerintah untuk mendata ulang penerima bantuan raskin, Jamkesmas dll, agar bantuan sosial program pemerintah semuanya tepat sasaran dengan kata lain yang benar-benar berhak yang menerima bantuan tersebut. (21)	Medan Deli	APBN	
		Lagi-lagi masyarakat membicarakan beras miskin yang sudah ada dan beras miskin tersebut sudah diterima dan dinikmati oleh masyarkat yang miskin di daerah kami tetapi ada sebagian ibu janda-janda miskin belum mendapatkannya mohon agar didata ulang kembali beras miskin tersebut memang untuk orang yang tidak mampu (miskin). Mohon kepada Bapak DPRD Provsu agar program beras miskin tersebut dilanjutkan karena sangat membantu kami masyarakat Komplek Uka Martubung Jl. Rawe 5 Lingkungan 7 Lorong 1 Ujung el. Tangkahan Kec. medan Labuhan, dan jamkesmas sangat membantu kami. (32)	Medan Labuhan		
		Perbaikan Jalan Jalan Armada- Jalan Pelangi	Kecamatan Medan Kota,, Kota Medan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Pengaspalan/Pembetonan jalan Santun		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Perbaikan Jalan Saudara samapi ke Simpang Limun		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Perbaikan/Pengaspalan Jalan Bahagia By Pas		APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

				Kab.Kota	Provsu
		Perbaiki Jalan Saudara dari Simpang Jalan Bahagia sampai Jalan SM. Raja		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Perbaiki/Pengaspalan Gg. Tengah jalan AR. Hakim sep. 200 m lebar 3,5 m	Kecamatan Medan Area, Kota Medan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Pengaspalan jalan Batubara disamping Hotel Yanglim Plaza sepanjang 300 m		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Pengaspalan jalan Amaliun sepanjang 1000 m		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Perbaiki/Pengaspalan Jalan Bausit Kelurahan Kota Bangun	Kematan Medan Deli, Kota Medan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Pembangunan Jembatan Sungai Deli yg menghubungkan Lingk III dgn Lingk IV		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Pelebaran Jembatan penyeberangan Tol Mabar Hilir		APBN/APBD Prov.SU	Dinas Bina Marga Provsu
		Mohon Pengaspalan di Kawasan Lingk VI Desa Bangun sep. 1 km yg sudah dilakukan perkerasan	Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Perbaiki Infrastruktur jalan di Kec. Medan Marelan yg sudah rusak		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Perbaiki Infrastruktur jalan yg sudah rusak dan berlubang	Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Pembangunan Jalan baru atau jalan alternatif jika terjadi banjir dan kebakaran		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Jalan penyeberang di bawah Jalan Tol, jika terjadi hujan maka akan banjir atau tergenang		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Peninggian Badan jalan besar Bagan Deli kel. Bagan Deli	Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		a) Peningkatan saluran drainase di jalan SM. Raja mulai dari Simpang Marendal, Banjar	Kec. Medan Amplas	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		<p>II, Garu V dan Garu VI sampai di depan Gedung Polda hujan turun sering terjadi banjir.</p> <p>b) Penambahan bak sampah, mohon agar Pemerintah memfasilitasi tempat pembuangan sampah.</p> <p>c) Perbaikan drainase di jalan Garu V dengan pengorekan parit-parit</p> <p>d) Penambahan bak sampah agar Pemerintah memperhatikan masalah sampah yang semakin menambah problem banjir</p>			
		<p>a) Perbaikan infrastruktur dari Jl. Armada-Jl.Pelangi.</p> <p>b) Perbaikan pelayanan kualitas air PDAM Tirtanadi.</p> <p>c) Perbaikan drainase di kawasan Sidorejo II tertutup oleh Bangunan.</p> <p>d) Perbaikan drainase di kawasan Sidorejo II tertutup oleh Bangunan di parit busuk Simpang Limun sampai ke Jl. Air Bersih.</p> <p>e) Peningkatan pelayanan dan kualitas air PDAM Tirtanadi bagi warga kota Medan.</p>	Kec. Medan Kota	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		<p>a) Pengerukan sungai agar kotoran sampah dan sedimentasi lumpur.</p> <p>b) Pengerukan parit untuk menghindari banjir saat hujan akibat air tidak mengalir.</p> <p>c) Bantuan Pengelolaan sampah dengan</p>	Kec. Medan Denai	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		menyediakan tempat sampah organik dan sampah non organik.			
		<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan jaringan drainase di kelurahan kota Matsum II karena jalan yang dibuat Pemerintah lebih tinggi dari rumah serta tidak ada parit. b) Pengerukan parit akibat dari adanya proyek MUDP parit yang berada di jalan Amaliun menjadi tinggi karena tanah bekas galian masuk ke dalam parit. c) Peningkatan saluran drainase kota d) Pengerukan parit di kec. Sukarame I dan Kota Matsum I, di jalan Medan Area Selatan e) Peningkatan saluran drainase kota dengan pembuatan parit di jalan Emas dan jalan AR. Hakim sampai Jl. Mandala by pass 	Kec. Medan Area	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan saluran drainase kota dengan pembuatan parit di jalan Pelita II, III, dan IV b) Peningkatan saluran drainase kota dengan pembuatan parit di Kel. Sidorame Barat II c) Peningkatan jaringan air minum PDAM Tirtanadi 	Kec. Medan Perjuangan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan saluran drainase di kelurahan Kota Bangun b) Perbaikan saluran drainase dengan pengerukan 	Kec. Medan Deli	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		a) Perbaikan saluran drainase dengan pengerukan di jalan Menteng Komplek Marelان III b) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM	Kec. Medan Marelان	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM di Komplek Uka Martubung jalan rawe 5 lingkungan 7 lorong 1 ujung kelurahan Tangkahan. b) Perbaikan saluran drainase di lingkungan V, 22, 23 dan 24 dan di kelurahan Tangkahan. c) Penertiban perusahaan – perusahaan penghasil limbah yang membuang ke sungai Deli. d) Perbaikan sanitasi dan persampahan lingkungan	Kec. Medan Labuhan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase kota b) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM c) Perbaikan sanitasi dan persampahan lingkungan	Kec. Medan Belawan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
	Dapil II (Medan Johor, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan	Masyarakat penyandang disabilitas mengharapkan Pemprovsu untuk memperhatikan dan membantu organisasi Penyandang Disabilitas dan membuat Perda bagi Penyandang Disabilitas.	Medan Polonia	APBD Prov	Dinas Sosial

	Baru)				
		Mohon penutupan terhadap cafe-cafe yang mengurus ke hal yang tidak baik di wilayah kec. Medan Polonia.		APBD PEMKO MEDAN	Dinas Sosial
		Masyarakat mengharapkan dan bermohon kepada Dinas Sosial Pemko medan untuk dapat mendata ulang bagi warga miskin dan kurang mampu agar mendapatkan fasilitas dari pemerintah berupa KKS, KIS dan KIP yang tepat sasaran.	Medan Barat	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Sosial
		Masyarakat mengharapkan kepada kepolisian melalui pemerintah provsu untuk lebih serius memberantas peredaran narkoba yang sangat meresahkan masyarakat di kec. Medan Sunggal	Medan Sunggal	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Sosial
		Mohon untuk penanganan panti rehabilitasi yang ditangani oleh Dinas Sosial karena terjadi pembiaran pelepasan pasien rehabilitasi secara sengaja	Medan Tuntungan	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Sosial
		Masyarakat mohon bantuan dan sosialisasi untuk masuk ke dalam data penerimaan bantuan iuran (PBI) yang berguna untuk mendapatkan Kartu BPJS yang iurannya di bayarkan oleh Pemerintah.	Medan Johor	APBD PROV/APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat mengaharapkan sosialisasi dari pihak pemerintah tentang BPJS sebab masih banyak masyarakat yang belun mengetahui manfaat dari keberadaan BPJS, untuk itu diminta kepada pihak BPJS agar segera melakukan sosialisasi agar masyarakat mengerti tentang manfaatnya.	Medan Polonia	APBD PROV/APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat meminta agar Pemerintah Kota Medan melakukan Foging disetiap keluarahan/lingkungan sebab rawannya penyakit		APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan

		BDB.			
		Tidak terdaftarnya warga kurang mampu sebagai Pemegang Kartu Jamkesmas	Medan Maimun	APBD PROV	Dinas Kesehatan
		Masyarakat juga mengeluhkan tentang kurangnya sosialisasi tentang BPJS dan meminta agar pihak BPJS tidak mempersulit pengurusan khususnya dalam hal rujukan.	Medan Petisah	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat meminta Pemkot Medan dapat mensosialisasikan perpindahan dari kartu medan sehat menjadi BPJS yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Medan.	Medan Barat	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat kec. Medan sunggal mengharapkan kepada pemerintah untuk mempermudah pengurusan BPJS dan membuat kantor-kantor cabang	Medan Sunggal	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Warga berharap Pemerintah Pemko Medan memberikan pendidikan dan kesehatan secara gratis bagi warga khususnya yang kurang mampu dan warga juga bermohon kiranya pemerintah dapat memberikan bantuan kendaraan ambulance gratis setiap kelurahan untuk membantu/digunakan warga apabila ada warga yang jatuh sakit.		APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh dan memberatkan dengan ituran BPJS diminta kepada Pemerintah untuk tidak memberatkan masyarakat dibawah garis kemiskinan.		APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Puskesmas di kec. Medan Selayang harap dibangun dengan sebaik-baiknya dan perlu adanya peninjauan/pemindahan mengingat puskesmas tersebut sudah tidak layak.	Medan Selayang	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan

		Masyarakat memohon kepada Pemerintah untuk penambah penerima bantuan iuran (PBI) guna mendapatkan fasilitas dari program pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat serta BPJS bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.	Medan Tuntungan	APBN	Dinas Kesehatan
		Diminta kepada Pemprovsum untuk merealisasikan Jamkesda ke masyarakat yang merupakan program Provsum		APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Kepala Lingkungan VI Titi Rante menyelaskan pihak BPJS memberikan data yang berbeda dengan kenyataan dilapangan, masyarakat memohon untuk bantuan untuk warga miskin dan pendataan ulang yang lebih selektif	Medan Baru	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Diminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mensosialisasikan sekolah Adiwiyata yang dikelola oleh Pemprovsum	Medan Barat	APBD PROV	Dinas Pendidikan
		Tenaga pengajar SMK Pemprovsum yang telah lengkap dengan peralatannya, mengharapkan kepada Pemprovsum untuk mempermosikan dan memberdayakan pengerjaan pembuatan meubeleur, service kendaraan dan keahlian lainnya pada instansi Pemerintah maupun Swasta sebagai pendapatan untuk penunjang kegiatan Pendidikan SMK Pemprovsum.		APBD PROV	
		Masyarakat Pondok Surya kec. Medan barat memohon bantuan kepada Pemprovsum untuk pembangunan dan penambahan ruangan belajar Madrasah Diniyah Awaliyah Al Iklas.		APBD PROV	
		Masyarakat mohon bantuan dalam pembangunan PAUD untuk menampung anak-anak usia dini.		APBD PROV	
		Pengusulan pembuatan pelatihan khususnya		APBD PROV	

		untuk anak putus sekolah yang orangtuanya tidak mampu setara tingkat SMA/SMK di sekolah SMK Binaan Provsu			
		Masyarakat memohon bantuan untuk merenovasi dan membantu pembangunan Mesjid Al-Hidayah.	Medan Sunggal	APBD PROV	
		Pertambahan jumlah penduduk di Medan Selayan yang cukup pesat hingga mempengaruhi dunia pendidikan diharapkan adanya pembangunan SMA Negeri di kec.Medan Selayang	Medan Selayang	APBN	
		Mohon untuk mensejahterakan tutor PAUD dengan menaikkan gaji mereka	Medan Tuntungan	APBN	
		Warga dikec. Sunggal protes terhadap pendataan warga yang mendapat jatah beras miskin (raskin) , dimohon kepada Pemerintah Kota Medan dan Pemprovsum untuk segera menengahi dan pendataan ulang lebih selektif dalam penyaluran raskin di kec. Medan sunggal pada umumnya.	Medan Sunggal	APBN	Bidang Kemiskinan
		Masyarakat memohon kepada pemkot medan dan pemprovsum untuk mendata ulang BLT yang tidak tepat sasaran.		APBD PROV/ APBD PEMKO MEDAN	
		Masyarakat mohon bantuan Bansos dari Pemko Medan maupun Pemprovsum untuk dapat pembangunan rumah ibadah di Jl. Karya Gg. Ayem kel karang berombak kec. Medan Barat	Medan Barat	APBD PROV/APBD PEMKO MEDAN	Biro Binsos
		Masyarakat memohon kepada Poldasu untuk membangun Pos Polisi di kel. Kwala Bekala.	Medan Johor	APBN	Biro Hukum
		Masyarakat di kec. Medan Selayang memohon kepada Poldasu adanya Polsek di setiap kecamatan.	Medan Selayang	APBD PEMKO	Biro Hukum
		Masyarakat meminta Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Medan Johor	APBD Prov	Pemerintahan Umum

		mensosialisasikan pengurusan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai dasar untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)			
		Warga memohon kepada Pemerintah dan Dinas terkait untuk mensosialisasikan Kartu Indonesia Pintar dikarenakan warga masih banyak yang tidak mengerti.		APBN	Pemerintahan Umum
		Masalah pengurusan akte kelahiran dan kartu keluarga yang memakan waktu lama sekitar 2-3 bulan.		APBD PEMKO MEDAN	Pemerintahan Umum
		Walikota Medan menyampaikan kePemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus bersinergi dan bekerjasama dalam pembangunan di bidang Kesehatan, pendidikan dan kependudukan.		APBD PROV/APBD PEMKO MEDAN	Pemerintahan Umum
		Masyarakat mengharapkan Pemkot Medan untuk tidak mempersulit dalam pengurusan Akte Kelahiran dan KK berwarna biru untuk pengurusan BPJS, diminta agar Pemkot Medan dapat memperhatikan hal ini.	Medan Petisah	APBD PEMKO MEDAN	Pemerintahan Umum
		Masyarakat meminta kepada pemerintah kota medan untuk mempermudah pengurusan KK dan akte kelahiran	Medan Sunggal	APBD PEMKO MEDAN	Pemerintahan Umum
		Warga lingkungan IV memohon kepada pihak kel. Ataupun kec. Untuk menetapkan dan mengganti Kepala Lingk. IV kel Babura kec. Medan Baru dikarenakan Kepling tidak berdomisili di lingk. IV karena sulit menghubungi secara langsung.	Medan Baru	APBD PEMKO MEDAN	Pemerintahan Umum
		Pihak kelurahan dan kepling mengutip biaya iuran keamanan setiap bulan. Warga memohon kepada		APBD PEMKO MEDAN	Pemerintahan Umum

		pihak kec. Dan kel. Memberikan pelayanan dalam keamanan.			
		Masyarakat juga menyampaikan keluhan tentang langkanya Gas Elpiji ukuran 3 kg,dan harganya cukup mahal diatas HET,melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak pertamina diminta agar dapat mengawasi menertibkan pihak agen/penyalur Gas Elpiji agar masyarakat yang susah tidak bertambah susah.	Kecamatan Medan Petisah		Biro Perekonomian/ Distamben
		Pengusulan pembuatan pelatihan khusus untuk anak putus sekolah yang orang tuanya tidak mampu setara tingkat SMA/SMK disekolah SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara.	Kecamatan Medan Barat		Dinas Koperasi dan UKM
		a) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM di kelurahan Kwala Belaka. b) Peningkatan saluran drainase di kawasan HKBP Pordomuan c) Pengerukan sungai Babura di kelurahan Kwala Belaka d) Peningkatan drainase di jalan karya Jaya Kecamatan Medan Johor	Kec. Medan Johor	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase kota b) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM c) Perbaikan sanitasi dan persampahan lingkungan melalui pengerukan parit	Kec. Medan Polonia	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase kota	Kec. Medan Maimun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase kota di jalan Gatot Subroto hingga kawasan Makro	Kec. Medan Petisah	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		b) Pengerukan parit di wilayah Simpang Iskandar Muda Baru.			
		a) Peningkatan drainase di sekitar RS Colombia, Selecta, dan PLN.	Kec. Medan Barat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase kota dengan pengerukan saluran parit di jalan kapten Sumarsono, dan kapten Muslim b) Perbaikan sanitasi dan Penanganan sampah pada kawasan perbatasan	Kec. Medan Helvetia	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase kota di jalan Djamin Ginting dan jalan Ngumban Surbakti. b) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM c) Perbaikan sanitasi dan persampahan lingkungan melalui pengerukan parit	Kec. Medan Selayang	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM b) Peningkatan saluran drainase melalui pembuatan parit di jalan Setia Budi Ujung, di kawasan sungai Bekala Perumnas Simalingkar c) Penghijauan pada bantaran sungai belawan	Kec. Medan Tuntungan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase melalui pengerukan parit di kel. Titi Rante, jalan Darussalam sampai ke jalan Sei Wampu b) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM Tirtanadi c) Peningkatan saluran drainase melalui	Kec. Medan Baru	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		pembangunan infrastruktur pendukung di kelurahan Sei Kambing dan kelurahan Babura			
		1. Perbaiki perbaikan Titi/Jembatan di lingk Lingkar Raya yg sudah rusak 2. Pelebaran jalan Karya Jaya hingga perbatasan Namu Rambe	Kecamatan Medan Johor	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		1. Pengaspalan jalan Bilal dan Jalan Cempaka di Kelurahan Sari Rejo 2. Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kec. Medan Polonia	Kecamatan Medan Polonia	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan Nasional Jl. Jamin Ginting - Titi Benggali di depan RS. Siti Hajar	Kematan Medan Petisah	APBN	Dinas Bina Marga
		1. Perbaiki Jalan Sumarsono sep. 2. Pembuatan jalan Tembus antara Jalan Gereja ke Jalan Ayahanda	Kecamatan Medan Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		1. Usulan memperbaiki/mengaspal jalan di Kec. Medan Sunggal 2. Pembangunan jalan alternatif Medan-Binjai- Jalan TB. Simatupang dan SMPN 9 dirueslag sebagai pembangunan 3. Pembanguan Fly Over Pinang Baris/Kampung Lalang	Kecamatan Medan Sunggal	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota APBN	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan dan pelebaran jalan Provinsi Jalan Bunga Raya, Jalan Setia Budi, Jalan Pasar I Lingk VIII (lebar m panjang 450 m)	Kecamatan Medan Selayang	APBD Prov. SU	Dinas Bina Marga
		1. Pengaspalan dan pelebaran jalan Provinsi Jalan Flamboyan Raya sampai Simpang Pasar Melati Kec. Tuntungan	Kecamatan Medan Tuntungan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		2. Pembangunan jalan tembus dari Jalan Bunga Lau (RS. Adam Malik) ke Jalan di Deli Serdang			
		1. Perbaiki jalan Kelurahan Titi Rante, Kel. Darat, Jalan Sei. Mencirim dan Jalan Darusalam serta Jalan Bahagia dan gang Pelita. 2. Perbaiki Infrastruktur Jalan di Kel. Sei. Sikambang dan Kec. Medan Petisah	Kecamatan Medan Baru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Dapil III (Kabupaten Deli Serdang)	Hibah untuk sarana dan prasarana muda-mudi remaja Masjid Al Watu Iman Dusun XX dan XXI Desa Mulyorejo kecamatan Sunggal	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan hibah untuk sarana prasarana rebana remaja masjid Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Penyediaan lahan untuk wakaf warga di Jl. Blok Gading Desa Klambir V Kebun Dusun XX Kec. Hampanan Perak	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan pengadaan peralatan, perbaikan rumah ibadah dan kegiatan sosial lainnya terhadap aksi sosial masyarakat di Kali Serayu Belakang Dusun 11 Desa Saentis/Cinta Rakyat	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan pembangunan mesjid di Pasar X Desa Bandar Kalippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan pemerintah terhadap Pembangunan sarana musholla di Desa karang Anyar Kec. Berigi	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan pembangunan Mesjid Al Jihad di Desa jati Kusuma Kec. Namorambe	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan pembangunan Balai Desa (Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe)	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial

	Bantuan atas tanah wakaf (Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe)	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
	Bantuan perwira ibu2 (Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe)	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
	Revitalisasi Taman makam Pahlawan di Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
	Perbaikan Jambur Lost yang merupakan tempat kegiatan keagamaan dan pesta masyarakat (Desa gunung Rintih Kec. STM Hilir)	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
	Bantuan pengeras suara untuk para remaja mesjid di hamparan perak khususnya remaja mesjid Abasiya Sei Baharu (Kec. Hamparan Perak-Komplek IRA)	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
	Pemerataan pembangunan sekolah lanjutan di Kecamatan atau Desa	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
	Perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
	Peningkatan kemampuan dan keterampilan para pendidik	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
	Bantuan beasiswa kepada anak-anak berprestasi dan kurang mampu secara proporsional	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
	Perhatian terhadap kesejahteraan guru	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
	Sosialisasi yang lebih intensif terhadap program pemerintah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera KUR dan bantuan sosial lainnya	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
	Bantuan anggaran untuk masyarakat tidak mampu seperti dana tabungan, syarat dan prosedur mendapatkannya agar masyarakat Desa Karang Anyar Kec. Berigi	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan

		Pembangunan gedung SMA dan TK di Desa karang Anyar Kec. Berigi	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Rehab sarana PAUD, kesejahteraan guru, biaya operasional Masyarakat di Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Pendirian PAUD dan fasilitasnya (Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Penambahan sekolah atau ruang kelas baru agar proporsional dengan jumlah penduduk (Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Kualitas pendidikan yang kurang memadai di SD Negeri (Desa Pematang Lalang, Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Tidak adanya guru agama Kristen di 2 (dua) SD Negeri (Desa Pematang Lalang, Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APBN	Dinas Pendidikan
		Perhatian terhadap sekolah PAUD di Desa Pematang Lalang dalam operasionalnya	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Kurangnya fasilitas sekolah SD, SMP dari segi kualitas sekolah dan jarak (Desa Serdang Kec. Beringin)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Agar masalah pemotongan tunjangan sertifikasi guru ditindaklanjuti (Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakkam)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pendidikan
		Peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan PAUD (Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Sosialisasi maksud dan tujuan program BPJS terhadap masyarakat oleh pihak BPJS	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Bantuan hibah pembangunan Puskesmas Dusun XX dan XXI desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi program pemerintah BPJS di Desa Desa	Kabupaten Deli	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan

		Bandar Kalippa Pasar X Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	Serdang		
		Sosialisasi program pemerintah BPJS di Jl. Blok Gading Desa Klambir V Kebun Dusun XX Kec. Hamparan Perak agar diketahui masyarakat akan kegunaan dan manfaatnya	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Bantuan poging dan obat-obatan dikarenakan merebaknya endemik muntaber di dusun VI barisan Gereja Desa Durian yang telah menelan 3 korban jiwa	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Bantuan pengurusan kartu BPJS untuk masyarakat Desa Sawit Rejo Kec. Kutalimbaru	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi penggunaan pelayanan kartu BPJS dengan angsuran Rp. 25.000/orang Desa Karang Anyar Kec. Berigi	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Keluhan masyarakat Desa Karang Anyar Kec. Berigi terhadap minimnya pelayanan BPJS	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov dan APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Masyarakat Desa Karang Anyar Kec. Berigi meminta peninjauan ulang Program BPJS karena harus membayar iuran tiap bulan	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov dan APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Bantuan pengadaan obat-obatan bagi masyarakat Desa Karang Anyar Kec. Berigi	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Agar pendaftaran BPJS dapat dilakukan di Kantor Kepala Desa agar tidak terlalu jauh ke Lubuk Pakkam	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Agar BPJS di Deli Serdang dapat dibuat menjadi kartu sehat gratis (Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe)	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Sulitnya mendapatkan kartu BPJS (Desa Pematang Lalang, Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Masyarakat merasa terbebani dengan kartu BPJS	Kabupaten Deli	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan

		mandiri dengan biaya Rp. 60.000 per bulan, agar pindah ke BPJS Umum yang dikeluarkan oleh PemKab Deli Serdang (Desa gunung Rintih Kec. STM Hilir)	Serdang		
		Bantuan honor untuk kader2 posyandu (Kec. Hampan Perak-Komplek IRA)	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Bantuan pendidikan dan Pelatihan untuk anak putus sekolah Dusun 11 Desa Saentis/Cinta Rakyat oleh Balai latihan kerja di Kali Serayu Belakang Dusun 11 Desa Saentis/Cinta Rakyat	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Bantuan pendidikan dan Pelatihan untuk remaja putus sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap di Dusun X Desa Medan Krio	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program pelatihan untuk masyarakat yang tidak bekerja dan tidak mempunyai lahan (Desa Pematang Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengadaan program2 pelatihan untuk masyarakat bagi pengangguran (Desa Serdang , Kec. Beringin)	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penertiban peredaran narkoba di kafe-kafe yang sangat meresahkan di Desa Klambir Lima Dusun V Kel. Tg. Gusta	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN
		Penertiban peredaran narkoba di kafe-kafe yang sangat meresahkan di Desa Bandar Kalippa Pasar X Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN
		Peneritiban peredaran narkoba kerjasama dengan pihak kepolisian di Desa Klambir V Kebun Dusun XX Kec. Hampan Perak	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN
		Penanganan meluasnya peredaran narkoba di Dusun X Desa Medan Krio	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN
		Perhatian pemerintah dan Polsek Pancur Batu dalam penanganan narkoba (Desa Jati Kusuma	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN

		Kec. Namorambe)			
		Masalah peredaran narkoba di Desa Suka Maju Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN
		Penangan Masalah nasrkoba di Kec. Deli Tua	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN
		Bantuan pembuatan lapangan olahraga di Desa Sidodadi Dusun I dan II Kecamatan Pagar Merbau kabupaten Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota*)	Dispora
		Bantuan pembangunan sarana dan prasarana remaja agar dapat melakukan kegiatan di Desa Sawit Rejo Kec. Kutalimbaru	Kabupaten Deli Serdang	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota*)	Dispora
		Pembangunan sarana prasana fasilitas kegiatan remaja di Desa Lantasan baru Kec. Patumbak	Kabupaten Deli Serdang	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota*)	Dispora
		Pembangunan lapangan bola(Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe)	Kabupaten Deli Serdang	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota*)	Dispora
		Bantuan sarana olahraga (lapangan bulutangkis0 untuk para pemuda di wilayah jalan mawar (Kel. Kadal, Kec. Deli Tua)	Kabupaten Deli Serdang	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota*)	Dispora
		Dukungan Pemerintah Deli Serdang dan Provsu untuk menindak lanjuti permasalahan tanah Desa Ramunia ke Pemerintah Pusat agar bisa terselesaikan di Dusun IV Pematang Blara Desa Pantai Labu Kec. Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Pemerintahan Umum
		Permasalahan Tanah pemukiman yang sampai sekarang belum ada suratnya	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov	Pemerintahan Umum
		Perhatian terhadap kepemimpinan Kepala Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe yang akan berakhir	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Pemerintahan Umum
		Permohonan prona untuk sertifikat tanah bagi masyarakat desa Pematang Kec. Percut Sei Tuan	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Pemerintahan Umum

		Pengurusan Akte Pernikahan (Desa Pematang lalang Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Pemerintahan Umum
		Masalah tanah Ex HGU (Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov	Pemerintahan Umum
		Masalah tapal batas desa dan hutan lindung mengacu kepada SK Menhut No. 44 (Desa gunung Rintih Kec. STM)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov	Pemerintahan Umum
		Tindak tegas oleh Kapolda terhadap premanisme di Desa Klumpang dusun Dusun XVI Timur Sidomulyo Desa Klumpang Kec. Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Penertiban kafe2 yang meresahkan masyarakat di Desa lantasan baru Kec. Patumbak	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Diminta pemerintah Deli Serdang bantuan pengadaan mesin mencari kerang bagi masyarakat Pantai labu	Dusun: IV Pematang Biara, Desa:Pantai Labu, Kec :Deli Serdang, Kab. Deli Serdang		Dinas Kelautan Perikanan
		1.Karena belakangan ini sering terjadi kelangkaan Gas Tabung Elpiji 3 kg apalagi sekarang pemerintah menaikkan harga minyak ditambah susahny mendapatkan minyak tanah kembali,masyarakat desa sidodadi memohon kepada Pemerintah Provsu dan Pemerntahan Kabupaten untuk segera mengatasi hal ini.	Desa :Sidodadi, Kec : Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang		Biro Perekonomian
		2.Hal serupa dari Tahun-ketahun yang dikeluhkan masyarakat masih juga terjadi di Desa sidodadi yaitu masih terdapatnya kelangkahan Pupuk dan sulit memperoleh pada saat musim tanam yang menjadi masalah besar.Kelangkahan pupuk bersubsidi dikarenakan kurangnya Pengawasan dari Pemerintahan Kabupaten ditambah lagi			Dinas Pertanian

		banyaknya pupuk yang dijual Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seharusnya diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu,hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja mohon menjadi perhatian Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang untuk meninjau ulang masalah kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut.			
		1.Masyarakat mengusulkan kepada pemerintah detempst sgsr mendirikan khusus Koperasi Pertanian agar petani mudah untuk memperoleh pupuk,bibit dan lain-lain yang lebih murah dan terjangkau oleh petani-petani kecil karena sesuai dengan aturan pemerintah,kalau ingin mendapatkan bantuan dari Pemerintah masalah bibit harus mempunyai lahan seluas 5 Ha.	Desa :Dusun II		Dinas Pertanian
		2.Dari pertemuan reses yang dilaksanakan di desa Namo Bintang yang juga turut hadir dari Dinas Koperasi dan UKM,Masyarakat ingin membentuk suatu lembaga yang berbentuk Koperasi sehingga para petani/pemulung bisa menjual hasilnya dan mempunyai legalitas yg sah.Masyarakat meminta kepada dinas terkait agar dapat membantu apa yang diharapkan masyarakat Dusun II Desa Namo Bintang kab.Deli Serdang bisa tercapai.	Desa :Dusun II		Dinas Koperasi Dan UKM
		Dimohon kepada Pemerintah untuk memberi bantuan kepada masyarakat dalam penyediaan bibit ikan,kambing,babi,dan sapi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Kec :Sunggal, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Kelautan Perikanan
		Dimohon kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat/petani dalam pengadaan pompa penyedot air dari sungai untuk	Kec :Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Pertanian

		menghadapi musim kemarau panjang setiap tahunnya yang selalu dialami para petani karena pada saat musim kemarau tali air tidak berfungsi disebabkan pintu berada diatas permukaan air parit.			
		Masyarakat meminta kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pemeberian pupuk untuk membantu pertanian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			Dinas Pertanian
		Dimohon kepada pemerintah untuk memberi bantuan kepada masyarakat dalam penyediaan bibit ikan,kambing,babi dan sapi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			Dinas Kelautan Perikanan,Dinas Peternakan
		Pengembangan Wirausaha masyarakat seperti:pelatihan bordir,Salon,pembuatan makanan ringan serta diintensifikannya pelatihan dan bimbingan dari instansi terkait kepada kelompok usaha masyarakat maupun perorangan,untuk mengoptimalkan potensi yang desanya dan perbaikamn penghasilan nelayan	Desa :Bagan Serdang, Kec :Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Koperasi dan UKM
		Masih banyak sawah warga yang dikelola pertanian yang dikelola dengan sistem tadah hujan,sehingga hasilnya tidak maksimal.Pembangunan dan perawatan irigasi ,agar menjadi prioritas pemerintah ,karena Percut Sei Tuan merupakan daerah lumbung beras di sumatera utara.Masyarakat juga mengharapkan diberikan bantuan pengadaan peralatan pertanian,penyaluran bantuan bibit tanaman dan	Desa :Saentis/cinta rakyat, Kec :Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Pertanian,Dinas Peternakan

		bantuan ternak.dengan bantuan tersebut,akan meningkatkan hasil pertaniandan peternakan warga yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Deli Serdang.			
		Perlu segera ditambah Petugas Penyuluh Lapangan,untuk membimbing masyarakat tentang cara pertanian /perkebunan dan peternakan yang baik serta diberikannya bantuan bibit unggul dan tahan lama,penyaluran pupuk bersubsidi secara teratur dan tepat sasaran serta penyaluran bantuan ternak kepada warga kurang mampu,dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahterannya.	Kabupaten Deli Serdang		Bakorluh
		Dusun III sebagai ketua Koperasi Mandiri mengharapkan bantuan modal untuk meningkatkan status Koperasi kami.	Desa :Lantaran Baru, Kec :Patumbak, Kab. Deli Serdang		Dinas Koperasi dan UKM
		Banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan bahan dan alat-alat pertanian berupa bibit pertanian,bibit ternak,alat pertanian serta alat-alat keterampilan.	Kec :Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Pertanian,Dinas Peternakan
		Desa Tanjung Rejo sebagai daerah wisata Mangrove diharapkan bantuan Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan daerah wisata ini.	Kec :Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Masyarakat memohon bantuan bibit padi.setiap turun kesawah masyarakat kekurangan bibit untuk berladang oleh sebab itu masyarakat sangat mengharapkan adanya program bantuan	Desa :Pematang Lalang, Kec :Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Pertanian

		bibit padi dari pemerintah, seperti yang telah diterima di desa-desa lain.			
		Masyarakat petani sangat kesulitan mendapatkan pupuk untuk bertani karena pupuk sangat terbatas dan langka. Masyarakat petani meminta adanya program penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani.	Desa :Serdang, KEC :Beringin, Kab. Deli Serdang		Dinas Pertanian
		Masyarakat memohon bantuan bibit ternak seperti lembu kepada kelompok ternak atau kelompok yang menerima bantuan benar-benar berprofesi sebagai petani ternak.	Desa :Gunung Rintih, KEC :STM Hilir, Kab. Deli Serdang		Dinas Peternakan
		Dimohon kepada Pemerintah agar kiranya memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak serta perbaikan dan pembenahan Drainase di kec.Percut Sei Tuan.	Desa :Tembung, KEC :Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang		Biro Perekonomian
		Masyarakat juga memohon kiranya perlu ada kegiatan atau bimbingan dan penyuluhan tentang Modal Usaha bagi masyarakat UKM.			Dinas Koperasi dan UKM
		Masyarakat mengeluhkan mahal dan langkanya Gas Elpiji 3 kg di desa tersebut dan masyarakat juga mengeluhkan pemadaman yang dilakukan lagi oleh pihak PLN karena menghambat kegiatan para warga di Desa Bakaran Batu.	Desa :Bakaran Batu, KEC :Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang		Biro Perekonomian
		Masyarakat mengeluhkan mahal dan langkanya Gas Elpiji 3Kg di Desa tersebut.	Desa :Marindal I, KEC :Patumbak, Kab. Deli Serdang		Biro Perekonomian
		Guna peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat petani di daerah ,perlu ditingkatnya	Kabupaten Deli Serdang		Dinas Pertanian

		bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain pemberian bantuan bibit/benih variates unggul tahan hama,ketersediaan pupuk,pengadaan alat-alat pertanian serta ditambahnya penyuluh lapangan.			
		Mohon membantu mempercepat pemasangan jaringan listrik sampai Dusun V Desa Namuriam	Desa :Namuriam, KEC :Pancur batu, Kab. Deli Serdang		Distamben
		a) Pembangunan sarana dan prasarana air minum di Desa Paya Bakung b) Pembangunan sumur bor di Dusun XX dan XXI Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal c) Peningkatan saluran drainase melalui pengerukan parit di Desa Tembung Dusun I dan Dusun II d) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM Tirtanadi di Dusun XX dan XXI Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal	Kabupaten Deli Serdang	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan saluran drainase melalui pengerukan parit	Desa Klambir Lima Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kec. Hamparan perak	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase melalui pembangunan saluran parit b) Peningkatan pelayanan air bersih PAM TIRTA DELI agar masuk ke Dusun XX	Desa Klambir V Kebun Dusun XX Kec. Hamparan perak	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan saluran drainase melalui pembangunan saluran parit	Desa Bandar Kalippa Pasar X Kec. Percut	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

			Sei Tuan		
		Peningkatan saluran drainase melalui pembangunan saluran parit	Desa Bandar Kalippa Pasar X Kec. Percut Sei Tuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Desa Sidodadi Batu 8 Dusun II Kec. Pagar Merbau	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan MCK	Desa Bangan Serdang Kec. Pantai Labu	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan saluran drainase melalui pembangunan saluran parit	Dusun 11 Desa Saentis/ Cinta Rakyat, Kec. Percut Sei Tuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase melalui pengerukan sampah	Desa Karang Anyar Kec. Beringi	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase seperti parit	Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan pipanisasi air minum	Desa Kutalimbaru kec. kutalimbaru	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase melalui pengerukan parit	Desa Sampali kec. Percut Sei Tuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase melalui pengerukan parit	Desa Medan Estate kec. Percut Sei Tuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase melalui pengerukan parit	Desa Mekar Sari dan Desa Suka Maju kec. Deli tua	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase melalui pengerukan parit	Desa Serdang Kec. Beringin	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		Peningkatan drainase jalan provinsi	Desa Tembung kec. Percut Sei Tuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan jaringan air minum	Desa Deli Tua Barat kec. Deli Tua	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Perbaikan Jalan dan saluran drainase	Desa Tanjung Morawa kec. Tanjung Morawa	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan jaringan air minum	Dusun III kec. Hamparan Perak	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pengaspalan jalan di Desa pantai Labu Deli Serdang, karena jalan tersebut jalan lintas ke Bandara kuala Namu.	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kab atau BKP	Bina Marga
		Pengaspalan Jalan di Dusun XVI Desa Klumpang sepanjang 3 km.	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kab atau BKP	Bina Marga
		Ruas Jalan Durin Tinggiung - Gunung Merah sepanjang ± 8 Km (Kondisi ruask berat)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Ruas Jalan Gunung Meriah – Watas Simalungun sepanjang ± 8 Km	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Ruas jalan Tiga Juhar – Durin Tinggiung (Kondisi rusak sedang)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Watas Serdang Bedagai – Gunung Meriah (kondisi rusak sedang)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Ruas Jalan Bangun Purba – Watas Serdang Bedagai (Kondisi rusak sedang)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga

		Ruas jalan Galang – Bangun Purba (kondisi rusak sedang)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten atau BKP	Bina Marga
		Ruas jalan Deli Tua – Talun Kenas (kondisi rusak sedang)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Ruas jalan Talun Kenas – Tiga Juhar (pemeliharaan berkala)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Watas Kota Medan (Kolonel Bejo) Percut Sei Tuan (Bandar Setia) Batang Kuis – Bandara Kuala Namu.	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Simpang Penara – Penara – bandara Kuala Namu	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lubuk Pakam – Berigin – P.labu – Kuala Namu	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Simpang Warung Seri – Sidoarjo I Ramunia (P.Labu) – Pintu Belakang Kuama namu	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lubuk Pakam – Bandara Kuala Namu – Batang Kuis – Percut Sei Tuan – Medan Labuhan (Kota Medan) – Hampan Perak – Watas Langkat (Jalan Lingkar Mebidangro)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Bandara Kuala Namu – Tanjung Morawa – Patumbak – D.Tua – P.Batu – Sunggal – Hampan Perak (jalan lingkar Mebidangro)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		T.Morawa – Saribu Dolok – Tongging (Rawa Saring)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		Tiga Juhar – Liang Pematang – Tiga Panah (Tanah karo)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Ranatu Panjang – Pantai labu – P.Cermin (Kab. Sergai)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Tandem Hilir I – Bulu Cina – Simp.Beringin – Hamparan Perak – Sp.Kantor (Medan)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Watas Medan – Patumbak Kampung – Sigara-gara – Lantasan lama – Patumbak I	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Simpang Abadi – Bandar Labuhan – Talun Kenas	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Sampali – Saentis – Bagan Percut	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Batang Kuis – Sugiharjo – Pematang Biara – Pantai Labu – Denai Kuala - P.Cermin (Kab.Sergai)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Tuntungan (Watas Medan) – Sawit Rejo – Mencirim – Simp.Diski (Watas Binjai)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan Jalan Ibnu Chattab di Dusun III Tanjung Morawa B.	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan Industri Gang Tapai Dsn I Tanjung Morawa B dengan ukuran L.4 m dan P.800 m.	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan jalan dan saluran parit di jalan Wakaf	Kecamatan Deli	APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

		Tanjung Morawa	Serdang, Kab. Deli Serdang	Kab.Kota	
		Perbaikan Jalan dari Batang Kuis sampai Pantai Labu sepanjang 10 km	Kecamatan Batang Kuis, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan Pertanian sepanjang 2.400 meter, jalan Pembangunan 2.200 meter Jalan Pelita Dusun V sepanjang 800 meter dan jalan RK sepanjang 850 meter	Kecamatan Namo Bintang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan jalan Klambir Lima – Desa Hampan Perak berbatasan dengan Medan Helvetia – Deli Serdang dan berbatasan dengan Medan Marelan sepanjang ± 15 km dan menaikkan status Jalan Kabupaten selama ini untuk meningkat statusnya menjadi Jalan Provinsi.	Kecamatan Namo Bintang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Pembangunan Jembatan Penghubung yang dimana akses jembatan tersebut menghubungkan beberapa desa seperti : Desa Klambir Lima Kebu Desa Klambir Kampung Desa Paya bakung dan mengurangi dampak kemacetan yang sering kali terjadi di Jalan Klambir Lima Kec. Hampan Perak tersebut.	Kecamatan Hampan Perak, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Memperbaiki (Pengecoran) Jalan – jalan / Gang – gang yang ada di Desa Bandar Kalippa Pasar X Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.	Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kab. Deli Serdang	APBD Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Perbaikan jalan mulai dari Pasar 16 Saentis menuju Bangan.	Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembuatan Jembatan 3 x 4 M di Dusun II Sidodadi Kecamatan Pagar Marbau sudah hancur dan rubuh,	Kecamatan Pagar Marbau, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		Aspal Cor di Dusun I dan Dusun II Sidodadi Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang sudah hancur dan berlubang-lubang	Kecamatan Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan jalan di depan gereja HKI Sei Semayang Kec. Sunggal kab. Deli Serdang kondisinya sangat memprihatinkan.	Kecamatan Sunggal	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi pariwisata Pantai Bagan di Desa Bangan Serdang dan Pantai Muara Indah di Desa Denai Kuala	Kecamatan Pantai Labu, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jalan-jalan di desa Beringin yang kondisinya masih banyak yang berupa jalan tanah dan batu		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan dan pengaspalan jalan-jalan kampung di Kecamatan Kutalimbaru	Kecamatan Kutalimbaru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan jembatan di Dusun Sejahtra yang menghubungkan Dusun Sejahtra menuju sekolah jalannya sangat rusak ditambah jembatan tersebut tidak mempunyai dinding pengaman.	Kecamatan Kutalimbaru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di Kec. Kulimbaru.	Kecamatan Kutalimbaru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Peningkatan status ruas jalan Tuntungan-Kutalimbaru-Bandar Baru menjadi status jalan Provinsi	Kecamatan Kutalimbaru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Peningkatan status ruas jalan Tanjung Anom-Lau Bakeri-Perpanden yang tembus sampai ke Langkat/ Binjai menjadi jalan Provinsi.	Kecamatan Kutalimbaru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Silebo-lebodi Kecamatan Kutalimbaru dengan Desa Pasar IV Namo Trasi Kab Langkat yang melintasi Syngai Mencirim sepanjang kurang	Kecamatan Kutalimbaru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		lebih 20 meter.			
		Jalan alternatif di pasar Pancur Batu untuk menghindari kemacetan	Kecamatan Pancur Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan dan Pemeliharaan Ruas Jl Letda Sudjono-Tembung-Batang Kuis yang merupakan jalan nasional yang merupakan akses yang termudah oleh masyarakat Kota Medan bila hendak menuju Bandara KNIA.	Kecamatan Percut Sei. Tuan	APBN	Bina Marga
		Pengaspalan jalan sepanjang 3000 meter dari Dusun X Desa Serdang yang berbatasan dengan rel Kereta Api menuju arah jalan Bandara Kuala Namu.	Kecamatan Beringin	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan dari jalan simpang Kutambaru sampai ke Dusun II Kutambaru.	Kecamatan STM Hilir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua	Kecamatan Deli Tua	APBD Prov. SU	Bina Marga
		Perbaikan/Pemeliharaan daerah Irigasi kewenangan Provinsi : 1. Namurambe seluas 1.036 Ha 2. Medan Krio seluas 2.800 Ha 3. Bekala (irigasi lintas Kabupaten/Kota)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Provinsi	PSDA
		Pembuatan Tembok Kupingan Pinggir Sungai/Titi di Dusun I Sidodadi Kecamatan Pagar Marbau Kabupaten Deli Serdang	Kecamatan Pagar Merbau	APBD Provinsi	PSDA
		pengadaan pompa penyedot air dari sungai untuk menghadapi musim kemarau panjang	Kecamatan batang Kuis	APBD Provinsi	PSDA
		Pembangunan dan perawatan irigasi	Kali Serayu Belakang Dusun 11, Desa Saentis/Cinta Rakyat	APBD Provinsi	PSDA
		Perbaikan saluran jaringan irigasi Bandar Sidoras	Desa Cinta Damai	APBN	PSDA dan BWSS

		yang rusak	dan Pematang Lalang		
		pembangunan pleningan tali air dan pintu air di Desa Pematang Lalang Dusun Sekata	Desa Pematang Lalang	APBD Provinsi	PSDA
		Pembangunan/Rehabilitasi saluran irigasi pertanian di Desa Serdang Kec. Beringin	Desa Serdang Kecamatan Beringin	APBD Provinsi	PSDA
		Membangun kembali Benteng Penahan Air di Dusun 4 (Empat) Sei Belawan	Dusun 3 (Tiga) Kecamatan Hampan Perak – Komplek IRA	APBN	PSDA dan BWSS
	Dapil IV (Kab.Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi)	Pembangunan sekolah TK Gereja HKBP Sei Rampah Kel. Pangkalan Budiman.	Kabupaten Serdang Bedagai	Hibah/Bansos	Dinas Pendidikan
		Masalah pembuangan air selokan menuju sekolah yang menyebabkan banjir (Kel. Pangkalan Budiman Kec. Sei Rampah)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Perhatian terhadap biaya sekolah yang mahal	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Peningkatan mutu pendidikan (Kec. Sei Rampah)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Peningkatan pelayanan di Puskesmas maupun RSUD serta obata-obatan dan peralatan. (Kec. Sei Rampah)	Kota Tebing Tinggi	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Bantuan pengobatan, pangan, biaya kematian, peralatan rumah tangga bagi masyarakat pasien penyakit kusta (Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah)	Kabupaten Serdang Bedagai	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Pembangunan klinik khusus pengobatan/pasien	Kabupaten Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan

	sakit kusta (Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah)	Bedagai		
	Bantuan obat-obatan untuk puskesmas di Kota Tebing Tinggi (Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir)	Kota Tebing Tinggi	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
	Pendataan ulang kembali kartu sehat (Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis kota T.Tinggi)	Kota Tebing Tinggi	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
	Kurangnya pemahaman mengenai program BPJS dan banyaknya masyarakat yang sudah mendaftar namun belum menerima kartu BPJS (Desa Bengkel Kec. Perbaungan)	Kabupaten Serdang Bedagai	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
	Pelayanan RS untuk pasien JKN diskriminatif	Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan wanita untuk menambah pendapatan (Kec. Pantai Cermin)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kegiatan keterampilan untuk remaja putus sekolah (Kec. Sei Rampah)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kurangnya lapangan kerja untuk generasi muda usia produktif (Desa Bengkel Kec. Perbaungan)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kurangnya lapangan kerja untuk generasi muda usia produktif (Kota Tebing Tinggi)	Kota Tebing Tinggi	APBD Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Mohon diadakannya penyuluhan narkoba (Kec. Perbaungan)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab/Kota	BNN
	Mohon diadakannya penyuluhan narkoba (Kec. Sei Rampah)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab/Kota	BNN
	Perhatian terhadap maraknya peredaran narkoba di Kota Tebing Tinggi (Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota T. Tinggi)	Kota Tebing Tinggi	APBD Kab/Kota	BNN
	Maraknya peredaran narkoba Di Sergai	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab/Kota	BNN

		Rehab Mesjid sebesar Rp. 400.000 (Desa Pulau Tagor Dusun VI Kec. Serdang Bedagai	Kabupaten Serdang Bedagai	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Bantuan untuk pembangunan mesjid dana P.APBD Provsu TA. 2015 Desa Pegajahan Kec. Pegajahan)	Kota Tebing Tinggi	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Bantuan pembangunan perluasan parkir dan teratak stainless untuk halaman mesjid jamik di Dusun I Sukajadi Kec. Perbaungan	Kabupaten Serdang Bedagai	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Masalah banjir dan perbaikan tanah wakaf kristen HKBP simpang Bedagai (Kel. Pangkalan Budiman Kec. Sei Rampah)	Kabupaten Serdang Bedagai	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Pengadaan penerangan lampu jalan listrik di gang Gereja HKBP Sei Rampah Kel. Dusun I Kec. Dolok Masihul)	Kota Tebing Tinggi	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Pembangunan drainase berupa parit	Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan jaringan air minum	Kec. Pantai Cermin	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase berupa gorong-gorong	Kec. Sei Rampah	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan sumur bor	Desa Pertambakan kec. Dolok Masihul	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Perbaikan drainase dan pengerukan lumpur	Kel. Pinang Mancung kec. Bajenis	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembuatan Kanal dan drainase	Kel. Pangkalan budiman kec. Sei Rampah	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Pembangunan drainase di jalan budi utomo b) Perbaikan jalan dan drainase perkotaan	Kel. Siambut-umbut kec. Kota Kisaran Timur	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		di jalan teratai			
		1. Bantuan ternak lembu kepada kelompok Ternak di Desa Melati II	Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2. Bantuan ternak budidaya ikan tawar di Desa Melati II	Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Kelautan dan Perikanan
		3. Masyarakat bermohon pembangunan lumbung ketahanan pangan Dusun III Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan sebanyak 1 Unit	Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai		Badan Ketahanan Pangan
		4. Mohon bantuan bibit ternak lembu untuk Dusun I s/d IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan	Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		5. Gabungan Kelompok Tani dari Dusun III Desa Sukajadi mohon bantuan teknologi hand traktor sebanyak 3 unit dan nantinya akan dibagikan perkelompok tani yang ada di Desa Sukajadi untuk mengolah sawah yang luasnya ± 200 Ha	Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		1. Mohon kepada Dinas Perkebunan agar jangan melakukan perawatan Areal Perkebunan dengan cara meracuni semua rumput karena semua peternak sudah cukup lama bergantung dengan perkebunan untuk mengambil rumput sebagai Pakan utama ternak.	Kec. Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Perkebunan
		2. Masyarakat Desa Jati Mulia/ kelompok ternak mohon bantuan ikan air tawar	Kec. Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Kelautan dan Perikanan
		3. Mohon bantuan ternak Sapi sebanyak 20 ekor di Dusun IV Desa Pegajahan	Kec. Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		4. Mohon bantuan mesin babat rumput sebanyak	Kec. Pegajahan,		Dinas Pertanian

		3 unit di Dusun IX A Desa Bingkat	Kabupaten Serdang Bedagai		
		5. Mohon bantuan 50,000 ekor benur bibit ikan gurami yang akan dibagikan kepada 10 kelompok tani di Desa Jati Mulyo	Kec. Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		6. Mohon Pemerintah agar pembagian gas LPG 3 Kg hendaknya harus perkelurahan karena warga setempat banyak yang tidak kebagian warga lain yang mendapat	Kec. Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai		Biro Perekonomian
		7. Mohon Pemerintah agar dapat menindaklanjuti gas LPG 3 KG harganya melambung diatas 20.000 dan hilang dari peredaran sulit untuk men dapatkannya	Kec. Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai		Biro Perekonomian
		1. Mohon bantuan sarana alat penangkap hasil laut untuk kelompok Jenahar di Desa Lubuk Saban Kec. Pantai Cermin	Kec. Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Kelautan dan Perikanan
		2. Masyarakat kelompok ternak bermohon diadakan pelatihan tentang ternak ikan air tawar, lembu dan kambing	Kec. Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		1. Masyarakat mohon diadakannya kegiatan keterampilan untuk remaja yang putus sekolah	Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Koperas dan UKM
		2. Masyarakat Petani mohon bantuan bibit Padi dan Pupuk	Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		3. Masyarakat Desa Simpang Empat mohon bantuan bibit jagung	Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		4. Mohon bantuan pupuk bersubsidi untuk Petani di Desa Simpang Empat	Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian

		5. Mohon bantuan ternak kambing dan lembu untuk menambah penghasilan masyarakat Desa Simpang Empat	Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		1. Mohon bantuan bibit Kelapa Sawit untuk meningkatkan pendapatan Petani Desa Pertambakan	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Perkebunan
		2. Mohon bantuan pupuk bersubsidi untuk Petani di Desa Pertambakan	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		3. Mohon agar penyaluran Gas Elpiji 3 Kg tepat sasaran dan menjaga agar harga tidak melambung	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Biro Perekonomian
		4. Masyarakat mengeluh atas sulit dan mahal nya untuk mendapatkan Gas Elpiji 3 Kg di Kel. Pekan Dolok Masihul	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Biro Perekonomian
		5. Kelompok tani Kel. Pekan Dolok Masihul juga mengeluhkan langkanya pupuk bersubsidi untuk itu Dinas terkait agar dapat membantu mengatasi kelangkaan pupuk tersebut	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		6. Mohon Pemerintah agar mengadakan penyuluhan-penyuluhan Pertanian kepada para Petani guna meningkatkan hasil panen	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		7. Mohon bantuan alat-alat pertanian Jetor dan Bibit unggul yang bermutu kepada Kelompok Tani di Desa Serdang Bedagai Kec. Sei Bamban	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		8. Mohon merealisasikan Pupuk Subsidi yang langka, harganya mahal, hilang dari peredaran dan pemberian tidak tepat sasaran di Desa Suka Damai	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		1. Bantuan untuk mendapatkan Gas Elpiji ukuran 3 Kg dengan harga murah, karena pada saat ini	Kec. Padang Hilir, Kabupaten Serdang		Biro Perekonomian

		masyarakat membeli Gas dengan harga mahal	Bedagai		
		2. Mohon bantuan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi agar petani bisa mendapatkan hasil Pertanian yang maksimal	Kec. Padang Hilir, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		1. Mohon agar mendapatkan pakan subsidi karena selama ini hasil panen para petani tidak sesuai dengan harga jual, yang mana harga pakan lebih tinggi dari harga jual di Kel Pinang Mancung	Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi		Dinas Pertanian Provsu
		2. Mohon agar dapat mengadakan Balai Benih ikan di Kel. Pinang Mancung karena sampai saat ini belum ada dibuat Balai Benih ikan agar supaya ada masukan untuk para petani yang telah selesai panen di sawah	Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi		Dinas Kelautan dan Perikanan
		3. Mohon bantuan jetor dan alat semprot hama yang masih kurang di Kel Pinang Mancung	Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi		Dinas Pertanian Provsu
		4. Mohon untuk Pemerintah dapat mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 Kg di Kec. Bajenis	Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi		Biro Perekonomian
		5. Mohon bantuan untuk mengadakan penanaman kedelai, padi dan lain-lain untuk mendatangkan pupuk yang murah dan bermutu tinggi.	Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi		Dinas Pertanian Provsu
		6. Mohon bantuan agar dapat merealisasikan pupuk subsidi yang langka, pupuk mahal tidak sesuai hasil panen	Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi		Dinas Pertanian Provsu
		Pengaspalan kembali jalan lintas Kecamatan dari Kecamatan Perbaungan menuju Sukasari Kecamatan Pengajahan sepanjang 15 km	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan hotmix di Dusun Jambu Desa Melati sepanjang 1300 m	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

			Bedagai		
		Pengaspalan Lapen di Dusun Rambe Desa Melati II sepanjang 1600 m	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan parit jalan dari Dusun I s.d II Desa Sei Jenggi (Jalan lintas Medan - Tebing Tinggi) sepanjang 3000 m	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan parit jalan dari Dusun II s.d III Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan (Jalan lintas Medan - Tebing Tinggi)	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan Jalan Dusun I s.d II Desa Sukajadi sepanjang 1200 m	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jalan setapak Dusun I s.d IV Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan sepanjang 2970 m	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan ulang Jalan Antar Kecamatan Pegajahan menuju Kecamatan Serbajadi dari Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan s.d Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi	Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan Jalan Kecamatan dari Desa Pegajahan Dusun V menuju Desa Bengabing	Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan ulang jembatan di Dusun V Desa Pegajahan menuju Desa Lestaridadi Kecamatan	Kecamatan Pegajahan,	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		Pegajahan	Kabupaten Serdang Bedagai		
		Pengaspalan Jalan Dusun II Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan sepanjang 1000 m	Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan sepanjang 1500 m di Desa Simpang Empat Kecamatan Serdang Bedagai	Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan desa sepanjang 2500 x 3 m yang menghubungkan Dusun III s.d Dusun IV Desa Pulau Tagor Kecamatan Serdang Bedagai	Dusun IV Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan Jalan alternatif atau jalan pemotongan di Kecamatan Dolok Masihul untuk menghindari macet di jalan Provinsi	Kelurahan Dusun I Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan/pengaspalan jalan dari Desa Damakurat s.d Desa Simalas Kecamatan Sipispis	Kelurahan Dusun I Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jalan di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan	Kelurahan Dusun I Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaiki jalan di Kelurahan Pinang Mancung dan Jalan Pramuka	Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis, Kota Tebing	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

			Tinggi		
	Dapil V (Kabupaten Batu Bara, Asahan dan Kota Tanjung Balai)	Bantuan perbaikan/rehabilitasi Masjid Al Muhtadin Desa Sei Kamah I Dusun V Kampung Tempel	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan untuk pembangunan rumah ibadah di Dusun II Desa Perlompongan Kec. Batu.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan hibah keuangan kepada Persatuan Wirid Yasin Muhibbah Desa Sei Paham	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan dan perhatian juga support agar gereja dan rumah ibadah diberi perhatian lebih dan juga bantuan dana hibah/sosial	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Al-Hidayah Dusun I Punggulan Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Ar-Rahman Dusun II Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Al-Ikhwan Dusun V Desa Punggulan Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan berupa alat kesenian Islam lengkap untuk digunakan oleh remaja mesjid Al-Hidayah (KURMA) Dusun I Desa Punggulan Kec. Air Joman untuk digunakan pada hari besar Islam maupun kegiatan Desa	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan pagar mesjid Al-Ikhal Desa Rawa Sari Dusun I Kec. Aek Kuasan.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan mesjid Jariyah Desa PR Pekan Dusun VI Sidomulyo Kec. Pulau Rakyat.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan menara mesjid dan melantai halaman mesjid Syuhada Desa Bangun Dusun II Kec. Pulau Rakyat.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembuatan pagar dan paving block	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos

		Masjid Nurul Imam di Desa Sei Silau Barat.			
		Bantuan renovasi Masjid Al-Fallah Desa Banjar Dusun IV Kec. Air Joman.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Al-Huda Desa Binjai Baru Kec. Talawi Kabupaten Batubara.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan Mesjid Al-Ikhlas berupa pembangunan MCK, pagar Mesjid dan penambahan areal bangunan (diperbesar) di Dusun IV Desa Karang Baru Kec. Talawi.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP dan APBD Kab. Batubara	Binsos
		Bantuan kepada bilal mayat dan nadzir mesjid di Desa Suka Damai Barat Kec. Pulo Bandring.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan pagar dan pemasangan paving blok Masjid Ar-Rahman Dusun III Desa Glugur Maksmur Kec. Talawi	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan mesjid Al-Ikhlas Dusun II Desa Karang Baru Kec.a Talawi	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan mesjid Al-Hijratul A'Zhom Dusun II Desa Pahang Kec. Talawi	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan mesjid Alhuda, pembangunan pagar mesjid beserta rehab atemapt wudhu dankamar mandi, di dusun IV Sidorejo Desa Sei Muka, Kec. Talawi.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan renovasi pembangunan Mesjid Al-Amin Desa Benteng Kec.a Talawi.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan Menara Mesjid Nurul Iman Desa Perk. Tanah Datar Kec. Talawi	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan renovasi Mushollah Ar-Rohim Dusun V Desa Glugur Makmur Kec. Talawi.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan Mesjid Al-Muttaqin Desa Lubuk Besar Kec. Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos

	Bantuan Pembangunan Mesjid Al-Hidayah Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
	Bantuan Dana Mesjid Nurul Hasanah Dusun III Pulau Rejo Desa Sumber Rejo Kec. Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
	Bantuan Dana untuk pembangunan Menara Masjid Al-Ikhlas Kampung Baru Kec. Talawi.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
	Bantuan Alat Olah Raga Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.	Kabupaten Asahan	Hibah/BKP	Dispora
	Bantuan Alat Olah Raga Kepada EGC Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten	Kabupaten Asahan	Hibah/BKP	Dispora
	Bantuan Pendidikan Swasta Desa Sei Paham Kecamatan Sei kepayang kabupaten Asahan.	Kabupaten Asahan	Hibah/BKP	Dinas Pendidikan
	Mohon Kepada pemerintah agar dibangun sekolah SMP Negeri di Desa Hutapadang Kecamatan bandar pasir mandoge Kabupaten Asahan.	Kabupaten Asahan	Hibah/BKP	Dinas Pendidikan
	Mohon pembangunan SMK Negeri di kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan	Kabupaten Asahan	Hibah/BKP	Dinas Pendidikan
	Bantuan Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu maupun mahasiswa berprestasi	Kota Tanjung Balai	Hibah/BKP	Dinas Pendidikan
	bantuan beasiswa yang terkendala karena tidak memiliki KIP	Kota Tanjung Balai	Hibah/BKP	Dinas Pendidikan
	Mohon supaya programPemerintah terutama mengenai Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sejahtera agar cepat dapat dilaksanakan di Desa Air Putih Kecamatan Meranti kabupaten Asahan.	Kabupaten Asahan	APBN	Dinas Kesehatan
	Mohon supaya programPemerintah terutama mengenai Kartu Indonesia Pintar,	Kabupaten Asahan	APBN	Dinas Kesehatan
	Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sejahtera agar dilakukan dengan tepat sasaran	Kabupaten Asahan	APBN	Dinas Kesehatan

		dan sesuai dengan tujuan program di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.			
		Masyarakat berharap kepada Pemerintah dengan adanya peralihan dari Jamkesmas ke BPJS agar diberikan penjelasan dan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik tanpa membedakan agama, suku, ras dan golongan.	Kabupaten Asahan	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Rumah sakit Umum Daerah Belum mampu melayani masyarakat secara maksimal yang masih ditemukan pelayanan amburadul yang berawal dari kelemahan sistem pelayanan di Puskesmas. Pelayanan di Puskesmas, BPJS Maupun dari Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Batubara.	Kabupaten Batu Bara	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Masyarakat Desa Karang batu kecamatan talawi kabupaten batu bara meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten batu bara untuk lebih mensosialisasikan program BPJS karena Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui program ini apalagi tentang pembuatan kartu BPJS tersebut.	Kabupaten Batu Bara	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Masyarakat meminta kepada Pemerintah agar dapat mensosialisasikan tata cara pengurusan BPJS dan berharap kepada aparat desa supaya menata kembali masyarakat yang belum menerima kartu BPJS.	Kabupaten Batu Bara	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Pemerintah/Pihak BPJS perlu melakukan sosialisasi tentang pengaturan dan pelaksanaan BPJS serta kaitannya dengan program Bapak Presiden RI tentang Kartu Indonesia Sehat sampai	Kota Tanjung Balai	APBD Prov	Dinas Kesehatan

		ke tingkat Desa.			
		Mendata ulang penerima manfaat Jamkesmas dan Raskin yang tidak tepat sasaran di Kecamatan Datuk Bandar Timur	Kota Tanjung Balai	APBN	Dinas Kesehatan
		peninjauan ulang pembuatan BPJS kesehatan dimana masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan kartu BPJS	Kota Tanjung Balai	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Bantuan perbaikan/rehabilitasi Masjid Al Muhtadin Desa Sei Kamah I Dusun V Kampung Tempel	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan untuk pembangunan rumah ibadah di Dusun II Desa Perlompongan Kec. Batu.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan hibah keuangan kepada Persatuan Wirid Yasin Muhibbah Desa Sei Paham	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan dan perhatian juga support agar gereja dan rumah ibadah diberi perhatian lebih dan juga bantuan dana hibah/sosial	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Al-Hidayah Dusun I Punggulan Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Ar-Rahman Dusun II Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Al-Ikhwan Dusun V Desa Punggulan Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan berupa alat kesenian Islam lengkap untuk digunakan oleh remaja mesjid Al-Hidayah (KURMA) Dusun I Desa Punggulan Kec. Air Joman untuk digunakan pada hari besar Islam maupun kegiatan Desa	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan pagar mesjid Al-Ikhal Desa Rawa Sari Dusun I Kec. Aek Kuasan.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan mesjid Jariyah Desa PR	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama

		Pekan Dusun VI Sidomulyo Kec. Pulau Rakyat.			
		Bantuan pembangunan menara mesjid dan melantai halaman mesjid Syuhada Desa Bangun Dusun II Kec. Pulau Rakyat.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembuatan pagar dan paving block Masjid Nurul Imam di Desa Sei Silau Barat.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan renovasi Masjid Al-Fallah Desa Banjar Dusun IV Kec. Air Joman.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan Rehab lantai Masjid di Desa Banjar Dusun IV Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan untuk pembangunan Masjid Al-Mutaqin di Desa Mangga Dua	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Al-Huda Desa Binjai Baru Kec. Talawi Kabupaten Batubara.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan Mesjid Al-Ikhlas berupa pembangunan MCK, pagar Mesjid dan penambahan areal bangunan (diperbesar) di Dusun IV Desa Karang Baru Kec. Talawi.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP dan APBD Kab. Batubara	Agama
		Bantuan kepada bilal mayat dan nadzir mesjid di Desa Suka Damai Barat Kec. Pulo Bandring.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan pagar dan pemasangan paving blok Masjid Ar-Rahman Dusun III Desa Glugur Maksmur Kec. Talawi	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan mesjid Al-Ikhlas Dusun II Desa Karang Baru Kec.a Talawi	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan mesjid Al-Hijratul A'Zhom Dusun II Desa Pahang Kec. Talawi	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan mesjid Alhuda, pembangunan pagar mesjid beserta rehab atemapt wudhu dankamar mandi, di dusun IV	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama

		Sidorejo Desa Sei Muka, Kec. Talawi.			
		Bantuan renovasi pembangunan Mesjid Al-Amin Desa Benteng Kec.a Talawi.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan Menara Mesjid Nurul Iman Desa Perk. Tanah Datar Kec. Talawi	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan renovasi Mushollah Ar-Rohim Dusun V Desa Glugur Makmur Kec. Talawi.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan Mesjid Al-Muttaqin Desa Lubuk Besar Kec. Lima Puluh	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan Pembangunan Mesjid Al-Hidayah Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan Dana Mesjid Nurul Hasanah Dusun III Pulau Rejo Desa Sumber Rejo Kec. Lima Puluh	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan Dana untuk pembangunan Menara Masjid Al-Ikhlas Kampung Baru Kec. Talawi.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan penyuluhan dan rehabilitasi gratis kepada generasi muda yang belum terkontaminasi maupun yang sudah terkontaminasi Narkoba Kabupaten Batubara khususnya Desa Sumber Padi Kec. Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara	APBD Provinsi/BNN	Kesbangpol
		Peningkatan pemberian penyuluhan kepada generasi muda untuk tidak terjebak kepada barang-barang haram seperti narkoba, di Desa Pematang Rambai Kec. Tanjung Tiram.	Kabupaten Batu Bara	Pemerintah Provsu dan Kab. Batubara	Kesbangpol
		Permohonan untuk mengangkat sekretaris desa di Desa Suka Damai Barat Kec. Pulo Bandring yang sudah bertugas di atas 7 (tujuh) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Kabupaten Batu Bara	Pemerintah Provsu dan Kab. Batubara	Kesbangpol
		Agar Pemerintah dan Pihak Kepolisian agar dapat memperhatikan dan menuntaskan masalah narkoba di Desa Mekar Baru.			Kesbangpol

		Pemerintah setempat agar bertindak tegas kepada generasi muda dalam hal pergaulan bebas dan bahaya Narkoba di Desa Binjai Serbangan Lingkungan II Pasar V Kec. Air Joman Kab. Asahan	Kabupaten Asahan	Pemerintah Kab. Asahan	Kesbangpol
		Aparat keamanan agar bertindak tegas dan cepat untuk memberantas peredaran dan perdagangan NARKOBA pada generasi muda sebagai penerus bangsa di Desa Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai	Kabupaten Asahan	Pemerintah Kab. Asahan	Kesbangpol
		Permintaan lahan HGU PT. BSP untuk kuburan Muslim di Pasar 4 Kelurahan Karang Anyar Kec. Kota Kisaran Timur.	Kabupaten Batu Bara	APBD Kabupaten Batu Bara	Pemerintahan
		Pengaduan Masyarakat Desa Empat Negeri, Desa Perk. Kwala Gunung Kec. Lima Puluh tentang PT. Kualagunung tentang Indikasi HGU Mati, truk pengangkut sawit pajak mati bertahun-tahun 10 unit, tidak pernah memberikan dana CSR pada warga sekitar.	Kabupaten Batu Bara	APBD Kabupaten Batu Bara	Pemerintahan
		Agar dibuat penyesuaian kearifan lokal Kota Tanjung Balai terkait Peraturan Menteri Nomor 57. Agar dibuat penyesuaian kearifan lokal Kota Tanjung Balai terkait Peraturan Menteri Nomor 57.	Kota Tanjung Balai	APBD Kota Tanjung Balai	Pemerintahan
		Agar Pemerintah dan wakil-wakil rakyat secara berkala dapat turun (blusukan) ke masyarakat untuk memperhatikan permasalahan dan mendengarkan keluhan masyarakat serta kepentingan rakyat.	Kabupaten Asahan	APBD Kabupaten Asahan	Pemerintahan
		Bimbingan dan penyuluhan pemerintah terutama untuk peningkatan pendapatan dan ekonomi	Kabupaten Batu Bara		Biro Perekonomian

		rumah tangga bagi masyarakat di desa Simodong kec. Sei Suka Kab. Batubara			
		Pemasangan tiang tiang listrik sekaligus aliran listriknya ke Desa Pematang Rambai menuju ke Desa Panca Arga yang belum ada listriknya	Kabupaten Batu Bara		Distamben
		Beras miskin kepada masyarakat	Kabupaten Batu Bara		Ro Perekonomian
		pupuk gratis	Kabupaten Batu Bara		Ro Perekonomian/ Distan
		Bantuan bibit jeruk nipis guna pengembangan usaha pertanian	Kabupaten Batu Bara		Disbun
		Pengadaan bibit ikan, berupa bibit ikan lele jumbo, bibit ikan mujair dan bibit ikan nila serta juga pakan ikannya	Kabupaten Batu Bara		Distan
		Bantuan berupa sapi brahman, pembuatan kandang sapi, pembangunan rumah kompos serta mesin cincang sampah dan alat kerja lainnya	Kabupaten Batu Bara		Dis Peternakan & Kesehatan Hewan
		Pemasangan tiang-tiang listrik karena di Dusun IX Panca arga menuju Dusun VI Desa Pematang Rambai, masyarakatnya belum menikmati aliran listrik sampai sekarang	Kabupaten Batu Bara		Distamben
		Bantuan UKM dan LKP khususnya kepada para kaum perempuan guna lebih memberdayakan kelompok perempuan yang berada di desa tersebut	Kabupaten Batu Bara		Biro Perekonomian
		Pengawasan pendistribusian gas elpiji	Kabupaten Asahan		Biro Perkenomian Setda Provsu
		Bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan)	Kabupaten Asahan		Dinas Pertanian Provsu
		Bantuan bibit ikan, pakan dan kolam terpal Koptan Setia Dame	Kabupaten Asahan		Diskanla
		Bantuan bibit ikan kepada Koperasi Nelayan	Kabupaten Asahan		Diskanla

		Bahari Sentosa serta Koperasi Nelayan Madani dan Koptan Harapan Desa Sei Paham			
		Bantuan alsintan kepada Koptan Maju Jaya Desa Sei Paham	Kabupaten Asahan		Diskanla
		Pengadaan alat berat untuk membuka lahan keras pertanian 1000 Ha	Kabupaten Asahan	Hibah/Bansos	Dinas Pertanian Provsu
		Penambahan atau pembangunan tali air menuju ke daerah dusun I desa air putih kec. Meranti	Kabupaten Asahan	Hibah/Bansos	Dinas Pertanian Provsu
		Penyuluh pertanian di daerah Dusun I desa air putih kec. Meranti supaya lebih aktif melaksanakan penyuluhan	Kabupaten Asahan	Hibah/Bansos	Dinas Pertanian Provsu
		Penyuluhan peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat di desa air putih kec. Meranti	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian
		Penyuluhan peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat di desa simpang empat kec. Simpang empat	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian
		Bimbingan dan Penyuluhan peningkatan pendapatan dan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat di desa Hutabagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian
		Supaya Desa-desa terpencil di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan dapat dimasukkan aliran Listrik dari PLN	Kabupaten Asahan		Distamben
		Perhatian pemerintah mengenai masalah pertanian yang gagal panen karena banjir yang merusak persawahan masyarakat di Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan	Kabupaten Asahan		Distan (Pertanian)
		Pendataan ulang kembali mengenai bantuan langsung tunai yang pelaksanaannya di Kabupaten Asahan tidak tepat sasaran	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian

		kelangkaan Gas Elpiji ukuran 3 Kg di Kecamatan Tanjungbalai yang disebabkan terjadinya kenaikan harga BBM	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian / Distamben
		merajelanya operasi pukat harimau dan sejenisnya yang mengakibatkan penghasilan mereka semakin terpuruk , sehingga para istri-istri nelayan tersebut pagihari sudah mencari kerang guna menambah penghasilan keluarga	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian / Diskanla
		nelayan kecamatan Air Joman dan Silo Laut memohon bantuan alat tangkap berupa kapal nelayan yang lebih besar (5 GT) karena akhir – akhir ini gelombang ombak yang semakin tinggi hingga mencapai 3 meter sehingga tidak memungkinkan lagi menggunakan kapal kecil	Kabupaten Asahan		Diskanla
		Bantuan ternak lembu, bibit ikan lele, bibit ikan gurami	Kabupaten Asahan		Dinas Peternakan
		Bantuan modal usaha berupa Kredit Usaha bagi ibu-ibu nelayan agar bisa membuka lapangan usaha seperti menjahit, membordir dan usaha membuat kripik ubi dan lain sebagainya	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian
		Bantuan bibit ikan kepada KUBE As Syarif Tanjung Balai dan KUBE Subur Tanjung Balai,	Kota Tanjung Balai		Diskanla
		pengawasan mengenai pendistribusian gas elpiji di Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai		Biro Perkenomian / Distamben
		bantuan bibit ikan, padi dan pupuk bagi petani	Kota Tanjung Balai		Diskanla
		Pendataan ulang penerima manfaat JAMKESMAS dan RASKIN yang tidak tepat sasaran	Kota Tanjung Balai		Biro Perkenomian / Dinkes
		Bantuan ternak untuk masyarakat Kota Tanjung Balai seperti lembu, kerbau, kambing, babi dan hewan ternak lainnya	Kota Tanjung Balai		Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
		Bantuan alat tangkap ikan bagi kelompok nelayan	Kota Tanjung Balai		Diskanla

		yang sudah terbentuk			
		peraturan khusus untuk kota Tanjung Balai mengenai masuknya ikan luar ke pasar Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai		
		Peningkatan drainase berupa pembuatan parit	Sei Kamah I Dusun V Desa Kampung Tempel Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan drainase dan pembangunan jalan	Desa Simpang Empat Kec. Simpang empat Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan drainase berupa parit	Desa Aras Kec. Air putih Lima Puluh Kab. Batubara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan sumur bor	Desa Air Putih kec. Meranti kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Normalisasi saluran drainase	Desa Sei Mataram Pematang Nibung kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Perbaikan drainase	Kec. Kisaran Barat kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Kec. BP Mandoge kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Dusun IV, dusun VIII kec. BP Mandoge kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan drainase berupa normalisasi saluran pembuang	Desa Sei Sembilang kec. Sei Kepayang Timur	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		Peningkatan kualitas drainase	Desa Binjai Serbangan kec. Air Joman Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Kel. Sei Ranggung kec. Kota Kisaran Barat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase berupa pembuatan parit	Kel. Sentang kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase berupa pembuatan parit	Kel. Sei Silau Timur kec. Buntu Pane Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase berupa pembuatan parit	Desa Buntu Pane Kec. Buntu Pane Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase berupa pembuatan parit	Desa Mekar Sari kec. Buntu Pane Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Desa Mangkai Baru kec. Lima Puluh Kab Batubara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Desa Lima Puluh kec. Lima Puluh Kab. Batubara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Desa Sumber Makmur kec. Lima Puluh Kab. Batubara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Desa Suka Ramai kec. Sei Balai Kab. Batubara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		Pembuatan Riol/ drainase pada jalan Provinsi	Kel. Aek Loba Pekan kec. Aek Songsongan kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembuatan Drainase	Desa Aek Korsik kec. Aek Ledong kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembuatan Riol/ drainase	Desa Aek Loba Afdeling I kec. Aek Ledong kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembuatan Drainase	Desa Sei Lama kec. Simpang Empat kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		pengaspalan jalan utama dari Simpang Sumur Bor Desa Simpang Dolok menuju Desa Kwala Gunung sepanjang 1,2 Kilometer di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara	Desa Kwala Gunung, Kabupaten Batu Bara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan jalan Hotmix terutama pada ruas jalan dari desa Simodong kec. Sei Suka Kab. Batubara menuju desa Tanjung Sigoni kec. Medang Deras Kab. Batubara.	Kec. Sei Suka Kab. Batubara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan jalan utama dari Simpang Sumur Bor Desa Simpang Dolok menuju Desa Kwala Gunung sepanjang 1,2 Kilometer di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara.	Desa Kwala Gunung Kecamatan Lima puluh Kabupaten Batubara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan jalan dan titi (jembatan) dari Desa Pematang Rambai menuju Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan	Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		memperbaiki jalan yang telah mengalami kerusakan sepanjang ± 7 Km dan pengaspalan	Desa Karang Baru di Kecamatan Talawi	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		jalan tanah merah sepanjang ± 10 Km di Desa Karang Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara	Kabupaten Batu Bara		
		pembangunan Peningkatan Ruas Lapem Dusun III Sepanjang ± 500 m.	Desa Empat Negeri Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan Jalan Rambung Merah Desa Empat Negeri Sepanjang ± 500 m.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapem Titi Putih Dusun II Desa Empat Negeri Sepanjang ± 500 m.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Penimbunan Jalan Tanah Doman, Jembatan menuju Glugur Desa Empat Negeri.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan Jalan Dusun III Jalan Bustami Desa Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara Sepanjang ± 500 m.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan jalan-jalan yang rusak Desa Sei Suka Kecamatan Tanjung Kasau Kabupaten Batu Bara.	Desa Sei Suka Kecamatan Tanjung Kasau Kabupaten Batu Bara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Renovasi jembatan di Desa Ambalutu	Desa Mangga Dua Dusun Iv Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Jalan Dusun II menuju ke Dusun IV.	Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan jalan dari Simpang Pir sampai ke Desa Tinggi Raja yang merupakan jalan	Desa Tinggi Raja Kecamatan Tinggi	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		Kabupaten.	Raja Kabupaten Asahan.		
		pengaspalan jalan Provinsi dari Desa Tinggi Raja sampai ke Desa Rowo Rejo .	Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengerasan jalan Dusun VI Desa Sidomulyo .	Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Bantuan Lapen Jalan Kegiatan Pasar 12 Dusun V menuju ke Dusun IV Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan sepanjang 1 kilometer	Kabupaten Asahan		Bina Marga
		pembangunan peningkatan ruas jalan dengan Hotmix dari Dusun I menuju Dusun III desa Hutabagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan.	Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan/peningkatan Jalan dengan hotmix terutama di jalan Swadaya dan jalan Karya Dusun 19 di desa Simpang Empat kec. Simpang empat Kab. Asahan	Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan/peningkatan jalan yang melalui Dusun 11 di desa Simpang Empat kec. Simpang empat Kab. Asahan	Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan/peningkatan jalan dari Dusun 12 menuju Jampalan Wetan Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.	Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan / pengaspalan jalan Protokol Desa Sei Kamah I Dusun V Kampung Tempel sepanjang ± 1 km.	Dusun V Desa Kampung Tempel Kab. Asahan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan Jalan Pendidikan di Desa Hesa Perlompongan Dusun II Kec. Air Batu	Dusun II Desa Hesa Perlompongan Kec. Air Batu Kab. Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan jalan provinsi di Kecamatan Sei	Desa Sei Paham	APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

		Kepayang	Kecamatan Sei Kepayang Kab. Asahan	Kab.Kota	
		lanjutan pembangunan jalan menggunakan Hotmix dari Desa Serdang 2 menuju Desa Air Putih Kec. Meranti Kab. Asahan.	Kec. Meranti Kab. Asahan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan/peningkatan Jalan dengan hotmix terutama di jalan Swadaya dan jalan Karya Dusun 19 di desa Simpang Empat kec. Simpang empat Kab. Asahan	Kec. Simpang Empat Kab. asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan/peningkatan Jalan dengan hotmix jalan yang melalui Dusun 11 di desa Simpang Empat kec. Simpang empat Kab. Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan/peningkatan Jalan dengan hotmix jalan dari Dusun 12 menuju Jampalan Wetan Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		peningkatan jalan dengan Hotmix di Dusun 6 Tangkahan Limau Desa Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kab. Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan peningkatan ruas jalan dengan Hotmix dari Dusun I menuju Dusun III desa Hutabagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan.	Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Jalan Kegiatan Pasar 12 Dusun V menuju ke Dusun IV Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan sepanjang 1 kilometer	Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembuatan jembatan sebagai jalan penghubung dari Jalan Desa Perjuangan Pasar V menuju Tugu Perjuangan Pasar Lembu Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		Perbaiki Jalan di Jalan Lobak menuju Jalan Kecipir.	Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaiki dan Pembangunan Jalan dan drainase sepanjang + 800 Meter di Jalan Teratai		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan dan pengaspalan Jalan Sanusi Pane serta Jalan Rimbang 1 dan 2 Lingkungan 9 Kelurahan Siambut Baru		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pelebaran jalan menuju Air Joman dari Karang Anyer		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jembatan di Siambut umbut	Kecamatan Air Joman, Kab. Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Peningkatan ruas jalan dari perkerasan menuju SMK Negeri 1 BP Mandoge Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan drainase di jalan Provinsi dari Dusun IV menuju Dusun VIII Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Kec. Aek Songsongan Rahuning Bandar Pulau, Aek Kuasan, Aek Ledong Pulo Rakyat Kab. Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Hotmix jalan sepanjang 1,5 km lingkungan VI jalan Pandu.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembuatan Riol kiri kanan jalan lintas Provinsi sepanjang 3000 m.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Penghotmixkan jalan lingkungan VI ke VII sepanjang 5 km.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan badan jalan sepanjang 7 km di Aek Ledong		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembuatan Drainase 14 km kiri kanan di Aek Ledong		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembuatan Riol Dusun VI sepanjang 2 km kiri		APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

		kanan di Aek Loba.		Kab.Kota	
		Pengerasan di Dusun IV ukuran 3m x 200m Danau Sijabut Kec. Air Batu Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan di Dusun II 3m x 300m di Desa Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase di Dusun II menuju Desa Pasiran ukuran 1m x 0.75m x 350m di Desa Sei Lama Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan di Jalan Pertanian ukuran 3m x 300m di Desa Sipaku Area Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen di jalan Listrik Dusun VIII menuju Simp Empat ukuran 4m x 200m di Desa Simpang Empat Kec Simpang Empat Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan Perkerasan Jalan, Jembatan dan Turab Desa Glugur Makmur Kec. Talawi Kab. Batubara.	Kec. Lima Puluh, Medang Deras, Air putih, Talawi, Kab. Batubara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase Jalan Protokol 400M Depan Kantor Desa di Desa Mangkai baru Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapem Dusun IV Desa Antara Belakang PKS Kuala Gunung 800m di Desa Antara Kec. Limapuluh Kab. Batubara		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase MTSN 50 2m X 300m Desa Limapuluh Kota Kec. Limapuluh Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapem Dusun I – II 500m Desa Perk. Tanah Gambus Kec. Limapuluh Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase Dusun IV – V 500m Desa Sumber Makmur Kec. Limapuluh Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapem Jalan Dusun V Sidodadi 500m Desa Sumber		APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

		Rejo Kec. Limapuluh Kab. Batubara.		Kab.Kota	
		Lapen Jalan Protokol Desa Mekar Baru Kec. Talawi Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Jalan Protokol Desa Karang Baru Kec. Talawi Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Dusun IV 500m Desa Glugur Makmur Kec. Talawi Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Dusun I Desa Petatal Kec. Talawi Kab. Batubara		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perkerasan jalan Dusun IV Kamp. Petani 500m Desa Ujung Kubu Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Dusun IV 1000m Desa Siajam Kec. Sei Balai Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase Dusun I 1000m Desa Suka Ramai Kec. Sei Balai Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Dusun VIII 1000m Desa Pematang Kuing Kec. Sei Suka Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lening jalan Desa 1000m Dusun VIII di Desa Sei Suka Deras Kec. Sei Suka Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Dusun 15 – 16 1500m Desa Laut Tador Kec. Sei Suka Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perkerasan jalan baru Dusun VI 500m Desa Dewi Sri Kec. Sei Suka Kab. Barubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pelebaran Jalan utama Desa Sei Silau Barat di Dusun V sepanjang 300 meter.	Kec. Setia Janji, Tinggi Raja, Buntu Pane, Pasir Mandoge, Kab. Asahan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembuatan Jembatan di Dusun V Desa Sei Silau Barat lebar 3x6 meter.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		Jalan Dusun VI, di turap panjang + 200 meter.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembuatan jembatan dengan panjang 2x5 meter		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan protokol simpang Butu Pane menuju Setia Janji		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase satu sisi Lk II ke Lk. I di jalan Singa Kel. Sei Renggas ukuran 1m x 1m x 150m Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen di Jalan Arwana Lk I Kel. Sidomukti ukuran 2m x 150m Kel.sidomukti Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase di jalan Bacang Kel Sentang ukuran 1m x 1m x 150m Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen di Dusun IIB depan Budi Hesti ukuran 3m x 100m Kel. Sei silau Kec. Buntu Pane Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perkerasan di Dusun IIB Simp. Gerandong hingga Rumah Trisan ukuran 2.5m x 300m Desa Karya Ambalutu Kec. Buntu Pane Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan di Dusun III ukuran 3.5m x 200m di Desa Sei Silau Barat Kec. Setia Janji Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan di Dusun IV ukuran 3.5m x 300m Desa Urung Pane Kec. Setia Janji Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan di Dusun V ukuran 3.5m x 200m Desa Piasa Ulu Kec. Setia Janji Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lanjutan pengerasan di jalan Garuda Dusun VI ukuran 3.5m x 200m Desa Tinggi Raja Kec. Tinggi Raja Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan di Dusun VI ukuran 3m x 300m Desa Hutang Padang Kec. BP. Mandoge Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Desa Binjai Serbangan Lingkunagn li Pasar V		APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

				Kab.Kota	
		pembangunan infrastruktur jalan lintas antar desa, dusun dan pengaspalan jalan-jalan kecamatan	Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pemeliharaan jalan dikecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan	Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan infrastruktur jalan yang rusak parah yang menghubungkan desa- desa di Kecamatan Air Joman dan Silau laut khususnya	Desa Binjai Serbangan Kebun Sayur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapem jalan SD Inpres No. 014694 Dusun III Desa Air Joman .	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Kecamatan Tanjung Balai Utara	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaiki jalan hotmix di jalan DTM Abdullah Gg. Logam Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara sepanjang + 300 meter.	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Kecamatan Datuk Bandar	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jalan menuju perkuburan umat kristiani yang terletak di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan panjang 30 meter dan lebar 8 meter.	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Penghotmitan jalan dengan lebar 6 meter dan panjang 600 meter yang terletak di jalan Kampong Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaiki jalan yang terletak di daerah Pantai	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

	Olang Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai		Kab.Kota	
	Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 3 Km di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Kecamatan Datuk Bandar Timur	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Perbaiki jalan MT Hariono ujung Kelurahan Tanjung Balai Selatan beserta pemasangan lampu jalan dengan panjang jalan 2 Km.	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Kecamatan Sei Tualang Raso	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Pembangunan jalan Perumnas di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso menuju perumahan Anggkatan Laut	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Kecamatan Teluk Nibung	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Penghotmixan kembali jalan Sipori-Pori Ujung sampai dengan perbatasan Tanjung Balai – Asahan sepanjang 3 Km di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Pembangunan pembentengan sungai Sukaraja di kec. Simpang Empat Kab. Asahan	Kabupaten Asahan	APBN	PSDA
	Perbaiki tanggul di Desa Binjai Serbangan Lingkungan II Pasar V Kec. Air Joman		APBN	PSDA
	Pembuatan tanggul untuk penahan abrasi pantai		APBN	PSDA
	Perbaiki/Rehab jaringan irigasi di Kecamatan Sei Suka Kab. Batu Bara untuk meningkatkan debit air	Kabupaten Batu Bara	APBN	PSDA
	Rehabilitasi/peninggian Pintu Air SMB yang	Kabupaten Batu Bara	APBN	PSDA

		terletak di Desa Brohal kec. Sei Suka untuk menaikkan debit air untuk irigasi			
		Pembangunan DAM Irigasi Dusun IV dan V Desa Karang Baru Kecamatan Talawi	Kabupaten Batu Bara	APBN	PSDA
		Saluran Pembuang Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 150 Ha normalisasi saluran pembuang pasar bondang 5000 meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Provinsi	PSDA
		Saluran Pembuang Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 170 Ha normalisasi saluran pembuang Pasar Kaya 5000 meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Provinsi	PSDA
		Saluran Pembuang Desa Sei Pasir dan Sarang Holang Kecamatan Sei Kepayang Timur areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 150 Ha normalisasi saluran pembuang Desa Sei Pasir dan Sarang Holang 5000 meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Provinsi	PSDA
		Perkuatan Tebing Desa Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 150 Ha perkuatan tebing Desa Sei Pasir 350 Meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Kab / Prov	PSDA
		Pembuatan Tanggul Desa Sarang Holang Kecamatan Sei Kepayang Timur areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 150 Ha pembuatan tanggul penahan air asin 6000 meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Provinsi	PSDA
		Saluran Pembuang Desa Sei Kepayang Timur areal rawa yang efektif terlayani rehab dan	Kabupaten Batu Bara	APBD Kab / Prov	PSDA

		peningkatan jaringan pembuang 150 Ha Normalisasi saluran pembuang Desa Sei Kepayang Tengah menuju Desa Sei Sembilang 5000 meter			
		Saluran Pembuang Desa Pembangunan Kecamatan Sei Kepayang areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 150 Ha normalisasi saluran pembuang pasar 14 8000 meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Kab / Prov	PSDA
		Saluran Pembuang Desa Sei Kepayang Kanan Kec. Sei Kepayang Kanan areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 170 Ha normalisasi saluran pembuang Dusun X menuju Dusun XII 8000 meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Kab / Prov	PSDA
	Dapil VI (Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan)	Pengadaan dan pembangunan tanah wakaf di desa Silumajang	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Rehab Paving Block Masjid Al Munawwaroh Dusun IV Sumber Rejo Desa Padang Maninjau	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Pemasangan pagar dari Dusun I s/d Dusun IX Desa Padang Maninjau Kec. Aek Kuo	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Bantuan sosial untuk mesjid di Desa Lobuhuala Kec. Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Pembangunan Musholla Al Ikhlas di Jl. Suka Jadi Lingkungan VIII Kelurahan Sungai Berombang Kec. Panai Hilir	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Pengadaan honor para bilal mayit dan nazir mesjid	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Pembangunan mesjid di dusun Karya Maju Kec. Torgamba	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Hibah/ Bansos	Dinsos

		Pengadaan sarana pendidikan dan MCK untuk sekolah di Kec. Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Diknas
		Pembangunan pagar sekolah SMP 3 Negeri di Dusun Montong Desa Silumajang	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Diknas
		Penambahan 2 lokal sekolah MTS Al-Mukmin di Dusun Sibito Desa Silumajang	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Diknas
		Pembangunan sekolah MDA di Desa Silumajang	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ BKP/APBD Kab. Kota	Diknas
		Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan di Kec. Na XIX agar dibangun Aula Dinas Pendidikan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ BKP	Diknas
		Rehab 5 ruangan belajar dan penambahan 1 ruang belajar untuk sekolah MTS Islamiyah di Dusun VII Desa Padang Maninjau	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ BKP	Diknas
		Pendidikan gratis tingkat SMP dan SMA	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBN	Diknas
		Honor daerah untuk guru PAUD dan perhatian untuk infrastruktur PAUD	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Diknas
		Kesetaraan pembangunan sekolah-sekolah agama dengan sekolah negeri di Sungai Berombang	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ BKP	Diknas
		Pembangunan sekolah agama MDTA di Desa Tebing Lingga Hara	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ BKP	Diknas
		Pembangunan SD Negeri di Lingkungan Bulu Cina Desa Sidorejo	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ BKP	Diknas
		Pembangunan SMA Negeri Sitongit kampung dalam	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ BKP	Diknas
		Pembangunan sekolah SD dan SMA	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ BKP/APBD Kab. Kota	Diknas
		Pembangunan Ruang Kelas Baru di Desa Cikampak untuk SD, SMP, SMA	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Prov/ BKP	Diknas
		Pemagaran keliling sepanjang +- 750 M untuk	Kabupaten Labuhan	APBD Prov/ BKP	Diknas

		Sekolah Madrasah Al Muttaqin di Desa Suhud Kec. Silangkitang	Batu Selatan		
		Pengadaan akses internet dan jaringan selular di Desa Beringin Jaya untuk siswa-siswa agar mengenal dunia interbet	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Diknas
		Pengadaan meubileur di sekolah SD Negeri 118270 Desa Beringin Jaya	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Diknas
		Ketepatan pembayaran dana BOS yang berkaitan dengan pembayaran honor atau gaji bagi guru honor di sekolah Desa Suhud	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Diknas
		Pembangunan Rumah Sakit di Kota Aek Kanopan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ BKP	Dinkes
		Penambahan Puskesmas di Desa Ujung Padang	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ BKP	Dinkes
		Pembuatan/ Pembangunan Puskesmas Desa	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ BKP	Dinkes
		Pembangunan dan perbaikan Puskesmas serta penambahan perawat dan bidan di Desa Kuala Beringin	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ BKP	Dinkes
		Pengembalian alihfungsi Puskesmas Model menjadi Rumah Sakit di Labuhan Bilik	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Dinkes
		Pihak Puskesmas menyediakan obat-obatan sebagai perangsang untuk ibu-ibu hamil yang sulit melahirkan di Desa Senah	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Dinkes
		Membangun sarana POLINDES di Dusun Kampung Jawa Raya	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Dinkes
		Evaluasi dan mengawasi kinerja pegawai di Puskesmas di Desa Cikampak	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Dinkes
		Sosialisasi mengenai kartu BPJS dan pendistribusian kartu sehat tepat sasaran di Desa Beringin Jaya	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Dinkes

		Subsidi untuk mendaftar sebagai peserta BPJS untuk masyarakat tidak mampu	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Dinkes
		Penyuluhan dan pendistribusian Kartu Sehat tepat sasaran	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Dinkes
		Pelayanan kesehatan yang maksimal	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Dinkes
		Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Dusun Bulu Cina Desa Sidorejo	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Kab. Kota	Disnakertran
		Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Desa Beringin Jaya serta pembinaan dan pelatihan bagi pemuda di Desa Beringin Jaya	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Disnakertran
		Informasi Perekrutan untuk penerimaan CPNS sampai ke masyarakat, karena banyak kekurangan jumlah aparatur	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Provsu	BKD
		Permohonan dari masyarakat Desa Kampung Padang, Kec. Pangkatan mengenai penerimaan CPNS agar dapat diawasi karena menurut masyarakat setempat terdapat kenakalan dari beberapa oknum DPRD setempat yang ikut mengganggu objektivitas penerimaan CPNS tersebut.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Provsu	BKD
		Penanganan peredaran narkoba serta perjudian yang telah merebak dari kota sampai ke pedesaan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Provsu	Kesbangpol
		1. Kelompok Tani Tunas Baru Dusun Kampung Lima Puluh Desa Tanjung Pasir Kec. Kualuh Selatan menyampaikan permohonan bantuan sapi dan kelompok tani bunga tanjung dan kelompok tani harapan makmur mengharapkan bantuan sapi potong dalam rangka peningkatan populasi	Kabupaten Labuhan Batu Utara		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

		ternak di desa			
		2. Mohon pemerintah untuk bantuan kelompok tani mekar utama di Dusun IV berupa bantuan sapi	Kabupaten Labuhan Batu Utara		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3. Pengadaan bibit, baik bibit padi maupun bibit ternak di Desa Adian Torop dan pengadaan pupuk bersubsidi	Kabupaten Labuhan Batu Utara		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian
		1. Masyarakat mengharapkan bantuan bibit sawit bersertifikasi, yang mana selama ini masyarakat menanam bibit sawit sembarangan, bahkan sekitar 10% masyarakat yang menggunakan bibit sawit bersertifikasi	Kabupaten Labuhan Batu		Dinas Perkebunan
		2. Masyarakat mengharapkan agar pupuk bersubsidi selalu ada di daerah Dusun Kampung Jawa sebab selama ini pupuk bersubsidi tersebut kadang tersedia dan kadang tidak sama sekali	Kabupaten Labuhan Batu		Dinas Pertanian
		3. Masyarakat mengharapkan Pemerintah agar mendorong Pertamina dalam rangka penanganan kelangkaan Gas LPG 3 Kg dan 12 Kg yang sangat meresahkan masyarakat	Kabupaten Labuhan Batu		Biro Perekonomian
		1. Masyarakat meminta kepada Pemerintah agar memberikan bantuan ke kelompok tani berupa bibit pertanian dan bantuan hewan ternak	Kabupaten Labuhan Batu Selatan		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian
		2. Masyarakat mengharapkan bantuan bibit pertanian seperti bibit karet dan bibit sawit serta bibit ternak seperti ternak sapi bagi peternak di Desa Aek Goti	Kabupaten Labuhan Batu Selatan		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan
		3. Mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan petani karet di Huta Godang, karena saat ini harga karet sangat murah	Kabupaten Labuhan Batu Selatan		Dinas Perkebunan
		a) Peningkatan kualitas drainase	Dusun Kampung	APBN/APBD Provsu	Distarukim

		b) Pembangunan MCK	Lima Puluh Desa Tanjung Pasir kec. Kualuh Selatan kab. Labuhan Batu	(BKP)	
		Pembangunan sarana air minum	Desa Silumajang kec. Na IX-X kab. Labura	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan Drainase	Dusun I, Dusun II, dan Dusun VII Desa Padang Maninjau Kec. Aek Kuo kab. Labura	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan sarana air minum	Desa Bandar Durian kec. Aek Natas, Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Penyediaan Air Minum	Dusun Pardomuan Nauli kec. Kualuh selatan kba. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan sarana air minum	Dusun Beringin Jaya kec. Aek kou kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan sarana air minum	Dusun karya Maju kec. Torgamba kab. Labuhanbatu Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan sarana air minum	Desa Suhud kec. Silangkitang kab. Labuhanbatu Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan sarana air minum	Desa Aek Goti kab. Labusel	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		Peningkatan drainase menuju Sungai Sentang	Desa Parlabian Kab. Labuhanbatu	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan drainase Desa Teluk Sentosa yang berbatasan dengan Sungai Barumun	Desa Selat Belting kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan drainase jalan provinsi mulai km. 6 s/d km. 9	Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan drainase di daerah Kampung Jawa Tengan	Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan sumur bor	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan Badan jalan H. T. Milwan/Makam Desa Telaga Suka di Dusun V Kec. Panai Tengah sepanjang 1.500 meter dan lebar 3 meter.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Peningkatan Badan Jalan Kampung Selamat Desa Telaga Suka di Dusun VI Kec. Panai Tengah sepanjang 1.300 meter dan lebar 3 meter.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Peningkatan Badan Jalan Jembatan di Jalan Panglima Timur Desa Telaga Suka di Dusun I Kec. Panai Tengah sepanjang 80 meter dan lebar 4 meter.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Peningkatan badan jalan Panglima Timur Desa Telaga Suka di Dusun IV dan V Kec. Panai Tengah sepanjang 400 meter dan lebar 3 meter.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembuatan Jembatan Penghubung Jalan Kampung Selamat Desa Telaga Suka di Dusun VI Kec. Panai Tengah sepanjang 12 meter dan lebar 3 meter.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		Pengaspalan Jalan Sungai Rakyat menuju Sungai Berombang sepanjang 24 km yang sangat dibutuhkan masyarakat.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan Jalan Sungai Cina Kec. Panai Tengah sepanjang 6 km	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan Jalan Sungai Merdeka di Dusun I menuju Dusun III Kec. Panai Tengah sepanjang 1 km yang sudah hancur agar segera diselesaikan	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jalan sirtu/beton sepanjang 3.000 meter di Desa Selat Beting Kec. Panai Tengah.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan Titi Beton 4 meter x 30 meter sebagai penghubung antar desa di Desa Selat Beting.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan Badan Jalan Suka Jadi Lingkungan VIII Kelurahan Sungai Berombang Kec. Panai Hilir.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan Jalan Pendidikan (SMP Negeri & SMK Negeri ke Jalan Provinsi) di Dusun III menuju Dusun VI sepanjang 1 km dan lebar 4 meter di Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jembatan beton di Jalan Besar Dusun IV sepanjang 17 meter, lebar 4 meter dan tinggi 1 meter di Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jembatan beton di Dusun IV Gg. Panen sepanjang 12 meter, lebar 5 meter dan tinggi 1 meter di Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan Jalan di Dusun VII Sei Tawar sepanjang 5 km dan lebar 4 meter di Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		membangun jembatan sepanjang 100 meter yang	Kabupaten Labuhan	APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

		menghubungkan dua desa yaitu Desa Kampung Padang dan Desa Tanjung Harapan yang dipisah oleh sungai Bilah	Batu	Kab.Kota	
		peninggian badan jalan di Daerah Desa Kampung Padang	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Kabupaten Labuhanbatu.	Bina Marga
		peninggian jalan di Kabupaten Labuhan Batu seiring dengan pembangunan Drainasenya.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Kabupaten Labuhanbatu.	Bina Marga
		pembangunan jalan ke Desa desa dapat dipercepat karena masih ada desa yang belum mempunyai akses jalan.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan jalan dusun tanjung sari menuju Jl. Siluman B dengan Volume 3,5m X 15000 m	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Kabupaten Labuhanbatu.	Bina Marga
		pembangunan jalan sigambal sampai janji sepanjang 3 km	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pemprovsu membangun Jalan Lingkar (Ring Road) untuk menghindari kemacetan di Kota Aek Kanopan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU	Bina Marga
		pembangunan jalan dari simpang Tanjung pasir menuju kampung Lima Puluh sepanjang 16 Km.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengalihan status jalan dari gunting saga ke tanjung leidong dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pemeliharaan dan perbaikan jalan Kualuh Hilir dan Kualuh Hulu	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan jalan beton sepanjang 500 meter di Dusun I Desa Lobuhuala	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan jembatan di Dusun II Desa Lobuhuala sebagai urat nadi transportasi produksi.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		pengerasan jalan sepanjang 1.000 meter mohon bantuan dari APBD Provinsi	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan jalan sepanjang 2 Km yang berlokasi di Dusun Montong Desa Silumajang Kecamatan Na XIX.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan jalan sepanjang 1 Km yang berlokasi di Dusun II Desa Silumajang sampai Desa Simonis.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan jalan beton sepanjang 750 meter di Dusun 6 Desa Padang Maninjau Kec. Aek Kuo	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan parit beton sepanjang 3 Km, dengan lokasi di Dusun I, Dusun II, Dusun VI dan VII Desa Padang Maninjau Kec. Aek Kuo	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan berbatas dengan desa sidodadi sampai ke desa karang rejo	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan dan pengaspalan jalan di Kabupaten Labuhan Batu Utara	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan dan perbaikan jalan lintas mulai dari desa ujung padang sampai desa Bandar durian	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan sepanjang 15 km dari desa hapoltahon sampai ke desa pamingke pos.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan jalan serta pengaspalan jalan dari desa Bandar durian sampai ke desa pangkalan dusun III hapoltahon nauli.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jembatan aek mongom	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		membangun jalan yang sudah sangat rusak di Kuala Beringin	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan jalan dari Desa Beringin Jaya menuju	Kabupaten Labuhan	APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

		dusun Beringin Makmur sepanjang + 6 Km	Batu Selatan	Kab.Kota	
		pembangunan jalan dari simpang tiga menuju TPU sepanjang + 1 Km yang merupakan jalan lintas anak sekolah.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan tanggul di daerah Tanjung pasir sungai kualuh dimana beberapa titik rawan jebol.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
		Perbaikan tanggul kiri Sungai Kualuh Desa Sialang Taji Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sepanjang 15 m	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
		Pembangunan irigasi di Dusun I Desa Gunung Lonceng	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
		Pembuatan tanggul sungai aek natas yang telah rusak di desa adian torop sepanjang 300 m	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
		Pembangunan bronjong sungai padang matinggi	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
		Pembuatan Beronjong Pantai Jalan Panglima Timur Desa Telaga Suka di Dusun I Kec. Panai Tengah sepanjang 80 meter dan lembar 4 meter	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
		Pembuatan Bronjong di sungai agar jalan disekitar sungai tidak tergerus oleh air aliran sungai di Desa Tebing Lingga Raya	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
	Daerah Pemilihan VII (Kab. Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan)	Bantuan sosial untuk rumah ibadah	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
		Penyediaan kartu Indonesia Sehat, kartu indonesi pintar dan kartu keluarga sejahtera	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial

	Bantuan Rumah Ibadah di desa Somonggal Parmonangan dan desa Aek Badak	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
	Bantuan Sosial untuk rumah ibadah ke kec. Tanotombangan angkola	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
	pemberantasan narkoba yang masih duduk di bangku sekolah	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
	Bantuan Hibah aset tanah milik pemprov untuk bantuan pembangunan lapangan terbang	Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
	Memperhatikan Pemberantasan Narkoba	Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
	Renovasi mesjid taqwa di kelurahan tamiang	Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
	Masyarakat di kecamatan Saipar Dolok Hole meminta untuk dapat segera dibangunnya Gedung Sekolah SMK Negeri	Tapanuli Selatan	APBN	Dinas Pendidikan
	Pembangunan gedung dan fasilitas laboratorium pada SMU Negeri 1 yang berada di Kelurahan Aek Pinang Kec. Batang toru, dan SMK Negeri 2 pertambangan yang berada di kelurahan Aek Pining di Kec Batangtoru	Tapanuli Selatan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Penyediaan alat berat bagi SMK N. 2 Pertambangan yang berada di kel. Aek pinang	Tapanuli Selatan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Penyediaan bantuan dana pada murid-murid berprestasi dan ekonomi lemah serta putus sekolah mulai tingkat SD, SLTP, SMA sederajat serta Universitas di kec. Batangtoru	Tapanuli Selatan	APBN	Dinas Pendidikan
	Penyediaan tenaga guru sesuai dengan bidang pendidikan	Tapanuli Selatan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil	Tapanuli Selatan	APBD Prov	Dinas Pendidikan

	Bantuan peningkatan kualitas pendidikan	Tapanuli Selatan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Meminta pemberian gaji kepada tenaga pengajar madrasah yang masih honor, dan bantuan buku-buku agama.	Tapanuli Selatan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Pengangkatan guru Honores menjadi PNS	Mandailing Natal	APBD Pemkab	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Gedung SMP di Simpang Durian	Mandailing Natal	APBN	Dinas Pendidikan
	Masih banyak guru pegawai honorer dan membutuhkan penambahan 3 unit ruang kelas baru di kec. dolok	Padang Lawas Utara	APBD Pemkab	Dinas Pendidikan
	MTs kecamatan Dolok sangat minim PNS hanya 2 guru PNS dari 18 orang guru	Padang Lawas Utara	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	pembangunan gedung SMP dan SMA Negeri	Padang Lawas Utara	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Guru Honor yang sudah lulus K2 belum ada kejelasan pengangkatan sebagai PNS	Padang Lawas	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Bangunan Sekolah membutuhkan penambahan 3 ruang kelas di desa hutaraja kec. Sosa	Padang Lawas	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Masih kurangnya tenaga guru PNS	Padang Lawas	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Masdrasah stanawiyah Darul Ilmu membutuhkan bantuan pembangunan gedung sekolah dan fasilitas sekolah seperti perpustakaan dan laboratorium	Padang Lawas	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Sumatera Utara di desa Simirik yang terdapat asset pemerintah sebesar 7 hektar	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Kartu Indonesia Sehat	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan

	Penyediaan kartu Indonesia Sehat kec. Tatonombangan Angkola	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Penambahan peralatan medis yang mendukung kegiatan palang Merah Indonesia Kab. Tapsel	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
				Dinas Kesehatan
	Pembangunan rumah sakit umum p. sidempuan di ds pijor koling	Padang Sidempuan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
				Dinas Kesehatan
	Pembangunan Rumah Sakit Umum di Madina	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Pemerintah mengharapkan Pemberian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Sosialisasi BPJS di kec. Desa Gunung Berani kec. Panyabungan	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Pembangunan puskesmas pembantu di desa huta Nauli	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Percepatan program BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Pembangunan ruang Rawat Inap dan ICU di RSUD Panyabungan	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Meminta bantuan alat City Scan dan obat-obatan	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Meminta bantuan dokter Radiologi, spesialis patologi dan anatomi yang blm ada di rumah sakit panyabungan	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Meminta Dokter spesialis otak, spesialis kandungan dan bedah yang belum ada di rumah sakit permata madina	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
				Dinas Kesehatan
	Masih minimnya tenaga medis	Padang Lawas Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan

		Pembangunan gedung puskesmas beserta peralatan yang lengkap	Padang Lawas Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
		Para Kepala Desa memohon kenaikan honor kepdes, honor yang diterima Rp. 1.000.000	Padang Lawas	APBD Kab. Kota	BPMD
		Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta agar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan lebih serius dalam hal penerimaan CPNS dengan sistem UBK (Ujian Berbasis Komputer) agar dapat berjalan dengan baik.	Tapanuli Selatan	APBD Prov	BKD
		Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan agar lelang jabatan di pemerintahan ditiadakan agar lebih mengutamakan putra daerah.	Tapanuli Selatan	APBD Prov	BKD
		Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta agar Pemerintah Kota Padang Sidempuan lebih serius dalam hal penerimaan CPNS dengan sistem UBK (Ujian Berbasis Komputer) agar dapat berjalan dengan baik.	Padang Sidempuan	APBD Prov	BKD
		Pemerintah Kota Padangsidempuan menyampaikan agar lelang jabatan di pemerintahan ditiadakan agar lebih mengutamakan putra daerah.	Padang Sidempuan	APBD Prov	BKD
		Masyarakat Kec. Sihitang meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaiki jalan dari jembatan Tugu Siborang sampai dengan perbatasan Desa Palopat Maria karena jalan tersebut sudah banyak yang rusak diakibatkan tidak adanya Anggaran Kota Padang	Kota Padang Sidempuan	APBD Prov	PEMUM

		Sidempuan.			
		Masyarakat meminta agar Pemkab Padang Lawas Utara dan Pemprov dapat memediasi masyarakat transmigran di Desa Batang Pane III dengan Pihak PT. Muslim terkait sengketa lahan seluas 6.000 hektar dengan segera Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemprov, memberikan data-data terkait tapal batas antara lahan masyarakat dengan PT. Muslim dengan demikian diharapkan permasalahan dimaksud bisa menjadi jelas, siapa yang salah apakah masyarakat atau PT. Muslim.	Padang Lawas Utara	APBD Prov	PEMUM
		usulan anggaran untuk pengadaan alat musik / nasyid di kecamatan dolok (hal 30 point 3)	Padang Lawas Utara	APBD Prov	PEMUM
		Pembangunan sekolah dan asrama putri di kecamatan holongonan desa bergotong hal 31 point 5)	Padang Lawas Utara	APBD Prov	PEMUM
		usulan pemberian honor bagi guru-guru non formal dan guru pasantren (hal 35 point 2)	Padang Lawas Utara	APBD Prov	PEMUM
		Beberapa warga desa terpencil di Kecamatan Panyabungan Utara bercocok tanam ganja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Hal tersebut dapat merusak generasi bangsa, maka dari itu diharapkan pemerintah pusat beserta pemerintah daerah bersinergi memberantas tanaman ganja serta membina warga tersebut.	Mandailingnatal	APBD Prov	Kesbangpol
		Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan upaya pemberantasan narkoba di Kecamatan Lingga Bayu. Hal ini berdasarkan tes urine yang telah dilakukan oleh Camat dengan pihak-pihak terkait terhadap siswa-siswa di beberapa sekolah	Mandailingnatal	APBD Prov	Kesbangpol

		yang ada di Kecamatan Lingga Bayu, tingkat siswa pengguna narkoba cukup tinggi dan memprihatinkan.			
		Kehadiran OTP Geotermal di wilayah Lembah Sorik Marapi telah menimbulkan perpecahan diantara warga ada yang pro dan ada yang kontra yang selama ini cukup harmonis dan kekeluargaan. Oleh karena itu, diminta kepada pemerintah untuk menangani konflik antar warga dimaksud serta diminta agar OTP Geotermal terlebih dahulu mensosialisasikan dampak positif dan negatif atas keberadaannya di wilayah ini kepada masyarakat.	Mandailingnatal	APBD Prov	Kesbangpol
		Meminta kepada pemerintah untuk membasmi kejahatan Narkoba dan Maksiat di Desa Naga Saribu.	Padang Lawas Utara	APBD Prov	Kesbangpol
		Rehabilitasi mesjid Al-Muttaqin di Desa Padang Matinggi dan mesjid di Mompang Jae, Kec. Penyabungan Utara	Mandailingnatal	APBD Prov	BINSOS
		Meminta agar Pemerintah Provisi Sumatera Utara memberikan bantuan untuk merenovasi Masjid Taqwa, yang berada di Kelurahan Tamiang yang apabila terjadi hujan atap Masjid sering bocor, dan memperluas bangunan Masjid supaya bisa menampung jamaah yang sedang beribadah.	Mandailingnatal	APBD Prov	BINSOS
		Meminta kepada pemerintah untuk di bangun Mesjid di Kec. Padang Bolak Julu, karna mayoritas masyarakat di Desa tersebut agama Islam	Padang Lawas Utara	APBD Prov	BINSOS

		Masyarakat meminta kepada Pemerintah agar membantu pemasaran produk-produk salak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kec. Angkola Barat, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tokoh masyarakat meminta agar jalan usaha tani menuju kelahan pertanian sepanjang ± KM untuk diperbaiki karena selama ini masyarakat yang membawa hasil pertanian mereka sangat sulit dilalui	Kec. Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat mengharapkan bantuan untuk penyediaan alat bantu Traktor tangan (jetor) agar lebih memudahkan para petani untuk bercocok tanam padi	Kec. Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
				ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	
		Pemberian bantuan bibit, traktor dan penyediaan pupuk pada pertanian di Kec. Batang Toru	Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Diadakannya penyuluhan pertanian bagi kelompok tani dan masyarakat di Kec. Batang Toru	Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pembentukan dan bantuan modal koperasi usaha masyarakat di Kec. Batang Toru	Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Pemberian bantuan bibit, traktor dan penyediaan pupuk pada pertanian untuk kelompok tani dan masyarakat desa Aek Badak dan desa Somanggal Parmonangan	Kec. Sayur Matinggi, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Diadakannya penyuluhan pertanian di Desa Aek Badak dan Desa Somanggal Parmonangan	Kec. Sayur Matinggi, Kab. Tapanuli	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian

			Selatan		
		Pembuatan pasar tradisional diperbatasan Desa Somanggal Parmonangan dengan Desa Aek Badak	Kec. Sayur Matinggi, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pembentukan dan bantuan modal koperasi usaha masyarakat Desa Somanggal Parmonangan dan Desa Aek Badak	Kec. Sayur Matinggi, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Pemberian bantuan bibit, traktor dan penyediaan pupuk pada pertanian untuk kelompok tani dan masyarakat seluruh desa Kec. Tanotombangan Angkola	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Diadakannya penyuluhan pertanian untuk kelompok tani dan masyarakat seluruh desa	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pembentukan dan bantuan modal koperasi usaha masyarakat se Kec. Tanotombangan Angkola	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Dijadikannya tempat budaya dan pariwisata atas penemuan batu berukiran kepala manusia yang berada di Desa Purbatua Kec. Tanotombangan Angkola	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pembangunan jalan pertanian panjang \pm 50 meter dan lebar \pm 1,5 meter	Kec. Angkola Julu, Kota Padangsidempuan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Penambahan volume pupuk subsidi	Kec. Angkola Julu, Kota Padangsidempuan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat mengharapkan adanya Pembangunan	Kec. Panyabungan,	ABPN/APBD	Dinas Perindustrian

		industri hilir dari hasil hutan dan perkebunan yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat	Kab. Mandailing Natal	Prov/APBD Kab.Kota	dan Perdagangan
		Mohon bantuan bibit kopi, ayam, ikan dan bebek kepada kelompok tani yang berada di Desa Gunung Barani	Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Perbaiki tambak-tambak ikan milik warga masyarakat di wilayah Kec. Panyabungan Utara	Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Bantuan bibit ternak bagi warga miskin Desa Sinondoan	Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Perbaiki tambak-tambak ikan milik warga masyarakat di wilayah Kec. Panyabungan Timur	Kec. Panyabungan Timur, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Mengusulkan agar pemerintah turun tangan menstabilkan harga komoditi karet yang saat ini harganya turun yang berpengaruh pada pendapatan masyarakat	Kec. Panyabungan Timur, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Mengusulkan agar pemerintah turun tangan menstabilkan harga komoditi karet yang saat ini harganya turun yang berpengaruh pada pendapatan masyarakat	Kec. Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Mengusulkan agar pemerintah turun tangan menstabilkan harga komoditi karet yang saat ini harganya turun yang berpengaruh pada pendapatan masyarakat	Kec. Lembah Sorik Marapi, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan

		Perbaiki tambak-tambak ikan milik warga masyarakat di wilayah Kec. Puncak Sori Marapi	Kec. Puncak Sorik Marapi, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Mohon untuk meningkatkan fasilitas pertanian dan perkebunan berupa bantuan pupuk bersubsidi, bibit tanaman, ternak dan perikanan di kel. Tamiang	Kec. Kota Nopan, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian
		Mohon bantuan modal usaha untuk budidaya ikan dan bantuan bibit kopi, bibit cabe dan ternak kepada kelompok tani yang ada di Desa Manambin	Kec. Kota Nopan, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Masih banyak hutan lindung yang belum bersertifikat, mohon keseriusan pemerintah untuk mengatasi masalah ini	Kec. Dolok, Kab. Padang Lawas Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kehutanan
		Mohon untuk membangun Koperasi di beberapa Desa di Kec. Padang Bolak supaya harga barang dari hasil pertanian masyarakat bisa stabil	Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Mohon untuk menyediakan lahan pertanian untuk kebun cabai	Kec. Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Mohon Untuk merenovasi Pasar Tradisional, supaya lebih teratur, rapi dan tidak mengundang kemacetan	Kel. Pasar Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Masyarakat mengharapkan agar bisa menggunakan tanah milik Dinas Kehutanan	Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kehutanan

		Pemprovsu yang terlantar, sudah disurati ke Pemkab namun belum ada jawaban			
		Renovasi pasar ujung batu sebagai Pusat Central Perekonomian	Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Harga getah sangat anjlok, padahal mayoritas penduduk adalah petani getah	Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Jalan Pertanian Desa Siundul, Lokasi Kebun Hopong, Panjang 3 Km dan lebar 2 M	Usulan Tambahan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Jalan Pertanian Desa Aek Bargot, Lokasi Kebun Gariang Aek Bargot, Panjang 2 KM dan Lebar 2 M	Usulan Tambahan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pembangunan lanjutan jalan pertanian Aek Maga, Lokasi Kebun Sibodak Aek maga, Panjang 2 KM dan lebar 2 M	Usulan Tambahan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pengadaan Mesin rontok padi jumlah 2 unit	Usulan Tambahan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pengadaan alat bajak sawah jumlah 2 unit	Usulan Tambahan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM	Kel. Sitinjak kec. Angkola Barat kab. Tapanuli selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana dan prasarana air minum	Dusun Pagaran pandoan Desa Simangambat kec. Saipar Dolok Hole Tapanuli Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penyediaan Air Bersih	Kel. Aek Pinang Kec. Batang Toru Kab.	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

			Tapstel		
		Penyediaan mobil pemadam kebakaran	Kel. Aek Pinang Kec. Batang Toru Kab. Tapstel	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Aek Badak kec. Sayur matinggi Kab. Tapanuli Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Somanggal Parmonangan kec. Sayur matinggi kab. Tapanuli selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Kec. Tanotombangan kab. Tapanuli Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembuatan sumur bor air bersih	Desa Rimba Soping kec. Angkola Julu kota padang sidempuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembuatan sumur bor air bersih	Kel. Sitamiang Baru, kec. Padang sidempuan kota padang sidempuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembuatan sarana MCK	Kel. Panyabungan II kec. Panyabungan Kab. Madina	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Kel. Panyabungan II kec. Panyabungan Kab. Madina	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Program penyehatan permukiman kumuh	Kel. Panyabungan II	APBN/APBD Provsu	Dinas Penataan Ruang

			kec. Panyabungan Kab. Madina	(BKP)	dan Permukiman
		Pembangunan sarana dan prasarana air minum	Desa Tanjung Mompang kec. Panyabungan utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan MCK	Desa Manambin kec. Kotanopan kab. Madina	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase	Kel. Pasar Gunung Tua kec. Padang bolak kab. Paluta	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan MCK	Kec. Barumon kab. Padang Lawas	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kec. Panyabungan Utara dan kec. Lingga Bayu	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana dan prasarana air minum	Desa Hutasuhut Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana dan prasarana air minum	Desa Bulugading Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan jaringan air minum	Desa Aek Bayur Kec. Sidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan jalan usaha tani	Desa Simpang Banyak Julu Kec. Ulu Pungkut Kab.	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

			Mandailing Natal		
		Pembangunan sarana dan prasarana air minum	Kec. Panyabungan, Kec. Bukit Malintang, Kec. Naga Juang Kab. Mandailing Natal	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan MCK	Kec. Panyabungan Utara, Kec. Bukit Malintang, Kec. Naga Juang Kab. Mandailing Natal	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pengaspalan jalan dari perbatasan Kota Padang Sidempuan sampai di Kecamatan Angkola Barat.	Kecamatan Angkola Barat , Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan/pengaspalan Jalan Lintas Kecamatan Angkola Barat sampai dengan perbatasan Sibolga.	Kecamatan Angkola Barat , Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan/perbaikan jalan usaha tani menuju kelahan pertanian sepanjang ±2 KM.	Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembukaan jalan baru sepanjang ±3KM dari Desa Pangindran ke Desa Somba Debata Purba.	Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah	Kecamatan Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembuatan saluran air pada sisi kiri dan kanan jalan provinsi	Kecamatan Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

		Pengaspalan jalan di Desa Napa sepanjang 1,5 km dan Dusun Kampungbaru Desa Wek 4 sepanjang 600 meter di Kecamatan Batangtoru	Kecamatan Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pelebaran jalan penghubung antara Kelurahan Panabari Hutatonga Kecamatan Tanotombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan desa Somanggal Parmonangan dan desa Aek Badak Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pergantian jembatan gantung menjadi jembatan permanen yang menghubungkan Kelurahan Panabari Hutatonga Kecamatan Tanotombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan desa Somanggal Parmonangan dan desa Aek Badak Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jembatan penghubung antara desa Simaninggir Kecamatan Tanotombangan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan desa Muara Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal di sungai Batanggadis	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan serta saluran air pada sisi kiri dan kanan jalan Kecamatan Tanotombangan Kabupaten Tapanuli Selatan	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemeliharaan jalan Provinsi di kota Padang Sidempuan menuju kota Sibolga.	Kota Padang Sidempuan, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemeliharaan dan pelebaran jalan Provinsi di Kota Padang Sidempuan menuju Kabupaten Paluta.	Kota Padang Sidempuan, Kota	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

			Padang Sidempuan.		
		Pembangunan/perbaikan jembatan dari Tugu Siborang Desa Palopat Maria sampai dengan Tapsel.	Kota Padang Sidempuan, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan dari jembatan Tugu Siborang sampai dengan perbatasan Desa Palopat Maria.	Kecamatan Sihitang, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pelebaran jalan parsobolan atau simirik sampai simpang tiga Kantor Dinas Perhubungan.	Kecamatan Sihitang, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan/pengaspalan jalan mulai dari Bundaran Tugu Juang sampai keperbatasan Tapsel.	Kecamatan Padang Sidempuan, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan pertanian Panjang : ± 50 x 1,5 meter.	Kecamatan Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan kelurahan, Duma I – VI, Kel. Sitamiang Baru	Kec. Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan yang menghubungkan Kabupaten Madina dengan Kabupaten Palas ± 40 Km dari Madina ke perbatasan Kab. Palas	Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan Pantai Barat, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan-Madina-Provinsi Sumatera Barat.	Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

		Pembangunan Dermaga Pelabuhan Laut di Batahan Kecamatan Natal.	Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Bantuan hibah aset tanah milik Provinsi Sumatera Utara seluas ± 100 hektar yang terletak di Desa Malintang kepada Pemkab Madina. Hal ini dimaksudkan untuk pembangunan lapangan terbang di Kabupaten Madina	Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan/pembangunan jalan desa Simaninggir, sepanjang ± 1.8 Km.	Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan desa Simaninggir menuju Desa Lumban Dolok.	Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perluasan jembatan.	Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan Penghubung dari Kec. Panyabungan barat ke Kec. Hutabargot sepanjang 4 km.	Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan setapak di Jalan Pahlawan Kelurahan Panyabungan II.	Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan Panyabungan Timur ke Sibuhuan Kab. Padang Lawas, sepanjang 60 km.	Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan antar desa Mompang Jae dan sekitarnya.	Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

		Rehabilitasi total jembatan/rambin di Desa Mompang Jae.	Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jembatan/rambin di Desa Tor Banua Raja, aek Batang Gadis.	Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaiki dan pelebaran jalan pedesaan di wilayah Kecamatan Panyabungan Timur.	Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaiki jalan dan jembatan pedesaan di Desa Simpang Koje dan Desa Pangkalan	Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaiki jalan dan jembatan yang menghubungkan Desa Huta Baru – Rato Naginjang sepanjang 2,5 km.	Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan Hotmix sepanjang 700 m ke arah kantor Kecamatan Lembah Sorik Marapi.	Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemeliharaan jalan provinsi Gunung Tua-Sibuhuan, Gunung Tua-Langga Payung dan Gunung Tua-Padang Sidempuan.	Kabupaten Padang Lawas Utara.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan aspal hotmix. dari Pasar Sipiongot menuju Desa Siburbur.	Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

		Pembangunan jalan-jalan yang rusak di Desa Batang Pane III, Kecamatan Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara.	Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan Provinsi antara perbatasan Paluta Dengan Palas.	Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan Provinsi maupun Kabupaten yang rusak dan berlubang termasuk di kota Gunung Tua.	Kel. Pasar Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemb. Parit di sekitar Jl.Merdeka di link.III pasar Gunung Tua	Kel. Pasar Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemeliharaan jalan provinsi Sibuhuan-Gunung Tua dan Sibuhuan-Sosopan khususnya pada lokasi ruas jalan yang rusak berat.	Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Membuat program kegiatan pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Kabupaten Palas dengan Kabupaten Madina,	Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan / renovasi jalan menjadi aspal hotmix sepanjang ± 400 meter, dari dan menuju ke Desa Hurtaraja.	Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan 330 Desa di Kabupaten Palas.	Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan/Pembuatan Jembatan Sungai Sosa yang menghubungkan Kecamatan Batang Lubu Sutam ke Desa Hutaraja Lama	Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

		Pemb./perb. jalan menuju Kecamatan Batang Lubu Sutam, dari Kecamatan Sosa ke Kecamatan Batang Lubu Sutam.	Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan provinsi yang berada di Kabupaten Padang Lawas terutama di daerah Aek Nabara Barumon.	Kecamatan Sibuhuan Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembukaan akses jalan apung sampai ke madina sekitar 60 Km serta jalan yang berada di Kabupaten Padang Lawas agar ditingkatkan menjadi jalan Provinsi atau jalan Nasional.	Kecamatan Sibuhuan Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan Provinsi dari Gunung Tua sampai ke Padang Lawas .	Kecamatan Sibuhuan Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan dari Aek Godang sampai Sosopan.	Kecamatan Sibuhuan Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangun jalan tembus dari Sibuhuan Ibu Kota Padang Lawas menuju Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang terletak di Desa Hapung.	Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangun jalan lintas yang menghubungkan dari Kabupaten Padang Lawas ke Kabupaten Padang Lawas Utara serta ke Kabupaten Rokan Hulu (Sungai Kerang) Provinsi Riau.	Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

		Pembangunan dan perawatan Jalan dan Jembatan Provinsi Lintas Sosopan, KM 150 Aek Godang – Sibuhuan, Khususnya dari Aek Bargot – Siraisan	Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Jembatan gantung desa Siundol Jae, ukr. 85x1,5 m, penghubung ke desa terisolir (Aek Hayuara/Martona) dan perkebunan masyarakat	Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan pertanian Desa Siundol, kebun hopong, Ukr. 3 Km x 2m.	Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Pertanian Desa Aek Bargot, Kebun Gariang Aek Bargot, Uk. 2 Km x 2 m.	Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan lanjutan jalan pertanian Aek Maga, Kebun Sibodak Aek Maga, Uk 2 Km x 2m.	Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
	Dapil VIII (Kab. Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli)	Kelompok Usaha Wanita Sangat Membutuhkan Ketrampilan Untuk Mengolah Usaha Kecil Masyarakat	Kota Gunung Sitoli	APBD Prov	Pemberdayaan Perempuan, Anak, KB
		Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Immanuel Desa Hiliwarokha Kec. Bowolato Kab. Nias	Kabupaten Nias	APBD Prov	BINSOS
		Desa Sirete Kec. Gido Masyarakat Merasakan Kurangnya Kepedulian Pemerintah Khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Organisasi-Organisasi Keagamaan	Kabupaten Nias	APBD Prov	BINSOS
		Desa Hiligeho Sogawu Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan Minimnya Sarana Pemerintahan	Kabupaten Nias Selatan	APBD Prov	BKD

		Untuk Mendukung Penyelenggaraan Tugas-Tugas Administrasi Pemerintahan Karena Kurangnya Tenaga Kerja/Pns Yang Ditempatkan Di Daerah Ini			
		Masalah Pns Yang Saat Ini Masih Mengalami Kekurangan Dan Ada Beberapa Pns Cenderung Mengajukan Pindah Sementara Di Daerah Hibala Mengalami Kekurangan.	Kabupaten Nias Selatan	APBD prov	BKD
		Desa Dahana Kec. Bowolato Kab. Nias Pembangunan Balai Pertemuan Desa Dahana Kec. Bowolato	Kabupaten Nias	APBD prov	PEMUM
		Pembangunan Mck Bagi Masyarakat Di Dusun Desa Dahana Kec. Bowolato	Kabupaten Nias	APBD prov	PEMUM
		Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Sarana Perkantoran Di Lingkungan Kecamatan Hili Serangkai ; Kantor Danramil Dan Polsek Hiliserangkai	Kabupaten Nias	APBD prov	PEMUM
		Desa Sirete Kec. Gido Masyarakat Masih Mengeluhkan Penyaluran Kartu Bpjs Yang Sampai Saat Ini Belum Ada Realisasinya.	Kabupaten Nias	APBD prov	PEMUM
		Mohon Perhatian Pemerintah Dalam Hal Kesejahteraan Kepala Desa Yang Masih Dibawah Standart.	Kota Gunung Sitoli	APBD prov	PEMUM
		Perlu Adanya Sosialisasi Bagi Masyarakat Mengenai Masalah Bpjs. Banyak Masyarakat Masih Belum Paham	Kota Gunung Sitoli	APBD prov	PEMUM
		Masyarakat Mengeluhkan Masih Banyaknya Warga Yang Belum Terdata Untuk Mendapatkan Kartu Bpjs, Kartu Sehat, Kartu Pintar, Dan Kartu	Kabupaten Nias Barat	APBD prov	PEMUM

		Keluarga Sejahtera Sehingga Diminta Untuk Data Ulang, Khususnya Bagi Warga Miskin.			
		Masyarakat Memohon Pembangunan Kantor Camat Tanah Masa Lokasi Di Baluta Sebagai Ibukota Kecamatan	Kabupaten Nias Selatan	APBD prov	PEMUM
		Mohon bantuan modal usaha bersama kepada ibu-ibu rumah tangga seperti jahit menjahit, pembuatan keripik, agar dapat membantu perekonomian keluarga dan dapat membina usaha kecil menengah	Kec. Idanogawo, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Bantuan sosial budidaya ikan/perikanan darat, kelompok tani sihura desa dahana	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Kelompok tani/ternak fahurusa desa dahana, memohon bantuan ternak babi	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Kelompok tani/ternak buasi mawar desa hiliwarokha, mohon bantuan ternak kambing	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (plts) di desa- desa se-kecamatan hiliserangkai	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertambangan dan Energi
		Pengembangan intensifikasi tanaman cabe di desa-desa kecamatan hiliserangkai	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Bibit unggul terbaru untuk tanaman karet dan coklat sangat dibutuhkan masyarakat.	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Bantuan peralatan teknis pengolahan umkm masyarakat desa	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Rehabilitasi pasar tradisional botombawo desa dahadano botombawo kec. hiliserangkai	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Perlu dilakukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah dalam mendongkrak harga	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian

		penghasilan petani.			
		Pemerintah melalui dinas-dinas terkait diharapkan dapat memberikan bantuan modal usaha bagi pkk sekaligus memberikan pelatihan keterampilan berupa salon dan menjahit.	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Kelompok usaha wanita sangat membutuhkan keterampilan untuk mengolah usaha kecil masyarakat	Kota Gunung Sitoli	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Usul dari organisasi wanita di kecamatan alasa adalah sumber daya manusia sebagai salah satu kunci yang menjadi motor penggerak pembangunan untuk itu sangat diperlukan penambahan personil pendidik, paramedis dan penyuluh pertanian begitu pula pelatihan home industri rumah tangga.	Kec. Alasa, Kab. Nias Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Pengadaan alat produksi pakan ikan di balai benih ikan alasa	Kec. Alasa, Kab. Nias Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengadaan hand trakctor			Dinas Pertanian
		pengadaan bibit penangkal benih padi sering sekali terlambat , mengakibatkan kadaluarsanya benih.	Kec. Alasa, Kab. Nias Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pengadaan ternak bibit sapi/kerbau sangat dibutuhkan masyarakat, potensi pakan ternak sapi /kerbau sangat melimpah, memungkinkan ternak sapi.	Kec. Alasa, Kab. Nias Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Jaringan listrik dari hiligoduhoya – sifaoroasi – hilina'a, kec. lahewa kab. nias utara.	Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertambangan dan energi
		Jaringan listrik dari lauru fadoro – sifaoroasi,	Kec. Lahewa, Kab.	ABPN/APBD	Dinas Pertambangan

		lahewa, nias utara.	Nias Utara	Prov/APBD Kab.Kota	dan energi
		Jaringan listrik dari ibukota kec. lahewa timur – kec. alasa kab. nias utara.	Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertambangan dan energi
		Permasalahan jaringan listrik tak luput dari keluhan masyarakat, untuk itu melalui reses anggota dprd provinsi sumatera utara masyarakat menyampaikan bahwa di kecamatan mandrehe barat dari desa lasara bagawu menuju desa orahili badalu sampai saat ini belum tersentuh jaringan listrik. diharapkan agar kedepannya jaringan listrik di desa tersebut dapat segera teratasi	Kec. Lahomi, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertambangan dan energi
		Peserta reses meminta agar pemprov dapat memprogramkan bantuan-bantuan untuk nelayan berupa perahu dan alat-alat tangkap termasuk pembangunan tambahan perahu di daerah kecamatan sirombu.	Kec. Lahomi, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas kelautan dan Perikanan
		Masyarakat desa sisarahili i kec. mandrehe, kab. nias barat meminta bantuan bibit kelapa sawit untuk perkebunan masyarakat.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat desa sisarahili i kec. mandrehe, kab. nias barat meminta bantuan bibit karet okulasi untuk perkebunan masyarakat.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat desa sisarahili i kec. mandrehe, kab. nias barat meminta bantuan bibit babi.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Masyarakat desa sisarahili i kec. mandrehe, kab. nias barat meminta bantuan bibit ayam petelur.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Masyarakat desa sisarahili i kec. mandrehe, kab. nias barat meminta bantuan bibit ikan lele jumbo.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab.	Kec. Mandrehe, Kab	ABPN/APBD	Dinas Perkebunan

		nias barat, meminta bantuan perluasan lahan karet seluas 30 hakter dengan bibit okulasi	Nias Barat	Prov/APBD Kab.Kota	
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab. nias barat, meminta bantuan peremajaan lahan karet seluas 20 hakter dengan bibit okulasi	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab. nias barat, meminta bantuan pengadaan bibit unggul ternak babi dan fasilitas kandang.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab. nias barat, meminta bantuan pengadaan bibit ternak ayam dan fasilitas kandang	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab. nias barat, meminta bantuan pengadaan bibit ternak kambing	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab. nias barat, meminta bantuan memohon pengadaan bibit palawija.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab. nias barat, meminta bantuan pengadaan mesin penggiling karet.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Masyarakat desa lakhene mengharapkan bantuan bibit ikan lele.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pembangunan jaringan listrik yang sampai saat ini belum masuk ke desa-desa.	Kec. Pulau –pulau Batu, Kab. Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertambangan dan energi
		Masyarakat meminta bantuan bibit tanaman yang biasa ditanam di daerah ini contohnya bibit padi unggulan, getah dan kopra yang cocok untuk daerah tersebut.	Kec. Pulau –pulau Batu, Kab. Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Memohon kepada pemerintah agar penyaluran	Kec. Pulau –pulau	ABPN/APBD	Dinas Pertanian

		pupuk bersubsidi agar lebih terarah pembagiannya kepada semua penduduk yang tidak mampu sekaligus pengawasan terhadap pupuk yang dipalsukan dipasaran.	Batu, Kab. Nias Selatan	Prov/APBD Kab.Kota	
		Pengadaan pln yang sampai saat ini belum masuk listrik ke desa-desa terpencil.	Kec. Tanah Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Distamben
		Pembangunan tempat penangkapan ikan (tpi) belum ada sampai saat ini pengadaan motorisasi dan alat tangkap nelayan bagi masyarakat yang melaut di kecamatan tanah masa	Kec. Tanah Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perikanan
		Pengadaan alat-alat pertanian bagi masyarakat petani yang ada di kecamatan tanah masa, guna meningkatkan hasil bumi yang ada, adapun tanaman yang bisa dihasilkan yaitu : cengkeh, pinang, kelapa dan tanaman hortikultura lainnya.	Kec. Tanah Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat membutuhkan bantuan berupa bibit unggul padi, jagung, kopi dan coklat serta bibit karet karena harga getah karet saat ini menurun.	Kec. Tanah Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Para petani tetap mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi di setiap musim tanam dan walaupun ada saat ini dipasaran harganya sangatlah mahal untuk itu mohon bantuan pemerintah menyalurkan pupuk ke daerah ini lebih efektif.	Kec. Tanah Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Sampai saat ini di kecamatan hibala listrik belum masuk hanya meteran yang dipasang namun listrik belum ada masyarakat hanya menggunakan genset darurat.	Kec. Hibala Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Distamben
		Pencurian ikan dari daerah lain ke wilayah hibala	Kec. Hibala Masa,	ABPN/APBD	Dinas Perikanan

		sudah banyak contoh dari nelayan sibolga dan padang dengan menggunakan pukat cincin dan pukat harimau yang merusak ekosistem dan terumbu karang laut karena kurangnya pengawasan laut.	Kab Nias Selatan	Prov/APBD Kab.Kota	
		Pengawasan terumbu karang di kawasan laut hibala hampir punah/rusak karena tidak ada pengawasan laut yang seharusnya dibawah lanal hibala disinyalir ada pemboman ke dasar laut yang dilakukan para nelayan yang tidak bertanggung jawab akibat kurangnya pemahaman hukum laut dari pihak terkait yang kementerian kelautan dan perikanan serta lanal setempat, untuk masyarakat memohon dibangun pos lanal yang aktif.	Kec. Hibala Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perikanan
		Pembangunan penyediaan Sarana Air Bersih	Desa Loawo Hilimbaruzo kec. Idanogawo kab. Nias	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan penyediaan Sarana Air Bersih	Desa Dahana kec. Bawolato kab. Nias	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan MCK	Desa Dahana kec. Bawolato kab. Nias	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan Drainase	Desa Sirete dan Desa Umu kec. Gido kab. Nias	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana air bersih	Desa Lasara kec. Gunungsitoli kota Gunungsitoli	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penyediaan Air Sumur Bor, Air PDAM	Desa Hiligehe	APBN/APBD Provsu	Dinas Penataan Ruang

			Sogawu kec. Pulau-pulau kab. Nias Selatan	(BKP)	dan Permukiman
		Pembangunan MCK dan penyediaan air bersih	Desa Eho Kec. Hibala Kab. Nias Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Lolombali Kab. Nias Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan Penampungan Air	Desa Duria Kec. Lolofitu Moi Kab. Nias Barat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana air minum	Desa Sisobawino II , Desa Hilibadalu Kec. Lolofitu Moi Kab. Nias Barat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan rumah	Desa Wango Kec. Lolofitu Moi Kab. Nias Barat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kec. Idanogawo Kab. Nias	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan jaringan air minum dan pembangunan sumur bor	Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Lasara Tarakhaini Kec. Gunungsitoli Alo'oa, Desa Lasara Bahili Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

		Pemb. Jalan simpang Mezawa Kec. Idanogawo menuju desa Siofa Banua Kec. Bawolato melalui Desa Loawo Hilimbaruzo Sep. 5 Km,	Pemb. Jalan	APBD Kab. Kota / BKP.	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan desa Loawo Hilimbaruzo Kec. Idanogawo.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembukaan badan jalan Maduma Desa Dahana menuju Desa Balela, Tabaa, sep. 9 Km.	Kecamatan Bowolato, Kab. Nias	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembukaan badan jalan Maduma Desa Dahana menuju Desa Dahana.	Kecamatan Bowolato, Kab. Nias	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Badan jalan Amkhai Desa Dahana menuju desa Silimaewali.	Kecamatan Bowolato, Kab. Nias	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembuatan bronjong pengamanan jembatan sungai Suani Desa Dahana.	Kecamatan Bowolato, Kab. Nias	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Semenisasi dari desa Eho Baluta menuju Ibukota Kecamatan, dari desa Hale Baluta menuju Desa Bawo Orudua, dari desa Hiligehe Sogawumenuju desa Eho Baluta dan dari Hiliomasio menuju desa Saeru melayu, sep. 30 Km.	Kecamatan Pulau-pulau Batu , Kab. Nias Selatan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Pelabuhan dan jemb. Perahu/jetty desa Hale Baluta dan dan desa Eho Baluta (Baruyu) sebanyak 2 Pelabuhan.	Kecamatan Pulau-pulau Batu , Kab. Nias Selatan.	APBN	Dinas Perhubungan
		Pemb. Jalan, pengaspalan dan pembuatan parit menuju Kec. Hibala.	Kecamatan Hibala, Kab. Nias Selatan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jemb. Menuju Kec. Hibala.	Kecamatan Hibala, Kab. Nias Selatan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		Pemb./diperbesar Pelabuhan Sigolong-golong.	Kecamatan Hibala, Kab. Nias Selatan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Peningkatan ruas jalan dari Gunung Sitoli ke Alasa.	Kec.Alasa.Kabupaten Nias Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Peningkatan status jalan menjadi jalan Provinsi yaitu ruas jalan dari Anaoma Kec. Alasa menuju Kec. Amatan Afulu + 20 km.	Kec.Alasa.Kabupaten Nias Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan baru ke Botolala	Kec.Alasa.Kabupaten Nias Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jln yang menghubungkan Kec. Dengan kota Kab. Pengaspalan perbatasan Desa Dahana Alasa sampai perbatasan Laowowaga kec. Lahewa Timur sep. 2.300 m.	Kecamatan Lahewa, Kab. Nias Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan Provinsi ruas Miga – Lolowau – Teluk Dalam.	Kabupaten Nias Barat	APBD Provsu/BKP.	Dinas Bina Marga
		Jalan Povinsi ruas Lolowau – Sirombu	Kabupaten Nias Barat	APBD Provsu/BKP.	Dinas Bina Marga
		Jalan dan Jembatan Provinsi ruas Afulu Kab. Nias Utara – Sirombu, Kabupaten Nias Barat.	Kabupaten Nias Barat	APBD Provsu/BKP.	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan dari Kec. Mandrehe melalui desa Sisarahili desa Zuzundao dan desa Sitoluewali ke desa Hiliwaele menuju Kab. Nias Utara.	Kabupaten Nias Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan dari desa Sitoluewali Kec. Moro'o menuju desa Gunung Tua Kab. Nias Utara.	Kabupaten Nias Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan dari Kec. Mandrehe Barat melalui desa Hilisoromi – desa Onozalukhu – desa	Kabupaten Nias Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		Siduahili – desa Dangagari menuju sungai Oyo Kab. Nias Utara.			
		Pengerasan jalan dari desa Siso Baoho menuju dusun Hiliadulo desa Onolimbura Kec. Mandrehe Barat.	Kabupaten Nias Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan dari desa Lasara Bagawu menuju desa Orahili Badalu Kec. Mandrehe Barat.	Kabupaten Nias Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan, pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan antara dusun iii Tugala desa Hilibadalu menuju desa Hilisangawola Kec. Moro’o Kab. Nias Barat.	Kabupaten Nias Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan Hiligara menuju desa Hiligodu Ombelata Kec. Gunung Sitoli Selatan.	Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan dari Tetelesi Ombelata menuju desa Gada Gunung Sitoli Barat.	Kecamatan Gunung Barat, Kota Gunung Sitoli	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
			.		
		Peningkatan jalan dari desa Orahili Tanoseo Alooa menuju desa Sisobahili Tanoseo Kec. Hilidiho.	Kecamatan Hilidiho , Kota Gunung Sitoli	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Dapil IX (Kab. Toba Samosir, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga)	Masyarakat Kecamatan Siborong-borong yaitu di Desa Hutabulu Dalam upaya peningkatan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat miskin Pemerintah diharap dapat mensosialisasikan BPJS	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan

		Masyarakat juga menghimbau adanya perbaikan Puskesmas, dan penambahan peralatan Puskesmas, serta penambahan tenaga Medis.	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Dokter Umum dan Dokter Spesialis, karena di Daerah ini belum ada Dokter Umum	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan
		Para Medis agar dapat memantau obat-obat yang sudah kadaluarsa dan palsu jangan sampai beredar yang berakibat fatal bagi masyarakat	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Penduduk Dusun IV Pokki Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong Kab.Tapanuli Utara meminta kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi agar membangun 1 unit Polindes di Desa mereka	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan
		Penduduk Desa Lumbantongatonga mengharapkan kepada pemerintah Provinsi agar membangun 1 unit POSKESDES di Desa mereka dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan
		penduduk Lobusonak Desa Pohan Tonga dan penduduk Sianjur Desa Pohan Julu dalam rangka layanan kesehatan, meminta agar Pemerintah Membangun/Rehab Total Polindes masing-masing 1 unit	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan
		Masyarakat di Desa Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluhkan dan mengharapkan kepada Pemkab Tapteng agar segera memperhatikan rumah sakit tersebut	Kab. Tapanuli Tengah	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan

		karena Peralatan dan Perlengkapan di rumah sakit tersebut kurang memadai			
		Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Masyarakat sangat mengharapkan Pemerintah dapat membuka Sekolah baru untuk tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi karena pada umumnya warga Masyarakat masih banyak menyekolahkan anak-anak mereka ke luar daerah maupun ke luar Provinsi	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Permohonan penyediaan sarana dan Prasarana Sekolah yang masih kurang memadai dan belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti Laboratorium, Perpustakaan dan Komputer	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Di Desa ini memang sudah ada SMP 1 Atap namun Guru yang mengajar banyak yang masih tenaga honor, untuk itu masyarakat mengharapkan Guru yang profesional sesuai dengan bidang Study masing-masing dan setara kurikulum Nasional	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		para tenaga pengajar (Guru) masih sangat dibutuhkan, karena masih banyak Guru yang mengajar mata pelajaran yang bukan sesuai dengan jurusannya, dan masih banyak ditemui Guru Honor yang belum diangkat jadi PNS	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		penggunaan dana BOS juga menjadi perhatian Masyarakat dan diharapkan penggunaannya dapat tepat sasaran dan juga dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan

		Pengadaan PAUD di setiap Desa juga diharapkan mendapat perhatian yang serius	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Perbaikan dan Pengadaan Ruang Kelas Baru di setiap Sekolah SD, SMP, SMA dan sekolah lainnya berikut dengan pengadaan Laboratorium Bahasa Inggris	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> - Rehab Bangunan Sekolah SD NO. 173287 Hutabulu - Mobilair SD No. 173287 seperti Meja siswa 70 buah, kursi siswa 140 buah, Meja Guru 7 buah, Kursi Guru 7 buah, Lemari 6 buah, Rak Buku 3 buah, Lap Top 5 Unit, Komputer lengkap 5 Unit. - Gedung Laboratorium untuk SMP 1 Atap di Desa Hurabulu. - Gedung Perpustakaan untuk SMP 1 Atap di Desa Hutabulu. - Pemagaran Sekolah SD Hutabulu dan SD Huta Ginjang 	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		para orang tua masyarakat Dusun I, II, III, IV Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kab.Tapanuli Utara meminta kepada Pemerintah untuk membangun masing-masing 1 unit Gedung PAUD di desa mereka	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat di Dusun V / VI Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara, meminta kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi agar segera membangun Gedung Sekolah Dasar Negeri di desa mereka	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Untuk mendapatkan pendidikan usia dini para orang tua masyarakat Dusun I Lobu Siregar I	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan

		Kecamatan Siborongborong Kab.Tapanuli Utara meminta kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi agar membangun 1 unit Gedung PAUD			
		Warga jemaat Gereja HKBP Lobu Siregar II beserta masyarakat sekitar mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten maupun Instansi terkait Pemerintah Provinsi lewat reses Anggota Dewan ini agar membangun PAUD di Lapangan Gereja	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat Desa Sigumbang Kecamatan Siborongborong Kab.Tapanuli Utara lewat Reses Anggota Dewan ini meminta kepada Pemerintah Kabupaten ataupun Provinsi untuk segera membangun 1 unit Gedung Sekolah SMP Negeri di Desa mereka	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		masyarakat warga Nagasaribu Kec.Siborongborong Kab.Tapanuli Utara meminta kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi agar dapat merehab gedung SD 173289 Nagasaribu	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Sarana dan Prasarana Pendidikan di Pandan sangat kurang , sehingga masyarakat Pandan menyekolahkan anaknya keluar dan ini sangat membutuhkan biaya , diharapkan kepada Pemkab agar memperhatikan dan mengutamakan pembangunan sekolah di Pandan	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Anak-anak Masyarakat di Kecamatan Sigumpar banyak yang merantau dikarenakan menempuh jenjang sekolah yang lebih tinggi, hal ini	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan

		disebabkan jarak sekolah yang cukup jauh dari rumah mereka dan alasan lain karena mereka ingin mengecam pendidikan yang lebih baik.			
		Keadaan sekolah di Daerah ini masih banyak yang memprihatinkan, demikian juga para Guru masih sangat minim.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat sangat mengharapkan adanya perbaikan Sekolah dan penambahan Ruang Kelas Baru, penambahan fasilitas sekolah, mobilier sekolah.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Sangat dibutuhkan tenaga Guru yang Profesional agar dengan demikian masyarakat tidak perlu sekolah jauh-jauh ke Kota ataupun merantau. Di Desa ini masih banyak Guru yang honor.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Tenaga Guru Pendidikan dan pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) ORCHID memohon bantuan kepada perlengkapan pembelajaran PPAUD ORCHID, Perbaikan Alat Permainan sangat minim, untuk itu PPAUD ORCHID ini membutuhkan : - Perbaikan Alat Permainan. - Penambahan Perlengkapan Pembelajaran. - Penambahan Alat Permainan. - Alat Transportasi untuk mengantar dan menjemput anak murid yang sesuai. - Honor Guru PAUD untuk tiga (3) orang.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat di Huta Op. Raja Hutapea Desa Pardinggaran Kec. Lagu Boti Kabupaten Toba Samosir menyampaikan Kondisi Pendidikan di Kabupaten Toba Samosir bahwa pada saat ini Paket C sudah ditiadakan karena tidak ada lagi	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan

		dana dari Provinsi. Sebenarnya keinginan masyarakat Paket C tetap dilanjutkan karena selama ini pastinya terbantu kepada siswa yang mengikuti paket C. Untuk itu diharapkan ada kebijakan Pemerintah untuk melanjutkan Paket C dimaksud			
		Masyarakat Desa Pardinggaran meminta agar Paud dapat dibuka kembali oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat Desa Pardinggaran memohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menambah ruangan kelas tentunya diperlukan pembangunan bertingkat. Kebutuhan untuk bangunan bertingkat dananya sangat besar.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat Desa Natolu Tali secara khusus meminta agar jalan ke sekolah Dasar Batu Gaja di Desa Natolu Tali diperbaiki dan dilakukan pengerasan. Jalan tersebut selama ini sering digunakan oleh pelajar mencapai sekolahnya, namun jika terjadi hujan, jalan tersebut sering tergenang banjir sehingga menghambat siswa untuk belajar di sekolahnya	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat desa Hutnamora melalui Sekdes Hutnamora meminta agar semua jalan menuju SMA Hutnamora Kec. Silaen dan SD negeri yang saat ini sudah rusak perlu dilakukan perbaikan secepatnya, jalan tersebut sering banjir jika terjadi hujan sehingga menghambat kelancaran siswa ke sekolah, mereka berharap pemerintah secepatnya memperbaiki jalan tersebut.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan

		Masyarakat Desa di Kecamatan Kolang mengharapkan agar sarana dan prasarana olah raga yang selama ini seperti tidak pernah menjadi perhatian Pemerintah supaya kembali digalakkan. Hal ini selain untuk menyehatkan masyarakat, juga agar terjalin hubungan komunikasi yang baik antar sesama warga khususnya para pemuda. Begitu juga dengan adanya kegiatan olah raga maka diharapkan akan mengurangi tindak kejahatan yang selama ini sudah memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD Kabupaten	Dispora
		Permohonan Bantuan, Rehab/Pembangunan Gedung Sekolah Minggu Gereja HKBP Tambunan, Desa Lumban Pea Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten Toba Samosir	APBD Provinsi	Dinas Sosial
		Permohonan Bantuan Dana untuk pembangunan Gereja GKPI Resert khusus Tambuna. Karena keterbatasan dana dimohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar berkenan memberikan bantuan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).	Kabupaten Toba Samosir	APBD Provinsi	Dinas Sosial
		Mohon bantuan dana untuk pembangunan HKBP Dolok Nauli II di Dusun Parluasan desa Lumban Rau Utara Kec. Nassau Kabupaten Toba Samosir yang saat ini merencanakan renovasi Gereja dan Pembangunan satu unit Rumah dinas Pimpinan /Guru Jemaat HKBP Dolok Nauli II Resort JUDIKA dengan biaya sebesar Rp.344.500.000,-	Kabupaten Toba Samosir	APBD Provinsi	Dinas Sosial
		Permohonan bantuan, Pembangunan Gereja HKBP Estomihi Ressort Baruara, yang berada di	Kabupaten Toba Samosir	APBD Provinsi	Dinas Sosial

		Jln.Pagaraji, Desa Baruara Kec. Balige kabupaten Toba Samosir			
		Permohonan bantuan Pembangunan Gereja GKPI Sibuntuon Ressort Patane Desa Sibuntuon Kec. Uluan Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten Toba Samosir	APBD Provinsi	Dinas Sosial
		Permohonan bantuan untuk pembangunan Gereja HKBP Paronan nagodang resort lagu Boti Desa pardinggaran Kec. Laguboti kabupaten Toba Samosir	Kabupaten Toba Samosir	APBD Provinsi	Dinas Sosial
		Masyarakat dan Jemaat HKI Dolok Saribu Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara sangat mengharapkan adanya bantuan sosial pembangunan Gereja HKI Dolok Saribu. Menurut informasi dari Pengurus Gereja bahwa pada tahun 2014 sudah dibuat proposal untuk bantuan pembangunan Gereja tersebut, namun terkendala karena adanya Pemilu	Kab. Tapanuli Utara	APBD Provinsi	Dinas Sosial
		Keberadaan PT. TPL sudah cukup lama, namun keberadaannya belum mempunyai arti apa-apa bagi masyarakat di Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara. Hal tersebut disebabkan karena bantuan CSR dari PT. TPL belum pernah dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat sangat mengharapkan agar PT. TPL pada tahun 2015 CSRnya diberikan ke desa mereka	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Masyarakat di Desa Golat Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara mengeluhkan pembagian Balsem dan raskin tidak tepat sasaran	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Masyarakat di Desa Sampean Kecamatan	Kab. Humbang	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial

		Doloksanggul Kabupaten Humbahas berharap agar pembangunan rumah ibadah dapat diteruskan, agar masyarakat semakin semangat dan rajin untuk datang beribadah. Jika masyarakat semangat dan rajin beribadah maka akan menambah dan menguatkan iman kepercayaan masyarakat	Hasundutan		
		Masyarakat Kecamatan Parmaksian khususnya Desa Lumban Sitorus menyampaikan aspirasinya bahwa tanah mereka yaitu kawasan Jior Sisadasa dan Silosung yang terletak di Silosung Sosor Ladang Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian seluas 46 Ha telah dikuasaisecara sepihak oleh PT. TPL. Masyarakat meminta agar PT. TPL mengembalikan tanah ulayat tersebut dan turut memberikan surat-surat tuntutan dan dokumen tanah milik warga Lumban Sitorus kepada Sarma Hutajulu, S.H. untuk dapat diperjuangkan melalui Lembaga Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara.	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Biro Pemum
		Masyarakat meminta agar pemerintah membuat peta dan sertifikasi tanah untuk menghindari terjadinya konflik sesama masyarakat karena kaburnya tapal batas tanah sesama mereka.	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Biro Pemum
		Masyarakat Desa di Kecamatan Kolang mengharapkan agar sarana dan prasarana olah raga yang selama ini seperti tidak pernah menjadi perhatian Pemerintah supaya kembali digalakkan	Kab. Tapanuli Tengah	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dispora

		Permohonan Bantuan, Rehab/Pembangunan Gedung Sekolah Minggu Gereja HKBP Tambunan, Desa Lumban Pea Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir.	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
		Permohonan Bantuan Dana untuk pembangunan Gereja GKPI Resert khusus Tambunan. Kondisi Gedung Gereja GKPI Resert khusus tambunan tidak lagi memadai untuk menampung Anggota Jemaat untuk melaksanakan Ibadah karena kondisi bangunan yang sempit dan konstruksi bangunan yang sudah lapuk dan bocor sehingga warga Jemaat merasa tidak nyaman pada saat melaksanakan Ibadah / Kebaktian	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
		Mohon bantuan dana untuk pembangunan HKBP Dolok Nauli II di Dusun Parluasan desa Lumban Rau Utara Kec. Nassau Kabupaten Toba Samosir	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
		Permohonan bantuan, Pembangunan Gereja HKBP Estomihi Ressort Baruara, yang berada di Jln.Pagaraji, Desa Baruara Kec. Balige kabupaten Toba Samosir.	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
		Permohonan bantuan Pembangunan Gereja GKPI Sibuntuon Ressort Patane Desa Sibuntuon Kec. Uluan Kabupaten Toba Samosir.	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
		Permohonan bantuan untuk pembangunan Gereja HKBP Paronan nagodang resort lagu Boti Desa pardinggaran Kec. Laguboti kabupaten Toba Samosir	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
		Masyarakat dan Jemaat HKI Dolok Saribu Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara sangat mengharapkan adanya bantuan sosial pembangunan Gereja HKI Dolok Saribu.	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos

	Menyangkut Pembangunan rumah ibadah, masyarakat berharap agar pembangunan rumah ibadah ini dapat diteruskan,	Kab. Humbang Hasundutan	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
	Traktor besar 5 Unit agar masyarakat dapat membuka lahan perkebunan juga untuk Desa Sigumpar Julu, Huta Nagodang dan Sigumpar Tengah.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Hand Traktor 15 Unit untuk Desa Sigumpar Julu dan Sigumpar Tengah.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Zetor 3 Unit untuk 3 Kelompok Tani di Desa Sigumpar Julu.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Bantuan pupuk bersubsidi bagi para kelompok Tani.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Bantuan bibit Unggul yang sesuai untuk iklim dan tekstur tanah di Kecamatan Sigumpar	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Bibit Jeruk, Jagung, Melon, Semangka, kacang@an dll.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
	Para penyuluh pertanian juga sangat diharapkan para petani.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Pembukaan Jalan Usaha Tani.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Pembangunan Irigasi Baru dan Tali Air.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Pembuatan Check Dum dll	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Bantuan bibit Kerbau dan ternak	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan
	Pengadaan bibit ternak	Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan

		Perlu dilakukan Pembenahan saluran air sehingga pengaturan air yang mengalir ke persawahan menjadi merata dan maksimal serta mengharapkan bantuan untuk Pembangunan terhadap Irigasi yang kurang perawatannya dan masih terdapat irigasi yang belum permanen. Untuk itu perlu penanganan yang serius terhadap penangan Irigasi, sebab masih ada sawah yang belum mendapatkan air secara merata bahkan terdapat lahan produktif menjadi lahan tidur akibat saluran air tidak dibangun secara permanen. Ada 2 aliran sungai yang dapat dialirkan airnya tetapi itu adalah kewenangan Provinsi Sumatera Utara sehingga masyarakat berharap ada tindakan dari Pemerintah Provinsi.	Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Bantuan bibit ternak	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan
		Pengembangan pariwisata	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pariwisata
		Penyuluh perlu dilibatkan agar masyarakat memahami keberuntungan dan kerugian akibat dampak dari pola tanam yang tidak teratur.	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Bakorlu
		Masyarakat melalui Kepala Desa Lumban Binanga berharap agar Pemerintah Provinsi melakukan pengadaan bibit padi, mesin handtractor	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat melalui Kepala Desa Sintong Marnipi berharap agar dilakukan pengadaan bibit padi dan handtractor. Lebih spesifik, masyarakat meminta dibuat irigasi di 5 desa sekitar Sintong Marnipi. Masyarakat mengaku bahwa sumber air semakin berkurang karena pohon-pohon sebagai	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian

		penyimpan air ditebangi oleh Perusahaan PT. TPL (Toba Pulp Lestari) yang dulu bernama PT, Inti Indorayon Utama.			
		Dari desa Pardinggaran, masyarakat meminta agar dilakukan pembukaan jalan ke Desa Sitoluama sebagai jalan ring road Danau Toba. Masyarakat juga meminta agar Dinas Perikanan Provinsi melakukan pembinaan kelompok perikanan untuk mengganti konsep keramba apung yang cenderung mencemari air Danau Toba.	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perikanan
		Dari UPT Dinas Pertanian Tobasa meminta agar pemerintah melakukan pengendalian hama tanaman, karena saat ini penyakit tanaman jenis blas meningkat. Lebih spesifik masyarakat meminta agar pemerintah Provinsi mengkaji perlunya dibangun suatu laboratorium pertanian di Kec. Laguboti agar menghasilkan suatu produk untuk membasmi hama tanaman. Masyarakat juga meminta agar dilakukan pendampingan kelompok tani atau asosiasi kelompok tani untuk meningkatkan hasil pertanian,	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Masyarakat sangat mengharapkan agar Pemerintah memberikan Pengadaan bibit-bibit tanaman yang unggul , bagus dan berkuwalitas seperti bibit Jagung, Padi, bawang dan lain-lain karena bibit ini sangat sulit untuk didapat.	Kec. Simanindo, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan
		Masalah penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Simanindo tidak lancar dan sangat sulit didapat.	Kec. Simanindo, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan / Pertanian

		Masyarakat Simanindo sangat mengharapkan bantuan traktor dari Pemerintah untuk Pengadaan alat-alat pertanian karena sangat mendukung bagi masyarakat, karena di Kecamatan simanindo ini terdiri dari dataran rendah dan tinggi. Maka dengan pengadaan Hand Traktor masyarakat dapat mengelola sawah untuk meningkatkan produktifitas	Kec. Simanindo, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Untuk itu masyarakat sangat mengharapkan perhatian dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pengadaan traktor dan pengadaaan irigasi di daerah mereka agar dapat mengairi lahan persawahan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat desa Pansurbatu dapat lebih meningkat dan kehidupannyapun agar dapat semakin sejahtera.	Kec. Pagaran, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pada umumnya mata pencaharian masyarakat adalah petani, sehingga sangat menyulitkan bagi petani tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari belum lagi untuk keperluan sekolah anak-anaknya. Untuk itu masyarakat sangat mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan bantuan ternak kepada masyarakat agar masyarakat dapat meningkatkan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.	Kec. Pagaran, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pengadaan delapan (8) CHECK DUM di semua Dusun Desa Hutabulu dan Desaq Pohan Jae.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian

		Traktor besar 5 unit untuk Desa Hutabulu dan Desa Pohan Jae.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Hand Traktor 5 unit untuk Desa Hutabulu dan Desa Pohan Jae.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pengadaan Bibit Unggul yang sesuai dengan daerah dan iklim di Desa Hutabulu dan Desa Pohan Jae.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Bantuan Pupuk.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan / Pertanian
		Masyarakat juga menyampaikan masalah perikanan dan peternakan, untuk itu Pemerintah diharap dapat membantu Masyarakat berupa Bibit Ikan Nila bagi Kelompok Tani di dua Desa ini, bantuan bibit Kerbau, Bantuan bibit Babi, Bantuan bibit Itik dan Penyuluh Peternakan agar dapat sejalan dengan pembinaan para Peternak.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perikanan
		Petani Dusun I s.d IV Desa Pohan Julu Kec.Siborongborong Kab.Taput dalam rangka meningkatkan produksi tani dan perekonomian petani mohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan Pengadaan Bibit ternak Kerbau sebanyak 100 ekor.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Dalam rangka meningkatkan produksi tani dan meningkatkan perekonomian petani yang ada di Desa Paniaran Kec.Siborongborong Kab.Taput melalui Reses Anggota DPRD-SU ini meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian

		untuk dapat memberikan bantuan Bibit Cabe 5.000 batang, Bibit Wortel Unggul 5.000 batang.			
		Petani Desa Silaitlait Kec.Siborongborong Kab.Taput mohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan bibit kopi sebanyak 15.000 batang.	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Petani Dusun I s.d III Desa Silaitlait dalam rangka meningkatkan produksi tani dan perekonomian petani mohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan Pengadaan Bibit Ikan Mas sebanyak 8.000 ekor.	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Petani Dusun II Pohan Julu Kec.Siborongborong Kab.Taput dalam rangka meningkatkan produksi tani dan perekonomian petani mohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan Pengadaan Hand Tractor sebanyak 1 unit.	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Petani Desa Sigumbang Kec.Siborongborong Kab.Taput dalam rangka meningkatkan produksi tani dan perekonomian petani mohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung 3 unit, dan Bibit Ternak Ikan Mas sebanyak 20.000 ekor.	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Penduduk Dusun I s.d V Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbahas memohon melalui reses ini agar pemerintah membantu menyediakan rumah kompos dan pemerintah dapat mengendalikan harga hasil produk pertanian seperti cabe dan lain-lain.	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Penduduk Siborongborong I dan Pohan Jae, dalam	Kec. Siborong-	ABPN/APBD	Dinas Perkebunan

		rangka pengendalian lahan kosong memohon kepada Pemerintah Provinsi melalui Kegiatan Reses Anggota DPRD-SU ini Bibit Pohon Suren/Mahoni sebanyak 50.000 batang.	borong, Kab. Tapanuli Utara	Prov/APBD Kab.Kota	
		Demikian juga Desa Sigumbang, Pohan Tonga, Lobu Siregar memohon kepada Pemerintah Provinsi melalui Kegiatan Reses Anggot DPRD-SU ini Bibit Pohon Pinus/Mahoni masing-masing 15.000 batang.	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Dalam rangka menghutankan kembali dan pengendalian lahan yang kosong di Kecamatan Siborongborong Penduduk Dusun II, III dan IV Desa Silaitlait memohon kepada Pemerintah Provinsi melalui Kegiatan Reses Anggot DPRD-SU ini Bibit Pohon Pinus sebanyak 45.000 batang, Pohon Mahoni 10.000 batang, Pohon Suren 10.000 batang	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Penduduk Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kab.Tapanuli Utara sudah lama mendambakan penerangan listrik seperti desa lainnya yang sudah menikmati penerangan listrik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Oleh karenanya melalui Kegiatan Reses Anggota DPRD-SU ini meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat memberikan bantuan Pemasangan Jaringan Listrik sebanyak 36 tiang.	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Distamben
		Penduduk Desa Silaitlait Kec.Siborongborondg melalui Reses Anggota DPRD-SU ini meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat memberikan bantuan Pemasagan Jaringan Listrik	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Distamben

		di Dusun V dan VI Silaitlait sebanyak 12 tiang. Pengadaan Lampu Jalan di Dusun I s/d IV sebanyak 29 titik.			
		Melalui Reses Anggota DPRD-SU ini penduduk meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat memberikan bantuan Pemasagan lampu Jalan di Siampapaga Sitampurung 5 titik, Hutagurgur Sitampurung 3 titik, Sitampurung Toruan 6 titik, Silaban Dolok Sitampurung 2 titik, Sitonggitonggi Sitampurung 2 titik	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Distamben
		Masalah penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di kecamatan Siatas Barita tidak lancar dan sangat sulit di dapat.	Kec. Siatas Barita, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian/Perkebunan
		Masyarakat mengharapkan agar Pemkab memperhatikan dan mengembangkan Usaha bertenen , para penenun sekarang ini kewalahan dalam pemasaran karena hasilnya tidak sesuai dengan pekerjaannya dan dirasakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari padahal ini merupakan mata pencaharian sehari-hari. Dimohon untuk diperhatikan.	Kec. Siatas Barita, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi / Disperindag
		Masyarakat mengeluhkan Sangat sulit dalam memperoleh pengurusan izin dalam membuka usaha di Kabupaten Tapanuli Utara.	Kec. Siatas Barita, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	BPPT
		Masyarakat Desa Hutajulu Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dahulu mempunyai kolam ikan Mas dan ikan Nila seluas 2 Ha. Mengingat tidak adanya perhatian atau	Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perikanan

		bantuan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga kondisi kolam tersebut saat ini sudah tidak terpelihara lagi dan ikan yang dipeliharapun sudah tidak ada lagi. Untuk itu masyarakat melalui Kelompok Reses sangat mengharapkan adanya bantuan pengadaan Benih Ikan Mas dan Ikan Nila serta bantuan untuk pengorekan kolam agar masyarakat dapat kembali memlihara ikan untuk penambahan penghasilannya			
		Masyarakat mengharap bantuan bibit tanaman keras dan Holtikultura termasuk kopi, jeruk manis, di Desa ini sangat bagus tanaman jeruk manis. Kemudian pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Sampean	Kec. Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Masyarakat Desa Sampean mengharapkan ada bantuan Pemerintah untuk memberikan ternak kepada masyarakat, karena dari kotoran ternak sangat banyak membantu masyarakat untuk membuat pupuk kompos untuk dibuat ke tanaman.	Kec. Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan
		Mengenai pelepasan SK 44, ada 6 Desa di Kecamatan Pasaribu Tobing termasuk SK 44 atau Kawasan Hutan Lindung. Masyarakat sangat mengharap bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah tentang kejelasan dan pelepasan SK 44, agar masyarakat tidak terganggu tidak takut dan tidak bimbang untuk mengerjakan dan mengelola	Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kehutanan

		lahannya.			
		masyarakat sangat mengharapkan bantuan pemerintah untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani, Bantuan Pengadaan bibit tanaman karet, kopi, sawit, coklat dan bisa dapat memberikan pinjaman lunak kepada para petani sebelum hasil pertanian berproduksi.	Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian / Perkebunan
		Masyarakat mengeluhkan peredaran pupuk bersubsidi sangat langka di kecamatan pandan dan mengharapkan kepada pemerintah agar menyediakan Pupuk bersubsidi.	Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pasar dipandan sampai saat ini belum ada perbaikan, pedagang berdagang dipinggir –pinggir jalan yang sering membuat kemacetan dan ini membuat kota pandan kelihatan kumuh dimana pasarnya tidak teratur Masyarakat memohon kepada pemkab agar segera mencari solusi dan membangun pasar dan memindahkan pasar yang lama ke pasar yang baru.	Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perindag
		Peredaran Pupuk yang bersubsidi agar sampai langsung ke kelompok-kelompok tani yang ada di pedesaan serta memperbanyak kios pupuk bersubsidi terus diteriakan oleh para petani sejak dahulu	Kec. Kolang, Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		masyarakat sangat mengharapkan kepada pemerintah, agar pola pertanian yang mereka lakukan selama ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan alat teknologi modern yaitu berupa traktor	Kec. Kolang, Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian

		Mengingat jenis penyakit tanaman pertanian terus bertambah dan berkembang, begitu juga perlunya system pola tanam yang dianjurkan, jadwal dan jenis pupuk yang digunakan, maka keberadaan PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) sangat diharapkan	Kec. Kolang, Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Untuk itu melalui Kelompok Reses Daerah Pemilihan Sumut IX mengharapkan agar pemerintah dapat segera menstabilkan harga karet kembali, agar kehidupan petani penggalas karet dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.	Kec. Kolang, Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Nelayan Sibolga Tapteng berharap agar Pemerintah memberikan perhatian terutama dalam alat penangkapan ikan	Kota Sibolga	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perikanan
		Peningkatan sarana air minum	Desa Sigumpar Julu kec. Sigumpar Kab. Tobasa	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Desa Sibarani Sitangkola kec. Laguboti kab. Tobasa	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Desa Op. Raja Hutapea kec. Laguboti kab. Tobasa	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Desa Aruan kec. Laguboti kab. Tobasa	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Desa Sibarani nasampulu kec.	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

			Laguboti kab. Tobasa		
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Kec. Simanindo kab. Samosir	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Kec. Pagaran kab. Tapanuli Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Desa Hutabulu dan Desa Pohan Jae kec. Siborong borong kab. Tapanuli Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Pohan Julu Kec. Siborong borong kab. Tapanuli Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Sampean kec. Dolok Sanggul kab. Humbahas	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kel. Kolang Nauli kec. Kolang kab. Tapanuli Tengah	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli Tengah	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kec. Andian Koting Kab. Tapanuli Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sumur bor	Kec. Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kec. Uluan, Kec.	APBN/APBD Provsu	Dinas Penataan Ruang

			Pintu Pohan, Kec. Balige Kab. Toba Samosir	(BKP)	dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kec. Pangururan Kab. Samosir	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pengaspalan Jalan Provinsi dari Simpang Silimbat sampai ke Silaen.	Kecamatan Sigumpar, Kab. Toba Samosair	APBD Prov SU	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan Gompar Sidais ke Parmalim di Sigumpar Julu.	Kecamatan Sigumpar, Kab. Toba Samosair	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Negara.	Kecamatan Tampahan, Kab. Toba Samosir	APBN	Dinas Bina Marga
		Lanjutan Pemb. Jalan Lintas Balige- Lintongni Huta – Meat	Kecamatan Tampahan, Kab. Toba Samosir	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Dinas Bina Marga
		Lanjutan Pemb. Jalan Lintas Balige- Lintongni Huta – Meat	Kecamatan Tampahan, Kab. Toba Samosir	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Dinas Bina Marga
		Pemb./Pelebaran Jalan menuju Pantai Pangkodian.	Kecamatan Tampahan, Kab. Toba Samosir	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jembatan di Sigiringgiring.	Kecamatan Tampahan, Kab. Toba Samosir	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Dinas Bina Marga

		Pemb. Jalan Negara Balige – Lagu Boti di Desa Aruan Kec. Lagu Boti.	Kecamatan Laguboti, Kab. Toba Samosir	APBN	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Pardinggaran-Huta Siarung arung.	Kecamatan Laguboti, Kab. Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb./Pengaspalan jalan siraja Deang Dolok-Op. Raja Hutapea + 300 m.	Kecamatan Laguboti, Kab. Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembukaan jalan ke Desa Sitoluama sebagai jalan ring road Danau Toba.	Kecamatan Laguboti, Kab. Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan di Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige	Kec. Balige, Kab. Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Lanj. Penahanan Tebing Sungai Jembatan Sigeokgeok Desa Lumban Gaol Kecamatan Balige.	Kec. Balige, Kab. Toba Samosir.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan desa Hutnamora, menuju SMA dan SD negeri Hutnamora Kec. Silaen.	Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb./pengaspalan jalan sepanjang 2,5 Km di Desa Lumban Dolok Kec. Silaen.	Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
			Kecamatan Simanindo.		
		Pemb. Jalan di JL Lingkar Tuk-tuk kec. Simanindo	Kec. Simanindo, Kab Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Desa	Kecamatan Pagaran, Kabupaen Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
			.		
		Pemb. jalan di Desa Lobu Sunut Kecamatan	Kecamatan	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		Parmonangan.	Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara	Kab.Kota	
		Pembukaan Jalan Usaha Tani dari Kampung Sosor Lobu ke Kampung Pangkirpansepanjang ± 1.000 meter, Kec.Siborongborong.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perkerasan jalan di Dusun 3, Lokasi si Mataniari sep. ± 400 meter. Kec.Siborongborong.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Usaha Tani dari Kampung Si Tolu Bahal ke Kampung Siagiandi Dusun 1 Desa Pohan Julu 1, sep. 700 meter Kec.Siborong-borong.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb./pengaspalan jalan Dusun II Sianjur Desa Pohan Julu sepanjang 1,5 Km.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Pariksabungan sepanjang 2 Km.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaiki Drainase sepanjang 1 Km.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perkerasan Jalan Hasang Pariksabungan sepanjang 3 Km.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perkerasan Jalan Ledong Pariksabungan sepanjang 400 m.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan Jalan Sitabotabo Toruan Pariksabungan sepanjang 500 m.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan Jalan Ulunihuta Sigumbang 1 Km,	Kecamatan	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		Kec.Siborongborong.	Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	Kab.Kota	
		Perkerasan jalan Desa Lumban Tobing ke M.Tabu Lumban Tongatonga, sep.1.050 m Kec.Siborong-borong.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan Silaitlait Julu ke Dusun III Silaitlait sep. 1,5 Km.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalann jalan Sitonggitonggi Sitampurung sepanjang 400 M,	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Jl.Siampapaga Nauli Sitampurung sepanjang 200 m,	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Jl.GPP Siampapaga Sitampurung sepanjang 300 M,	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Jl.Sibagaol Sitampurung sepanjang 300 m, serta Jl.Peanauli Sitampurung 300 m.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan Dusun Siaro Soborong-borong I sepanjang 1 Km, Pengaspalan Jl.Dusun IV Siaro sepanjang 1 Km, Pengaspalan Jl.Dusun II Siaro sepanjang 60 m, Pengaspalan Jl.dari Desa Siaro ke Desa Siborongborong II sepanjang 1 Km Koso	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan dari Doloksanggul menuju Sidikalang Kabupaten Dairi	Kec Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jemb. Dusun II Lumban Tumpal Desa	Kec Dolok Sanggul	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		Sampean Kec. Doloksanggul.	Kabupaten Humbang Hasundutan	Kab.Kota	
		Pengaspalan Jalan di Dusun I dan II sepanjang 3000 m	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Peningkatan Mutu Jalan Rabat Beton di Dusun I dan III sepanjang 4500 m.	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembukaan Jalan Usaha Tani di Dusun I dan III sepanjang 4000 m.	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun I ke Dusun III sepanjang 2500 m	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perb. jalan Pasaribu Tobing sampai dengan Desa Sipakpahi,	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Titi Gantung sepanjang 61 m, Jalan Rabat Beton (Sigompul) di Dusun IV sepanjang 690 m.	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jembatan Ramping / Gantung di Dusun I sepanjang 70 m x 2 m Desa Pasaribu Tobing.	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jembatan Ramping menjadi Jembatan Permanen, Desa Aeknadua.	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jembatan untuk sarana transportasi penyeberangan.	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		Perbaiki jalan-jalan di Kecamatan Kolang.	Kec. Kolang, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Dapil X (Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun)	Meminta perhatian pemerintah kepada pengangguran untuk diberikan keterampilan dn kursus-kursus gratis untuk pemuda-pemudi yang putus sekolah di desa kebun sayur kec. Sidamanik kab. Simalungun	Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun	APBD Pemko/Kab	Dispora
		Bantuan Raskin untuk masyarakat miskin supaya lebih dioptimalkan	Kab. Simalungun	APBN	Dinas Sosial
		Pelatihan buat anak-anak yang terkena narkoba, gangguan jiwa, da anak jalanan	Kab. Simalungun	APBD Prov/APBD Pemkab	Dinas Sosial
		SD Negeri yang ada di desa Sinaman Labah membutuhkan tambahan guru, karena guru yang ada hanya 2 orang PNS dan 2 orang Honorer Kec. Dolok Pardamean	Kab. Simalungun	APBD Prov	Dinas Pendidikan
		Meminta bantuan Mobiler, karena saat ini satu meja di gunakan untuk 3 orang di SD N yang ada di desa sinaman labah	Kab. Simalungun	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		SD Negeri yang ada di sigodang barat mengharapkan meubilair sebanyak 20 unit dan 7 buah lemari di kec. Panei Kab. Simalungun	Kab. Simalungun	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		belum ada para siswa SD mendapatkan Bana BOS dan juga kartu pintar di desa Nagori Sejahtera Kec. Siantar Kab. Simalungun	Kab. Simalungun	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		Belum ada bangunan Sekolah Dasar di desa Nagori Gorad Kec. Sidamanik Kab. Simalungun	Kab. Simalungun	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		bantuan bea siswa untuk anak-anak yang kurang	Kab. Simalungun	Bantuan Keuangan	Dinas Pendidikan

		mampu		Provinsi (BKP)	
		Perlu dibentuknya sekolah percontohan di kota pematang siantar	Kota Pematang Siantar	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		Guru honorer belum menerima bantuan keuangan dari pemprov su, dan meminta kejelasan	Kota Pematang Siantar	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		Mohon Pendidikan yang ada di Kota Pematang Siantar dibenahi sehingga nama besar kota pematang siantar sebagai kota pendidikan benar-benar terwujud	Kota Pematang Siantar	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		Bantuan pemerintah terhadap pengembangan gedung sekolah PAUD di kec. MARIHAT kota pematang siantar	Kota Pematang Siantar	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		Meminta pemerataan kartu pintar	Kota Pematang Siantar	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		Dikecamatan Banda , tepatnya di kota perdagangan telah ada bangunan Rumah Sakit dengan kondisi yang memadai , namun peralatan dan mobile belum mendukung.	Kab. Simalungun	APBN	Dinas Kesehatan
		Bantuan peralatan pendukung belajar, meminta dukungan pemerintah Sumut untuk mengalokasikan bantuan pengadaan 1 unit kendaraan komersial roda 4 untuk AMIK Tunas Bangsa Pematang Siantar yang sering menerima kunjungan berbagai Perguruan Tinggi dalam Negeri maupun Luar Negeri	Kab. Simalungun	APBD Prov/APBD Kab	Dinas Kesehatan
		Pengurusan kartu BPJS Kesehatan yang dibuat pemerintah agar di umumkan secara transparan di setiap kantor kelurahan	Kab. Simalungun	APBD Prov/APBD Kab	Dinas Kesehatan

		Kurang maksimalnya pelayanan pihak rumah sakit yang melayani pasien BPJS kelas III di Kota Pematang Siantar	Kota Pematang Siantar	APBD Prov/APBD Kab	Dinas Kesehatan
		Mengusulkan pembangunan rumah sakit Rehabilitasi dan Rumah Sakit Pasca Rehabilitasi	Kota Pematang Siantar	APBD Prov/APBD Kab	Dinas Kesehatan
		Meminta perhatian pemerintah kepada pengangguran untuk diberikan keterampilan dan kursus-kursus gratis untuk pemuda-pemudi yang putus sekolah di desa kebun sayur kec. Sidamanik kab. Simalungun	Kab. Simalungun	APBD Pemko/Kab	Dinas Tenaga Kerja
		Pencairan Dana Desa di TA 2014 untuk terima IV bingkisan 20 % yang jumlahnya bervariasi antara Rp. 10.000.000 - Rp. 13.000.000 per desa, yang tidak cair, sementara pertanggung jawaban APBD T.A 2014 sudah berakhir.	Kab. Simalungun	APBD Prov	Dinas Sosial
		Pembangunan Balai GKPS	Kab. Simalungun	APBD Prov	Dinas Sosial
		Masyarakat Sigodang Barat juga mengharapkan agar masalah pembebasan lahan dapat diselesaikan.	Kab. Simalungun	APBD Prov	Dinas Sosial
		Masyarakat Sigodang Barat menghgharapkan masalah pembebasan lahan dapat diselesaikan	Kab. Simalungun	APBD Prov	Biro PEMUM
		Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya pengurusan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, KTP, BPJS dan Pengurusan Surat Keterangan Miskinpun masih dikenakan biaya, oleh karena itu dimohonkan agar menjadi perhatian pihak Pemerintah	Kab. Simalungun	APBD Prov	Biro PEMUM

		Masyarakat menyampaikan mahal biaya pernikahan dimohon agar pihak Pemerintah melalui pihak yang terkait mensosialisasikan PP No 48 tentang Nikah Grastis bagi masyarakat miskin. Dan memberikan keterangan tentang criteria masyarakat miskin	Kab. Simalungun	APBD Prov	Biro PEMUM
		Di Nagori Simpang Pane Kec. Panombean Pane Kabupaten Simalungun Pengurusan kartu BPJS Kesehatan yang dibuat pemerintah agar di umumkan secara transparan di setiap Kantor Kelurahan	Kab. Simalungun	APBD Prov	Biro PEMUM
		Di Nagori Simpang Pane Kec. Panombean Pane Kabupaten Simalungun Pelayanan bantuan Raskin untuk masyarakat miskin supaya lebih dioptimalkan	Kab. Simalungun	APBD Prov	Biro PEMUM
		Dalam pertemuan juga disampaikan agar Pemko Pematang Siantar menertibkan Warnet-warnet karena jam operasional tidak terbatas sehingga menjadi tempat berkumpulnya anak-anak sekolah. Kalau perlu pemerintah mengeluarkan Perda untuk masalah izin operasional warnet tersebut	Kota Pematang Siantar	APBD Prov	Biro PEMUM
		Masyarakat juga menyampaikan kurang maksimal pelayanan pihak rumah sakit yang melayani pasien BPJS kelas III	Kota Pematang Siantar	APBD Prov	Biro PEMUM
		Jl. Pangaribuan No. 10 Kecamatan. Siantar Selatan Kota pematangsiantar Harga-harga sembako yang ada mohon dipantau sehingga tidak memberatkan masyarakat	Kota Pematang Siantar	APBD Prov	Biro PEMUM

		Tokoh Masyarakat mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Simalungun segera membentuk Badan Narkotika Nasional Simalungun karena peredaran Narkoba di Kecamatan Pematang Bandar sudah sangat meresahkan	Kab. Simalungun	APBD Prov	KESBANGPOL
		Perlu diaktifkan kembali Pos Kambling di setiap desa guna memantau anak-anak yang masih usia sekolah agar tidak berkeliaran di atas jam 10 malam	Kab. Simalungun	APBD Prov	KESBANGPOL
		Diharapkan kepada pihak Kepolisian ataupun pihak yang terkait agar melakukan razia terhadap anak-anak sekolah yang berada di Warnet pada jam sekolah	Kab. Simalungun	APBD Prov	KESBANGPOL
		Desa Nagori Sejahtera Kec.Siantar Kabupaten Simalungun Masyarakat juga menyampaikan tentang kurangnya kenyamanan anak-anak muda di Desa Nagori Sejahtera ini, mohon kiranya kepada pemerintah setempat supaya mengaktifkan atau dalam bentuk kegiatan di Desa tersebut	Kab. Simalungun	APBD Prov	KESBANGPOL
		Jl. Farel Pasaribu No. 30 Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Mohon keamanan bagi masyarakat supaya di tingkatkan karena akhir-akhir ini banyak pencurian sepeda motor, perampokan di pagi hari	Kota Pematang Siantar	APBD Prov	KESBANGPOL
		Jl. Pangaribuan No. 10 Kecamatan. Siantar Selatan Kota pematangsiantar Pembangunan pusat pasar yang ada di kota pematangsiantar seperti pasar Horas dan pasar Dwi Kora supaya lebih di	Kota Pematang Siantar	APBD Prov	KESBANGPOL

		tingkatkan kebersihan dan keamanan sehingga masyarakat yang harus membeli kebutuhan bisa lebih nyaman			
		Kabupaten Simalungun merupakan daerah pertanian namun para petani masih mengeluhkan akan sulitnya mendapatkan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan pertanian, dan oleh karenanya perlu perhatian lebih serius lagi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui <i>SKPD terkait dapat mengakomodir kebutuhan para petani tersebut melalui pembiayaan APBD Provsu setiap tahunnya, dengan tetap melakukan koordinasi dengan unsure Pemerintah Kabupaten Simalungun guna terukur akan kebutuhan dan tepat sasaran pembentukannya.</i>	Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian / Perkebunan
		Pupuk di Kecamatan Dolok Pardamean sangat kurang, padahal usul RDKK sudah dikirim tetapi realisasi tidak ada, sehingga hasil pertanian di daerah ini sangat kurang.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Masyarakat Kecamatan Dolok Pardamean sangat mengharapkan dibangunnya jalan produksi pertanian yang menyambungkan desa ke desa dari dusun ke dusun agar mempermudah hubungan antar daerah.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Dolok Pardamean, masyarakat mengharapkan agar diberikan bantuan bibit jagung NK 99 dan B 29.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Selain mengharapkan bantuan pupuk kimia berupa Urea, Za, Kcl, NPK Ponscha masyarakat	Kec. Dolok Pardamean, Kab	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan

		Kecamatan Dolok Pardamean juga mengharapkan pupuk organik, agar tanaman pertanian mereka dapat lebih baik dan memperoleh hasil pertanian yang berkualitas.	Simalungun		
		Masyarakat Kecamatan Dolok Pardamean meminta kepada Pemerintah agar memperhatikan penyaluran bibit, karena bibit yang beredar pada saat ini adalah bibit palsu.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Masyarakat Kecamatan Dolok Pardamean mengharapkan agar diberikan ternak babi, karena ternak babi yang sesuai di daerah tersebut.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Peternakan
		Kelompok Tani "Wanita Tani Bertama" Desa Sinaman Labah yang berjumlah 20 orang mengharapkan agar diberikan bantuan pupuk kimia (Urea, Za, Kcl dan NPK Ponscha) masing-masing jenis pupuk 1 sak per orang.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Kelompok Tani "Wanita Tani Bertama" mengharapkan tambahan modal koperasi yang pada saat ini sedang berjalan.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian / Koperasi
		Kelompok Tani "Mekar" Desa Bangun Pane mengharapkan agar berikan bantuan bibit jahe.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Masyarakat Desa Silaba Jaya mengharapkan pembangunan jalan usaha tani, pengadaan handtraktor dan pembuatan sumur bor di perladangan, karena apabila musim kemarau air sangat minim sehingga masyarakat tidak dapat menyirami pertaniannya.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Di bidang peternakan, masyarakat Desa Silaba Jaya mengharapkan bibit babi.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Peternakan

		Masyarakat mengharapkan agar diberikan bibit coklat dan kopi ateng untuk menambah kesejahteraan masyarakat Sigodang Barat.	Kec. Panei, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Masyarakat sekitar Kecamatan Panei mengharapkan bibit ternak babi.	Kec. Panei, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Peternakan
		Diharapkan kepada Pemerintah agar memperhatikan harga jagung dipasaran tetap stabil.	Kec. Panei, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Selain lahan irigasi masyarakat Sigodang Barat juga mengharapkan agar diberi bantuan bibit kopi ateng, jagung, coklat.	Kec. Panei, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
				APBD Prov/ SKPD Teknis	
		Masyarakat Sondi Raya mengharapkan bibit jagung, jeruk.	Kec. Sondi Raya, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Masyarakat Sondi Raya mengharapkan bantuan modal untuk usaha pertanian.	Kec. Sondi Raya, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Agar Pemerintah memberikan bantuan modal untuk Kelompok Tani dan Ternak yang ada di Kecamatan Pematang Bandar.	Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Masyarakat Nagori Kandungan yang pada umumnya adalah Petani sangat berharap agar Irigasi yang ada di Pematang Bandar dapat segera diperbaiki karena merupakan Saluran Irigasi Induk yang mengairi persawahan sekitar 3000 Ha dan sudah banyak yang rusak dan saat ini musim kemarau sehingga pengairan lahan pertanian tidak maksimal dan berharap agar Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Provinsi	Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinasn Pertanian

		Sumatera Utara segera memperbaikinya			
		Masyarakat memohon agar Pemerintah dapat memberikan bantuan alat pertanian berupa zeter, hand traktor, dan traktor sehingga hasil panen dapat meningkat dan kiranya masalah kelangkaan pupuk bersubsidi dan bibit-bibit berkualitas serta obat-obatan tanaman dapat diatasi.	Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinasn Pertanian / Perkebunan
		Masyarakat berharap bantuan untuk kelompok tani yang ada di desa mereka.	Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Masyarakat setempat mengharapkan penyuluhan-penyuluhan dari PPL lebih ditingkatkan.	Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Program asuransi pertanian untuk petani sangat di harapkan untuk segera terealisasi.	Kec. Huta Bayu, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Mohon bantuan bibit padi, jagung, bagi para petani	Kec. Huta Bayu, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	
		Mohon perbaikan irigasi pertanian yang ada di Kecamatan Huta Bayu Rja karena sudah banyak saluran irigasi rusak yang mengakibatkan tanaman padi tidak dapat tumbuh subur sehingga ada beralih menanam ubi atau jagung.	Kec. Huta Bayu, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Pupuk organik sangat sulit di dapatkan oleh petani dan mohon bantuan dari pemerintah	Kec. Huta Bayu, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Seperti tomat, cabe dan lain sebagainya harga jualnya turun, maka masyarakat kesulitan dalam memanfaatkan hasil pertanian tesebut, untuk mengatasi hal seperti ini dibutuhkan home	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan

		industry pengelolaan hasil pertanian seperti pengelolaan tomat yang akan dibuat saos			
		jalan Usaha Tani Anjuk menuju Sintat Raya sepanjang ± 2000 meter.	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		jalan Usaha Tani Sinta Raya menuju Siboras sepanjang ±2000 meter	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		jalan Usaha Tani Sinta Raya menuju Siboras sepanjang ±2000 meter	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Untuk mengendalikan harga hasil – hasil pertanian, seperti buah – buahan ataupun sayur – sayuran, maka masyarakat membutuhkan Koperasi ataupun pasar sayur	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Karena hidup masyarakat menggantungkan hidup dari bertani, maka masyarakat membutuhkan bantuan berupa 40 ribu bibit jeruk unggul.	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Untuk mempermudah petani dalam mengelola lahan pertanian maka dibutuhkan bantuan berupa Traktor.	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Untuk memfungsikan ataupun mengaktifkan kembali ±600 Ha lahan persawahan maka perlu perbaikan jalan pertanian dan jalur irigasi di Desa Bawang Kec. Dolok Silau	Kec Dolok Silau, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Untuk meningkatkan pengetahuan bagi para petani maka diperlukan para penyuluh pertanian.	Kec Dolok Silau, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Masyarakat / petani sangat membutuhkan berupa bibit – bibit pertanian serta bibit ikan.	Kec Dolok Silau, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Perlu pembangunan irigasi untuk lahan persawahan ±500Ha dimana areal persawahan ini sudah tidak digunakan akibat jalur irigasinya tidak ada	Kec Dolok Silau, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian

		Untuk pendistribusian hasil pertanian dapat cepat sampai kepasar maka perlu peningkatan / pembangunan jalan usaha tani maupun jalan lingkungan yang ada di desa Cingkes	Kec Dolok Silau, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Untuk mendapatkan hasil pertanian yang cukup signifikan dibutuhkan pupuk, tetapi pupuk yang dibutuhkan petani sangat sulit didapatkan mohon kepada pihak yang terkait untuk dapat membantu para petani untuk mendapatkannya,	Kec Dolok Silau, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		masyarakat mengharapkan perhatian dari pemerintah baik dari Kabupaten maupun Provinsi supaya dapat memperdayakan kaum ibu-ibu di Kecamatan Siantar khusus nya Desa Nagori Sejahtera ini kiranya dapat bantuan seperti : Mesin Goreng Ubi, Pencecah Ubi, Mesin Jahit.	Kec. Siantar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Biro Perekonomian / Disperindag
		Dalam pertemuan tersebut warga juga menyampaikan supaya lancar pola tanaman, mohon bantuan seperti Jetor, Lahan Penjemur Padi dan Mesin Penggiling Gabah untuk setiap kelompok tani dan juga masyarakat menginginkan bagaimana tentang tata tertib pola tanam	Kec. Siantar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan kelangkaan ketersediaan Elpiji serta harga nya yang sangat tinggi, maka sangat perlu pemerintah bersama PT Pertamina melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi kelangkaan atau melunjak harga elpiji.	Kec. Hantonduan, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Biro Perekonomian / Disperindag
		Warga desa Nagori Rambung menginginkan	Kec. Damanik, Kab.	APBD Prov/ SKPD	Dinas Pertanian

		bantuan alat tani karena masyarakat mayoritas petani, maka dengan itu masyarakat sangat mengharap perhatian dari pemerintah supaya masyarakat tidak lagi kesulitan untuk membutuhkan pupuk dan traktor.	Simalungun	Teknis	
		Masyarakat juga menginginkan bantuan bibit ternak, yang bisa membuat masyarakat mempunyai aktifitas dan meningkatkan kehidupan mereka.	Kec. Damanik, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Peternakan
		Kiranya Pemerintah memberikan bantuan pelatihan dan penyuluhan pertanian agar hasil yang diperoleh petani lebih baik.	Kec. Sidamanik, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Para pemuda bermohon kiranya Pemerintah juga memperhatikan masalah pengangguran agar diberikan keterampilan dan kursus-kursus gratis untuk pemuda pemudi yang putus sekolah sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.	Kec. Sidamanik, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Biro Perekonomian
		Masyarakat meminta kepada Pemerintah untuk memberikan bantuan bibit-bibit dan pupuk sehingga petani terbantu dalam mengelolah pertanian mereka.	Kec. Huta Bayu, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Masyarakat memohon bantuan berupa gas elpiji di sebabkan Kelangkaan gas elpiji 3 Kg bagi masyarakat Kota Pematangsiantar.	Kec. Siantar, Kota Pematang Siantar	APBD Prov/ SKPD Teknis	Biro Perekonomian/ Distamben
		Harga-harga sembako yang ada mohon dipantau sehingga tidak memberatkan masyarakat.	Kec. Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar	APBD Prov/ SKPD Teknis	Biro Perekonomian

		Peningkatan drainase	Kec. Tanah Jawa dan kec. Sidamanik kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Nagori Sinaman Labah kec. Dolok Pardamean kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Tigaras kec. Dolok Pardamean kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Pembuatan Drainase	Desa pasar Bawah kec. Pematang Bandar kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Bawang kec. Dolok Silau kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Pembuatan drainase	Desa Cingkes kec. Dolok Silau kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Nagori Buntu Bayu kec. Hantonduan Kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan jalan usaha tani	Kec. Tanah Jawa, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kec. Padang Sidamanik, Kec. Pane Kab.	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman

			Simalungun		
		Peningkatan drainase	Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kec. Sidamanik Kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Pemb. jalan di Kecamatan Siantar Martoba kota Pematangsiantar.	Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar	APBD Kab atau BKP	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan di Kecamatan Siantar Selatan kota Pematangsiantar.	Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar	APBD Kab atau BKP	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan di Kecamatan Siantar Marihat kota Pematangsiantar.	Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Peningkatkan jalan Provinsi antara Saran Padang hingga Gunung meriah sepanjang ±1,5 Km di Kab.Simalungun dan Kab. Deli Serdang.	Kab. Simalungun	APBDProvsu atau BKP	Dinas Bina Marga
		Peningkatan Jalan di Kec. Dolok Batu Nanggar, Kec. Gunung Malaka, Kec. Ujung Padang.	Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan produksi pertanian	Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		Pemb. jembatan Desa Pematang Sinaman.	Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan Dolok Marimbun – Dusun Bah Bulawan – Nagori Bangun Pane.	Kecamatan Panei, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan aspal antara Bah Bulawan – Dolok Marimbun sepanjang 1,8 Km.	Kecamatan Panei, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan menuju Desa Dolok Marimbun.	Kecamatan Panei, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan usaha tani	Kecamatan Panei, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		-			
		Pemb. jembatan yang menghubungkan Nagori Sigodang Barat – Simattin Pane Dame.	Kecamatan Panei, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan Sondi Raya – Raya Kahean.	Kecamatan Sondi Raya, Kab. Simalungun.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan dan drainase di sepanjang desa Pasar Bawah.	Kecamatan Pematang Bandar, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. / perbaikan jalan Serebalawan.	Kecamatan Dolok Batunanggar, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan infrastruktur jalan	Kecamatan Panombean Pane,	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

			Kab. Simalungun		
		Pemb. Jalan menuju Maligas Bayu, Kec.Huta Bayu Raja.	Kecamatan Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan Usaha Tani Anjuk menuju Sintat Raya sep. ± 2000 meter.	Kecamatan Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan Usaha Tani Sinta Raya menuju Siboras sep. ±2000 meter	Kecamatan Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Usaha Tani Sinta Raya menuju Sigada – gada sepanjang ±2000 meter	Kecamatan Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Dusun Parimbunan sepanjang ±2Km.	Kecamatan Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb./pengaspalan jalan provinsi antara jalan Saran Padang hingga Gunung Meriah sepanjang ±1,5 Km.	Kecamatan Dolok Silau, Kab. Simalungun	APBD Provsu	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan di Kecamatan Siantar	Kecamatan Siantar, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan di Kecamatan Hantonduan	Kecamatan Hantonduan, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan di Kecamatan Damanik	Kecamatan Damanik, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb./perbk. jalan-jalan yang rusak parah di	Kecamatan	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		Kecamatan Sidamanik.	Sidamanik, Kab. Simalungun	Kab.Kota	
	Dapil XI : Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Dan Kabupaten Pakpak Bharat	Mohon bantuan air bersih untuk MCK dan air minum untuk Desa Munte Kec. Munte dan Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo.	Kabupaten Karo	APBD Provinsi	Dinas Kesehatan
		Permohonan untuk pengadaan Dokter Spesialis di RSUD Dairi untuk mempermudah masyarakat di Kabupaten Dairi yang berobat dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan	Kabupaten Dairi	APBD Provinsi	Dinas Kesehatan
		Permohonan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar memfasilitasi kemudahan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Dairi yang mengajukan permohonan untuk menuntut ilmu dokter spesialis di Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diberlakukan oleh USU untuk beberapa Provinsi seperti Aceh dan Sumatera Barat.	Kabupaten Dairi	APBD Provinsi	Dinas Kesehatan
		Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan khususnya di Dapem XI (Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat) diharapkan dilakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas-fasilitas pendukung serta tenaga pengajar dan tenaga medis yang profesional	Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat	APBD Provinsi	Dinas Kesehatan
		Permohonan bantuan Beasiswa Miskin bagi Masyarakat Jalan Pematang Siantar Desa Sinaman Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo	Kabupaten Karo	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Permohonan kepada Pemerintah Sumut dan Kab. Dairi untuk pemerataan tenaga pendidik	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Pendidikan

		terkhusus guru Sekolah Dasar (SD) di desa - desa termasuk desa Paropo Kecamatan Sumbul			
		Agar dapat ditingkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Daerah, sehingga dapat mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, guna mendukung percepatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Dairi, Karo dan Pakpak Bharat	APBD Provinsi	Dinas Pendidikan
		Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan khususnya di Dapem XI (Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat) diharapkan dilakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas-fasilitas pendukung serta tenaga pengajar dan tenaga medis yang profesional	Kabupaten Dairi, Karo dan Pakpak Bharat	APBD Kab/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Warga Kelurahan Sumber Mupakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo memohon agar Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan alat-alat olahraga seperti: bola voli, net, bola kaki dan gawang yang layak agar kami pemuda setempat dapat mempunyai kegiatan yang positif di sela-sela kesibukan kami sekolah	Kabupaten Karo	APBD Kab/Provinsi	DISPORA
		Permohonan bantuan rehab gereja oleh warga di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Masyarakat Desa Bandar Huta Usang Tiga Baru Kecamatan Pegagan Hilir Kab. Dairi memohon realisasi bantuan pembangunan Gereja Kristen Protestan Pakpak Bharat (GKPPD)	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Warga di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi memohon untuk bantuan rehab	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial

		gereja			
		Mohon realisasi bantuan pembangunan Gereja Kristen Protestan Pakpak Bharat (GKPPD) Tiga Baru Kec. Pegagan Hilir	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Mohon bantuan pembangunan Mesjid Al-Huda Dusun Kuta Raja Desa Bukit Tinggi Kec. Pegagan Hilir total biaya sebesar Rp. 304.475.000	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Warga di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo meminta kepada Pemerintah mengenai BLT yang tidak tepat sasaran perlu disikapi dengan baik, karena akan membuat ketidak harmonisan antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat miskin	Kabupaten Karo	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Warga di Desa Batang Teru Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi memohon untuk pembagian secara merata bantuan dari Pemerintah Kabupaten Dairi berupa Beras Miskin, Keluarga Harapan dan lain-lain sebagainya	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Masyarakat Kecamatan Parmaksian khususnya Desa Lumban Sitorus menyampaikan aspirasinya bahwa tanah mereka yaitu kawasan Jior Sisadasada dan Silosung yang terletak di Silosung Sosor Ladang Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian seluas 46 Ha telah dikuasaisecara sepihak oleh PT. TPL. Masyarakat meminta agar PT. TPL mengembalikan tanah ulayat tersebut dan turut memberikan surat-surat tuntutan dan dokumen tanah milik warga Lumban Sitorus kepada Sarma Hutajulu, S.H. untuk dapat diperjuangkan melalui Lembaga Legislatif DPRD	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Ro. PEMUM

		Provinsi Sumatera Utara.			
		Masyarakat meminta kepada Dinas Catatan Sipil yang ada di kabupaten Dairi dapat memberikan keringanan biaya administrasi seperti pembuatan Akte kelahiran dan Perkawinan.	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Kota/Provinsi	Ro. PEMUM
		Mohon peninjauan kembali HGU PT. Tunggal Menara Jaya yang lahannya terletak di Kecamatan Si tellu Tali Urang Julu dan Kecamatan Siempat Rube dan tepatnya berbatasan dengan Desa Lae Langge.	Kaupaten Pakpak Bharat	APBD Kab/Kota/Provinsi	Ro. PEMUM
		Mohon bantuan pembangunan dan renovasi lanjutan rumah ibadah di Kecamatan Kabanjahe yang mana proposal telah kami sampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 dan 2013 tetapi hingga saat ini belum terealisasi. Mohon kepada Pemerintah agar segera membantu pembangunan dan renovasi lanjutan rumah ibadah di daerah kami.	Kabupaten Karo	APBD Kab/Kota/Prov	BINSOS
		Masyarakat memohon untuk bantuan rehab gereja.	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Kota/Prov	
		Mohon bantuan pembangunan Mesjid Al-Huda Dusun Kuta Raja Desa Bukit Tinggi Kec. Pegagan Hilir total biaya sebesar Rp. 304.475.000 (Tiga ratus empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan proposal terlampir.	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Kota/Prov	BINSOS
		Mohon realisasi bantuan pembangunan Gereja Kristen Protestan Pakpak Bharat (GKPPD) Tiga Baru Kec. Pegagan Hilir	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Kota/Prov	BINSOS
		Mohon bantuan pupuk dan bantuan peternakan	Kec. Gunung	APBD Prov	Dinas Perkebunan /

		dengan harga yang terjangkau guna meningkatkan perekonomian	Sitember, Kab. Dairi	(SKPD)Teknis	Pertanian
		Mohon kelangkaan LPG 3 kg segera teratasi.	Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	Biro Perekonomian / Distamben
		Masyarakat memohon bantuan untuk kredit usaha.	kec. Sidikalang, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	Dinas Koperasi
		Sebagian besar masyarakat Kabupaten Dairi adalah petani kopi, dan kopi yang dihasilkan oleh para petani adalah kopi dengan kualitas tinggi tetapi harga kopi masih sangat rendah. Untuk itu warga mengharapkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap harga kopi yang masih rendah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimana sekarang ini harga kebutuhan pokok semakin tinggi karena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	Dinas Pertanian
		Masyarakat Sumbul meminta agar Pemerintah Dairi memberikan perhatian terhadap warga agar kiranya dapat menyediakan bibit tanaman pertanian sekaligus badan penyuluhan pertanian dan pengadaan pupuk bersubsidi bagi masyarakat.	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	Dinas Perkebunan
		Masyarakat meminta kepada Pemerintah agar dapat segera dibangun tiang listrik sebagai sarana untuk penerangan jalan	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	Distamben
		Masyarakat Paropo meminta kepada Pemerintah Kabupaten Dairi agar jalan ke perladangan	Kec. Silalahi, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	Dinas pertanian

		menjadi jalan usaha tani yang berada di kecamatan Paropo I sepanjang 3 km, dikarenakan jalan perladangan ini berpotensi memberikan hasil pertanian bagi masyarakat.			
		Mohon bantuan jaringan PLN di Dusun Kuta Raja Desa Bukit Tinggi Kec. Pegagan Hilir yang mana desa ini termasuk desa terisolir dengan jalan yang belum memadai.	Kec. Pegagan Hilir, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	distamben
		Mohon bantuan alat pertanian (zetor) di 13 Desa sebanyak 13 Unit	Kec. Pegagan Hilir, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Mohon bantuan bibit pertanian yaitu Bibit jagung, bibit kopi, bibit jeruk dan bantuan ternak sapi.	Kec. Pegagan Hilir, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Mohon perbaikan irigasi persawahan untuk mencapai swasembada pangan di Kec. Pegagan hilir kab. Dairi.	Kec. Pegagan Hilir, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Masyarakat meminta bantuan berupa bibit kopi, kakao dan karet.	Kec. Siempat Numpu Hilir, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Masyarakat juga memohon bantuan ternak babi dan lembu.	Kec. Siempat Numpu Hilir, Kab. Dairi		dinas peternakan
		Pemerintah Kabupaten Dairi saat ini sangat kekurangan pupuk untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan pupuk bersubsidi.	Kec. Siempat Numpu Hilir, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Mohon bantuan bibit unggul untuk kelompok-kelompok tani dengan harga yang terjangkau.	Kec. Munte, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Mohon perbaikan irigasi persawahan.	Kec. Munte, Kab.	APBD Prov	dinas pertanian

			Karo	(SKPD)Teknis	
		Mohon bantuan peternakan seperti kambing, sapi, bibit ikan mas.	Kec. Munte, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Mohon ketersediaan LPG 3 kg segera teratasi.	Kec. Munte, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Mohon bantuan bibit unggul seperti jagung dengan harga terjangkau	Kec. Kabanjahe, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Mohon bantuan peternakan seperti sapi, kambing	Kec. Kabanjahe, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Mohon kelangkaan LPG 3 kg segera teratasi	Kec. Kabanjahe, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Kelompok koperasi perempuan dan kelompok penjahit di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Sumber Mupakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo banyak mengalami kekurangan modal untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam maupun permodalan untuk kelangsungan koperasi kami. Melalui Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kami memohon bantuan untuk memfasilitasi permodalan koperasi kami.	Kec. Kabanjahe, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Kami masyarakat Jalan Jamin Ginting Kelurahan Sumber Mupakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo memiliki pengelolaan pupuk kompos tetapi masih sangat konvensional (tradisional). Melalui Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara agar dapat mengusulkan kepada Pemerintah untuk memfasilitasi hal-hal yang sangat kami butuhkan antara lain: Alat pencacah, Gudang tempat penyimpanan pupuk kompos, dan pemasaran pupuk kompos tersebut ke luar	Kec. Kabanjahe, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan

		daerah.			
		Di Jalan Singga Kutambelin Kelurahan Kutambelin Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo masyarakat masih banyak memiliki sawah yang belum ada saluran irigasi untuk mengalirkan air ke sawah-sawah mereka sehingga masyarakat hanya mengharapkan air ketika hujan turun akibatnya produksi padi berkurang. Masyarakat hanya mampu panen 1 tahun sekali sedangkan jika ada saluran irigasi masyarakat bisa mampu panen 3 bulan sekali. Untuk itu kami mengharapkan bantuan kepada Pemerintah sesuai dengan program Bapak Presiden Jokowi mengenai Ketahanan Pangan, agar dilakukan pembuatan saluran irigasi untuk mengalirkan air ke sawah-sawah kami sehingga produksi padi kami meningkat dan masyarakat di desa kami menjadi sejahtera.	Kec. Tiga Panah, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Kami masyarakat di Jalan Singga Kutambelin Kelurahan Kutambelin Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo membutuhkan bantuan berupa hewan ternak lembu, kambing, dan babi. Pada kesempatan ini kami memohon kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara agar dapat memfasilitasi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok ternak kami agar bisa mendapatkan bantuan hewan ternak lembu, kambing, dan babi dari Pemerintah.	Kec. Tiga Panah, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Masyarakat di desa kami banyak yang bercocok tanam jeruk dan kentang. Untuk itu kami	Kec. Tiga Panah, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan

		meminta kepada Pemerintah untuk dapat menyediakan bibit unggul pertanian seperti bibit jeruk, dan bibit kentang guna meningkatkan hasil pertanian kami masyarakat di Jalan Singga Kutambelin Kelurahan Kutambelin Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.			
		Masyarakat meminta agar pupuk bersubsidi dihapus, akan tetapi harga dari hasil pertanian dapat ditingkatkan dengan menetapkan harga standarisasi harga komoditi pertanian.	Kec. Merek, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Masyarakat meminta agar Pemerintah Kabupaten Karo memberikan bantuan berupa tiang listrik untuk sarana penerangan lampu jalan yang ada di Desa Nanggalingga.	Kec. Merek, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	distamben
		Masyarakat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Karo agar dapat menyediakan bibit unggul pertanian, berupa bibit kentang guna meningkatkan hasil pertanian bagi warga sekitar.	Kec. Merek, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Masyarakat mengharapkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Karo tentang masalah hutan lindung yang ada di Kecamatan Merek di sebelah Selatan dikarenakan Hutan Lindung tersebut berdampingan dan berdekatan dengan pemukiman penduduk agar dapat menjadi perhatian khusus.	Kec. Merek, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas kehutanan
		Kelompok tani yang ada di Desa merek mengharapkan kepada Pemerintah memohon adanya hand tractor untuk mekanisme tanah untuk membantu masyarakat.	Kec. Merek, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian

		Bantuan pengadaan alat-alat pertanian, obat-obatan dan alat penyemprot hama.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Bantuan traktor lima cangkul satu unit.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Bantuan pupuk organik, dolomit dan pupuk bersubsidi.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Bantuan pengadaan bibit jeruk.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Bantuan ternak kerbau dan unggas.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan pengadaan jaringan PLN di Dusun IV Genting Desa Tanjung Meriah Kecamatan Siturje yang jumlah penduduk sebanyak 110 KK yang jarak tempuh dari Simpang jalan Aceh Selatan ± 3 Km sampai ke Dusun tersebut.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	distamben
		Bantuan mesin jahit sebanyak 50 paket untuk kelompok terampil perempuan di Desa Tanjung Meriah.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan pupuk bersubsidi 10 ton/ tahun	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan alat-alat pertanian dan bibit utuk pertanian berupa mesin babat, alat semprot hama, obat-obat pertanian, bibit jeruk 1200 batang	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Bantuan ternak unggas	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan ternak Kerbau 100 ekor @Rp. 8.500.000 = Rp 850.000.000	Kec. Pergetteng-getteng, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan

		Pengadaan mesin pengolah tapioka (pabrik tepung) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja.	Kec. Pergetteng-getteng, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Pembukaan jalan usaha tani ± 6 Km sebesar Rp.1.200.000.000	Kec. Pergetteng-getteng, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Bantuan ternak kepada kelompok tani yang terdiri dari 6 kelompok/ desa	Kec. Siempat Rube, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Sangat mengharapkan bantuan pembangunan pembukaan jalan-jalan tani yang sangat prioritas yaitu Jalan Tani Desa Lau Sereme Kecamatan Tigalingga.	Kec. Tigalingga, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Alat-alat pertanian seperti : Zetor, mesin babat, bibit jeruk dan pupuk organik dan bersubsidi Desa Mahala	Kec. Tinada, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Pembangunan drainase	Kec. Gunung Sitember Kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penataan lingkungan	Kec. Gunung Sitember Kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Munte kec. Munte kab. karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penataan lingkungan	Desa Munte kec. Munte kab. karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan MCK	Desa Munte kec.	APBN/APBD Provsu	Dinas Penataan Ruang

			Munte kab. karo	(BKP)	dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Samura kec. Kabanjahe kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penataan lingkungan	Desa Samura kec. Kabanjahe kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan MCK dan kamar mandi umum serta sumur bor	Desa Samura kec. Kabanjahe kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Samura kec. Kabanjahe kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi kawasan Perkotaan Kabanjahe	Desa Samura kec. Kabanjahe kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM Tirtanadi	Kel. Kutambelin kec. Tiga Panah kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sumur bor	Kel. Kutambelin kec. Tiga Panah kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Perlindungan kawasan hutan lindung	Desa Merek kec. Merek kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penangan air limbah	Desa Merek kec. Merek kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penyediaan air bersih	Desa Merek kec. Merek kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan pembangunan infrastruktur	Kec. Sumbul kab. Dairi	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pengadaan saran dan prasarana MCK	Desa Lau Sereme	APBN/APBD Provsu	Dinas Penataan Ruang

			kec. Tigalingga kab. Dairi	(BKP)	dan Permukiman
		Peningkatan Jalan Usaha Tani	Desa Rumah Kabanjahe Kec. Kabanjahe, Kec. Tiganderket Kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan Jalan Usaha Tani	Desa Lau Sereme Kec. Tigalingga Kab. Dairi Kab. Pakpak Bharat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana air bersih	Desa Lau Sereme Dusun Rambah Sere Kec. Tigalingga Kab. Dairi	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Siempat Rube I Kab. Pakpak Bharat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Perbaikan infrastruktur jalan yang ada di desa Negeri Tongging yang bertepatan di jalan Sirtu dapat di aspal ± 1500 meter.	Kab. Karo	APBD Kab/ BKP	Dinas Bina Marga
		Mohon perbaikan dan pelebaran jalan yang sudah rusak berat.	Kab. Karo	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Masyarakat memohon bantuan perbaikan jalan desa.	Kab. Dairi	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		perbaikan/mengatasi curamnya Jalan Nasional dari Desa Tanjung Beringin ke Sumbul.	Kab. Dairi	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Kab. Dairi	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		Kabupaten Dairi.		Kab.Kota	
		Perbaikan/pengaspalan infrastruktur jalan yang ada di jalan Huta uruk kec. Paropo sepanjang ± 2,5 km.	Kab. Dairi	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Peningkatan jalan perladangan menjadi jalan usaha tani di Kec. Paropo sep. 3 km	Kab. Dairi	APBD Kab.	Dinas Bina Marga
		perbaikan jalan Sitio sampai dengan jalan Silalahi sebagai jalur tempat jalan Pariwisata serta pengusulan jalan dari Desa Tongging sampai ke Silalahi tembus ke Sitinjo dan juga jalan Medan Lae Pandom Dairi	Kab. Dairi	APBD Kab.	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan Provinsi dari Tiga Baru – Sumbul yang hampir putus akibat terjangan air paret dari hulu.	Kab. Dairi	APBD Prov	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan lingkaran luar dari Sindeka - Lae Langge - Namuseng tembus Parbuluan - Tele.	Kab Pakpak Bharat	APBDN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan menghubungkan Siempat Rube 2 jalan lingkaran menuju Sitelu Tali Urang Julu sepanjang 6 Km	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan/ pengaspalan jalan Jambu Rea – Mungkur sepanjang 3 Km	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan dari Desa Kuta Jungak – Parbuluan Kabupaten Dairi yang belum selesai/ pembangunan lanjutan sepanjang ± 8 Km.	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengerasan/pengaspalan jalan dari Dusun Mungkur – Kuta Jungak sepanjang 950 M x 3 M.	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembukaan jalan dari Dusun I Mungkur ke Simp. II resdes sepanjang 400 M x 7 M.	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan dari Kantor Camat ke Kuta Jungak sepanjang 1 Km.	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		Pembangunan pembukaan jalan-jalan tani yang sangat prioritas yaitu Jalan Tani Desa Lau Sereme Kecamatan Tigalingga.	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan/ pengaspalan jalan penjaratan menuju Kerajaan (Sukarame) sepanjang ± 6 Km	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan nasional batas Kabupaten Dairi - Kabupaten Pakpak Bharat dari Nantampak Mas menuju Sukarame Uruk (sepanjang jalan sekitar Delleng Lumut ± 16 Km).	Kab Pakpak Bharat	APBN	Dinas Bina Marga
		1Pembangunan / Pengaspalan Jalan Provinsi yang menghubungkan 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Pakpak Bharat ke Kabupaten Dairi dari Desa Kuta Jungak Kecamatan Jambu Rea Kab. Pakpak Bharat ke Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi yang belum selesai/ pembangunan lanjutan sepanjang ± 8 Km.	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov	Dinas Bina Marga
		Pelebaran Jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Karo dengan Dairi di KM 104-114 yang sangat rawan longsor	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov	Dinas Bina Marga
	Dapil XII (Kab. Langkat dan Kota Binjai)	Mohon agar pembanguna sosial seperti pembanguna mushollah di Desa Cempa Dusun VII untuk diberikan bantuan dan realisasinya untuk pembangunan mushollah tersebut.	Kec. Hinai, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Permohonan Bantuan sarana dan prasarana beserta peralatan untuk rumah ibadah di Kec. Hinai Kab. Langkat	Kec. Hinai, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Rehab lantai Musholla uk. 8 m x 10 m dan Pembuatan Pagar Musholla uk. 1 m x 8 m dan Pembuata Pagar Musholla uk. 1m x 8 m lokasi Dsn II H Malaka dan Dsn III Sibongkok Desa Perk.	Kec. Kuala, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos

		Bekiun			
		Pembuatan Tempat Wudhu dan Sumur Musholla lokasi Dsn Petak II Desa Sido Makmur	Kec. Kuala, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Rehab Mushola 1 Unit lokasi Dsn Lau Mentar Desa Besadi	Kec. Kuala, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Pembuatan Pagar Mesjid sepanjang 25 m lokasi Dsn II Bangun Rakyat Desa Blankahan	Kec. Kuala, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Renovasi Madrasah Al-Ihsan lokasi Kel. Bela Rakyat	Kec. Kuala, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Pembuatan Pagar Mesjid Sepanjang 54 m lokasi Dsn III Sidorukun Desa Blankahan	Kec. Kuala, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Diharapkan kepada Pemerrintah Provinsi Sumatera Utara agar kiranya dapat membantu rumah rumah ibadah yang ada di Desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang, karena banyak rumah rumah ibadah seperti Mesjid dan Mushollah yang sudah tidak layak lagi.	Kec. Padang Tualang, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Memohon kepada Pemerintah kiranya dapat membantu para guru-guru ngaji yang mengajar mengaji, wirid yasin (bagi remaja dan ibu-ibu perwiridan) yang dalam pemberian honorariumnya masih berdasarkan bantuan keiklasan dari warga dan masih dibawah ketentuan umum.	Kecamatan Binjai Kota	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Masyarakat Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai mengharapkan agar Benteng/bronjong di wilayah Lembah yang posisinya di dekat Musholla Ikhlas dan mesjid	Kecamatan Binjai Utara	APBD Pemkab/Kota	Binsos

		Taqwa, agar dapat diperbaiki secepatnya karena dapat mengakibatkan rumah-rumah dipinggir sungai runtuh.			
		Pembangunan/perbaikan Musholla Al Muhajirin di lingkungan Kel. Bergam.		APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Dari hasil pertemuan reses dengan warga masyarakat di Desa Jati Mulyo, Warga sangat berharap adanya bantuan bagi Rumah Ibadah (Mesjid Nurul Iman) yang berada di lingkungan Pujidadi.	Kecamatan Binjai Selatan	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Masyarakat mohon kepada Pemerintah (melalui pengajuan proposal) untuk dapat membantu renovasi Masjid Al-Qhodar, Al-Hidayah, penambahan teras Musholah Nurul Iman, dan pembangunan Madrasah yang saat ini belum ada untuk proses belajar dan mengajar mengaji Al-Quran.	Kecamatan Binjai Barat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Masyarakat di daerah ini sangat resah, karena peredaran narkoba yang semakin meraja lela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.	Kec. Stabat, Kab. Langkat	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial
		Masyarakat di daerah ini sangat resah, karena	Kecamatan Wampu,	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial

		peredaran narkoba yang semakin merajalela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.	Kab. Langkat		
		Pengadaan Alat – alat Nasyid / Marhaban lokasi Dsn II Kp Baru Desa Raja Tengah			
		Semakin maraknya perjudian di Desa Empus. Dimohon kepada aparat Kepolisian dan penegak hukum untuk dapat melakukan pemberantasan perjudian yang telah merajalela di Pedesaan.	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial
		Masyarakat memohon kepada Pemerintah dan pihak kepolisian untuk menindak lanjuti masalah Narkoba yang saat ini sangat meresahkan masyarakat dan merusak generasi-generasi muda.	Kecamatan Selesai, Kab. Langkat	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial
		Masyarakat memohon penerbitan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan jangan dipersulit, dan Akte Nikah Penduduk hampir seluruhnya hanyut terkena banjir.	Kecamatan Besitang , Kab. Langkat	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial
		Masyarakat di daerah ini sangat resah, karena peredaran narkoba yang semakin merajalela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial

		juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.			
		Masyarakat di daerah ini sangat resah, karena peredaran narkoba yang semakin meraja lela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial
		Masyarakat Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Kota menyampaikan bahwa banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan Kartu KIS dan KIP, namun tidak mendapatkan kartu tersebut. Hal ini sama halnya dengan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Masyarakat mengharapkan agar Pemerintah dapat memberikan Kartu KIS dan KIP bagi masyarakat yang benar-benar miskin, sehingga tepat sasaran. Diharapkan juga agar data-data orang miskin di Kota Binjai khususnya Kecamatan Binjai Kota dapat didata ulang kembali.	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial
		Masalah narkoba dan judi yang semakin hari semakin marak keberadaannya, sedang aparat sudah berupaya membasminya namun hasilnya belum optimal dan narkoba masih beredar dikalangan remaja/anak-anak.	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial

		Permohonan agar merealisasikan bedah rumah yang telah diprogramkan Pemkab. Langkat untuk masyarakat khususnya di Desa Cempa yang selama ini belum secara merata pelaksanaannya.	Kec.Hinai, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Pelatihan Ketrampilan Bordir Menjahit lokasi Desa Parit Bindu	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 57 Unit lokasi Desa Besadi	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Bantuan Pengadaan Pakaian Remaja dan Perwiritan Kaum Ibu Masing – masing 25 Set lokasi Dsn Bekiung lama Desa Bekiung	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Pengadaan Pakaian untuk Remaja Mesjid sebanyak 100 set lokasi Desa Balai Kasih	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 60 Rumah se kelurahan Bela rakyat lokasi Kel. Bela Rakyat	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Bantuan Alat Musik Marhaban sebanyak 1 unit lokasi Dsn Mandailing Desa Sido Makmur	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 18 unit Kel. Pekan Kuala lokasi Kel. Pekan Kuala	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Masyarakat mengharapkan agar dapat dilakukan program Bedah rumah di Lingkungan Andalan Kelurahan Berngam, karena masih ada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni.	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Kiranya kepada seluruh bilal mayit yang ada saat ini dapat diberikan honor setiap bulannya mengingat bilal mayit yang ada saat ini tidak ada	Kec Binjai Barat, Kota Binjai	APBD Pemka/Kota	BPMD

		diberi honor, dan berdasarkan swadaya masyarakat.			
		1) Permohonan Bantuan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan khususnya masyarakat yang berada di Desa pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat.	Kec. Stabat, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan
		Dimohon kepada Pemerintah untuk pendataan BPJS agar pendataan tersebut di ambil dari Kepala Lingkungan, agar masyarakat dapat menggunakan BPJS tersebut.	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan
		Masih banyak warga masyarakat yang tidak mendapatkan formulir serta informasi mengenai Kartu Sehat, Kartu Pintar, Bantuan Langsung Masyarakat dan BPJS. Khusus mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT), agar pihak Badan Pusat Statistik dapat mendata ulang lagi masyarakat miskin, karena pembagian BLT selama ini dirasakan masih tidak tepat sasaran.	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan
		Keluhan Masyarakat Kecamatan Sei Lapan mengenai pengurusan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sangat memberatkan masyarakat, contohnya seluruh keluarga harus mendaftar sebagai Anggota BPJS, apabila ada 1 (satu) orang saja anggota keluarga yang tidak diurus, maka pengurusan BPJS akan ditolak pihak BPJS, sedangkan kondisi perekonomian masyarakat sangat	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan

		memprihatinkan, sehingga tidak mampu untuk mendaftarkan seluruh keluarganya ke BPJS. Masyarakat mengharapkan agar Pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan BPJS tersebut.			
		Para Kader Posyandu yang ada di Desa Kebun Kelapa juga mengeluhkan kalau selama ini mereka belum juga mendapat tunjangan/honor sebagai kader posyandu. Hal ini dirasa perlu untuk meningkatkan semangat kerja mereka dan mengingat banyak kader yang harus memikirkan pendapatan sementara tugas sebagai kader jadi terbengkalai.	Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan
		Sama juga halnya dengan masyarakat Kabupaten Langkat, Masyarakat miskin Kota Binjai juga mengeluhkan susahny mengurus untuk mendapatkan Kartu BPJS, dikarenakan harus semua anggota keluarga yang masuk BPJS.	Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan
		Keluhan masyarakat di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai hampir sama mengenai pengurusan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sangat memberatkan masyarakat, seperti diwajibkan untuk satu keluarga harus mendaftar sebagai Anggota BPJS, dan apabila ada satu orang saja anggota keluarga yang tidak diurus menjadi Anggota BPJS, maka pengurusan BPJS akan ditolak pihak BPJS. Masyarakat mengharapkan agar Pemerintah dapat memberikan kemudahan	Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan

		dalam pengurusan BPJS tersebut.			
		Masih minimnya fasilitas pendidikan yang ada di daerah ini, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih rendah. Hal ini disebabkan karena jumlah sekolah yang ada sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat menambah ruang kelas baru atau membangun sekolah-sekolah baru khususnya di Kec. Stabat	Kecamatan Stabat, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Para Guru-Guru di daerah ini sangat mengharapkan bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar kiranya dapat memberikan Beasiswa bagi guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, serta tunjangan bagi para guru-guru, mereka pernah mendapatkan tunjangan, akan tetapi saat ini sudah tidak ada lagi, para guru guru sangat mengharapkan agar bantuan tersebut dilanjutkan.	Kecamatan Stabat, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap penyaluran dana BOS yang selama ini penyalurannya dirasakan masih tersendat-sendat.	Kecamatan Stabat, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Guru guru di Desa Jaring Halus sangat mengharapkan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar kiranya dapat memberikan bantuan berupa transportasi bot, agar para guru guru tidak tergantung kepada bot sewa yang sudah ditentukan jadwalnya.	Kecamatan Stabat, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan

		Sedangkan jadwal rapat dan kegiatan sekolah lainnya terlalu padat, sedangkan guru guru tidak dapat berangkat karena jadwal transportasi bot tidak ada pada jam tersebut.			
		Masyarakat meminta kepada Pemerintah agar meningkatkan mutu pendidikan dengan membenahi dan memberikan fasilitas PAUD, karena di Kecamatan tersebut masih minim fasilitas PAUD.	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Bantuan Kesejahteraan Guru Ngaji dan Bantuan Kesejahteraan Guru Mingguan lokasi Desa Namo Mbelin	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Pembuatan pagar SD 056594 Menjahong lokasi Dsn VI Menjahong B Desa Raja Tengah	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Penambahan Guru SD lokasi Desa Suka Damai	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Rehab Madhrasah Diniyah uk. 6 m x 18 m lokasi Dsn I Sukaranda Desa Perk. Bekiun	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 057739 sebanyak 4 Unit lokasi Pondok Batu Desa Parit Bindu	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Rehab Berat WC/Kamar mandi SD Negeri 053962 lokasi Dsn Buluh Duri Desa Bekiung	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Rehab Lantai PAUD lokasi Dsn Besadi Desa Besadi	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Pengadaan Guru SD 056595 sebanyak 3 orang lokasi Dusun II Mejuah – Juah Desa Garunggang	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Pembangunan PAUD sebanyak 11 unit lokasi Desa Namo Mbelin	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Pembuatan Kantor Kepala Sekolah SD 050606	Kecamatan Kuala,	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan

		lokasi Desa Parit Bindu	Kab. Langkat		
		Mohon Bantuan Perehapan Bangunan / Rehap Berat SD 054912 Desa Kwala Besilam, Kecamatan Padang Tualang, sebanyak 3 kelas ruang belajar dan 1 ruang guru. Masyarakat sangat mengharapkan kiranya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat membantu perehapan ruang kelas tersebut.	Kecamatan Padang Tualang, Kab. Langkat	APBD Prov	Dinas Pendidikan
		SD Negeri Pasar Rodi saat ini bila hujan turun sering tergenang air (banjir). Hal ini diakibatkan adanya pembuatan gorong-gorong di Jalan Provinsi. Masyarakat telah melaporkan hal tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum, namun sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya. Untuk ini mohon perhatian pemerintah terhadap hal tersebut.	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Mengenai uang sertifikasi Guru-guru yang berdomisili di Kecamatan Sei Lapan agar dapat diberikan tepat waktu, yang selama ini terjadi pemberian uang sertifikasi selalu terlambat sampai 6 bulan. Diharapkan kepada Pemerintah agar untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang agar uang sertifikasi guru-guru diberikan tepat waktu.	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Usulan – usulan Rehab Sekolah di Kecamatan Selapian sebagai berikut :	Kecamatan Selapian, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Ø SD Negeri 050631 Tanjung Keliling	Kecamatan Kuala,	APBN	Dinas Pendidikan

			Kab. Langkat		
		- Perehapan 1 Ruang Kelas		APBN	Dinas Pendidikan
		- Pembangunan 1 Ruang Perpustakaan		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 050632 Tanjung Keliling	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Perehapan Ruang Kelas 6 Lokal Tambah 1 Kantor		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 058342 Uruk Gambir	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Penambahan Pembangunan 3 Ruang Kelas		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 054893 Ringin Sari	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Perehapan Ruang Kelas 3 Lokal Tambah 1 Kantor		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 057189 Batu Guru Naman Jahe	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Pembangunan 1 Ruang Perpustakaan		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 053959 Pondok 8	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Perehapan Ruang Belajar 3 Lokal Tambah 1 Kantor		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 054894 Lau Tepu	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Pembangunan Ruang Perpustakaan		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 056427 Adin Tengah	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Perehapan Ruang Belajar 3 Lokal		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 053961 Perk. Tambunan	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan

		- Pembangunan Ruang Perpustakaan		APBN	Dinas Pendidikan
		Ø SD Negeri 056590 Ujung Bandar	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Penambahan Ruang Kelas 1 Lokal		APBN	Dinas Pendidikan
		Ø SD Negeri 050630 Tanjung Langkat	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Pembangunan Perpustakaan		APBN	Dinas Pendidikan
		Ø SD Negeri 050628 Tanjung Langkat	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Rehab 3 Ruang Kelas		APBN	Dinas Pendidikan
		Usulan dari Guru-guru honor di Dusun II Pondok Besar yang sudah lama mengajar baik di tingkat PAUD,SD, SMP dan SMA, memohon melalui kegiatan Reses tentang kejelasan nasib mereka.	Kecamatan Sei Binge, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Warga Masyarakat dengan Kegiatan Reses ini mengadukan adanya lahan yang sudah di hibahkan akan di ambil kembali oleh pihak PTPN II, yang mana lahan tersebut selama ini sudah menjadi lahan pengembangan SMAN I Padang Tualang. Yang beralamat di Dusun Sido Dadi Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.	Kecamatan Batang Serangan, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Melalui kegiatan Reses ini Guru-guru honor yang mengajar PAUD di Kecamatan Batang Serangan ini belum menerima honor tahun 2014, yang biasanya dibayarkan / Desember setiap tahunnya, dan mereka juga mempertanyakan tentang kejelasan status dan nasib mereka.	Kecamatan Batang Serangan, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan

		Warga kampung lama juga mengeluhkan bahwa dalam hal penerimaan murid baru, Sekolah Negeri selalu memaksakan menerima siswa melebihi kapasitas kelas hal ini berhubungan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah , sehingga di pertengahan jalan banyak siswa yang di berhentikan dengan berbagai alasan sehingga berpindah ke sekolah swasta, hal ini menjadi gambaran yang buruk bagi kebanyakan orang bahwa sekolah swasta adalah sekolah buangan dari negeri. Untuk itu diharapkan agar sekolah negeri khususnya yang ada di kecamatan Besitang , dapat diberi batasan yang jelas mengenai kuota penerimaan murid baru disetiap tahun ajaran.	Kecamatan Besitang , Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Dalam Hal Pendidikan Masyarakat Tanjung Ibus kecamatan Secanggang megharapkan agar di tempat mereka didirikan sekolah menengah Kejuruan (SMK) mengingat sampai hari ini belum ada SMK di desa Mereka, sehingga sangat menyulitkan bagi anak-anak mereka yang ingin bersekolah di SMK.	Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Para Guru-Guru Swasta di daerah ini sangat mengharapkan bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar kiranya dapat memberikan bantuan tunjangan bagi para guru-guru, mereka pernah mendapatkan tunjangan, akan tetapi saat ini sudah tidak ada lagi, para guru guru sangat mengharapkan agar bantuan tersebut	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBN	Dinas Pendidikan

		dilanjutkan dan jangan dihentikan.			
		Memohon kepada Pemerintah agar dapat membantu pembangunan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang saat ini masih kekurangan lokal (kelas) jika dibandingkan dengan keadaan jumlah murid yang ada saat ini masih belum memadai. Dan dalam hal keamanan bagi anak-anak PAUD kiranya dapat juga diberi bantuan untuk pembangunan pagar sekolah yang lokasinya tepat berada dipinggir jalan umum.	Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai	APBN	Dinas Pendidikan
		Memohon kepada Pemerintah kiranya kepada guru-guru PAUD diberikan bantuan Insentif.	Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai	APBN	Dinas Pendidikan
		Memohon kepada Pemerintah untuk dapat memberikan bantuan kesejahteraan kepada guru-guru PAUD yang saat ini honorariumnya hasil dari swadaya PAUD dan dibawah UMK bagi tenaga guru.	Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai	APBN	Dinas Pendidikan
		Masyarakat juga menyampaikan saran mengenai penyelenggaraan Biaya Operasional Sekolah (BOS) agar dalam penyaluran dan penggunaannya sesuai dengan program yang ditentukan oleh Pemerintah.	Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai	APBN	Dinas Pendidikan
		Memohon kepada Pemerintah Pusat agar kiranya dapat menambah lapangan pekerjaan bagi anak-anak kami yang sudah tidak dapat melanjutkan pendidikan lagi dan butuh lapangan pekerjaan bagi mereka.	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemkot	Disnaker

		Mohon kepada Pemerintah untuk dapat membantu mengadakan/ menciptakan sarana olah raga khususnya Lapangan Bola Kaki dan pengadaan alat musik gamelan untuk mengiringi kegiatan seni bela diri (pencak silat) yang saat ini masih dilestarikan dan dimainkan oleh anak-anak remaja, keadaanya masih belum memadai.	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemkot	Dispora
		Masyarakat di daerah Kecamatan Stabat sangat resah, karena peredaran narkoba yang semakin meraja lela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.	Kab. Langkat	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Masyarakat di daerah Kecamatan Wampu sangat resah, karena peredaran narkoba yang semakin meraja lela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.	Kab. Langkat	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Semakin maraknya perjudian di Desa Empus. Dimohon kepada aparat Kepolisian dan penegak hukum untuk dapat melakukan pemberantasan perjudian yang telah merajalela di Pedesaan.	Kab. Langkat	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Masyarakat di Kecamatan Selesai memohon	Kab. Langkat	APBD Kab/Kota	Kesbangpol

		kepada Pemerintah dan pihak kepolisian untuk menindak lanjuti masalah Narkoba yang saat ini sangat meresahkan masyarakat dan merusak generasi-generasi muda.			
		Masyarakat di daerah Kecamatan Kota Binjai sangat resah, karena peredaran narkoba yang semakin merajalela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.	Kota Binjai	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Masalah narkoba dan judi yang semakin hari semakin marak keberadaannya, sedang aparat sudah berupaya membasminya namun hasilnya belum optimal dan narkoba masih beredar dikalangan remaja/anak-anak.	Kota Binjai	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Warga Masyarakat dengan Kegiatan Reses ini mengadukan adanya lahan yang sudah di hibahkan akan di ambil kembali oleh pihak PTPN II, yang mana lahan tersebut selama ini sudah menjadi lahan pengembangan SMAN I Padang Tualang. Yang beralamat di Dusun Sido Dadi Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat	Kab. Langkat	APBN	Ro. PEMUM
		Masyarakat Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang memohon agar dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang terletak di desa Sikundur menurut mereka adalah tanah leluhur mereka yang luasnya + 3000 Ha, yang	Kab. Langkat	APBN	Ro. PEMUM

		selama ini di akui oleh PNGL sebagai tanah milik mereka. Hal ini di anggap penting karena mereka adalah petani dan butuh lahan untuk pertanian dan tempat tinggal mereka.			
		Warga Kecamatan Besitang mempertanyakan masalah pemekaran Teluk Aru yang sampai saat ini belum ada kejelasannya, mereka meminta agar dapat membantu pemekaran Teluk Aru bisa terwujud.	Kab. Langkat	APBN	Ro. PEMUM
		Masyarakat memohon penerbitan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan jangan dipersulit, dan Akte Nikah Penduduk hampir seluruhnya hanyut terkena banjir.	Kab. Langkat	APBD PEMKAB/KOTA	Ro. PEMUM
		Mohon bantuan Kredit untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) bagi masyarakat Desa Paya Perupuk dalam rangka pengembangan Usaha pembuatan dodol.	Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan modal usaha (UKM) kepada para ibu-ibu agar dapat menambah penghasilan keluarga dan dapat meringankan beban keluarga.	Kec. Stabat, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Permohonan bantuan kepada kelompok-kelompok Tani yang berda di Desa Pantai Gemi dalam rangka budidaya ikan air tawar.	Kec. Stabat, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Permohonan Pupuk Bersubsidi bagi kelompok tani yang berda di Kec. Hinai Kab. Langkat.	Kec. Hinai, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian

		Mohon Bantuan kepada masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) Khususnya yang berada di Kec. Hinai Kab. Langkat	Kec. Hinai, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan modal usaha (UKM) kepada para ibu-ibu agar dapat menambah penghasilan keluarga dan dapat meringankan beban keluarga.	Kec. Wampu, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Menurunnya harga pertanian, seperti kelapa sawit dan juga harga karet yang semakin menurun, sementara Bahan Bakar Minyak harganya naik, hal ini sungguh tidak adil bagi petani. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar kiranya dapat menyelesaikan masalah ini.	Kec. Wampu, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian / perkebunan
		Untuk menambah penghasilan masyarakat, mereka sangat membutuhkan bantuan hewan ternak seperti : kambing dan sapi dari pemerintah, dengan harapan kiranya bantuan hewan ternak tersebut nantinya dapat lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat.	Kec. Wampu, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Pengadaan Hand Tractor Mini untuk Kelompok Tani sebanyak 4 unit lokasi Desa Parit Bindu	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Bantuan Pengadaan Bibit Kako sebanyak 2000 Batang lokasi Dsn Buluh Duri Desa Bekiung	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Pengadaan Hand Tractor sebanyak 6 unit lokasi Dsn I,III,IV Desa Baja Tengah	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Pengadaan Bibit Sawit sebanyak 5000 batang	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov	dinas perkebunan

		lokasi Dsn II Mejuah-juah Desa Garunggang	Langkat	(SKPD)Teknis	
		Bantuan Ternak Itik sebanyak 500 ekor lokasi Lingk V Bela Rakyat Kel. Bela Rakyat	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Ternak Sapi untuk 12 Kelompok lokasi Desa Namu Mbelin	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan Ternak Lembu sebanyak 1 Unit lokasi Desa Blankahan	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Ternak Lembu, Kambing sebanyak 60 ekor lokasi Dsn I Sukaraja Desa Sei Penjara	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Ternak Kerbau sebanyak 10 ekor, Lembu sebanyak 25 ekor, kambing sebanyak 90 ekor lokasi Desa Beruam	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Pengadaan Hand Traktor sebanyak 1 unit lokasi Desa Besadi	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Bantuan Ternak Lembu sebanyak 50 ekor lokasi Dsn Bangun Rejo Desa Dalam Naman	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Mesin Jahit untuk ibu – ibu PKK lokasi Desa Balai Kasih	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 30 Ekor Lokasi Dsni s/d VI Desa Perk. Bekiun	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Pengadaan Ternak Lembu sebanyak 15ekor lokasi Lingk III Sei Tembo Kel. Pekan Kuala	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Pengadaan Hand Tracktor 2 unit untuk kelompok tani lokasi Dsn Pembangunan Desa Bekiung	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Pengadaan Ternak Lembu bagi Kelompok peternakan sebanyak 6 ekor lokasi Desa Parit Bindu	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Ikan Lele Jumbo, ikan Nila, Ikan Gurame untuk 12 Kelompok Lokasi Desa Namu Mbelin	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan

		Pengadaan Bibit Karet sebanyak 10.000 Batang lokais Desa Garunggang	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Bantuan Bibit Ikan Lele sebanyak 200 ekor, ikan Nila sebanyak 20.000 ekor, Gurami sebanyak 20.000 ekor lokasi Desa Beruam	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Bantuan Simpan Pinjam ibu – ibu PKK lokasi Dsn Petak II Desa Sido Makmur	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan Bibit Ternak Kambing sebanyak 30 ekor lokasi Dsn I s/d Dsn IV Desa Perk. Bekiun	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Simpan Pinjam untuk ibu – ibu PKK lokasi Desa Balai Kasih	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan Bibit ikan Nila 20.000 ekor lokasi Dsn III Raja Tengah Hilir Desa Raja Tengah	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Bantuan Modal Usaha Simpan Pinjam berjumlah 50 org lokasi Dsn II Lau Kersik Desa Dalan Naman	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan Pengadaan Mesin Perontok Gabah sebanyak 2 unit untuk Kelompok Tani lokasi Dsn Pembangunan Desa Bekiung	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Pengadaan Bibit Ikan Lele sebanyak 10.000 ekor lokasi Lingk III Sei Tembo Kel. Pekan Kuala	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Bantuan Modal Usaha (UKM) untuk 30 kelompok lokasi Dsn I s/d IV Desa Perk. Bekiun	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Pengadaan Mesin Pengolahan Makanan Ternak sebanyak 2 unit lokasi Dsn I Sukaraja Desa Sei Penjara	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Pelatihan Ketrampilan Bordir Menjahit lokasi Desa Parit Bindu	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan Bibit Ikan sebanyak 50.000 ekor lokasi Dsn I Dalan Naman Desa Dalan Naman	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Bantuan Modal Simpan Pinjam sebanyak 100 org lokasi Desa Beruam	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi

		Bantuan Ternak Lembu sebanyak 50 ekor lokasi Dsn IV S.Rejo Desa Suka Damai	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Pelatihan Ketrampilan Bordir Menjahit lokasi Desa Balai Kasih	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan Pengadaan Bibit Ikan Lele sebanyak 20.000 ekor lokasi Desa Garunggang	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Untuk menambah penghasilan masyarakat, mereka sangat membutuhkan bantuan hewan ternak seperti : kambing dan sapi, dari pemerintah, dengan harapan kiranya bantuan hewan ternak tersebut nantinya dapat lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat.	Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Masyarakat/warga di Desa Empus kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi (langka) dan harus membeli pupuk dengan harga yang terbilang cukup mahal. Untuk hal ini masyarakat/warga memohon pengadaan pupuk bersubsidi diperbanyak karena pupuk tersebut sangat dibutuhkan warga yang sebahagian besar merupakan petani karet dan sawit.	Kec. Bahorok, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian / perkebunan
		Masyarakat mengharapkan kalau sudah tidak bisa lagi membudidayakan kepiting Soka, maka Pemerintah harus dapat mencari solusi untuk menggantikan budidaya kepiting Soka tersebut, salah satunya seperti memberikan bantuan bibit undang panani.	Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Di Kecamatan Sei Lapan sudah banyak hutan mangrove yang diganti dengan Pohon Sawit dan	Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan/perikanan

		limbah Sawit pun di buang ke laut, sehingga tambak-tambak ikan pun rusak dan ikannya banyak yang mati dan merugikan masyarakat. Masyarakat mengharapkan agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti.			
		Melalui kegiatan Reses ini warga Dusun II Pondok Besar yang mayoritas sebagai Petani juga mengharapkan adanya bantuan penyuluhan-penyuluhan/Pembinaan terhadap para Pertanian, juga bantuan-bantuan pupuk, bibit-bibit unggul dan alat-alat Pertanian yang memungkinkan dapat meningkatkan hasil panen, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup bagi para Petani.	Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Melalui Kegiatan Reses ini warga Dusun II Pondok Besar juga berharap adanya pengawasan Pemerintah tentang pupuk yang bersubsidi yang beralih ke perkebunan-perkebunan.	Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Warga Masyarakat juga berharap agar cepat teratasi tentang kelangkaan gas elpiji 3 kg.		APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Melalui kegiatan Reses ini, Kelompok Tani sangat membutuhkan adanya bantuan penyuluhan-penyuluhan/pembinaan terhadap para petani, juga bantuan-bantuan pupuk, bibit-bibit unggul dan alat-alat pertanian yang memungkinkan dapat meningkatkan hasil panen, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani.	Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan / pertanian
		Dan dari sektor Peternakan, kelompok-kelompok tani ternak sangat mengharapkan	Kec. Batang Serangan, Kab.	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan/kelautan

		perhatian/dukungan juga bantuan berupa bibit-bibit sapi, kambing unggulan dan bibit – bibit ikan.	Langkat		
		Dimohon kepada Pemerintah agar harga karet tidak dihargai rendah Karena pupuk subsidi yang diharapkan masyarakat hilang dari peredaran. Selain itu harga pupuk non subsidi sangat tinggi. Jadi petani karet dan petani lainnya mengharapkan agar pupuk subsidi sampai di desa mereka.	Kec. Selesai, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Warga Kampung lama yang berusaha di bidang peternakan memohon agar dapat dibantu dalam hal bibit lembu atau domba untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian mereka.	Kec. Besitang, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Selain Bertani sebahagian warga Desa Kebun Kelapa adalah Nelayan yang berjumlah ± 60 orang, masing-masing memiliki kapal/sampan untuk menangkap ikan, tetapi sebagian diantaranya sudah tidak dapat melakukan aktivitasnya karena sampan/kapal mereka sudah rusak dan tidak layak pakai. Melalui Reses ini mereka memohon dapat menampung keluhan mereka agar dapat di bantu untuk memperoleh bantuan pengadaan kapal serta alat penangkap ikan demi kelangsungan kehidupan perekonomian mereka.	Kec. Secanggang, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Warga Desa Kebun Kelapa yang beternak ikan dalam keramba menempatkan kerambanya dalam irigasi yang ada di desa mereka, tetapi	Kec. Secanggang, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan

		mereka selalu kesulitan dalam pengadaan bibit ikan, untuk itu mereka mohon agar dibantu dalam pengadaan bibit ikan lele ataupun ikan nila.			
		Memohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pusat untuk dapat memantau penyaluran gas elpiji yang saat keberadaannya sudah sangat menguatirkan, apabila pada saat mobil layanan operasional elpiji menyalurkan melalui distributor yang ada di salah satu distributor di lain Kelurahan, apabila warga Kelurahan lain akan membeli, dinyatakan bahwa elpiji sudah habis. Jadi memohon kepada Pemerintah agar dapat memantau penyaluran elpiji yang 3 Kg.	Kec. Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Masyarakat Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota mengharapkan kepada Pemerintah Kota Binjai maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan gas 3 Kg, yang akhir-akhir ini sangat susah untuk mendapatkannya.	Kec. Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Di lingkungan Andalan Kelurahan Berngam ini belum ada Koperasi, masyarakat mengharapkan agar di Lingkungan Andalan ini didirikan Koperasi, sehingga masyarakat yang selama ini masih meminjam uang dari rentenir dapat beralih ke Koperasi.	Kec. Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Warga Cengkeh Turi terutama petani memohon agar dapat diberi bantuan mesin penanam padi,	Kec. Binjai Utara, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian

		hal ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan mereka bertanam padi mengingat areal pertanian di tempat mereka sangat luas. Mereka juga memohon agar dimudahkan dalam memperoleh bibit padi dan pupuk.			
		Masyarakat Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota mengharapkan kepada Pemerintah Kota Binjai maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan gas 3 Kg, yang akhir-akhir ini sangat susah untuk mendapatkannya.	Kec. Binjai Utara, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Di lingkungan Andalan Kelurahan Bergam ini belum ada Koperasi, masyarakat mengharapkan agar di Lingkungan Andalan ini didirikan Koperasi, sehingga masyarakat yang selama ini masih meminjam uang dari rentenir dapat beralih ke Koperasi.	Kec. Binjai Utara, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Permohonan Bantuan Dana Kredit UKM untuk pengembangan Wira Usaha bagi masyarakat kurang mampu untuk menunjang tarap perekonomian yang lebih baik.	Kec. Binjai Utara, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Dari pertemuan dengan masyarakat/warga Desa Puji Dadi, para Kelompok Tani di desa tersebut kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi (langka) dan harus membeli pupuk dengan harga yang terbilang cukup mahal, jadi masyarakat/warga memohon pengadaan pupuk bersubsidi di perbanyak.	Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan/ pertanian
		Melalui Reses ini warga Desa Puji Dadi, para Kelompok Ternak memohon kepada pemerintah	Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan

		untuk pengadaan bantuan bibit – bibit ternak dikarenakan di desa tersebut susah untuk mendapatkan bibit – bibit ternak yang murah dan bagus (berkualitas).			
		Melalui Pertemuan Reses ini warga masyarakat Desa Karang Gading, Khususnya ibu-ibu memohon agar ada solusi tentang kelangkaan gas 3 kg dan berharap agar di tambah kuotanya.	Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Masyarakat Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Kota khususnya, umumnya Kota Binjai akhir-akhir ini susah sekali (Langka) mendapatkan Gas LPG 3 Kg, masyarakat mengharapkan kepada Pemerintah Kota Binjai dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat mencari solusi-solusi sehingga gas 3 Kg di Kota Binjai tidak langka, dan masyarakat tidak susah mencari Gas 3 Kg tersebut.	Kec. Binjai Timur, Kota Binjai		biro perekonomian / distamben
		Memohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pusat untuk dapat memantau penyaluran gas elpiji yang saat keberadaannya sudah sangat menguatirkan, apabila pada saat mobil layanan operasional elpiji menyalurkan melalui distributor yang ada di salah satu distributor di lain Kelurahan, apabila warga Kelurahan lain akan membeli, dinyatakan bahwa elpiji sudah habis. Jadi memohon kepada Pemerintah agar dapat memantau penyaluran elpiji yang 3 Kg.	Kec. Binjai Timur, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Mohon kiranya dapat dipermudah untuk mendapatkan pinjaman modal usaha (UKM) bagi	Kec. Binjai Timur, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi

		masyarakat yang memiliki usaha home industry (pedagang bakso dan pembuatan brose baju berbantuk suvenir-suvenir).			
		Masyarakat perlu bantuan dana tambahan untuk menghidupkan perekonomian rakyat terutama bagi usaha yang dikelola perorangan (home industri).	Kec. Binjai Barat, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perindag / biro perekonomian
		Pembangunan sarana air bersih	Desa Kwala Besilam kec. Padang Taulang	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penyediaan tempat sampah	Kec. Bahorok Kab. Langkat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Revitalisasi hutan Mangrove	Kec. Sei Lapan Kab. Langkat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Suka Jaya kec. Sei Lapan kab. Langkat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Mekar Maksur kec. Sei Lapan kab. Langkat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana air bersih	Desa Kampung Lama Kec. Besitang kab. Langkat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Kec. Binjai Kota	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		a) Pembangunan drainase berupa parit b) Penyediaan air bersih	Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara		Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembuatan leaning drainase parit beton	Kec. Binjai Kab.	APBN/APBD Provsu	Dinas Penataan Ruang

		sepanjang jalan T. Amir Hamzah	Langkat	(BKP)	dan Permukiman
		Peningkatan drainase dari Pangkalan ke Tangkahan	Kec. Batang Serangan Kab. Langkat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan drainase jalan S.M. Raja	Kec. Binjai Utara Kota Binjai	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan drainase	Kec. Binjai Barat Kota Binjai	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Permohonan Bantuan pembuatan untuk titi jalan terusan Desa lalang sepanjang 4 m x 50 m di Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.	Kecamatan Tanjung Pura, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan Jembatan dan Pengaspalan jembatan penghubung yang berada di jalan Medan-Tanjung yang terletak berada di kota Tanjung Pura.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	
		Perbaikan Infrastruktur dari Kecamatan Batang Serangan menuju kota, sangat jelek dan rusak sehingga sudah sangat sulit untuk dilalui.	Kecamatan Tanjung Pura, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan sepanjang 7 Km dari simpang ladang sampai dengan Desa Muka Paya Kec. Hinai.	Kecamatan Hinai, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan-jalan desa menuju ke kota kabupaten untuk aktifitas masyarakat	Kecamatan Wampu, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan infrastruktur jalan yang rusak serta perbaikan dan pengaspalan di Kec. Kuala Kel. Bela Rakyat.	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Usulan pengaspalan jalan tanah Kecamatan Kuala	Kecamatan Kuala,	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		sepanjang 500 m x 3 m	Kab. Langkat	Kab.Kota	
		Lanjutan Pengaspalan dengan Hotmix dari Simp. Lima menuju Simp. Inpres 1500 m x 4 m lokasi di Lingk III Tumakninah dan Lingk V Inpres Kel. Bela Rakyat	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Lanjutan Pengaspalan dengan Lapen dari Dsn III menuju Dsn IV Sep 2500 m x 3 m lokasi di Dsn III s/d Dsn IV Desa parit Bindu	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Lanjutan Pengaspalan Jalan sep 2000 m x 3 m lokasi di Lingk I Sidodadi Kel. Pekan Kuala	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan dengan Lapen sep 1000 m x 4 m lokasi Dsn VII Siberaya Menuju Dsn VI Bunga Rinte Desa Garunggang	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	
		Rehab Berat Pengaspalan Jalan sep 1000 m x 4 m lokasi Dsn I Besadi menuju Dsn IV Lau Mentar Desa Besadi	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan Jalan Pamah sep 500 m x 3 m lokasi Desa Raja Tengah	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Lanjutan Pengaspalan dengan Hotmix sep 1000 m x 3 m lokasi Dsn II Mekar Jaya Desa Suka Damai	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan Lapen sep 400 m x 3 m gang cahaya lokasi Desa balai kasih	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Lanjutan Pengaspalan dengan Hotmix sep 1600 m x 4 m lokasi Sp Buluh Duri menuju Dsn Tanjung Balai Desa Beruam	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan Jalan dengan lapen 1500 m x 3 m lokasi Dsn Handayani Desa Sido Makmur	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov dan APBD Kota Medan	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan dengan Hotmix Lingkaran Bundaran Tugu Pijer Podi dan jalan menuju Titi Panjang sep 300 m x 3 m lokasi Desa Dalam Naman	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan dengan Hotmix sep 1500 m lokasi	Kecamatan Kuala,	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

	Dsn Inpres Desa Sido Makmur	Kab. Langkat	Kab.Kota	
	Pengaspalan Jalan dengan Lapen Jalan Lingk IV Rel sep 1200m x 3 m lokasi Lingk IV Rel Kel Bela Rakyat	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Pengaspalan dengan Hotmix sep 1500 m x 4 m lokasi Dsn II Sipirak menuju Dsn I Besadi Desa Besadi	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Pengaspalan dengan Hotmix Simpang SMU I Negeri Kuala sampai Pasar Lori uk 1000 m x 4 m lokasi Kelurahan Pekan Kuala	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Pembuatan Jembatan Sungai Menjahong sep 15 m x 3 m lokasi Dsn I Nangka Lima ke Dsn Menjahong Desa Raja Tengah	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Pembangnan Jembatan sungai Begumit yang menghubungkan Dsn Dalam Naman dengan Lingk I Sidodadi Kel. Pecan Kuala dan Desa Sei Penjara dan Desa Blankahan sep 75 m lokasi Desa Dalam Naman	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Pengaspalan dengan Hotmix sep 500 m x 4 m lokasi Dsn I Besadi menuju Dsn V Duren Mulo Desa Besadi	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Pengaspalan jalan sep 3000 m x 3,5 m sampai Desa Balai Kasih lokasi Dsn I Dalam Naman Desa Dalam Naman	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Rehab Jembatan sep 15 m x 3m lokasi Dsn I Nangka Lima ke Dsn Menjahong Desa Raja Tengah	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Pembuatan Jembatan uk 5m x 4 m sebanyak 1 unit lokasi Lingk I Sidodadi Kel. Pekan Kuala	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Pengerasan Jalan Dsn II s/d Dsn VIII sep 8000 m x 3 m lokasi Dsn II s/d Dsn VIII Desa Parit Bindu	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Pengaspalan Jalan Bakti ABRI sep 350 m x 3 m	Kecamatan Kuala,	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		lokasi Perbatasan Dsn I Nangka Lima dgn Dsn II Kp. Baru Desa Raja Tengah	Kab. Langkat	Kab.Kota	
		Pembuatan Jembatan uk 15 m x 5 m lokasi Dsn III Cinta Rakyat Desa Garunggang	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Titi Gantung sep 75 m lokasi Dsn I Dalam Naman Desa Dalam Naman	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaiki total Jembatan Penghubung Menuju Desa Bekiung sep 6 m x 4m lokasi Lingk VI Rel Kel. Bela Rakyat	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
					Dinas Bina Marga
		Perbaiki jalan Provinsi di Kecamatan Padang Tualang yang kondisinya saat ini sangat rusak parah.	Kecamatan Padang Tualang, Kab. Langkat	APBD Prov. SU	Dinas Bina Marga
					Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan Bulang Bakat sepanjang ± 16 Km dan lebar ± 8 m. Jalan ini melalui 4 (empat) Desa yang ada di Kecamatan Bahorok dan pembukaan destinasi wisata baru Bulang Bakat (Bukit Lawang – Batu Katak).	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaiki infrastuktur jalan menuju Bahorok saat ini sudah rusak berat	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaiki Jalan yang menghubungkan beberapa desa saat ini sudah rusak, antara lain jalan Desa Empus – Desa Batugajah sepanjang 3 Km.	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pelebaran Jalan Pekan Bahorok menuju Bukit Lawang	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan alternatif / tembus dari Kecamatan Pematang Jaya Kecamatan Sei Lapan sampai ke Perbatasan Provinsi Aceh	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan/perbaiki Jalan sepanjang 450	Kecamatan Sei	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		Meter di Lingkungan Pangkalan Berandan Timur Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan.	Lapan, Kab. Langkat	Kab.Kota	
		Perbaikan/Pengaspalan Jalan lintas Medan-Banda Aceh di perbatasan Kecamatan Berandan Barat dengan Kecamatan Besitang di depan Kantor Koramil Besitang	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan Jalan Lintas Pangkalan Susu sepanjang 8 Km dari Kota Berandan Barat ke Pangkalan Susu.	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan/perbaikan Jalan di Lingkungan Pangkalan Berandan Timur Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jembatan Dusun II Wonorejo Desa Lama Baru Bronjong Sungai Dusun IV.	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemeliharaan jalan wisata menuju Bahorok yang saat ini kondisinya sudah parah sepanjang 15 km yang merupakan jalan provinsi yang terletak di Kuala, Selapian dan menuju Bahorok.	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Provinsi	Dinas Bina Marga
		Pembuatan/penimbunan jalan lama Desa yang rusak akibat longsor sebagai jalan penghubung Masyarakat dari kampung tempel ke Dusun II (jalan usaha tani L 2M X 1000M) dan pembuatan turap sepanjang 15M	Kecamatan Sei Bingei, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan/pengaspalan jalan penghubung antar dusun yaitu Dusun Kloneng I s/d Dusun tahun XI sepanjang ± 1 km.	Kecamatan Batang Serangan , Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan baru jembatan yang menghubungkan Desa Selayang dengan Desa Perhiasan .	Kecamatan Selesai , Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		Perbaikan jalan dari Desa Kuala Air Hitam ke Pardanauli sepanjang ± 6 km, lebar 3 m.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Rabat Beton dan pembuatan Titi jalan Pelabuhan di lingkungan V Simpang Tiga sepanjang ± 175 m dan pengaspalan jalan Datok Johan Pahlawan menuju Lk.II Bukit Mas Pasar sepanjang 150 m.	Kecamatan Besitang , Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan utama desa yang merupakan poros jalan di mulai dari desa kampung dua menuju desa sei ular sepanjang ± 2600 m	Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan/perbaikan Jalan Payaloba menuju Binjai	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Provinsi	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan dari Simpang sampai ke Jalan Andalan 13 di Kelurahan Bergam		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan dan pengaspalan jalan perbatasan antara Kelurahan Jati Utomo dengan Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai.	Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Percepatan pembangunan Jalan TOL Medan-Binjai.	Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai	APBN	Dinas Bina Marga
		Pelebaran jalan yang ada di Kec. Binjai Barat	Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

*) Rekapitulasi Hasil Reses DPRD tahun 2014)

2.3. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.83.
Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas
Provinsi Sumatera Utara

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf	>	1. Realisasi peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan (guru, siswa, prasarana, sistem) yang menjabarkan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang masih terbatas. 3. Kapasitas lembaga pendidikan kejuruan/pelatihan keterampilan yang relatif rendah	1. Penguatan dan pengawasan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi dan berbasis lokal 2. Penerapan pendidikan berbasis karakter bagi pendidik dan peserta didik 3. Keberadaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai serta terjangkau sesuai kebutuhan di tiap jenjang pendidikan 4. Alokasi dana pendidikan yang terus meningkat untuk membiayai program dan kegiatan prioritas bidang pendidikan
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	>		
1.3.	Pendidikan dasar 9 tahun	>		
1.4.	Angka partisipasi sekolah	>		
1.5.	Angka partisipasi kasar	>		
1.6.	Angka partisipasi murni	>		
1.7.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	=		
1.8.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	=		
1.9.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	>		
1.10.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	<		
1.11.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	<		
1.12.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<		
1.13.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	<		
1.14.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	<		
1.15.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	<		
1.16.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	<		
1.17.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	<		
1.18.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	<		
1.19.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	<		
1.20.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	<		
1.21.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	>	<p>1. Derajat Kesehatan masih rendah yang ditunjukkan dengan masih tingginya Angka Kematian Bayi, Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang dan Angka Kematian Ibu melahirkan.</p> <p>2. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat</p>	<p>1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di seluruh bidang pelayanan</p> <p>2. Universal coverage pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesda dan Jampersal</p> <p>3. Kesejahteraan tenaga pelayan kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan terluar</p>
2.2.	Angka usia harapan hidup	<		
2.3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	>		
2.4.	Persentase balita gizi buruk	<		
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	<	<p>1. Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan pelabuhan,</p> <p>2. saluran irigasi/rawa, jaringan pengairan lainnya, air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai</p> <p>3. Ketersediaan pasokan energi terbarukan dan penggalan sumber energi baru</p> <p>4. Pemantapan dan efektifitas jalan raya (jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota).</p> <p>5. Realisasi pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan alokasi anggaran - Peningkatan SDM dan kelembagaan - Peningkatan peralatan - Meningkatkan fungsi jaringan irigasi pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi - Meningkatkan fungsi jaringan Rawa pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ normalisasi /rehabilitasi jaringan Rawa - Penanganan banjir akibat sudah berkurangnya hutan di daerah hulu sungai - Penyediaan sarana air baku sebagai kebutuhan dasar masyarakat seiring dengan peningkatan penduduk dan
3.2.	Rasio jaringan irigasi	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
3.3.	jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum		<p>jalan lingkar luar (<i>Outer Ring Road</i>) Danau Toba.</p> <p>6. Realisasi pembangunan jalan Tanjung Morawa-Saribudok-Tongging (Rawasaring).</p> <p>7. Realisasi pembangunan kawasan Mebidang-Ro</p>	terjadinya krisis air		
3.4.	persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	<				
3.5.	Panjang jalan dilalui Roda 4	<				
3.6.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	<				
3.7.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	<				
3.8.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	<				
4.	Perumahan/Permukiman					
4.1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	=				
5.	Perencanaan Pembangunan					
5.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	=				
5.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	=				
5.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	=				
5.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	=				

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Perhubungan			
6.1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	<	<ol style="list-style-type: none"> Status Pelabuhan Laut Pengumpan Regional belum sepenuhnya diserahkan oleh Kemenhub (Kepmenhub No.KM.313/2013) Kelengkapan dokumen pendukung (Kepmenhun No.1 /2006) Pengembangan Terminal Angkutan Jalan yang belum sesuai dengan arahan RTRW (batal dilaksanakan) Pembangunan fasilitas terminal VIP Bandara Kualanamu 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pemerintah Pusat - Kelengkapan dokumen perencanaan (FS/DED) oleh Pemda - Keseuaian usulan pembangunan dengan Dokumen RTRW - Pembebasan lahan
7.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak			
7.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	< 5,44	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya peran aktif perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta Minimnya Perlindungan hak perempuan dan anak di seluruh sektor 	<ol style="list-style-type: none"> Berjalanya fungsi kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di lembaga pemerintahan dan swasta Kerjasama yang terintegrasi aparat penegak hukum dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak
7.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	< 17 %		
7.3.	Rasio KDRT	< 20		
7.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	=		
7.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	56,10 %		
7.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	= 356		
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	= 3,0	<ol style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa terkendali Minimnya minat pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta aktif KB 	<ol style="list-style-type: none"> Slogan “Dua Anak Lebih Baik” menjadi keinginan setiap pasangan rumah tangga Dasar pemahaman yang kuat akan pentingnya ber-KB
12.2.	Rasio akseptor KB	= 51,7 %		
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	= 64,36 %		
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	= 34,14 %		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Sosial			
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	= 20	1. Keberadaan prasarana dan sarana panti pemerintah dan swasta yang memprihatinkan 2. Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial yang minim	1. Rehabilitasi rutin dan berkala panti pemerintah dan swasta 2. Penyandang masalah kesejahteraan sosial memperoleh pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan social	= 26		
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	= 26		
14	Ketenagakerjaan			
14.1.	Rasio penduduk yang bekerja	=	1. Rendahnya serapan angkatan kerja 2. Rendahnya kualitas tenaga kerja	1. Berjalannya fungsi BLK dalam menghasilkan tenaga kerja siap pakai berkualitas 2. Kerjasama yang sinergi dan terintegrasi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Lembaga Penyedia Tenaga Kerja
14.2.	rasio ketergantungan	=		
14.3.	Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)	<		
14.4.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	>		
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
15.1.	Persentase koperasi aktif	<	Produktifitas koperasi yang masih rendah serta sumber daya manusia belum mampu untuk aplikasi sistem informasi teknologi khususnya pasar	Pelatihan dan pembinaan Koperasi serta pemberian aksesibilitas permodalan yang murah antara lain dengan skim kredit bunga murah seperti dengan pendirian Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dengan konsep Gramming Bank
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM	<		
15.3.	Jumlah BPR/LKM	<		
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	<		
16	Penanaman Modal			
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	- Penerbitan izin usaha yang masih terpusat di Pusat, selain itu juga daya saing infrastruktur yang rendah - Promosi investasi yang masih rendah, serta permasalahan lokasi investasi yang belum jelas	- Perlu ada desentralisasi penerbitan izin investasi di daerah serta perbaikan fasilitas infrastruktur khususnya jalan dan energi - Promosi investasi harus terus ditingkatkan baik skala internasional
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	>		
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	<		
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)			
16.5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<		
16.6.	Angka kriminalitas			
16.7.	Jumlah demo	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.8.	Lama proses perijinan	<	(status lahan yang bermasalah)	maupun nasional, serta komitmen Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan UU tentang Pertanahan yang baru
16.9.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	<		
17.	Kebudayaan			
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	<	Pagelaran/pertunjukan seni budaya masih terbatas	Fasilitas pendukung gedung pertunjukan belum memadai
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	<		
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	<		
18.	Kepemudaan dan Olahraga			
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	<	1. Minimnya Data dan informasi organisasi pemuda dan olahraga 2. Minimnya prestasi olahraga disebabkan prasarana dan sarana olahraga yang tidak mendukung	1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi dan keberadaan organisasi pemuda dan olahraga serta prasarana dan sarana olahraga 2. Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang memadai guna memacu prestasi olahraga
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	<		
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	<		
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	<		
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	<		
18.6.	Lapangan olahraga	<		
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	<	1. Minimnya jumlah aparat keamanan swadaya masyarakat dan prasarana pendukung	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan tempat tinggal
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	<		
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	<	2. Minimnya jumlah aparat keamanan swadaya masyarakat dan prasarana	2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan tempat tinggal
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	<		
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.4.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	<	pendukung	tinggal
22	Ketahanan Pangan			
22.1.	Regulasi ketahanan pangan	=	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih berlanjutnya alih fungsi lahan sawah 2. Menurunnya kualitas kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan 3. Terbatasnya penyediaan air bagi budidaya beberapa komoditas pangan pokok dan strategis 4. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat) yang belum tepat 5. Terbatasnya fasilitas permodalan di pedesaan dan meningkatnya suku bunga Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang berdampak kepada terbatasnya penerapan teknologi 6. Belum optimalnya penannganan panen dan pasca panen yang berpotensi mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemanfaatan irigasi yang ada serta perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru dan penghentian alih fungsi lahan melalui penetapan aturan-aturan yang dilandasi hukum 2. Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan agar potensi lahan yang ada dapat dipertahankan terutama di wilayah usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan dengan menerapkan teknologi konservasi dan rehabilitasi 3. Peningkatan dan penanganan teknologi pasca panen untuk memperoleh efisiensi dan kualitas produksi pertanian 4. Penyediaan sarana produksi dan permodalan secara tepat sehingga bermanfaat untuk petani bagi meningkatkan produktivitas hasil 5. Penguatan kelembagaan dan system penyuluhan bagi para petani sehingga terjadi penerapan paket teknologi untuk meningkatkan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7. Cukup tingginya jumlah penduduk miskin yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya keterampilan, akses permodalan dan lapangan kerja	<p>produktivitas hasil</p> <p>6. Mengurangi rasio ketergantungan terhadap impor dan pemasukan bahan pangan dari provinsi lain guna kebutuhan masyarakat</p> <p>7. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat yang menghadapi masalah pangan</p>
22.1.	Ketersediaan pangan utama	=		
24	Statistik			
24.1.	Buku "Provinsi Dalam Angka"	=		
24.2.	Buku "PDRB kabupaten"	<		
25	Kearsipan		1. Minimnya keberadaan arsip daerah 2. Minimnya kemampuan SDM arsiparis	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya arsip daerah 2. Tata kelola arsip yang tertib dan teratur
25.1.	Pengelolaan arsip secara baku	=		
25.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	=		
26	Komunikasi dan Informatika		1. Prasarana dan sarana media informasi baik cetak maupun elektronik belum menjangkau seluruh lokasi di daerah	1. Informasi tersampaikan ke seluruh daerah melalui media cetak dan media elektronik
26.1.	Jumlah jaringan komunikasi	=		
26.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	=		
26.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	=		
26.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	=		
26.5.	Web site milik pemerintah daerah	=		
26.6.	Pameran/expo	=		
27.	Perpustakaan		1. Jumlah perpustakaan dan koleksi buku yang ada belum memenuhi kebutuhan masyarakat	1. Tersedianya perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai dengan kerjasama TP PKK melalui desa binaan
27.1.	Jumlah perpustakaan	<		
27.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	<		
27.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	<		
B.	URUSAN PILIHAN			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertanian			
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		1. Peningkatan produktivitas tidak dibarengi dengan peningkatan luas panen (untuk padi dan kedele) 2. Terjadinya konversi lahan pertanian produktif 3. Anomali iklim yang mempengaruhi pola tanam 4. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat) yang belum tepat	1. Revitalisasi pertanian mendukung peningkatan produksi dalam menjaga stabilitas pangan dan mensukseskan swasembada pangan 2. Peningkatan mekanisasi pertanian 3. Pengadaan bibit/benih unggul 4. Peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan jalan produksi, irigasi)
	1.1.1. Padi (Ton)	>		
	1.1.2. Jagung (Ton)	>		
	1.1.3. Kedele (Ton)	<		
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	>		
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	>		
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	>		
1.5.	Nilai tukar petani	>		
2.	Kehutanan			
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis			
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan			
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	<		
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	<	Penerapan prinsip eco environmental telah menjadi rujukan untuk perijinan tambang	Pembuatan Perda Larangan bagi para PETI untuk beroperasi serta adanya zonasi bagi operasional Legal yang diperbolehkan dan dimasukkan dalam RTRWP/RTRWK
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	<		
4.	Pariwisata			
4.1.	Kunjungan wisata	<	1. Infrastruktur belum memadai menuju destinasi 2. Destinasi wisata masih monoton	Pembangunan/perbaikan jalan menuju objek wisata ditingkatkan
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	>		
5.	Kelautan dan Perikanan			
5.1.	Produksi perikanan (ton)	<	1. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum sepenuhnya	1. Pengembangan produksi perikanan budidaya untuk konsumsi dalam
5.2.	Konsumsi ikan/kapita/thn	<		
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	Tidak ada data		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Tidak ada data	<p>dikelola secara efisien dengan penerapan teknologi maju dengan budaya bisnis.</p> <p>2. Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang belum merata di seluruh Sumatera Utara, khususnya perikanan tangkap.</p> <p>3. Terjadinya cara-cara pemanfaatan sumberdaya perikanan yang tidak bertanggungjawab.</p> <p>4. Terjadinya pencemaran perairan umum dan perairan pantai akibat limbah industri dan rumah tangga.</p> <p>5. dukungan prasarana terhadap pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan dibandingkan dengan potensi perikanan yang tersedia</p> <p>6. Jumlah induk unggul untuk kegiatan pembenihan masih sangat terbatas</p> <p>7. Mutu hasil perikanan pada tahap pra panen belum sepenuhnya dapat dikendalikan sesuai dengan standar negara tujuan ekspor</p>	<p>negeri dan ekspor di kawasan budidaya air tawar,air payau/tambak dan air laut</p> <p>2. Pengadaan kapal dan alat penangkap ikan</p> <p>3. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana budidaya melalui pengadaan calon induk unggul dan pengadaan mesin pellet</p> <p>4. Identifikasi potensi dan pemetaan pulau di Sumatera Utara</p> <p>5. Pengembangan kluster industri pengolahan hasil perikanan</p>

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Perdagangan			
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	>		
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	>		
7.	Perindustrian			
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	<	1. Krisis energi listrik yang menghambat produksi industri rumah tangga 2. Bahan baku masih diimpor dari luar	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dibidang energi listrik
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	<		
7.3.	Pertumbuhan Industri.	<		